



Xanana Gusmão, Presiden CNRT/CN

Kami masyarakat Timor Lorosa'e, telah membebaskan tanah air kita. Sekarang, kemerdekaan untuk Timor Lorosa'e berarti bahwa kita harus menanyakan pembangunan. Kita sedang membangun negara dan masa depan kita. Kita harus mengambil keputusan yang bijaksana demi generasi masa depan.

Saya sangat senang bahwa Konferensi Pembangunan Berkelanjutan dilaksanakan di Timor Lorosa'e.

Membangun masa depan kita membutuhkan wawasan dan perencanaan- berdasarkan pada pengertian kita mengenai keadaan sekarang, dan harapan-harapan untuk pembangunan. Konferensi ini memberikan kesempatan berharga dalam mengkonsultasi ahli-ahli, dan membicarakan dan mengembangkan strategi-strategi yang menangani pembangunan berkelanjutan di Timor Lorosa'e.

Penyajian-Penyajian yang diberikan oleh ahli-ahli Timor Lorosa'e dan Internasional di konferensi ini memberi informasi yang diperlukan untuk proses perencanaan kita. Dasar partisipatif yang luas dan pelaksanaan banyak lokakarya di konferensi ini memberikan kita kesempatan berharga untuk membicarakan banyak isu, termasuk pelestarian lingkungan hidup, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial. Kita perlu mengembangkan strategi-strategi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sambil melestarikan dan memperbaiki lingkungan hidup.

Rakyat kita telah cukup banyak menderita. Kesejahteraan rakyat kita di masa depan sangat memprihatinkan saya. Perencanaan untuk masa depan membutuhkan pertimbangan tentang bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat Timor Lorosa'e. Konferensi mengenai pembangunan berkelanjutan merupakan langkah penting di jalan menuju masa depan yang berkelanjutan di Timor Lorosa'e.

Bpk. Xanana Gusmão
Presiden. CNRT/CN

Sergio Vieira de Mello, Administrator Transisi

Saya mendukung Konferensi Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa'e ini dari awal mulanya, khususnya titik beratnya pada hubungan antara pembangunan ekonomi dan sosial, dan kesejahteraan lingkungan hidup. Saya senang sekali melihat kesuksesan konferensi ini.

Salah satu area utama keprihatinan dunia telah menempatkan manusia sebagai pusat untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan dan bahwa manusia berhak akan kehidupan yang sehat dan produktif. Sebagai bangsa yang baru Timor Lorosa'e mempunyai suatu kesempatan yang jelas dalam menunjukkan kepemimpinan dengan menggunakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Timor Lorosa'e sedang berkembang secara politik dan secara sosio-ekonomi. Titik pangkal untuk Timor Lorosa'e adalah keadilan sosial dan politik. Pembangunan berkelanjutan di Timor Lorosa'e membutuhkan pemberdayaan masyarakat, partisipasi penuh dan pendidikan semua sektor masyarakat, serta perencanaan terpadu dan penilaian dampak lingkungan hidup.

Konferensi ini memberikan kesempatan yang penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup di Timor Lorosa'e. Konferensi ini memberikan kesempatan untuk mulai memikirkan solusi-solusi yang baru untuk Timor Lorosa'e.

Penting sekali bahwa masyarakat dan pemerintahan Timor Lorosa'e di masa depan akan merancang strategi pembangunan berkelanjutan yang efektif untuk memastikan pemakaian sumber daya alam Timor Lorosa'e secara berkelanjutan dan perbaikan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Hasil-Hasil konferensi ini akan membantu memastikan bahwa masalah-masalah lingkungan hidup terintegrasi dalam perencanaan pembangunan di semua sektor.

Saya mendukung sepenuhnya Satuan Tugas Pembangunan Berkelanjutan yang akan didirikan sebagai hasil konferensi ini. Satuan Tugas ini merupakan alat utama untuk perencanaan strategis pembangunan berkelanjutan di Timor Lorosa'e.

Hasil-Hasil konferensi ini merupakan pedoman berharga untuk rencana pembangunan di Timor Lorosa'e, karena hasil-hasil ini akan melakukan tugas kompleks dalam menyeimbangkan obyektif-obyektif konservasi dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat Timor Lorosa'e.

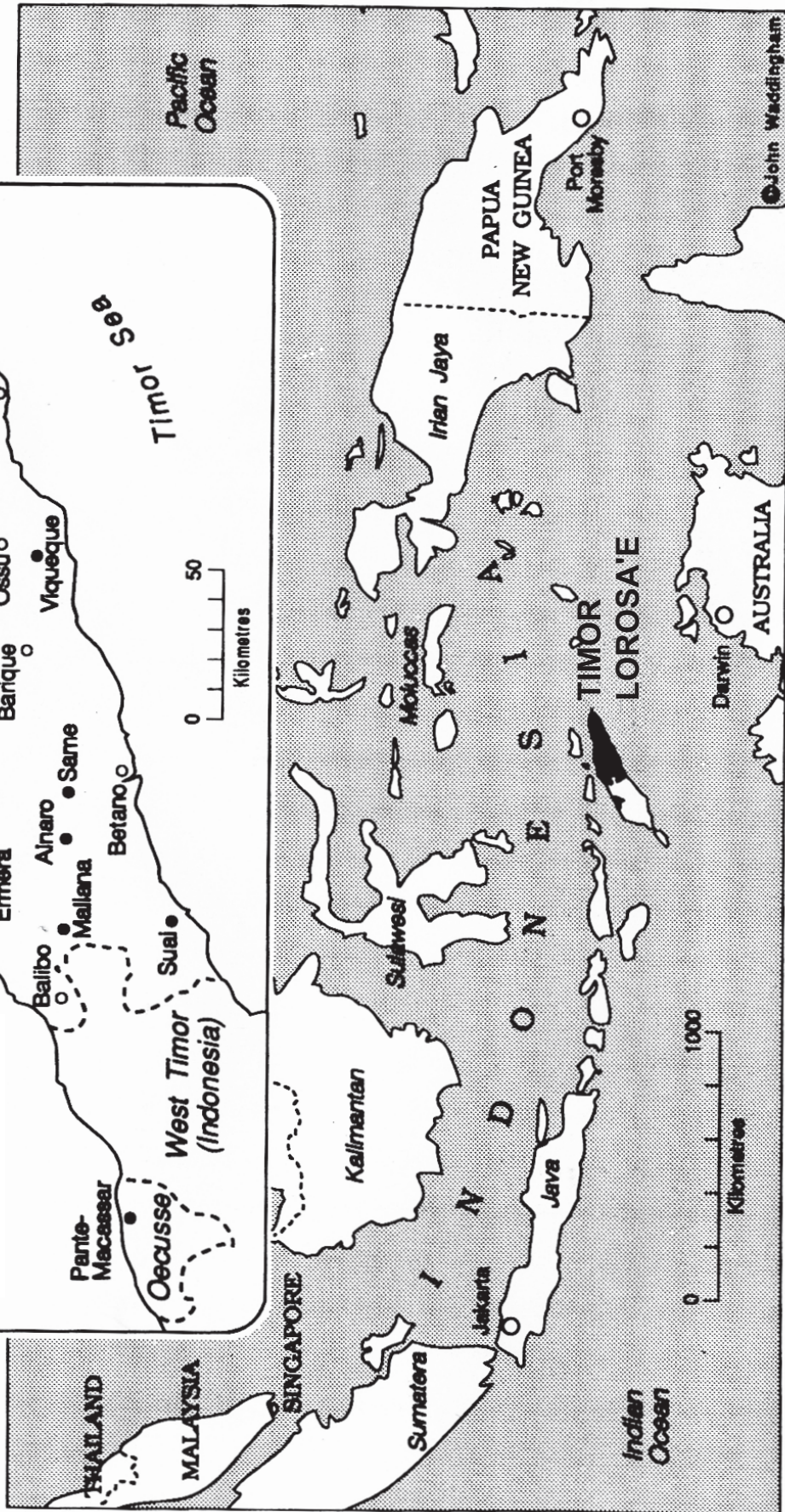
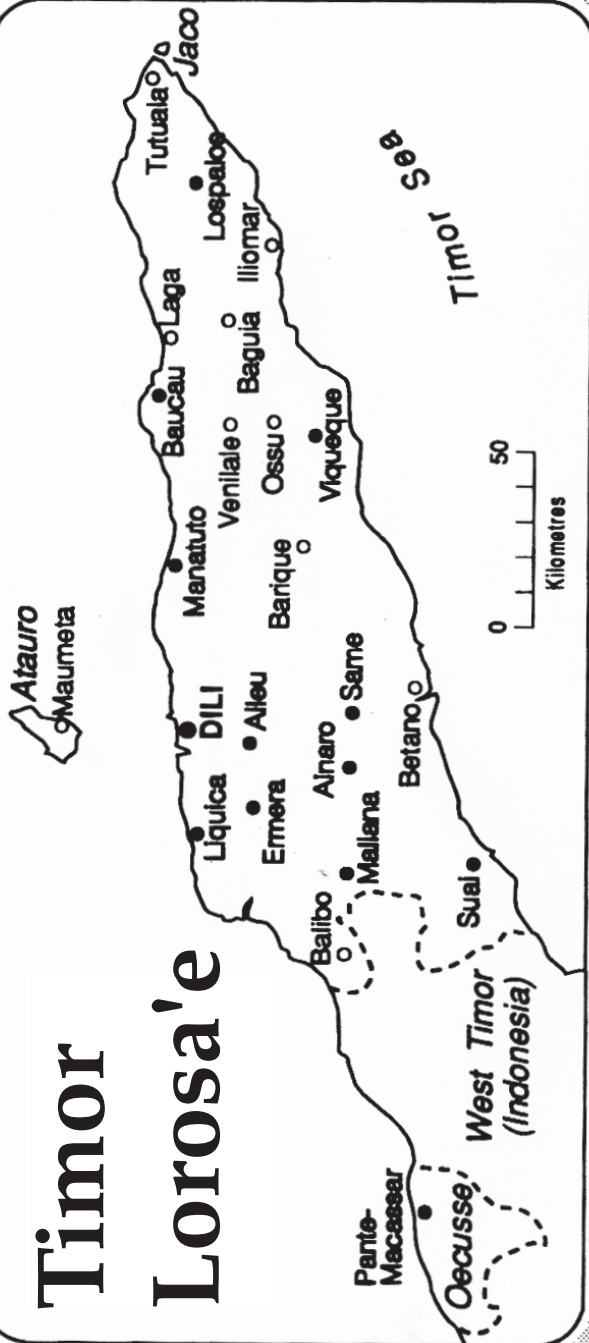
Bpk. Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi
Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal

DAFTAR ISI

1	<u>PRAKATA</u>
3	<u>PETA TIMOR LOROSA'E</u>
4	<u>KATA PENGANTAR</u>
7	<u>UCAPAN TERIMA KASIH</u>
8	<u>HASIL-HASIL DAN REKOMENDASI-REKOMENDASI KONFERENSI</u>
14	<u>BAB 1 PENDAHULUAN</u>
29	<u>BAB 2 SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN ALAM</u> Sumberdaya Alam dan Kekayaan Lingkungan Hidup Timor Lorosa'e • Pelestarian Keanekaragaman Hayati • Kehutanan • Perubahan Cuaca • Sumberdaya Air Tawar • Pengukuran Kebutuhan dan Prioritas Lingkungan Hidup di Timor Lorosa'e <u>45 • LOKAKARYA-LOKAKARYA</u>
47	<u>BAB 3 EKONOMI</u> Memperkenalkan Ekonomi dan Lingkungan Hidup • Industri, Perdagangan dan Globalisasi • Pertanian • Perikanan • Pertambangan, Industri Penarikan Sumberdaya • Pariwisata <u>71 • LOKAKARYA-LOKAKARYA</u>
75	<u>BAB 4 TEKNOLOGI</u> Pendahuluan • Infrastruktur • Pola-Pola yang Berkelanjutan • Energi yang Cocok dan bersifat • Sistem Manajemen Sampah Berkelanjutan <u>85 • LOKAKARYA-LOKAKARYA</u>
87	<u>BAB 5 MASALAH-MASALAH SOSIAL</u> Kesehatan • Gender • Generasi Muda • Pendidikan • Hak Kepemilikan Tanah dan Manajemen Tanah yang bersifat Berkelanjutan <u>104 • LOKAKARYA-LOKAKARYA</u>
108	<u>BAB 6 LEMBAGA-LEMBAGA</u> Pemerintahan • Masyarakat Sipil • Budaya Adat • Hukum Lingkungan Hidup Nasional dan Internasional • Perencanaan dan Manajemen Lingkungan Hidup <u>124 • LOKAKARYA-LOKAKARYA</u>
126	<u>PROGRAM UNTUK DISTRIK-DISTRIK</u>
130	<u>JARINGAN</u> Daftar organisasi-organisasi, strategi-strategi dan pentunjuk-pentunjuk pembangunan berkelanjutan, dengan berbagai situs web dan alamat email.
135	<u>SINGKATAN-SINGKATAN</u>



Timor Lorosa'e





Timor Lorosa'e merupakan negara paling baru di dunia. Timor Lorosa'e dijajah Portugis selama lebih dari 400 tahun, dan dari tahun 1975 sampai 1999, diduduki secara kejam oleh Indonesia. Selama masa pendudukan ini, lingkungan hidup Timor Lorosa'e mengalami kerusakan yang signifikan, karena rakyatnya diperas dan ditindas, dan tidak dapat ikut serta dalam keputusan mengenai masa depannya. Bertahun-tahun, Timor Lorosa'e tertutup dari dunia luar. Karena pendudukan ini, timbullah suatu keinginan bagi masyarakat setempat akan ukun rasik (penentuan nasib sendiri). Karena perlawanannya yang teguh, akhirnya rakyat Tikor Lorosa'e dapat merebut kebebasannya.

Pada tahun 1999, pendudukan Indonesia di Timor Lorosa'e berakhir. Titik akhir pendudukan Indonesia di Timor Lorosa'e ditandai oleh kebijakan "pembumihangusan", yang dilakukan oleh milisi dan didukung oleh Pemerintah Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, sebagai balasan atas akibat referendum pada tanggal 30 Agustus 1999. Selama tiga minggu pada bulan September 1999, lebih dari 75% prasarana di Timor Lorosa'e dibinasakan. Ribuan orang Timor Lorosa'e dibunuh, dan 200,000 orang Timor Lorosa'e terpaksa meninggalkan negaranya. Hampir seluruh penduduk Timor Lorosa'e tersingkir dari kampung halamannya.

Orang-orang yang tersingkir ini sekarang sudah kembali. Sekarang, mereka berusaha membangun negaranya yang baru merdeka ini, yang dalam banyak hal, harus dibangun dari awal. Namun, tugas rekonstruksi juga merupakan kesempatan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh banyak negara lain dalam pembangunannya. Maka, Timor Lorosa'e mempunyai kesempatan untuk mencari solusi yang inovatif terhadap tantangan yang sedang dihadapinya.

Prinsip-Prinsip pembangunan berkelanjutan dapat berguna bagi suatu negara yang baru mulai proses pembangunannya. Prinsip-prinsip tersebut menjamin penggabungan tujuan-tujuan ekonomis, sosial dan lingkungan hidup secara seimbang. Definisi pembangunan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh Komisi Dunia Lingkungan Hidup dan Pembangunan (1987), dan sudah diakui dunia internasional adalah "pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi berikut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya".

Ada berbagai model yang dapat digunakan di Timor Lorosa'e. Semoga buku Hasil Konferensi Pembangunan Berkelanjutan ini - yang dilaksanakan di Dili pada tanggal 25-31 Januari 2001 - dapat berguna sebagai dasar perencanaan strategis untuk pembangunan berkelanjutan di Timor Lorosa'e.

Konferensi Pembangunan Berkelanjutan diilhami oleh kemerdekaan Timor Lorosa'e - suatu saat permulaan yang merupakan kesempatan untuk merintis suatu rencana pembangunan yang berkelanjutan. Walau belum ada suatu model rencana yang teladan, namun, pada

tingkat global, pembangunan berkelanjutan sudah sering dibahas. Umumnya, telah diakui bahwa praktek-praktek pembangunan yang umumnya dilaksanakan sekarang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, suatu pendekatan baru terhadap pembangunan perlu dikembangkan.

Puncak Dunia Rio pada tahun 1992 menghasilkan suatu strategi pembangunan berkelanjutan yang penting - Agenda 21. Dalam tujuannya, Agenda 21 menentukan isu-isu dan topik-topik yang perlu ditangani dalam setiap usaha untuk mencapai kelanjutan. Agenda 21 menganggap kemiskinan, kelaparan, penyakit, kebutuhurufan dan kerusakan lingkungan hidup sebagai masalah yang saling terkait.

Ke-dua puluh tujuh prinsip Agenda 21 mengakui prioritas pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

- Perlindungan lingkungan hidup
- Persekutuan global untuk pelestarian, perlindungan dan pembaharuan keutuhan ekosistem bumi
- Penghapusan pola-pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan
- Akses terhadap informasi
- Perundang-undangan lingkungan hidup yang efektif
- Penggunaan pendekatan pencegahan
- Analisa Dampak Lingkungan Hidup
- Pengakuan bahwa perempuan berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup
- Perangsangan kreativitas, cita-cita dan keberanian kalangan muda, dan
- Kehormatan akan pentingnya pengetahuan dan praktek-praktek masyarakat adat.

Prinsip ke-25 dalam Agenda 21 menyatakan "kedamaian, pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup saling terkait dan tidak dapat dipisahkan", dan mempunyai relevansi khusus bagi Timor Lorosa'e.

Agenda 21 merupakan rencana aksi yang meminta semua negara agar membentuk strategi-strategi pembangunan berkelanjutan nasional. Banyak negara di seluruh dunia sedang bekerja untuk melaksanakan Strategi-Strategi Pembangunan Berkelanjutan Nasional.

Sebagian besar para peserta adalah orang Timor Lorosa'e. Semangat besar peserta-peserta Timor Lorosa'e terhadap konferensi menunjukkan keinginannya yang besar untuk membangun Timor Lorosa'e secara berkelanjutan.

Antara makalah-makalah yang termuat dalam buku ini, ada yang disampaikan oleh para pakar internasional, dan ada juga yang ditulis oleh para ahli asli Timor Lorosa'e. Konferensi mulai dengan pengenalan masalah pembangunan berkelanjutan. Sidang-sidang paripurna dan lokakarya-lokakarya, yang dilaksanakan pada lima hari pertama konferensi, membahas berbagai tema sebagai berikut: sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, ekonomi, teknologi, masalah-masalah sosial, dan lembaga-lembaga. Setiap tema tersebut dimuat sebagai topik dalam buku ini. Sebagian besar penyajian yang diberikan di konferensi termuat dalam buku ini. Banyak makalah yang termuat merupakan ringkasan. Makalah-makalah ini, termasuk beberapa makalah lengkap dan hasil-hasil konferensi, dapat dilihat di situs web konferensi, di homepage Timor



Aid, di <www.timoraid.org>.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Timor Lorosa'e atas sumbangannya pada konferensi dan pada buku ini. Makalah-makalahnya disiapkan dalam waktu yang sangat singkat dan terbatas, di antara berbagai tugas dan tanggung jawab di bidang masing-masing yang sudah sangat berat.

Rekomendasi-rekomendasi dari konferensi, termasuk ke-tujuh rekomendasi utama yang diajukan, termuat dalam buku ini. Ketujuh rekomendasi utama ini semoga disertakan dalam Undang-Undang Timor Lorosa'e, dan digunakan demi pelaksanaan suatu strategi pembangunan berkelanjutan nasional.

Setiap lokakarya membuahakan diskusi mengenai tema yang bersangkutan, dalam kaitannya dengan kenyataan setempat. Atas persetujuan tiap peserta lokakarya masing-masing, diskusi-diskusi tersebut, atau hasil-hasil lokakarya, telah diringkaskan agar termuat dalam buku ini dalam bentuk yang lebih singkat itu.

Semua lokakarya di konferensi menunjukkan pendidikan sebagai kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Timor Lorosa'e. Pentingnya pendidikan telah dititikberatkan oleh Armindo Maia, Rektor Universitas Timor Lorosa'e. Menurut dia, "tidak dapat diabaikan bahwa setiap orang Timor Lorosa'e pasti ingin melakukan sesuatu untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Tidak dapat diabaikan bahwa pendidikan, khususnya pendidikan formal, dianggap sebagai salah satu alat yang utama dan sangat berpengaruh dalam mencapai cita-cita tersebut".

Memang, salah satu peran konferensi yang paling mendasar adalah untuk mendidik dan meningkatkan kesadaran mengenai masalah-masalah lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Konferensi ini juga berperan untuk menjalin hubungan antar kelompok yang erat di dalam Timor Lorosa'e, serta mendirikan kerjasama antara kelompok tersebut dengan organisasi-organisasi internasional yang bergerak di bidang pembangunan berkelanjutan.

Salah satu hasil konferensi yang utama adalah pendirian "Satuan Tugas untuk Pembangunan Berkelanjutan", sebagaimana didukung oleh peserta-peserta konperensi. Atas persetujuan Universitas Nasional Timor Lorosa'e (UNTIL), Satuan Tugas tersebut akan dipusatkan di kampusnya. Lagipula, Satuan Tugas akan didirikan oleh Badan Keberlanjutan, berhubungan dengan Pusat Penelitian di UNTIL dan akan melibatkan pemerintahan, universitas, masyarakat sipil, gereja, dan bisnis. Satuan Tugas tersebut akan melaksanakan strategi dan rekomendasi dari konferensi, dan dapat memberikan kontribusi pada strategi pembangunan berkelanjutan nasional.

Untuk menjamin partisipasi yang maksimal, panitia konperensi berusaha melibatkan wakil-wakil di setiap distrik di Timor Lorosa'e. Sebelum konperensi dimulai, lokakarya-lokakarya diadakan di enam distrik, dan lebih dari 25 wakil pedesaan dari delapan distrik hadir di konferensi. Sebelum penutupan konperensi pada tanggal 31 Januari, seorang wakil daerah menggambarkan masalah lingkungan hidup yang utama yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan. Setelah selesainya konperensi, lokakarya-lokakarya sekali lagi diadakan di daerah untuk membahas hasil konferensi. Lokakarya-lokakarya pasca-konperensi ini juga berfungsi untuk menjalin hubungan antara Satuan Tugas daerah-daerah. Dalam Program

Pedesaan tersebut, beberapa tujuan telah tercapai, sebagaimana tercatat dalam buku ini.

Rekomendasi-rekomendasi, makalah-makalah, dan hasil lokakarya-lokakarya yang termuat dalam buku ini memberi suatu gambaran yang umum mengenai tantangan pembangunan yang sedang dihadapi oleh rakyat Timor Lorosa'e. Dengan rekomendasi-rekomendasi, makalah-makalah, dan hasil lokakarya-lokakarya yang termuat dalam buku ini, kami berusaha memberi gambaran mengenai keadaan pembangunan Timor Lorosa'e sekarang ini. Lebih khusus lagi, kami berharap terbitan ini dapat berfungsi sebagai suatu buku pedoman demi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Timor Lorosa'e. Semoga pembaca bukan hanya menikmati buku ini, tetapi juga menerapkan usulan-usulannya bidang masing-masing.

Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup

Masalah pembangunan berkelanjutan muncul dari pengakuan global mengenai adanya dan sifatnya masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam perencanaannya, panitia konperensi berusaha menitikberatkan pentingnya aspek lingkungan hidup dalam pelaksanaan suatu strategi pembangunan yang berkelanjutan. Kualitas hidup masyarakat Timor Lorosa'e tergantung pada pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dan produktif. Sebagai misal, baik pertanian dan perikanan maupun pariwisata tergantung pada pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat serta industri tergantung pada persediaan air yang bersih.

Walau kerusakan lingkungan hidup diakui sebagai sumber utama pembangunan yang tidak berkelanjutan, namun semenjak referendum dan masa krisis sampai sekarang, masalah lingkungan hidup tidak banyak mendapat perhatian di Timor Lorosa'e. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan suatu program pembangunan yang terpadu, masalah lingkungan hidup sangat menekan dan tak dapat diabaikan lagi.

Di konferensi kami ini, Mario Nunes, Manajer Badan Kehutanan Pemerintahan Transisi Timor Lorosa'e (ETTA), memberi suatu gambaran yang umum mengenai lingkungan hidup di Timor Lorosa'e. Pada sesi introduksi, Dionisio Babo Soares juga membahas hubungan antara budaya tradisional dan lingkungan hidup dalam pandangan orang Timor Lorosa'e. Disimpulkannya, "budaya, menurut orang-orang Timor Lorosa'e, merupakan cara melestarikan 'lingkungan hidup' dan lingkungan hidup tidak akan ada apabila budaya tidak dihormati. Keduanya saling terkait dan merupakan sumber kelangsungan hidup manusia". Dalam makalahnya yang dimuat dalam buku ini, Soares juga membahas mengenai keadaan lingkungan hidup baik sebelum maupun selama masa penjajahan Portugis, serta selama Indonesia.

Pada masa penjajahan Portugis, lingkungan hidup Timor Lorosa'e dirusak sedikit demi sedikit. Pendudukan Indonesia, yang berlangsung selama 24 tahun, berdampak berat pada sumber daya alam yang masih tersisa di Timor Lorosa'e, dan mengakibatkan berbagai masalah ekologis yang rumit.

Kayu cendana adalah lambang kebanggaan rakyat



Timor Lorosa'e. Dulu, dia mempunyai daya tarik khusus bagi pedagang-pedagang Portugis. Tentu, pada masa Portugis, ekonomi penjajahan tergantung pada perdagangan sumber daya alam, antaranya kayu cendana. Kayu cendana adalah jenis kayu yang bersifat parasit dan bertumbuh dengan lambat. Eksploitasi kayu cendana menyebabkan kayu cendana menjadi nyaris punah pada masa Portugis. Karena tetap dieksploitasi selama pendudukan Indonesia, sekarang ini pengadaan kayu cendananya di Timor Lorosa'e semakin menurun.

Selama pendudukan Indonesia, orang-orang Timor Lorosa'e dipindahkan secara paksa dari tanah nenek-moyangnya ke tempat-tempat yang lebih mudah diakses dan dikendalikan. Transmigran-transmigran didatangkan dari Indonesia. Praktek-praktek penggunaan tanah tersebut menambah tekanan pada lingkungan hidup.

Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Timor Lorosa'e

Timor Lorosa'e tidak begitu kaya sumber daya alam. Curah hujannya rendah dan tanahnya kurang produktif. Namun, salah satu sumber daya alam yang dapat membawa keuntungan - kalau dieksploitasi demi ekonomi Timor Lorosa'e - adalah sumber-sumber gas dan minyak bumi yang terdapat di Celah Timor. Kekayaan sumber-sumber minyak dan gas di Celah Timor dinilai setara dengan sumber-sumber yang paling produktif di dunia. Jika diekspor, produk-produk yang mempunyai nilai berkelanjutan, seperti kopi organik, juga dapat menghasilkan devisa. Ekoturisme juga merupakan salah satu industri yang dapat memainkan peran yang kunci pada pembangunan ekonomi Timor Lorosa'e.

Timor Lorosa'e terdapat dibagian timur pulau Timor, yang topografinya dramatis, dan didominasi oleh pegunungan Ramelau. Berbeda dari pulau-pulau tetangganya, di pulau Timor tidak ada gunung api. Pulau Timor merupakan bagian benua yang terputus. Tanahnya berasal dari batu kapur dan tanah liat kelautan yang telah bermetamorfosa, dan yang tidak subur tanah yang berasal dari batu vulkanis. Tentu, ketidaksuburan merupakan masalah yang inheren pada tanah-tanah tropis, karena pembusukan bahan-bahan organik terjadi dengan relatif mudah dan cepat. Lagipula, areal tanah Timor Lorosa'e yang berlereng gunung curam sangat luas, dan tanahnya juga cenderung dangkal. Oleh karena itu, sangat mudah terjadi erosi. Masalah erosi ini dipersulit oleh penggundulan hutan dan penggembalaan. Pada musim hujan, ketika curah hujannya pas tinggi, banyak tanah atas yang hilang. Erosi secara terus-menerus menyebabkan sedimentasi sungai dan waduk.

Karena terletak di bayangan hujan, Timor Lorosa'e sangat kering. Daerah aliran sungai di Timor Lorosa'e dibelah oleh daerah pegunungan di tengah Timor Lorosa'e. Oleh karena sempitnya pulau Timor, masa mengalirnya sungai sangat pendek, dan hanya beberapa sungai yang mengalir sepanjang tahun. Bagian utara sangat kering, dan bercirikan padang rumput savana yang setiap tahun dibakar.

Menurut perkiraan yang berlaku, dulu Timor Lorosa'e ditutupi oleh hutan, yang lantas hilang akibat berkembangnya peradaban manusia, dan kegiatannya yang termasuk pembakaran hutan dan penebangan hutan untuk penanaman, pemburuan dan penggembalaan. menyebabkan hilangnya sebagian besar hutan asli. Sekarang, hutan sangat tipis di Timor Lorosa'e, dan

vegetasinya terdiri dari hutan yang ditanam kembali, savana dan padang rumput. Berbagai aspek pada ekologi flora dan fauna Timor Lorosa'e masih perlu diteliti lebih lanjut.

Fauna Timor Lorosa'e mempunyai tingkat endemisme yang paling tinggi di kawasan Nusa Tenggara. Walau demikian, banyak jenis binatang di Timor Lorosa'e diancam punah, khususnya jenis-jenis binatang yang mengandalkan hutan yang semakin menipis akibat penebangan. Berbagai jenis binatang laut juga terancam punah.

Sebagian besar daerah pesisir Timor Lorosa'e dinilai masih asli. Ekosistem bakau masih dalam keadaan baik, dan banyak pantai dikelilingi oleh batu karang. Batu karang tersebut mempunyai fungsi ekologis yang penting. Batu karang juga merupakan sumber industri perikanan di daerah pesisir, dan sebagai obyek wisata yang potensial, mempunyai peran yang kunci pada pengembangan industri ekoturisme.

Pada saat ini di Timor Lorosa'e tidak mempunyai sistem pengelolaan limbah. Hal inilah yang merupakan masalah lingkungan hidup yang utama di daerah perkotaan. Misalnya, kota Dili tidak mempunyai baik sistem pengelolaan air kotor, maupun sistem untuk pengumpulan dan pembuangan kotoran di Dili. Pembuangan kotoran secara tidak sah di Dili dan sekitarnya menyebabkan penumpukkan sampah di beberapa tempat tertentu. Oleh karena tidak adanya sistem pengelolaan limbah, air di bawah tanah- sumber air minum penduduk kota Dili - menjadi tercemar.

Pembangunan tidak dapat dianggap berkelanjutan apabila dampak-dampak perubahan iklim tak terhitung. Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan bumi telah menyebabkan banyak bencana yang mempengaruhi kesehatan dan keadaan hidup banyak orang di seluruh dunia.

Masa depan yang berkelanjutan di Timor Lorosa'e

Pembangunan berkelanjutan di Timor Lorosa'e tergantung pada kebijakan-kebijakan sosial-ekonomis yang baik, serta perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif. Perlu diingat bahwa manusia menempati posisi utama dalam pembangunan, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah inti dari pembangunan yang berkelanjutan. Struktur pemerintahan yang transparan, bertanggungjawab dan partisipatif diperlukan di Timor Lorosa'e agar menjamin bahwa masyarakat biasa dan masyarakat madani dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.

Konferensi Pembangunan Berkelanjutan telah meningkatkan profil lingkungan hidup di Timor Lorosa'e, dan menitikberatkan perlunya pendekatan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk penurunan terjadinya kemiskinan, dan dapat menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat Timor Lorosa'e serta masyarakat Timor Lorosa'e di masa depan.

Seperti dinyatakan Mariano Sabino, yang membicarakan pembangunan berkelanjutan dari perspektif kalangan muda, "Semoga Timor Lorosa'e kembali menjadi negeri yang hijau dan makmur seperti harapan setiap anak bangsa Timor Lorosa'e".





Banyak orang memberi dukungan dan sumbangan yang sangat berharga pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan. Konferensi ini diprakarsai oleh peraih Hadiah Perdamaian Nobel, Yang Terhormat Dr. Jose Ramos Horta dan Timor Aid. Pada permulaan rekonstruksi Timor Lorosa'e, yang mana sumber-sumber daya masih terbatas, Timor Aid sempat membangun struktur organisasi yang fungsional. Kemampuan ini turut membantu perkembangan konferensi ini dan memberi sumber-sumber daya dan dukungan logistik. Proses keikutsertaan dalam mengadakan konferensi ini selalu didukung oleh CEO Timor Aid, Juan Federer, dan Presiden Timor Aid, Ceu Federer. Di mana dengan usaha Timor Aid dapat melaksanakan konferensi ini menjadi kenyataan.

Pelaksanaan konferensi dan buku hasil-hasil konferensi ini mendapat realisasi karena adanya dukungan dari para pemberi donor: USAID, HIVOS (Belanda), Catholic Fund for Overseas Development (CAFOD), Trocaire (Irlandia), Embassy of Finland (Kedutaan Finlandia), Canada Fund, UNICEF, UNDP, NZODA, dan AusAID.

Dukungan lebih lanjut diberikan oleh: Protimos Foundation, Ecological Architects Association (Australia), Regional Community Forestry Training Centre (RECOFTC – Thailand), Environment Australia, IUCN, Icelandic International Development Agency, Northern Territory University, Australian Volunteers International, BP Solar, Australian Computer Society, Natural Resources and Environment -Victoria, RMIT Department of Geospatial Science.

Konferensi ini diadakan secara partisipatif, dengan konsultasi luas dan keikutsertaan orang-orang Timor Lorosa'e. Terciptanya proses yang demokratik untuk pelaksanaan konferensi ini makan waktu beberapa bulan. Anggota dari berbagai kelompok Timor Lorosa'e berperan sebagai penasehat, dan sebagai anggota panitia konferensi ini.

Penasehat konferensi ini adalah: Mario Nunes - East Timor Forestry Group (ETFOG), Joaquim Fonseca - Yayasan HAK, Aderito de Jesus - SAHE, Demetrio Amaral - Haburas, Angus Mackay dan George Bouma - Environment Protection Unit, ETTA, Carlos Alberto Baros Forindo - Ema maTA Dalam ba Progresso (ETADEP).

Panitia konferensi ini terdiri dari Maria Isabel Da Silva, Americo Da Silva, Ajerino Vieira, Annalisa Koeman (Wakil Koordinator), Carolyn (Carrie) Deutsch (Wakil Koordinator), Russell Anderson (Koordinator Konferensi).

Orang lain yang bekerja di konferensi ini termasuk Marc Beuniche, Susie Russell, Sue Lennox, Alfredo Isaac, Filomena da Silva Soares, Steve Malloch, Bret Eartheart, dan Christian Ranheim.

Ucapan terima kasih banyak kepada banyak penerjemah, khususnya kepada Xylia Ingham, Kylie Tallo, Jeremy Stringer, James O'Brien, Richard Curtis, Fung Rodgers, Oliver Green, Catharina Gunawan dan Emma Baulch. Terimah kasih juga kepada Pusat Bahasa dan Pelatihan UNTAET

Terima kasih kepada semua pihak yang menyisihkan waktu untuk membantu dalam pelaksanaan konferensi ini.

Terima kasih juga kepada penengah-penengah dan fasilitator-fasilitator lokakarya-lokakarya. Khususnya terima kasih kepada Aurelio Guterres, Dionisio Babo Soares, dan Helder Da Costa atas semangatnya, dukungan dan tanggung jawabnya terhadap pembangunan berkelanjutan di Timor Lorosa'e.

Terima kasih istimewa kepada Keluarga Pinto, khususnya Nona, Celestina, dan Abeto, dan juga kepada Alex dan Ajax.

Orang-orang yang sangat membantu dengan mengarahkan dan mendukung konferensi ini termasuk Jeremy Carew-Reid (International Centre for Environment Management) dan Jenny Bryant (UNDP Sustainable Development Officer for the Pacific). Pengalaman, nasehat dan dukungannya sangat berharga. Arthur Hanson (International Institute for Sustainable Development) memberi sumbangan besar terhadap keberhasilan konferensi ini. Keahliannya dan dukungannya memberi daya dorongan pada hasil-hasil konferensi ini.

Buku ini dirancang, diperiksa dan diperbaiki oleh Russell Anderson dan Carolyn Deutsch. Terima kasih banyak kepada penerjemah-penerjemah dan pembaca-pembaca pruf, khususnya kepada Xylia Ingham, penerjemah utama buku ini.



HASIL-HASIL DAN REKOMENDASI-REKOMENDASI KONFERENSI

Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa'e

Konferensi ini mengangkat definisi yang sudah diakui dunia internasional terhadap pembangunan berkelanjutan digunakan di Timor Lorosa'e, yaitu: "pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka". Pembangunan berkelanjutan menjawab keterkaitan antara lingkungan hidup, ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Timor Lorosa'e adalah suatu negeri yang memakai pendekatan hak dalam mengatur negerinya. Ini mempunyai implikasi yang unik karena hak-hak asasi manusia adalah dasar dari pembangunan politik dan sosial yang berkelanjutan, serta keadilan lingkungan hidup. Masa-masa penjajahan menyebabkan kerusakan besar, yang menimbulkan kebutuhan besar akan sarana prasarana dan perbaikan lingkungan hidup. Akan tetapi, untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, membutuhkan jauh lebih banyak daripada hanya perbaikan kerusakan-kerusakan dari masa lalu. Kehidupan, usaha-usaha dan masyarakat yang berkelanjutan merupakan pernyataan yang lebih cocok untuk pemerataan dan keadilan bagi rakyat Timor Lorosa'e.

Pembangunan berkelanjutan tidak sepenuhnya dimasukkan di dalam perencanaan transisi. Strategi-Strategi pembangunan berkelanjutan haruslah sudah diciptakan pada saat kemerdekaan. Strategi-Strategi tersebut harusnya mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil. Ini merupakan tantangan besar yang berkaitan dengan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan bahkan kebijakan dalam dan luar negeri. Strategi-Strategi pembangunan berkelanjutan akan memberikan keuntungan seketika dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat dilaksanakan baik di daerah maupun di tingkat

nasional. Misalnya, penghijauan kembali daerah tangkapan air yang kering. Kesehatan masyarakat membaik dengan perbaikan sanitasi dan penyediaan air bersih. Pendapatan dapat ditingkatkan dari ekspor komoditi yang diproduksi secara berkelanjutan (dan disertifikasi), misalnya kopi yang ditumbuhkan secara organik.

Semua ini dan akibat-akibat lain dari pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui beberapa persyaratan. Konferensi mengakui bahwa pembangunan berkelanjutan tergantung pada:

- Komitmen pemimpin, baik tokoh masyarakat di daerah maupun kepemimpinan nasional;
- Memasukkan perencanaan terpadu dan analisis dampak lingkungan hidup;
- Penggunaan budaya sebagai dasar pembangunan berkelanjutan;
- Pengentasan kemiskinan dan pembukaan peluang ekonomi secara berkelanjutan;
- Keamanan lingkungan dan kebebasan dari intervensi militer yang lebih lanjut;
- Partisipasi penuh dari dunia usaha, masyarakat sipil, dan pemerintah;
- Keikutsertaan kaum wanita dalam proses pengambilan keputusan;
- Perangsang ekonomi untuk perbaikan lingkungan hidup;
- Inovasi teknologi, institusi dan proses pengambilan keputusan;
- Harapan-Harapan dan jadwal yang realistis.

Kemajuan hanya dapat dicapai apabila ada keberanian untuk mengambil tindakan. Tindakan-Tindakan menerapkan pembangunan berkelanjutan sebaiknya dimulai hari ini, dan sebaiknya tidak ditunda-tunda untuk dilakukan sewaktu-waktu di masa depan.

Rekomendasi-Rekomendasi

Di samping usulan-usulan spesifik yang muncul dalam makalah-makalah konferensi dan lokakarya-lokakarya, ada tujuh rekomendasi umum yang disepakati. Rekomendasi-Rekomendasi ini merupakan titik awal yang penting untuk memulai perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan di Timor Lorosa'e.

- 1. Memasukkan pembangunan berkelanjutan ke dalam rencana usul konstitusi Timor Lorosa'e**
- 2. Memasukkan prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman pembangunan berkelanjutan dalam meninjau kebijakan-kebijakan, program-program dan proyek-proyek di Timor Lorosa'e.**
Termasuk:
 - Prinsip keadilan sosial, efisiensi ekonomis dan keutuhan ekologi
 - Prinsip pencegahan terlebih dahulu
 - Prinsip pemakai membayar
 - Proses pengambilan keputusan yang partisipatif
- 3. Pendekatan pembangunan nasional melalui pembuatan rencana usul strategi pembangunan berkelanjutan bagi Timor Lorosa'e**
- 4. Selesaikan masalah-masalah yang menyangkut ketidakberlanjutan sesegera mungkin.**
Misalnya:
 - Deboisasi/Penebangan hutan di daerah aliran sungai
 - Masalah lingkungan hidup di perkotaan dan pedesaan, difokuskan pada air, sanitasi, perumahan, dan undang-undang mengenai tanah di perkotaan.
 - Hak Kepemilikan Tanah dan hak atas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
 - Penangkapan ikan yang tidak terkendali di pantai selatan Laut Timor Lorosa'e
 - Mengakui dan melindungi pemakaian tanaman-tanaman sesuai dengan adat
 - Kemajuan yang terbatas dalam mencapai kehidupan yang berkelanjutan bagi kalangan muda baik di kota maupun desa
- 5. Memperdayakan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan organisasi masyarakat melalui pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan selama dan sesudah masa transisi.**
- 6. Keikutsertaan Timor Lorosa'e dalam perjanjian-perjanjian global dan regional mengenai lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, namun dengan secara hati-hati memilih hanya yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan dan kemampuan Timor Lorosa'e.**
 - Prioritas utama adalah untuk menentukan batas-batas kelautan Timor Lorosa'e
- 7. Mendanai program pembangunan berkelanjutan, termasuk penghasilan yang didapat dari Celah Timor. Prioritas-prioritas investasi termasuk:**
 - Reboisasi/Penghijauan kembali
 - Pertanian yang berkelanjutan dan pelestarian keanekaragaman hayati
 - Penelitian dan pendidikan tentang pembangunan berkelanjutan
 - Pengelolaan aliran air, sanitasi dan limbah
 - Infrastruktur untuk energi yang berkelanjutan
 - Pemeriksaan kembali pembangunan, dengan memakai analisa dampak lingkungan (ADL)

Usulun Satuan Tugas Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan

Menbentuk Satuan Tugas Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri dari semua sektor pembangunan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk strategi nasional pembangunan berkelanjutan.

Maksud

- Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran untuk perencanaan strategis dan pengembangan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
- Menjamin bahwa prinsip-prinsip dan pengalaman-pengalaman pembangunan berkelanjutan dapat dimasukkan dalam perencanaan nasional dan di semua sektor pembangunan.
- Mengembangkan dasar pengetahuan pembangunan berkelanjutan melalui penelitian, pengembangan kemampuan dan program-program pendidikan.

Peran

Satu tim yang terdiri dari semua sektor pembangunan untuk membantu perencanaan strategis pembangunan berkelanjutan dan mengawasi perkembangan pelaksanaan program-program pembangunan berkelanjutan.

Sekretariat/ Koordinasi

Universitas

Keanggotaan

Perwakilan dari semua kelompok yang berkepentingan
8-16 orang (idealnya 10)
Sebagian besar anggota Timor Lorosa'e

Perwakilan orang-orang Timor Lorosa'e;

Pemerintah, Perguruan Tinggi, LSM-LSM, Masyarakat Madani, gereja, sektor swasta dan masyarakat.

Perwakilan Internasional;

Ahli-Ahli pembangunan berkelanjutan dan lembaga-lembaga pembangunan internasional

Anggaran

Perlu mencari anggaran (jelaskan biaya dan sumber-sumbernya)

Jangka waktu

1 s/d 2 tahun

Hasil-Hasil Lokakarya

22 lokakarya tentang pembangunan berkelanjutan menentukan 4 isu pokok dan kemudian menentukan beberapa strategi untuk menangani masalah-masalah tersebut. Semua hasil-hasil lokakarya-lokakarya, termasuk semua isu-isu, prioritas-prioritas dan strategi-strategi terdapat dalam bab yang bersangkutan dalam buku ini.

Dokumen berikut merupakan ringkasan strategi-strategi lokakarya-lokakarya, dan disetujui pada hari terakhir konferensi.

Pembangunan Ekonomi secara Berkelanjutan

Di semua tingkat masyarakat terdapat hubungan antara ekonomi, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Kehidupan rakyat Timor Lorosa'e tergantung pada lingkungan hidup yang sehat, utuh, dan produktif. Selama lebih dari 400 tahun penjajahan Portugal, dan 24 tahun penjajahan Indonesia menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan kemiskinan yang tersebar. Pembangunan berkelanjutan adalah dasar pokok tujuan mengurangi kemiskinan di Timor Lorosa'e.

Teknologi yang tepat, penghasilan pendapatan alternatif, akses terhadap mikro-kredit, pariwisata ekologis, penambahan nilai (value-adding), dan sertifikasi kopi merupakan kesempatan untuk membangun ekonomi secara berkelanjutan. Keikutsertaan perempuan dalam semua tingkat pengambilan keputusan, dan jaminan bahwa perempuan mendapat akses ke pendidikan dan kesempatan, juga penting sekali untuk mencapai pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

Melalui kebijakan pembelian, pemerintah dapat menyokong perusahaan-perusahaan lokal yang berpraktek secara berkelanjutan, seperti industri daur ulang. Persediaan air dan sarana prasarana dapat dicapai melalui kerjasama di antara perusahaan dan pemerintah. Tindakan-Tindakan tersebut bisa membantu merangsang pasar-pasar untuk membuat produk-produk dan jasa-jasa domestik. Pajak-pajak, subsidi-subsidi, penetapan harga energi dan biaya untuk pemakaian listrik, seharusnya dirancang agar dapat bekerja untuk dan bukan melawan pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan-perencanaan keuangan untuk investasi, mata uang, pinjaman dari negara lain dan anggaran-anggaran memerlukan analisis pembangunan berkelanjutan yang tepat. Perlu adanya transparansi dalam keputusan pada tingkat nasional mengenai pembangunan berkelanjutan.

Pendidikan - pada semua tingkat masyarakat

Di konferensi, pendidikan ditentukan sebagai strategi utama untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat yang berpendidikan merupakan aset nasional, dan program-program penelitian yang berkaitan seharusnya menjadi prioritas tinggi untuk pemerintah dan sumber-sumber LSM.

Program-Program dan bahan-bahan pendidikan harus dirancang sesuai dengan isu-isu prioritas yang telah dibahas dalam lokakarya-lokakarya konferensi dan yang terdaftar di bawah ini. Kurikulum mengenai pembangunan yang berkelanjutan dan lingkungan hidup perlu ditulis dan

diajarkan di sekolah-sekolah. Masih diperlukan guru-guru dan semua guru membutuhkan pelatihan khusus mengenai isu-isu pembangunan berkelanjutan dan bagaimana mereka dapat melibatkannya kedalam kurikulum umum. Program-Program semacam ini perlu dibuat secara bervariasi untuk memenuhi keperluan dan tingkat pendidikan yang beragam di Timor Lorosa'e.

Keperluan-Keperluan program pendidikan pembangunan berkelanjutan yang ditentukan dalam lokakarya-lokakarya meliputi: perguruan tinggi, sekolah, masyarakat desa, perempuan, nelayan dan petani, seminar untuk tukang bangunan dan perusahaan bangunan asing, perusahaan pariwisata, pelatihan di bidang bahasa, pendidikan hukum adat dan budaya, pelatihan di bidang internet, ketrampilan kerja, kesehatan, kesehatan gizi, kesehatan ibu hamil, pendidikan mengenai kesehatan pribadi, pendidikan mengenai proyek-proyek besar seperti tambang-tambang dan dampaknya terhadap masyarakat, pendidikan tentang politik dan fungsi masyarakat sipil, ketrampilan pemasaran, pendidikan teknik, perlindungan daerah penampungan air, reboisasi, kesehatan lingkungan hidup dan pendidikan pimpinan masyarakat.

Program pendidikan harus diadakan secara formal dan non-formal dengan menggunakan contoh-contoh praktis bilamana perlu seperti memperagakan teknik pertanian yang berbeda; cara-cara pembangunan, seperti membangun WC dengan cara yang baik, pemeliharaan dan perbaikan teknologi yang tepat, energi yang alternatif dan pilihan terhadap daur ulang, pengurangan sampah dan pembuangannya dan penampungan air hujan. Bantuan dengan mikro-kredit akan sangat diperlukan bila petani, nelayan dll. diharapkan membeli peralatan.

Pendidikan umum mengenai isu-isu pembangunan yang berkelanjutan harus dilakukan dengan bantuan media seperti penggunaan poster, radio dan televisi. Pers yang bebas dan mandiri juga ditentukan sebagai hal yang sangat penting untuk dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Bahan-bahan pendidikan pembangunan berkelanjutan juga harus disediakan di perpustakaan.

Pemberdayaan Kemampuan - pada semua tingkat masyarakat

Setelah lebih dari 400 tahun penjajahan dari Portuguese, ditambah dengan 24 tahun lebih dijajah Indonesia, rakyat Timor Lorosa'e menginginkan agar diikutsertakan secara aktif dan dididik dalam proses pembangunan berkelanjutan. Inilah tema kuat yang muncul dari lokakarya-lokakarya. Saat ini ada keperluan yang mendesak untuk memperdayakan masyarakat pada tingkat lokal melalui struktur tradisional dan organisasi seperti golongan-golongan perempuan, golongan-golongan pemuda dan LSM-LSM agar mereka dapat mengambil peran dalam pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah yang ditentukan selama konferensi pembangunan berkelanjutan ini.

Perlu juga dipercepatkan proses "Timorasasi", dimana orang Timor Lorosa'e diberikan posisi yang bertanggung jawab dalam pemerintahan, sedangkan UNTAET diharapkan di masa depan hanya akan berperan sebagai pendamping untuk memberikan pengarahan.

Pemuda, khususnya para pelajar dan mantan pegawai pemerintah (Portugis maupun Indonesia) perlu dipanggil untuk berpartisipasi dalam program-program pelatihan yang membahas masalah-masalah spesifik mengenai pembangunan yang berkelanjutan seperti tercantum dalam lembaran pendidikan hasil lokakarya konferensi ini. Petugas lapangan harus ditempatkan diseluruh daerah di Timor Lorosae, dan harus dipertimbangkan juga keadilan untuk daerah pedesaan, supaya mereka juga menerima porsi materi dan pelatihan yang sama. Sebenarnya, banyak masalah yang harusnya diselesaikan di tingkat pedesaan (mis. kesehatan pribadi dan pembuangan sampah), dan oleh karena itu masyarakat lokal harus diberikan pengetahuan yang cukup supaya bisa mengambil keputusan sendiri.

Proses Perencanaan yang Terpadu dan Transparan

Pembangunan berkelanjutan memerlukan transparansi dalam manajemen keuangan, perencanaan lintas-sektor yang bersifat holistik (menyeluruh), yang menghubungkan masalah lingkungan hidup dengan sektor-sektor lain. Misalnya, masalah-masalah kesehatan disebabkan oleh lingkungan, seperti penyebaran penyakit melalui kualitas air yang rendah atau pembuangan sampah yang tidak teratur, serta air kotor yang dibuang.

Perencanaan harus didasarkan pada pengetahuan masyarakat lokal. Perlu adanya pendekatan yang terpadu dan transparan, yang diatur oleh, dan termasuk di dalamnya, analisa dampak lingkungan (ADL).

Perencanaan infrastruktur harus bersifat lintas-sektoral (mis, pembuangan sampah harus dikoordinasikan dengan bidang transportasi, dan kapasitas aliran air harus ditinjau kembali jika perencanaan keparawistaan dimulai). Kerjasama antar departemen-departemen diperlukan sebab akan menghasilkan hasil yang lebih baik untuk masyarakat. Dibutuhkan rencana supaya keperluan-keperluan energi dipenuhi. Grup "Penghasilan Energi Secara Berkelanjutan di Masa Depan" mungkin bisa didirikan untuk membantu dengan pembuatan kebijakan dalam bidang penghasilan energi.

Perencanaan harus didukung oleh data yang baik. Di banyak daerah datanya sangat kurang dan kadang tidak ada sedangkan daerah-daerah yang merupakan prioritas harus ditentukan agar dapat dikumpulkan datanya. Data-data dan informasi yang merupakan dasar dari semua keputusan perencanaan harus disediakan kepada masyarakat lokal. Keputusan mengenai pembagian wilayah, sumber-sumber daya dan manajemen harus transparan dan bertanggungjawab. Sistem informasi geografik (GIC) dapat digunakan disini.

Perencanaan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dan dilakukan melalui dua pendekatan sekaligus: Dari bawah ke atas (bottom-up) dan dari atas ke bawah (top-down), antara Knua <> Aldeia <> Suco <> Conshello <> Distrik <> Negara, yang memungkinkan dua aliran pendapat sekaligus.

Pengembangan Kebijakan dengan Melibatkan Masyarakat

Beberapa lokakarya telah menentukan perlu adanya kebijakan pemerintah yang jelas untuk mengarahkan pembangunan Timor Lorosa'e pada masa depan. Kebijakan-Kebijakan dan pembuatan kebijakan pembangunan seharusnya menunjukkan pemerataan dalam akses terhadap

sumber daya dan pelayanan.

Di konferensi, besar dukungannya supaya kebijakan-kebijakan tersebut dikembangkan dengan konsultasi masyarakat supaya mereka sendiri memiliki ide-ide dari kebijakan itu. Kebijakan tersebut harusnya juga mencerminkan keperluan untuk menemukan solusi-solusi yang praktis dan keperluan-keperluan tersebut dirinci secara tertulis oleh sekelompok orang yang terdiri dari berbagai bidang keahlian. Kebijakan terakhir harusnya termasuk pendapat dan keperluan masyarakat lokal. (contohnya, seharusnya kebijakan pertanian mencerminkan keperluan petani-petani).

Perlu adanya komunikasi dan konsultasi secara terus menerus dengan LSM yang bekerja dengan masyarakat setempat.

Bidang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan yang diajukan dalam lokakarya-lokakarya termasuk antara lain Pemakaian Tanah dan Pembagian Wilayah, Perikanan, Pengelolaan Penampungan Air, Kehutanan, Tambangan, Impor/Ekspor, Investasi, Pertanian khususnya Pertanian tambang-bakar, Impor makanan yang direkayasa secara genetis, Kepariwisata, Tenaga (Energi) dan Pengelolaan Limbah.

Sistem Peraturan, Penegakan dan Hukuman yang Transparan

Peraturan dalam sejumlah bidang merupakan keperluan yang mendesak, khususnya kepemilikan tanah dan kepemilikan oleh orang asing.

Seharusnya peraturan ditulis dengan konsultasi dengan tokoh-tokoh adat supaya mengakui tanah adat, tanah individu, dan cara penentuan pembagian tanah yang berbeda-beda seperti tanah kehutanan, pertanian, industri dan kepariwisataan. Diperlukan juga peraturan kewarganegaraan, hak penggunaan investor asing, mekanisme untuk pemecahan pertengkaran kepemilikan tanah, impor/ekspor, penilaian pengaruh terhadap sosial dan lingkungan hidup dari tambangan dan proyek-proyek besar, pertanggungjawaban dari perusahaan, pencegahan polusi dan pembuangan sampah. Peraturan pembangunan juga diperlukan.

Peraturan diperlukan untuk menjaga hak asasi manusia, hak sipil, lingkungan hidup dan hak para buruh.

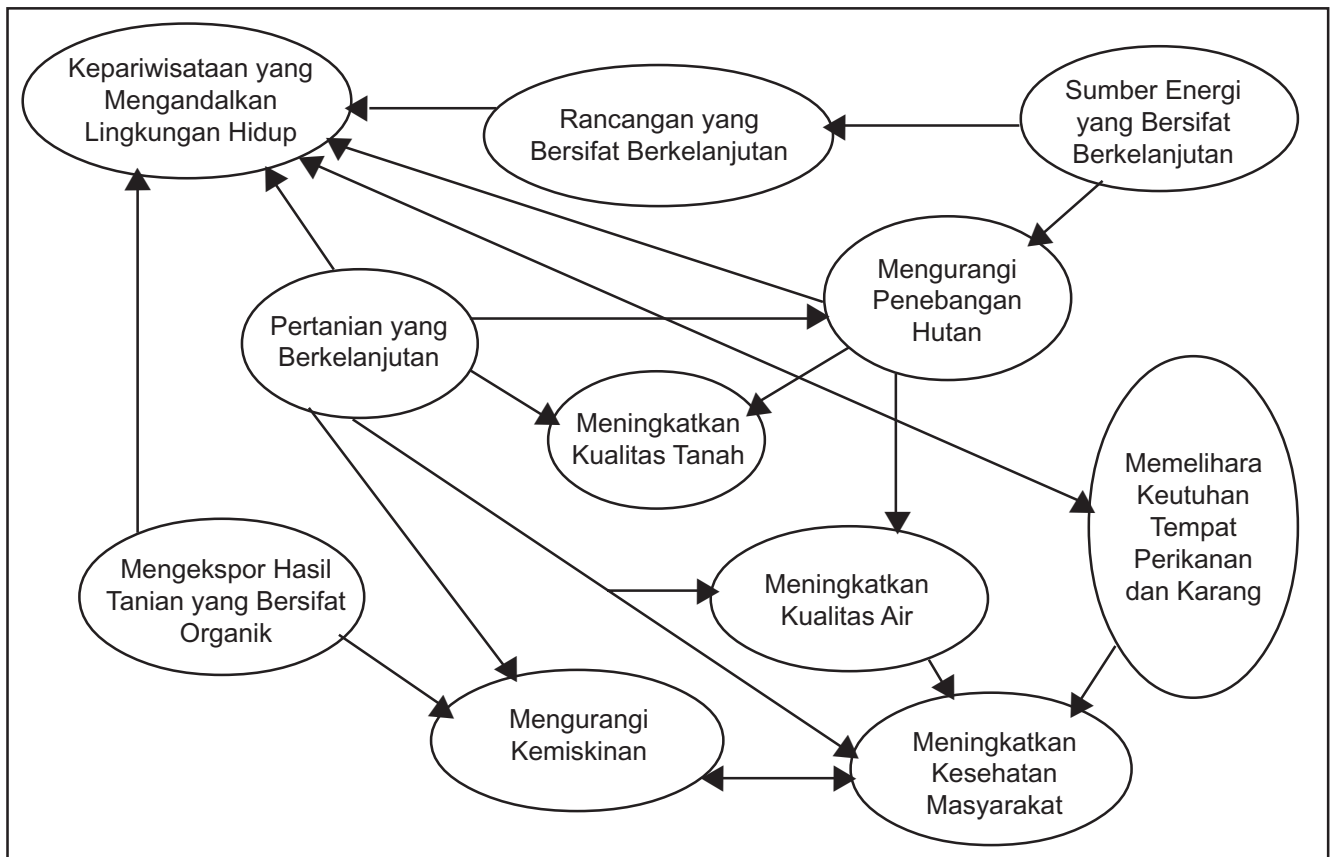
Seharusnya peraturan mempunyai mekanisme penegakkan, serta sumber daya manusia dan materi yang didedikasi terhadap penegakannya, bersama dengan sebuah sistem hukuman yang mencerminkan beratnya pelanggaran.

Pengakuan Struktur Masyarakat dan Pengetahuan Tradisional

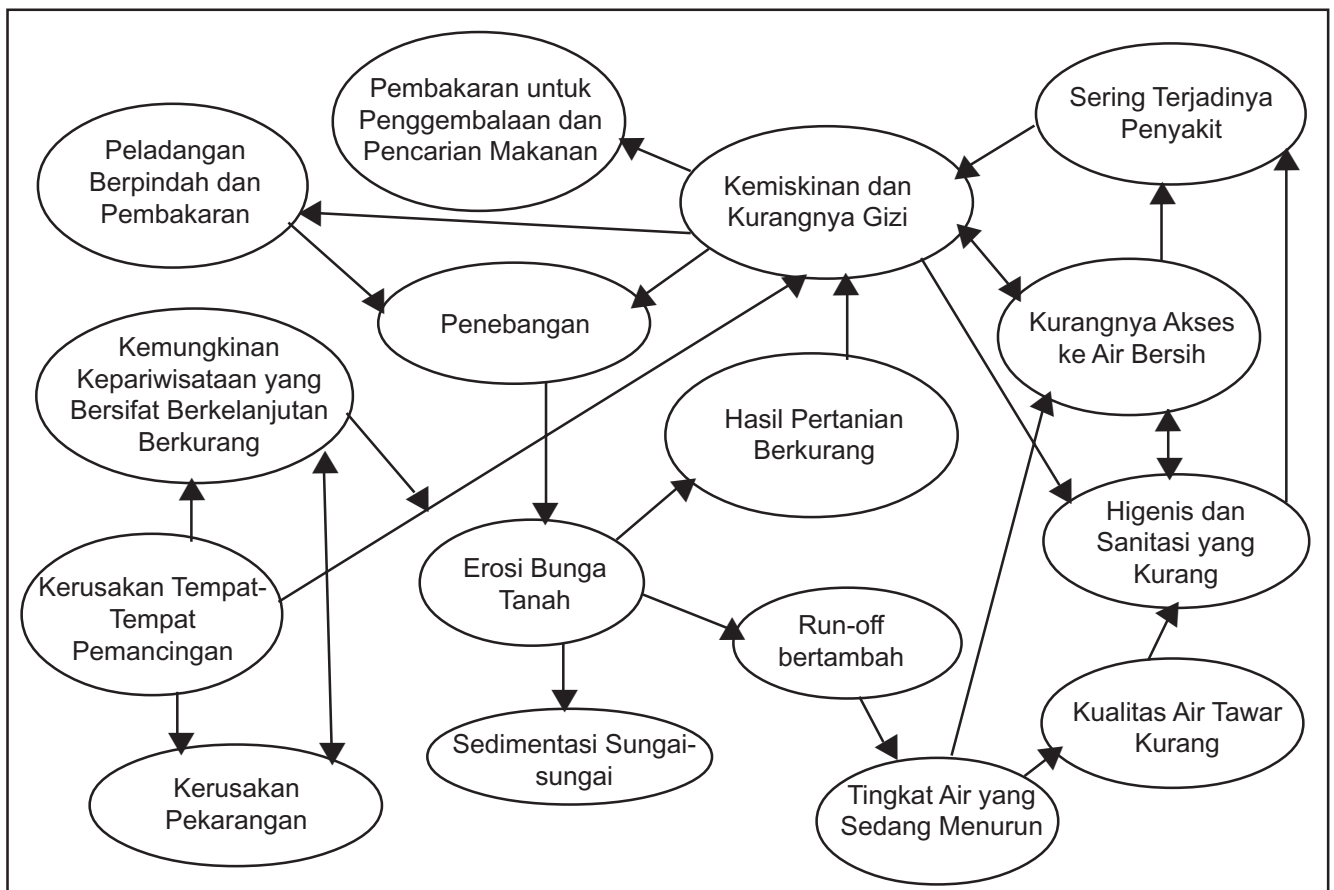
Hak-hak orang pribumi dan hukum adat harus diakui. Menghormati budaya tradisional dan menghargai produk-produk setempat juga penting. Bahan-Bahan tradisional memiliki banyak keuntungan jika dibandingkan dengan bahan-bahan impor, dan teknologi moderen dapat digunakan untuk menambah baiknya pola-pola tradisional. Pengakuan hukum adat dapat membantu mencegah masalah seperti penebangan hutan dan pencemaran. Pengetahuan dan pengalaman orang-orang tradisional sangat berharga karena kuatnya dekatnya dengan tanah, udara, dan air. Penemuan kembali pengetahuan tradisional dan hukum adat harus diutamakan.



Keterkaitannya Masalah-Masalah Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa'e



Ketidakberkelanjutan: Masalah-Masalah Pembangunan di Timor Lorosa'e





Introdusaun

Jose Lobato, Timor Aid

Inan-aman, Maun alin sira,
Molok ita atu hahú ita nia konférensia ne'e hau atu hato'o obrigado barak ba ita nia presencian iha seremonia loke ne'e. Hanesan ita hotu hatene ita nia konfrénsia hahú loron ne'e 25 Janeiro to'o 31 Janeiro 2001.

Definisaun kona ba desenvolvimento sustentavel dehak, desenvolvimento ida ne'ebele bele sustenta nesidade ohin loron nian maibe la halo compremisu ka halo la susar ba jersaun aban bain rua. Ha'u hanoin fali ba espresaun ida iha Bapa nia tempo ne'ebele dehan "dunia ini bukan milik kita tapi pinjaman anak cucu kita", "mundo ne'e laos ita nian maibe buat ida ita impresta husi ita nia be-oan sira". Buat ida ita impresta ita tenke fo fila fali ho kondisaun didiak. Ita nia ai-laran buat ida ne'ebele ita tenke entrega fali ba ita nia be-oan sira. Se ita tesi ai-naa (Rose wood), ai-kameli (sandalwood), ai-teka (teak), hotu fa'an fali, ita bele halo

osan barak. Maibe se ita koa ita nia ai-hotu agora aban bain rua, ita nia be-oan sira la hetan tan ai-laran, hetan deit deserta ida. Ohin loron Timor nia rendementu ka osan ne'ebele ita simu kiik liu ita nia kusta. Iha tinan 2004 ka 2005 bainhira ita hahu atu simu osan husi projetu gas ho mina rai Timor Gap maka ita nia rendementu bele boot liu ita nia kusta. Maibe ita la bele depende deit ho mina rai. Tamba loron ida mina rai sei hotu. Ita tenke buka dalan atu hetan osan husi kafe, ikan pesca, turismo, agricultura, ho husi foresta, no tan buat selu-seluk.

Ho konferensia ne'e ita haklibur ema matenek nain sira husi liur ho husi Timor Lorosae nia laran atu halo dialogu, atu hare problema desenvolvimento Timor Lorosa'e ho atu hetan solusaun ba problema ne'e tuir principiu desenvolvimento sustentavel nian. Resultadu ne'ebele ita hetan iha konferensia ne'e, UNTAET, governo tranzitoriu, ho governo aban loron bele uza iha ba plano dezenvolvimento aban bain rua.

Pidato pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan

Mario Carrascalao

Wakil Presiden, CNRTICN, atas nama Presiden CNRTICN Xanana Gusmao

Atas nama CNRT dan rakyat Timor Lorosa'e, saya mengucapkan selamat datang ke negara kami. Terima kasih karena anda telah menyediakan waktu dan keahlian, kemampuan, dan pengetahuan anda. Saya percaya bahwa pembahasan di sini dalam beberapa hari mendatang akan memberikan kepada kami pengetahuan yang berharga tentang bagaimana kami sebagai negara baru yang sudah hancur bisa maju ke arah masa depan yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep baru untuk kita di Timor Lorosa'e. Konsep tersebut bisa dikatakan konsep baru karena pembangunan berkelanjutan sudah belum dipraktekkan selama beberapa ratus tahun di Timor Lorosa'e.

Kita tidak mengerti akan konsep pembangunan berkelanjutan karena selama berabad-abad dalam penjajahan, Timor Lorosa'e mengalami eksploitasi yang tidak bersifat berkelanjutan terhadap sumber daya alamnya. Misalnya, kayu cendana di Timor Lorosa'e pertama dieksploitasi oleh orang-orang Cina, kemudian penjajah Portugese, sampai pada tahun 1948, kayu cendana di Timor Lorosa'e hampir tidak ada. Kemudian, selama 25 tahun terakhir ini, Indonesia mengambil apa saja yang mereka inginkan dari lingkungan hidup kita. Namun, tidak hanya orang lain saja yang merusak lingkungan hidup kita di Timor Lorosa'e: orang Timor Lorosa'e sendiri ikut mempraktekkan cara pertanian tambang bakar di lingkungan hidup kita yang sudah rusak ini. Salah satu sumber daya alam kita yang masih belum disentuh oleh para penjajah adalah sumber

tambang, dan ini harus kita pertimbangkan secara hati-hati.

Dengan mulainya konferensi tentang pembangunan berkelanjutan ini, kita harus mengamati situasi pada masa sekarang ini. Negara kita sudah hancur. Sumber daya alam yang masih ada, kualitasnya sangat rendah. Dengan kata lain, kita punya sedikit saja sumber-sumber untuk menunjang hidup kita.

Ada banyak tantangan yang harus dihadapi dan ditanggulangi sebelum kita bisa mulai melaksanakan pembangunan berkelanjutan secara sungguh-sungguh di Timor Lorosa'e.

Kita percaya pada konferensi ini untuk membuat beberapa ide solusi untuk memperbaiki sistem ekologi kita, dan memulihkan sumber daya alam kita. Kita juga ingin mendengar bagaimana masyarakat Timor Lorosa'e bisa ikut serta dalam proses pemulihan sumber-sumber alam tersebut.

Kami, para pemimpin, percaya bahwa penting sekali untuk melestarikan apa yang kita sudah punya. Kalianlah para ahlinya-tolong tunjukkan bagaimana caranya melestarikan hutan-hutan dan tanah kami. Tunjukkanlah bagaimana cara melestarikan sistem ekologi kita, sambil memberikan kehidupan berkelanjutan kepada mereka yang diminta menjaga dan melestarikan sumber daya alam tersebut.

Bagaimana memulihkan karang-karang kita, yang sudah rusak karena pemboman ikan dll? Bagaimana caranya supaya orang-orang yang tinggal di daerah pantai diikutsertakan dalam proses pemulihan sumber



daya alam tersebut?

Bicarakan juga tentang bagaimana kita mendasarkan pembangunan di Timor Lorosa'e pada penghasilan energi yang berkelanjutan-salah satu faktor yang paling penting untuk pembangunan berkelanjutan.

Yang penting pula, tunjukkanlah bagaimana kita bisa mendapat dukungan finansial yang sangat dibutuhkan karena jelas tidak akan ada program pembangunan berkelanjutan di Timor Lorosa'e tanpa keuangan dan pendanaan yang berkelanjutan untuk program-program semacam itu.

Saya menantang anda sekalian untuk mencari dan menemukan cara supaya budaya kita sendiri dapat menemukan solusi untuk membuat pembangunan berkelanjutan yang lebih berhasil.

Semua pembicaraan di Timor Lorosa'e juga harus termasuk pembicaraan tentang warisan penjajahan kita, yang terus mempengaruhi kita dan mengambil hak-hak asasi kita sebagai manusia. Warisan penjajahan tersebut melukai, mencederai, dan membunuh, seperti halnya perang. Sementara berjuta-juta dolar digunakan untuk memperbaiki kerusakan fisik dari perang tersebut-masyarakat sendiri terus menderita karena perusakan psikis yang disebabkan penjajahan, menderita karena perpecahan yang ditinggalkan dalam masyarakat kita.

Apakah pembangunan yang berkelanjutan dapat memasukkan suatu upaya agar masyarakat Timor Lorosa'e juga bisa menanggulangi penderitaan psikisnya yang disebabkan oleh warisan penjajahan? Bagaimana cara untuk mendamaikan warga masyarakat masing-masing, sebagaimana kita mendamaikan masyarakat dengan Ibu Pertiwi?

Masyarakat Timor Lorosa'e tidak bisa hanya membicarakan untung dan ruginya pembangunan berkelanjutan- mereka sudah cukup kesulitan cari makanan untuk keluarganya setiap hari. Seperti salah satu orang dari Kepulauan Pasifik berkomentar kepada seorang ahli ilmu pengetahuan yang datang, "Keanekaragaman hayati seseorang, adalah makan siang bagi orang lain".

Kita tidak bisa terlalu mengandalkan solusi dari luar. Karena semua yang sudah terjadi di sini, Timor Lorosa'e adalah negara yang unik dan keperluan-keperluannya luar biasa. Keperluan kita sudah harus segera ditangani karena apabila program-program untuk pembangunan berkelanjutan di masa depan tidak dilaksanakan sekarang, sisa sumber-sumber alam kita akan cepat hilang.

Kita berpikir bahwa situasi kita mirip dengan negara-negara dari Kepulauan Pasifik. Mereka juga sudah pernah mengalami penjajahan, tetapi tetap bisa mengembangkan sumber daya alamnya, dan menciptakan sistem demokrasi yang berjalan dengan baik.

Saya berharap konferensi ini akan menunjukkan bagaimana kita bisa belajar dari pengalaman negara-negara Kepulauan Pasifik, dan minta bantuan dan dukungannya terhadap usaha kita dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Kalian dari Asia Tenggara juga bisa membagi pengalaman anda di bidang pembangunan berkelanjutan. Negara-negara dari kawasan Asia

Tenggara sudah bersikap sangat baik terhadap Negara Timor Lorosa'e, dan kita berharap anda sekalian akan mencari jalan supaya sikap positif dari kawasan kita berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di sini.

Memang, kita akan dituntun oleh "Program Aksi" yang disetujui Konferensi Sedunia PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan di Negara-negara Kepulauan Kecil yang Sedang Berkembang, di Barbados, pada tahun 1994. Program tersebut disetujui oleh lebih dari 160 negara, dan memasukkan beberapa hal utama untuk kerja sama internasional.

Mungkin rekan kerja kita dari PBB yang ada di sini bisa menasehati kita tentang bagaimana menggunakan rencana yang disetujui di Barbados sebagai dasar hubungan kerja kita di masa depan.

Kita memberi tantangan kepada konferensi ini untuk mengakui hal-hal tersebut, dan melaksanakan Rancangan Pembangunan Berkelanjutan untuk anak dan cucu kita. Seperti kita sudah tahu, "Kita tidak mewarisi bumi ini dari orang tua kita- tetapi kita meminjamnya dari anak-anak kita".

Kita juga perlu mencari jalan untuk menggerakkan kalangan muda di Timor Lorosa'e supaya mereka sadar akan hak yang dimilikinya sejak lahir, dan supaya mereka membantu melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Mari kita bicarakan pelatihan macam apa yang diperlukan bagi kalangan muda Timor Lorosa'e.

Konferensi ini juga harus meneliti bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi apa yang sudah terbukti berjalan dengan baik. Kita tidak ingin menjadi laboratorium uji-coba- kita perlu memakai teknologi yang terbukti keberhasilannya. Kita akan mencari solusi yang cocok untuk budaya kita, serta yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita.

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang memungkinkan pelaksanaan konferensi ini dengan memberikan dukungan finansial, utamanya USAID, HIVOS, CAFOD, UNDP, TROCAIRE, Kedutaan Finlandia, Timor Aid, UNICEF, NZAid, AUSAid, dan Canada Fund. UNDP bersama Pemerintah Norwegia, juga mengirim tiga orang konsultan, dan tiga orang lokal untuk mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan lingkungan hidup di Timor Lorosa'e. Kita berharap bahwa UNDP, dan semua pemberi donor yang terdaftar di atas, akan terus bekerja sama dengan pemerintah dan LSM-LSM di bidang pembangunan berkelanjutan di Timor Lorosa'e.

Saya juga ingin berterima kasih kepada anda semua yang datang ke Timor Lorosa'e dari jauh supaya bisa membantu kami mencari jalan untuk membangun negara kami secara berkelanjutan.

Saya berharap bahwa hasil-hasil dari konferensi ini akan berarti bahwa masyarakat Timor Lorosa'e juga akan ikut berterima kasih kepada anda, karena anda sempat bekerja sama dengan kami untuk mencari masa depan yang penuh dengan harapan- dibangun atas dasar pemulihan ekologi dan pembangunan masyarakat dan sumber-sumber kita secara berkelanjutan dan manusiawi.

Semoga sukses dalam konferensi yang penting ini.



Pernyataan Pembukaan

Akira Takahashi

Penasehat Khusus untuk Pembangunan kepada Perwakilan Khusus Sekretaris-Jenderal, atas nama Sergio Vieira de Mello, Perwakilan Khusus Sekretaris-Jenderal

Saya berterima kasih atas undangan untuk ikut serta dalam pembukaan Konferensi Pembangunan Berkelanjutan. Saya senang sekali dapat hadir di sini, bicara atas nama Bapak Sergio Vieira de Mello, perwakilan khusus Sekretaris-Jenderal.

Bapak Vieira de Mello telah dipanggil ke New York bersama Bapak Jose Ramos Horta, untuk memberi penerangan kepada Dewan Keamanan tentang pembaharuan-pembaharuan dalam pelaksanaan transisi menuju kemerdekaan di Timor Lorosa'e. Beliau mohon maaf atas ketidakhadirannya di sini pada hari ini, tetapi beliau minta kepada saya untuk bicara atas nama beliau, dan atas nama Administrasi Transisi Timor Lorosa'e.

Komentar-komentar saya menghubungkan pentingnya meningkatkan profil pembangunan berkelanjutan di Timor Lorosa'e dengan menyalurkan masalah-masalah utama, yaitu pendidikan dan lingkungan hidup. Supaya pembangunan berkelanjutan menjadi kenyataan di Timor Lorosa'e, pembangunan berkelanjutan harus dipentingkan dalam masyarakat, supaya menjadi isu yang didukung oleh masyarakat. Pemikiran tentang pembangunan seharusnya tidak hanya merupakan bidang akademis, ahli-ahli teknis, dan pembuat kebijakan saja. Pemikiran demikian harus menjadi bahan pemikiran yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Masyarakat di perkotaan dan pedesaan di Timor Lorosa'e harus menjadi pendorong pembangunan berkelanjutan.

Belum cukup, dan tidak pantas, untuk membuat kebijakan-kebijakan dan program-program tanpa keterlibatan masyarakat Timor Lorosa'e. Seberapa pun kerja keras yang dilakukan di belakang pintu tertutup atau dalam konferensi tidak akan dapat menggantikan pengembangan dan dorongan dukungan dan tanggung jawab dari masyarakat Timor Lorosa'e. Konferensi seperti ini berguna karena jangkauannya luas, dan hasil-hasilnya dapat disebarkan ke masyarakat luas.

Kita dapat menyokong proses keterlibatan masyarakat dengan mencari cara yang cocok untuk menyampaikan informasi tentang pembangunan berkelanjutan kepada rakyat, dan dengan memberikan kepada masyarakat pengetahuan dan kesempatan

supaya pendapatnya didengarkan oleh para pembuat kebijakan dan program. Dari cara pandang Administrasi Transisi, ini berarti bahwa kita perlu berkonsentrasi pada usaha-usaha meningkatkan kesadaran akan pembangunan berkelanjutan dengan menyebarkan informasi dan pendidikan umum.

Kita ingin melihat informasi tentang pembangunan berkelanjutan disebarkan melalui dua alat jalur. Pertama, melalui media massa, dan kedua melalui sistem pendidikan. Bapak Vieira de Mello sudah bicara dengan Bapak Filomeno Jacob, Anggota Kabinet untuk Masalah-masalah Sosial, tentang menemukan cara supaya masalah-masalah lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di Timor Lorosa'e. Pada saat yang sama, kita bisa menggunakan media seperti Radio UNTAET, untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan di Timor Lorosa'e.

Dengan menyebarkan informasi secara luas ke masyarakat Timor Lorosa'e, dan dengan mendidik anak-anak, kita akan dapat membangun dasar yang kuat dan berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan di Timor Lorosa'e. Penting sekali bahwa hasil-hasil dari konferensi ini menerima perlakuan yang sama, dan disebarkan seluas mungkin. Pesan paling penting yang saya diminta untuk menyampaikan pada hari ini, adalah bahwa pemikiran tentang pembangunan berkelanjutan harus disebarkan dari tingkat pembicaraan di kalangan ahli ke tingkat penerimaan masyarakat umum.

Ini adalah tantangan utama untuk kita semua, dan selama permusyawaratan sekalian pada hari-hari yang akan datang ini, saya minta kepada anda semua untuk mengingat pentingnya menerjemahkan pembicaraan-pembicaraan anda menjadi pesan-pesan umum yang dapat disebarkan di Timor Lorosa'e.

Atas nama perwakilan khusus Sekretaris-Jenderal, saya ingin mengucapkan selamat. Kami di Administrasi Transisi menunggu untuk mendengar rekomendasi-rekomendasi final dan hasil-hasil dari konferensi. Kami menganggap konferensi ini sebagai pelengkap untuk pembuatan kebijakan di Administrasi Transisi, dan sebagai peristiwa penting untuk meningkatkan profil pembangunan berkelanjutan di Timor Lorosa'e.

Acara Pembukaan Konferensi

Aderito de Jesus
Institut Sahe

**Selamat datang Bapak-bapak dan Ibu-ibu
Saya ingin memperkenalkan Konferensi
Pembangunan Berkelanjutan.**

Partisipasi

Pertama kali saya tahu tentang Konferensi ini kira-kira satu tahun yang lalu, dan sejak itu saya membantu dengan pelaksanaannya. Selama tahun tersebut terjadi banyak pertemuan dan banyak pembicaraan. Pihak-pihak lain terlibat secara lebih langsung dengan panitia pelaksanaan konferensi termasuk wakil-wakil dari Yayasan Hak, Kelompok Kehutanan Timor Lorosa'e (ETFOG), Talitakum, ETADEP, Timor Aid, dan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (EPU). Konferensi ini diadakan melalui proses kerja sama tersebut.

Proses partisipatif ini membantu mengembangkan cara-cara supaya konferensi ini bisa berkelanjutan-bagaimana mendapat hasil yang paling berguna untuk jangka panjang.

Terima kasih kepada semua orang yang sudah memberikan ide-ide mereka. Sudah terlaksana pertemuan terbuka di Forum LSM Timor Lorosa'e (FONGTIL), pertemuan dengan dosen-dosen, dan khususnya menjelang konferensi ada beberapa pertemuan dengan peserta-peserta konferensi.

Saya juga ingin berterima kasih kepada semua peserta internasional yang datang dari berbagai pelosok dunia dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Timor Lorosa'e. Puluhan orang lainnya berkeinginan untuk hadir di konferensi ini, tetapi tidak dapat hadir karena berbagai alasan. Mereka datang dari berbagai organisasi seperti Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP), Badan Pelestarian Lingkungan Hidup Australia (ACF), Dewan Internasional untuk Inisiatif Lingkungan Hidup di Tingkat Lokal, wakil UNDP dari Kawasan Pasifik, serta Serikat Internasional untuk Pelestarian Alam di Kawasan Asia.

Hasil-Hasil Konferensi

Diusulkan bahwa suatu Satuan Tugas untuk Pembangunan Berkelanjutan didirikan untuk meneruskan ide-ide yang dihasilkan dari konferensi ini dan untuk terus menggunakan jaringan kerja penting yang sudah dibentuk dengan peserta-peserta internasional.

Oleh karena itu pelaksanaan konferensi ini berakar pada masyarakat LSM- dalam masyarakat madani- maka usulan untuk sebuah Pusat Sumber Lingkungan Hidup merupakan satu kemungkinan lain lagi.

Hasil-hasil yang diharapkan dari konferensi ini termasuk kerangka untuk program pertukaran pelajar dan penentuan proyek uji coba untuk lingkungan hidup.

Terhadap pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup ada beberapa jaringan pendidikan dengan universitas-universitas.

Universitas-universitas yang terwakili dalam konferensi ini termasuk Universitas Pasifik Selatan, Universitas Northern Territory di Australia, Universitas Nasional Australia (ANU), Universitas Queensland, dan Universitas Murdoch.

Hasil-hasil konferensi yang wajar akan didapat dari pembahasan beberapa hari yang akan datang ini. Dari pembahasan tersebut, akan dihasilkan beberapa rekomendasi, dan rekomendasi-rekomendasi tersebut akan tercetak sebagai buku hasil konferensi. Kami berharap bahwa hasil dari pembahasan di sini dapat digunakan untuk penentuan proyek-proyek uji coba lingkungan hidup, dan membantu dalam pengembangan kebijakan.

Supaya harapan-harapan tersebut menjadi kenyataan, kami telah merancang beberapa lokakarya terstruktur pada setiap sore.

Pada pagi hari akan dilaksanakan sidang paripurna. Saya menanti-nantikan berbagai presentasi yang akan diajukan oleh berbagai ahli lingkungan hidup internasional dan asli Timor Lorosa'e. Pentingnya keikutsertaan, diperkuat oleh berbagai lokakarya yang bersifat sangat komprehensif. Kami berharap anda akan menerima banyak masukan dari konferensi ini.

Kami ingin mengajak semua peserta untuk menghadiri hari terakhir konferensi ini. Pada hari terakhir, akan diadakan penyimpulan dan pengesahan hasil-hasil konferensi, dan rekomendasi-rekomendasi akan dibuat. Pada sore hari terakhir konferensi, akan diadakan pembahasan tentang pendirian Satuan Tugas untuk Pembangunan Berkelanjutan. Pertanyaan-pertanyaan akan diajukan tentang pendirian Satuan Tugas, tentang bagaimana fungsinya, dan bagaimana hubungan Satuan Tugas dengan masyarakat madani, LSM-LSM, pemerintahan transisi, dan dengan pemerintahan Timor Lorosa'e di masa depan.

Sangat membesarkan hati melihat jumlah orang yang sudah mendaftar untuk hadir di konferensi ini, yang datang ke upacara pembukaan, dan melihatkan ketertarikan akan konferensi ini. Keikutsertaan tersebut menunjukkan ketertarikan akan masa depan yang berkelanjutan di Timor Lorosa'e. Ketertarikan tersebut datang dari peserta-peserta Timor Lorosa'e sendiri, maupun dari peserta-peserta internasional. Keberlanjutan menekankan strategi-strategi untuk masa depan, dan pelaksanaannya. Kami berharap bahwa peserta-peserta internasional akan terus membantu mengembangkan strategi-strategi untuk masa depan. Kami dapat belajar banyak dari pengalaman dari luar negeri.

Banyak negara sudah mencoba untuk memahami dan melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan. Namun, belum ada satu negara pun yang mencapai suatu sistem yang betul-betul berkelanjutan. Akan tetapi, tidak ada satu negara pun yang dapat membina pembangunan berkelanjutan sendiri. Ada banyak masalah ketidakberkelanjutan yang melewati batasan-

batasan negara. Misalnya, kemiskinan, perubahan cuaca, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia menyebabkan banyak orang pindah dari tempatnya dan cari tempat tinggal yang lain, mungkin saja di negara lain. Isu pembangunan berkelanjutan tidak terbatas secara geografis. Sedikit orang yang mengkonsumsi banyak sama bahayanya dengan banyak orang yang mengkonsumsi sedikit. Dan efek dari konsumsi dapat melewati batasan baik negara yang masih berkembang, maupun yang sudah berkembang.

Kami berharap bahwa Satuan Tugas untuk Pembangunan Berkelanjutan dapat membina kerja sama

yang erat dengan peserta-peserta internasional. Suatu persekutuan yang dapat melewati batasan-batasan negara dan membantu membangun masa depan yang berkelanjutan untuk Timor Lorosa'e.

Pembangunan Berkelanjutan bertujuan membangun kerja sama global, dan tanpanya kita tidak akan bisa mengatasi masalah ketidakseimbangan kemiskinan, perubahan iklim yang terus-menerus, atau membayangkan perdamaian di dunia kita ini.

Saya berharap konferensi ini berhasil membentuk kerja sama global tersebut.

Persepsi Orang Timor Lorosa'e Tentang Kebudayaan dan Lingkungan Hidup

Ringkasan¹

Dionisio Babo Soares

Mahasiswa Ilmu Sosial dan Antropologi, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University, Canberra, Australia.

1. Pengantar

Tulisan ini membahas persepsi orang Timor Lorosa'e tentang arti budaya dan lingkungan hidup.

Pembicaraan mengenai "budaya dan lingkungan hidup" di Timor Lorosa'e diwarnai/dipengaruhi oleh dua jalur pikiran dalam masyarakat Timor Lorosa'e. Pendapat pertama berasal dari mereka yang dianggap berpendidikan atau mempunyai latar belakang pendidikan yang baik. Pendapat kedua adalah pandangan masyarakat yang hidup di pedesaan, orang biasa termasuk para penguasa hukum tradisional (*makaer fukun, lia nain*)². Saya akan mengantisipasi pembahasan ini dengan menyatakan bahwa pendapat kelompok kedua sangat dominan dalam wacana persepsi masyarakat Timor Lorosa'e mengenai budaya dan lingkungan hidup, meskipun pendapat pertama mulai mendapat perhatian serius dalam masyarakat.

Dalam tulisan ini, terlebih dahulu saya ingin membahas secara ringkas mengenai ke dua pendapat yang berbeda diatas. Kemudian saya akan membahas dengan lebih terinci mengenai "persepsi umum" masyarakat terhadap budaya dan lingkungan hidup. Bagian ketiga dari makalah ini menaruh perhatiannya pada tahap-tahap pengembangan lingkungan hidup di Timor Lorosa'e, dan akhirnya, pada persepsi masyarakat Timor Lorosa'e mengenai masalah-masalah lingkungan hidup.

II. Budaya: Persepsi Lokal

Ada dua pendapat yang berbeda mengenai makna budaya di masyarakat Timor Lorosa'e.

Yang pertama berasal dari sekelompok orang yang saya namai kelompok masyarakat Timor Lorosa'e yang berpendidikan. Untuk kelompok ini budaya merupakan proses (Ahmadi 1985; Daryanto, 1972 Geertz, 1973) yang meliputi evolusi, menjalankan fase perubahan dan inovasi sesuai dengan berjalannya waktu, pola pikir

masyarakat, dan pengembangan teknologi.

Pandangan yang kedua mencakup pandangan bahwa budaya merupakan aturan-aturan sosial yang ditentukan oleh nenek moyang; suatu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang sejak dulu. Dari segi ini, budaya tidak dipandang sebagai proses atau sistem yang berubah-ubah. Sebaliknya budaya merupakan aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang menentukan kelakuan sosial. Aturan/kebiasaan ini harus dihormati dan dipegang erat oleh setiap anggota masyarakat. Orang yang menganut pandangan ini, dikenal sebagai 'orang yang bertradisi', percaya bahwa bila tradisi dan budaya tidak dihormati akan mengakibatkan ketidakstabilan dalam kehidupan sosial; Selanjutnya akan mengakibatkan terjadinya bencana alam, kegagalan musim panen, kelaparan, penyebaran penyakit menular dan kematian. Semua ini berakar pada budaya yang merupakan tradisi yang diwarisi dari "sumber", dari "asalnya" dan dari nenek moyang.

Pikiran yang ditata berdasarkan pandangan masyarakat yang berorientasi kepada dominasi hak mutlak 'laki-laki' merupakan cara berpikir utama di masyarakat Timor Lorosa'e pada umumnya. Misalnya, garis keturunan diambil dari garis keturunan laki-laki dan anak laki-laki yang mempunyai akses terhadap warisan keluarga. Laki-laki diberi tugas melindungi perempuan dan lingkungan hidup. Suatu garis keturunan selalu dapat diusut ke atas yaitu pada Aman Boot, Katuas Boot (mambae: tata-mai) atau "Bapak Besar" atau "Nenek Moyang Besar" dari suatu klan, dan umumnya berkelamin "pria". Pandangan demikian dianggap sebagai "berakar" pada "budaya" asli dan dalam kenyataannya diikuti sebagian besar anggota masyarakat.

Saya tidak ingin mengajak anda untuk berdebat secara antropologis mengenai konsep budaya. Namun

¹ Diringkas oleh Panitia Konferensi

² *Makaer Fukun* (kelompok penguasa) dan *lia-nian* (pemegang kata-kata) berkenaan dengan orang yang berkuasa, atau ketua suku.

secara umum kedua pendapat tersebut menunjukkan perbedaan pandangan dari dua kelompok di Timor Lorosa'e.

Pertanyaannya adalah: pandangan yang mana yang dipegang paling banyak orang di masyarakat Timor Lorosa'e?

Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu melakukan penyelidikan antropologi yang lebih mendalam. Tetapi kenyataan bahwa 70% dari penduduk Timor Lorosa'e tinggal di daerah pedesaan dan kebanyakan penduduk kota berasal dari daerah pedesaan, menunjukkan bahwa pendapat tradisional mengenai budaya merupakan pendapat dominan dan banyak diikuti di Timor Lorosa'e saat ini.

III. Lingkungan Hidup: Pandangan Lokal

Sekarang mari kita bicara mengenai lingkungan hidup. Dalam bahasa Tetum (bahasa utama di Timor Lorosa'e) tidak terdapat kata yang bisa diterjemahkan sebagai lingkungan hidup.

1. Untuk masyarakat Timor Lorosa'e yang berpendidikan, lingkungan hidup diterjemahkan sebagai 'ambiente' (bahasa Portu) dan dalam bahasa Indonesia sebagai lingkungan (tempat tinggal, tempat sekeliling), sekeliling atau disamakan artinya dengan 'ekosistem'. Pembicaraan mengenai lingkungan hidup di kelompok ini lebih menekankan pada arti akedemisnya daripada hipotesa kosmoslogisnya.
2. Tetapi, untuk kelompok yang kedua, lingkungan hidup merupakan potret atau cerminan cara mereka melihat dunianya. "Lingkungan hidup" didefinisikan sebagai tempat yang meliputi "kosmos" (lalehan, saun) dan jurisdiksi territorial (rai). Termasuk didalamnya "tempat lahir, tempat asal, tempat tinggal" (moris fatin, hela fatin) yang merupakan tempat asal nenek moyang mereka. Apa pun yang termasuk dalam masalah lingkungan hidup mempunyai tempat khusus atau diatur atau telah digariskan melalui "kata-kata nenek moyang". Pengaturan ini merupakan aturan-aturan dan pedoman yang diwariskan dan yang dipandang oleh kebanyakan masyarakat Timor Lorosa'e sebagai aturan sosial dan mengatur kehidupan sosial.

Bagaimana hubungan pandangan ini dengan pembangunan berkelanjutan dalam konteks sekarang?

IV. Menyamakan Pandangan Budaya dan Lingkungan Hidup

a. Dwi Sifat

Seperti sudah dibahas, pandangan masyarakat Timor Lorosa'e dipengaruhi oleh cara mereka melihat dunia – lingkungan hidup – dimana mereka tinggal.

Kiasan/metafor yang saling berlawanan (contradictive) tetapi sejajar (parallel) merupakan ciri dari pikiran sosial masyarakat Timor Lorosa'e. Gabungan-gabungan seperti "baik/buruk", "kiri/kanan", "pria/wanita", "siang/malam" merupakan cara yang digunakan masyarakat Timor Lorosa'e untuk melihat dunia mereka. Jadi agar ada "baik" harus ada "buruk". Demikian pula, "siang-hari" tidak bisa ada tanpa "malam" dan "pria" tidak akan ada tanpa "wanita" dan sebaliknya budaya tidak mungkin bertahan tanpa menata lingkungan hidup dengan baik. Sehingga lingkungan, menurut pola pikiran orang Timor, mungkin tidak ada

tanpa budaya yang merupakan warisan nenek moyang dan sebaliknya. Semua metafor ini memberikan gambaran akan cara pandang masyarakat tentang lingkungan hidup dan tempat tinggal masyarakat Timor Lorosa'e (lihat Traube, 1977, McWilliam (1989), Therik, 1995).

b. Posisi Lingkungan Hidup: Persepsi Tradisional

"Lingkungan hidup" digambarkan berada di antara kelakuan "baik" dan "buruk". Lingkungan hidup dapat dilindungi dan diperkenankan memelihara kehidupan apabila kekuasaan "niat baik" berdiri teguh dan mampu melawan kelakuan "buruk".

Yang dimaksud dengan "baik" disini meliputi perlindungan terhadap sumber daya, perhatian dan perlindungan tanah dan segala-galanya yang berada di dalamnya. "Baik" dapat juga berarti kekayaan – pertambangan, tanah, tumbuh-tumbuhan, kayu cendana – hasil panen yang baik dan sumber kesejahteraan. "Buruk" terkait dengan kebiasaan penggunaan tanah yang tidak baik, pembuangan sumber daya, erosi tanah dan semuanya yang terkait dengan, atau yang berakibat dari salah menggunakan tanah. Contohnya, hasil panen yang tidak baik, banjir, atau tanah longsor dan penurunan kualitas lingkungan hidup pada umumnya merupakan bagian dari sifat "buruk".

Seperti sudah disinggung, istilah lingkungan alam meliputi tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon dan binatang-binatang yang berada di dalam wilayah sebuah suku. Pada zaman dahulu, orang berkata bahwa "lingkungan hidup saya juga adalah kebun saya dan sekitarnya" (hau nia quintal, hau nia tos) yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai lingkungan. Dalam satu pembicaraan dengan seorang pimpinan adat, seorang "liurai" di desa Matahoi, Watolari, 2000 mengutarakannya sebagai berikut:

Lingkungan hidup saya ada di tempat ini, dan telah ada untuk banyak generasi, sejak zaman nenek moyang. Mereka tinggal di sini; mereka dikubur di sini. Merekalah yang memelihara kebun kita, pohon kita, kembang kita, binatang kita, air kita, dan hidup kita. Saya tidak boleh memberi tanah ini kepada orang lain. Kalau saya memberi tanah ini kepada orang lain, nenek moyang saya akan menghukum saya.

Di dalam setiap suku ada peraturan-peraturan yang sudah ditentukan mengenai bagaimana menggunakan sumber daya alam. Walaupun ada kekurangan seimbangan – yang mungkin disebut beberapa orang sebagai 'diskriminasi' – dalam distribusi kekayaan antara laki dengan wanita, tugas sosial dibagikan berdasarkan pendekatan yang seimbang. Semua orang wajib melindungi 'ekosistem' (sistem lingkungan hidup). Lingkungan hidup itu dipelihara secara kolektif oleh suku sebab kehidupan kelompok sangat tergantung pada kehidupan lingkungan alam. Dampak negatif dari pembakaran dan pertengkaran yang muncul sebab pembakaran di tanah milik satu sama lain merupakan contoh mengapa masyarakat Timor Lorosa'e menganggap kerjasama penting sekali demi menangani masalah seperti yang dimaksud³.

Langkah ini memperkenalkan ketua suku untuk mengelola dan menguasai penggunaan sumber daya, dan dengan demikian melindungi tanah, oleh karena



pembagian tanah yang jelas di bawah system hukum adat telah ada. Bahkan, struktur politik tradisional memberi mekanisme yang memperkenankan perlindungan. Dalam struktur tersebut, sebagai contoh, seorang liurai (traditional king) dibantu oleh beberapa datu. Salah satu datu ini diberi wewenang untuk melindungi lingkungan hidup. Seperti dikatakan seorang Liurai (wawancara, 2000), "Dia yang diberi kekuasaan untuk memelihara tanah, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, mata air, selokan dan pembagian tanah"

c. Pengembangan Masalah-Masalah Lingkungan Hidup

Setiap kelompok etnik yang berbeda mempunyai cara yang berbeda untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. Demikian pula, suku Mambai mempunyai cara yang lain daripada suku Tetum, yang Tetum memakai cara yang lain daripada suku Fataluco dan sebagainya. Ini disebabkan oleh perbedaan dalam hal penggunaan tanah, perbedaan iklim dan tumbuh-tumbuhan yang berbeda dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Tidak adanya metode untuk pembersihan tanah, menanam dan teknik memanen secara moderen merupakan ciri khas dari sistem pertanian subsistensi (penyambung hidup) di Timor Lorosae. Akibat pendekatan tradisional yang kurang baik ini tidak jarang menyebabkan hasil yang kurang baik dalam sistem pertanian dan perusakan tanah dan tumbuh-tumbuhan pada umumnya.

Keadaan ini diperparah lagi oleh pembangunan yang dilaksanakan di zaman penjajahan. Selama 20 tahun terakhir, cara memelihara lingkungan untuk kepentingan subsistensi gagal menanggulangi perusakan lingkungan secara besar. Di satu segi, dampak kimiawi dari bom-bom napalm (yang dilepas pesawat perang militer Indonesia) dan pemindahan penduduk tempat tinggal yang dipaksakan oleh militer Indonesia (Aditjondro a & b 1994) menyebabkan perubahan yang besar dalam lingkungan hidup dan struktur sosial masyarakat dan skalanya begitu besar sehingga tidak dapat ditangani dengan cara tradisional. Di segi lain, praktek pembakaran tanah masih sering terjadi sebagai akibat dari kekurangan tenaga kerja dan keperluan tidak mengeluarkan banyak tenaga dan waktu. Potret kerusakan lingkungan seperti ini telah terjadi sejak lama.

Secara umum, terdapat tiga tahap pembangunan lingkungan hidup di Timor Lorosa'e.

Tahap pertama adalah tahap sebelum penjajahan Eropa. Laporan mengenai pembangunan lingkungan hidup selama periode itu susah dicari, dan hanya sedikit yang dapat diperoleh, namun sebahagian besar hanya bercerita tentang bagusny hutan di Timor Lorosa'e, hijaunya pulau Timor Lorosa'e, banyaknya kayu cendana yang didapatkan dan budaya orang-orangnya yang bermacam-macam. Cerita awal dari orang Cina dan Portugis lebih menyoroti kesan-kesan pertama orang-orang asing ketika baru tiba di pulau ini (lihat Castro 1943). Nyatanya, selama periode itu, setiap suku menguasai lingkungannya sendiri, termasuk yurisdiksi politik, ekonomi dan sosial suku itu secara independen.

Tahap kedua adalah zaman penjajahan Eropa-utamanya penjajahan Portugis. Selama periode itu,

tumbuh-tumbuhan setempat dieksploitasi oleh Portugis untuk tujuan perdagangan. Kepunahan beberapa jenis tanaman dan panen serta diperkenalkannya beberapa tanaman asing seperti kopi dan jagung terjadi pada waktu itu tidak begitu banyak diceritakan dalam sejarah pengelolaan lingkungan. Lagi pula, perusakan dan penghancuran lingkungan hidup adalah akibat dari diperkenalkannya tanaman "pengganti" tersebut dan periode sesudahnya tidak terdokumentasi dengan baik.

Disamping itu, kehilangan jiwa, perusakan tumbuhan dan penderitaan masyarakat Timor Lorosa'e akibat dari pertempuran antara Australia dan Jepang di wilayah ini selama Perang Dunia II belum juga diselidiki untuk mengetahui imbasnya terhadap lingkungan hidup.

Tahap ketiga dari pembangunan lingkungan hidup adalah zaman penjajahan Indonesia. Dalam periode itu, ada penghancuran total pada lingkungan hidup di seluruh Timor Lorosa'e, baik disebabkan karena tindakan sengaja dari pemerintah dan militer Indonesia, maupun karena kekurangan pengertian dari masyarakat Timor Lorosa'e terhadap bagaimana melindungi lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi yang didorong oleh pemerintah Orde Baru memaksa masyarakat meninggalkan tanahnya. Juga, pemindahan penduduk secara paksa oleh militer memaksa orang-orang meninggalkan tanah sucinya. Pada waktu itu, cara pertanian tambang bakar masih digunakan; cara tradisional untuk membersihkan tanah seperti tambang bakar, yang digunakan supaya "tidak mengeluarkan banyak tenaga dan waktu", tetap digunakan hari ini, dan membantu menyebabkan erosi tanah dan menghasilkan panen yang berkualitas rendah (lihat Aditjondro a & Aditjondro b, 1994).

Tiga tahap pembangunan yang disebut di atas hanyalah sedikit dari masalah besar yang akan tetap merupakan tantangan bagi para ahli lingkungan hidup, serta semua orang yang bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan hidup di negara baru ini.

V. Pentingnya Lingkungan Hidup: Persepsi Lokal

Apakah di masyarakat yang kehidupannya sekedar untuk penyambung hidup, pemeliharaan lingkungan hidup merupakan suatu kebiasaan secara umum? Pada umumnya, terdapat tiga persepsi dasar terhadap pertanyaan tersebut. Pertama, kehidupan sehari-hari. Misalnya, kebiasaan yang menyebabkan kerusakan tanah secara tradisional dianggap 'melukai' (halo a'at) tanahnya. Masyarakat Mambai melarang praktek tambang bakar karena dianggap merusak tanah, dan menyebabkan erosi dan tanah longsor. Suku Mambai lebih menyukai pembersihan tanah dengan memakai tangan. Walaupun demikian, masih terlihat di bukit di kaki gunung di Dili, seperti di tempat-tempat lain di Timor Lorosa'e, bahwa pembakaran sebelum penanaman jagung masih terjadi.

Kedua, terdapat kepercayaan bahwa tanah adalah "tubuh ibu", dan "kita" sebagai anak-anaknya, seharusnya memelihara tubuh ibu. Maka praktek memotong pohon tanpa mengetahui gunanya merupakan pelanggaran aturan-aturan budaya dan tradisi. Terdapat kepercayaan bahwa "Ibu pertiwi" mengorbankan badannya- tanah-supaya dapat menghasilkan makanan untuk anak-anaknya (lihat Traube, 1977). Penafsiran orang Timor bahwa nenek

3 Terhadap masalah sistem kepemilikan tanah, terdapat dua macam tuntutan atas hak kepemilikan tanah di Timor Lorosa'e. Pertama kepemilikan perseorangan, kedua, kepemilikan kolektif, atau kelompok. Penghapusan sistem kepemilikan kolektif mulai pada tahun 1912, ketika tuntutan hak kepemilikan perseorangan mulai muncul sebagai hak kepemilikan utama.



moyang mereka biasanya membiarkan tanah (ibu pertiwi) beristirahat setelah setiap musim panen merupakan satu contoh. Ciri pengembaraan (hidup berpindah-pindah) orang Timor Lorosa'e memberi penjelasan atas pengertian dan contoh tersebut. Contoh lainnya, pada masa dulu, berpindahnya orang pada setiap musim merupakan hal biasa, khususnya setelah musim panen karena orang Timor percaya bahwa bagian tanah yang sudah dipanen dan menghasilkan tanaman akan terkupas habis kualitasnya (merasa lelah) dan harus dibiarkan istirahat untuk sementara. Dengan demikian musim panen berikutnya seharusnya dilakukan di tempat lain. Tujuannya adalah untuk memelihara tanahnya (husik rai bokur, secara harfiah, menggemukkan tanahnya), supaya hasilnya lebih banyak di tahun berikutnya. Orang Timor berkata: "kita mencintai tanah kita dan harus memeliharanya, kalau tidak, dia tidak akan menghasilkan makanan". Tanah, batu, pohon dan sungai kecil merupakan bagian dari tubuh ibu pertiwi. "Ibu pertiwi" akan melihatkan kemarahannya dengan membiarkan hasil panen tidak baik, menyebabkan gempa bumi dan menyebabkan penangkapan ikan terganggu dan sebagainya.

Ketiga, untuk "melindungi" lingkungan hidup, masyarakat Timor memakai "tanda larangan" (horok, lulik) supaya mencegah penyalahgunaan tanahnya. Tanda tersebut terdiri dari daun kering (ai tahan maran), sebuah ikatan daun sirih (bua ho malus) atau setengah kelapa (nu'u sorin baluk), biasanya ditaruh di pintu masuk tempat tinggal atau kebun. Selain menunjukkan kepemilikan atas tanah itu, tanda tersebut juga melarang orang masuk ke tanah orang lain dan mencegah adanya perbuatan pencurian. Horok atau lulik juga digunakan untuk mencegah kehancuran atau untuk menghindari kelakuan yang dapat merusak lingkungan hidup, seperti perusakan lingkungan, tubuh ibu pertiwi.

Memang, dalam ceritanya tentang kehidupan Uskup Ximenes Belo, Arnold Kohen menggambarkan bagaimana eratnya hubungan orang Timor dengan tanahnya (1999:47) dan bagaimana setianya orang terhadap agamanya. Tanah adalah tempat mereka tinggal, di mana garis keturunannya terbentuk, di mana tanaman-tanamannya ditanam, di mana kuburan nenek moyangnya terletak, dan, hal yang

paling penting, di mana asal usulnya dapat diusut. Pemimpin-pemimpin politik Timor, di riwayat hidupnya, mengakui pentingnya "tanah" (diterjemahkan sebagai tempat lahir, moris fatin), dalam kehidupan mereka (lihat Ramos-Horta, 1987; Bishop Belo di Kohen, 2000). Xanana Gusmão terkenal terhadap komentarnya beberapa tahun yang lalu: "hutan saya adalah universitas saya". Kakek saya sendiri dulu suka berkata: "moris fatin saya adalah sekolah saya".

VI. Penutup

Sebagai penutup, apabila membicarakan masalah budaya dan lingkungan hidup di Timor Lorosa'e, kita harus memperhatikan bagaimana budaya dan lingkungan hidup dipahami dalam konteks masyarakat lokal. Kita dapat memakai konsep yang paling canggih untuk menjelaskan artinya budaya dan menerapkan teknik yang paling mederen untuk memecahkan masalah-masalah lingkungan hidup. Akan tetapi, pendekatan demikian, menurut pandangan masyarakat setempat, mempunyai arti lain, misalnya merusak lingkungan hidup mereka akibat tidak diperhatikannya kebiasaan mereka atau merendahkan nilai-nilai dan budaya lokal.

Dalam persepsi masyarakat Timor Lorosa'e, lingkungan hidup tidak terbatas pada tanah atau tempat tinggal. Lingkungan hidup adalah kehidupan kita. Lingkungan hidup merupakan tempat asalnya suatu klan, tempat garis keturunan terletak dan terbentuk, tempat letaknya kuburan nenek moyang, tempat letaknya tempat suci untuk sembahyang dan tempat kudus lainnya yang berhubungan dengan kosmos masyarakat tradisional.

Pengertian masyarakat Timor Lorosa'e tentang budaya dan lingkungan hidup adalah sa,a dengan pandangan mereka tentang dunia yang mereka hidup. Dua-duanya adalah komponen hidup yang penting, dan saling mendukung. Yang satu menentukan kelakuan yang satu, dan sebaliknya. Budaya, dalam persepsi orang Timor, berarti melestarikan "lingkungan", dan lingkungan tidak akan ada apabila budaya tidak juga dihormati. Dua-duanya saling terkait, dan merupakan kunci kelangsungan hidup manusia.

Referensi

- Aditjondro, G. Junus (a), 1994 *From Memo to Tutuala: A Kaleidoscope of Environmental Problems in East Timor* in Herb Feith, Emma Baulch, Pat Walsh: *East Timor: An Indonesian Intellectual Speaks Out*, Development Dossier No 33, ISBN 0 909 831 610, Australia
- Aditjondro, G. Junus (b), 1994 *In the Shadow of Mount Ramelaw: Some Sketches of East Timorese Culture* in Herb Feith, Emma Baulch, Pat Walsh: *East Timor: An Indonesian Intellectual Speaks Out*, Development Dossier No 33, ISBN 0 909 831 610, Australia
- Ahmadi, H. Abu, 1985 *Sosiologi*, Surabaya: Bina Ilmu
- Castro, G. Pimenta de, 1943 *Timor: Subsídios Para A Sua História*, Agência Geral da Colónias, Lisboa – MCMXLIV
- Daryanto, 1972 *Sosiologi*. Bandung, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Padjadjaran
- Fox, James J., 1989 *Category and Complement: Binary Ideologies and The Organisation of Dualism in Eastern Indonesia* in David Mayburry-Lewis and Uri Almagor (eds) *The Attraction of Opposites: Thought and Society in Dualistic Mode*, The University of Michigan Press, Michigan
- Geertz, Clifford, 1973 *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, New York : Basic Books
- Gusmao, Xanana, 2000 *To Resist is to Win: The Autobiography of Xanana Gusmao*; with selected letters & speeches/ edited by Sarah Niner ; principal translators, Jose Luis Perestrelo Botelho ... [et al.], Richmond, Victoria : Aurora Books
- Kohen, Arnold, S., 1999 *From the Place of Dead: Bishop Belo and the Struggle for East Timor*, A Lion Book, Oxford, England
- McWilliam, Andrew 1989 *Narrating the Gate and the Path: Place and Precedence in Southwest Timor*, Unpublished PhD Thesis, The Australian National University
- Ramos-Horta, Jose 1987 *Funu: The Unfinished Saga of East Timor*, preface by Noam Chomsky, Trenton, N.J : Red Sea Press
- Therik, G. T., 1995 *Wehali-The Four Corners Island: Cosmology and Tradition of A Tetum Ritual Centre*, Unpublished PhD Thesis, Anthropology, RSPAS, The Australian National University
- Traube, E., 1977 *Ritual Exchange Among the Mambai of East Timor: Gifts of Life and Death*, A PhD Thesis, Harvard University



Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa'e

Emilia Pires

Kepala, Badan Perencanaan dan
Pembangunan Nasional (NPDA), ETTA

Terima kasih atas kesempatan untuk berbicara mengenai masalah yang sangat penting yaitu pembangunan berkelanjutan di Timor Lorosa'e. Saya ingin memulai dengan beberapa pengamatan singkat mengenai bagaimana kita dapat memastikan bahwa konferensi ini dapat menghasilkan pengaruh yang praktis dan kekal terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Timor Lorosa'e. Saya kemudian ingin berkomentar mengenai pembangunan berkelanjutan dan peran Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Konferensi ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat tepat untuk menggabungkan beragam pencetus pembangunan, baik dari Timor Lorosa'e maupun dari luar. Saat ini kita berada dalam masa kritis di mana kita hendaknya memusatkan perhatian kita untuk bekerja sama secara lebih baik untuk memastikan bahwa arah yang sedang kita tentukan dapat diwujudkan di masa yang akan datang. Tugas pembangunan yang belum terlaksana adalah vital, tetapi agaknya kita dapat mengkonsolidasikan kemajuan pasca kemerdekaan.

Kita harus memperkuat hubungan kerja sama untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi bersama. Ini berarti, berbicara antara satu dengan lainnya secara konstruktif dan analitis, dan juga berbagi informasi mengenai apa yang telah dilakukan dan rencana yang telah disusun. Sebagai mitra dalam pembangunan, administrasi pemerintahan, masyarakat madani dan para ahli internasional harus berbicara dan saling mendengar satu sama lain. Kita hendaknya tidak menilai berdasarkan anggapan/praduga, persepsi dan isu.

Di sebuah negara sebesar Timor Lorosa'e, kita harus memastikan bahwa kita semua bekerja sama untuk menghadapi pembangunan yang terbentang dihadapan kita. Tidak ada satu pun yang mampu mencapai pembangunan secara optimal tanpa bantuan pihak lain. Untuk melaksanakan dengan usaha kita sendiri akan kurang produktif, tetapi lebih penting lagi, untuk masyarakat Timor Lorosa'e. Untuk mencapai kemitraan yang lebih kuat, kita perlu untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi diantara kita semua. Saya berharap hal ini akan menjadi hasil yang berarti dari konferensi ini-sebuah kesempatan untuk berbicara satu sama lain, berbagi pengalaman dan mendiskusikan arah untuk masa depan.

Fokus/perhatian utama lainnya adalah untuk memastikan bahwa kita membuat rekomendasi yang praktis dan relevan tentang pembangunan yang berkelanjutan di Timor Lorosa'e. Kita tidak punya waktu untuk berkuat dengan bagian yang abstrak mengenai teori pembangunan. Dalam pelaksanaan semacam ini, mengkaitkan pemikiran kita yang mendalam untuk mencapai hasil pembangunan dan memecahkan persoalan yang ada saat ini adalah sesuatu yang harus didahulukan. Menjadi tugas kita semua untuk menemukan keseimbangan akan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan dan memastikan pelaksanaan pembangunan yang efektif.

Saya ingin meminta kepada semua delegasi peserta

konferensi ini untuk membantu proses administrasi dan pembangunan di Timor Lorosa'e untuk membantu kami sebagai mitra pembangunan untuk menemukan solusi yang praktis, relevan dan tahan lama untuk masalah-masalah pembangunan yang kita hadapi. Ada banyak masalah untuk diperhatikan, yaitu: urbanisasi yang cepat, penggundulan hutan, pemulangan pengungsi, pendidikan kewarganegaraan, perbaikan prasarana, dan pembentukan kantor administrasi umum yang efektif. Kuncinya adalah untuk memprioritaskan hal-hal yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan Timor Lorosa'e, dan untuk menargetkan usaha-usaha serta sumberdaya keuangan yang terbatas hanya untuk hal-hal yang paling penting saja. Kita harus realistis terhadap apa yang bisa kita lakukan dan kemudian mencapainya dengan cara seefisien mungkin.

Pembangunan yang Berkelanjutan

Saya sekarang akan kembali pada masalah pembangunan berkelanjutan terhadap hubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh ETTA, khususnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Di masa di mana terdapat banyak tekanan untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat, dan untuk menyediakan sumberdaya yang bernilai, kita dapat dengan mudah kehilangan gambaran yang menyeluruh.

Bagaimanapun juga, kita harus membuat daya berkelanjutan menjadi prinsip dasar perencanaan pembangunan di Timor Lorosa'e.

Saat memikirkan mengenai program-program pembangunan, apakah melalui anggaran nasional, program donor maupun dukungan LSM, satu pertanyaan penting harus ditanyakan. Dapatkah pemerintah, rakyat dan alam Timor Lorosa'e mempertahankan selama jangka menengah ke jangka panjang? Beberapa orang akan mengatakan ini merupakan pertanyaan yang jelas untuk ditanyakan.

Tetapi akan sulit menjawab dengan lingkungan di mana segala sesuatu telah dihancurkan, di mana kebutuhan-kebutuhan memuncak dan di mana para pendonor menyediakan dukungan yang besar dan cepat untuk melakukan rekonstruksi dan pembangunan.

Dalam lingkungan semacam ini, hasil jangka pendek dapat mengakibatkan masalah-masalah berskala besar dan berjangka panjang di masa yang akan datang. Seperti contoh, penanaman kembali investasi yang besar untuk memperbaiki prasarana berskala besar seperti perbaikan jalan atau generator pembangkit listrik sampai pada tingkat yang tidak dapat ditopang akan membuat pincang anggaran pemerintah independen Timor Lorosa'e di masa yang akan datang. Contoh lain adalah pembangunan atau pembangunan kembali sejumlah besar gedung sekolah di mana pemerintah mendatang tidak akan dapat mendanai pembelian peralatan sekolah dan membayar gaji para guru. Hal ini merupakan pemborosan uang dalam jangka pendek dan dapat membuat pemerintah tidak dapat melanjutkan pembiayaan untuk jangka panjang. Untuk mengantisipasi hal ini, pemeriksaan secara teliti akan

daya berkelanjutan intervensi pembangunan harus menjadi prioritas utama kita.

Dalam merancang program-program pembangunan, semua departemen pemerintah, pendonor, LSM dan pihak lain harus selalu membuat penilaian yang seksama terhadap beban pembangunan yang mungkin akan dibebankan kepada pemerintah, rakyat dan lingkungan. Apabila tidak ada satupun dari mereka yang mampu melanjutkan kegiatan untuk jangka panjang, misalnya melalui penurunan sumber daya alam, kurangnya pendanaan pemerintah atau kurangnya dukungan masyarakat, saya kemudian akan menanyakan apakah hal itu perlu diikuti.

Di saat telah ada usaha-usaha untuk memastikan bahwa program-program di Timor Lorosa'e mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mendasar, terdapat juga kekurangan dalam cara bagaimana pembangunan dirancang dan dilaksanakan, yang berpengaruh pada kelanjutan pembangunan.

Pokok-pokok diantaranya adalah sebagai berikut:

- Kurangnya konsultasi masyarakat, yang mengarahkan pada kurangnya partisipasi masyarakat Timor Lorosa'e dalam beberapa hal;
- Tidak adanya data pokok yang baik untuk mendukung perumusan kebijakan, perancangan program dan pembangunan;
- Terlalu sedikit orang Timor Lorosa'e yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan, begitu juga posisi-posisi dalam program manajemen dan pelaksanaan proyek; dan
- Kurangnya prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan secara baik dan terpadu.

Untuk memperbaiki daya berkelanjutan dari kegiatan-kegiatan pembangunan, butir-butir dari masalah utama ini harus diperhatikan sebagai prioritas.

Peran NPDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional)

Dalam Administrasi Transisi Timor Lorosa'e, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional telah dibentuk untuk mengatur sebuah program kegiatan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang baik di Timor Lorosa'e. Saya ingin menggarisbawahi beberapa contoh mengenai bagaimana rencana kerja NPDA akan menangani kekurangan-kekurangan yang tadi telah saya sebutkan dan bagaimana memperbaiki perencanaan untuk hasil pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini termasuk perbaikan terhadap:

1. Konsultasi masyarakat dan perencanaan lokal;
2. Pengumpulan dan analisa data;
3. Pelibatan orang-orang Timor Lorosa'e; dan
4. Pengutamaan Pembangunan Nasional.

1. Konsultasi Masyarakat

Agar kegiatan pembangunan dapat bersifat berkelanjutan, penting bahwa pembangunan itu mencerminkan pandangan dan pemikiran orang Timor Lorosa'e mengenai masa depan yang kita inginkan bagi masyarakat dan negara ini. Sangat penting untuk membuat perencanaan pembangunan yang bertahap, dari bawah ke atas, yang akan membantu untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat setempat harus dilibatkan secara aktif dalam menganalisa keperluan pembangunan dan menentukan penempatan

sumber daya yang ada. Hal ini akan memastikan adanya partisipasi masyarakat Timor Lorosa'e yang besar dan berkelanjutan.

Mempertinggi kemampuan daerah untuk perencanaan pembangunan merupakan prioritas utama kita. Untuk mendukung hal ini kita perlu suatu persetujuan mengenai model pemerintahan lokal. Hal ini akan termasuk peralihan tanggung jawab dari pengambilan keputusan tingkat pusat ke tingkat daerah, begitu pula dukungan keuangan yang memadai.

Pada saat yang sama, kita akan membantu menyampaikan pesan mengenai perencanaan dan prioritas pembangunan yang berkelanjutan kepada masyarakat dengan usaha menyuluhkan kepada masyarakat luas dengan cara kampanye. Harapan saya adalah supaya hal ini akan dapat juga mendukung pemahaman yang lebih realistis mengenai kemampuan pemerintah independen di masa yang akan datang untuk memberikan layanan di Timor Lorosa'e, paling tidak untuk jangka menengah. Hal ini akan menyumbangkan pemahaman yang lebih luas mengenai apa yang berkelanjutan dan apa yang tidak berkelanjutan.

2. Pengumpulan dan Analisa Data

Persyaratan lainnya untuk memperbaiki pembangunan yang berkelanjutan di Timor Lorosa'e adalah pengumpulan data yang berkualitas untuk mendukung perancangan program dan kebijakan yang efektif serta pelaksanaannya. Saat ini, program-program penanaman modal yang besar sedang dirancang dan dinilai tanpa adanya data yang mencukupi, konsisten dan dapat diandalkan. Informasi ini sangat penting pada saat keputusan-keputusan penting sedang dibuat atau akan segera dibuat yang akan mempengaruhi masa depan negara ini.

Saya sedang memikirkan keputusan misalnya struktur gaji yang akan mempunyai pengaruh yang berlangsung lama terhadap ekonomi pasar, atau mengenai pembentukan struktur konstitusional, atau mengenai model untuk pembangunan ekonomi. Keputusan-keputusan ini hendaknya tidak dibuat tanpa memberi akses kepada orang Timor Lorosa'e atas latar belakang data dan beberapa analisa perbandingan mengenai pilihan yang tersedia. Dilengkapi dengan informasi-informasi ini, kita kemudian dapat membuat penilaian sendiri mengenai pilihan apa yang secara fundamental sesuai untuk Timor Lorosa'e, dan karakter serta sifat masyarakat Timor Lorosa'e. Contohnya apakah masyarakat Timor Lorosa'e lebih suka model perlindungan ekonomi, pasar liberal bebas atau mungkin model lainnya berdasarkan prinsip-prinsip yang kooperatif. Begitu keputusan diambil kita sendiri perlu untuk mencoba bagaimana untuk mengalihkan masyarakat kita untuk mencapai hasil yang mereka inginkan. Pendekatan ini, yang berdasarkan pada pemberdayaan masyarakat, akan membantu adanya daya berkelanjutan.

Oleh karena itu, NPDA selama ini memprioritaskan untuk mengembangkan sebuah program kerja untuk meningkatkan kemampuan staf Timor Lorosa'e untuk mengelola pengumpulan data untuk pemerintah secara keseluruhan. NPDA juga akan menjadi mitra kerja pemerintah untuk studi Penilaian Kemiskinan yang didanai oleh Bank Dunia, ADB dan UNDP yang akan melaksanakan survei pendapatan rumah tangga awal tahun ini. Informasi ini akan menjadi sangat penting untuk memperbaiki kualitas keseluruhan dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Timor Lorosa'e.



3. Pelibatan Orang Timor Lorosa'e

Penting juga bahwa orang Timor Lorosa'e dilibatkan secara penuh dalam proses pembangunan. Untuk memastikan adanya daya berkelanjutan, orang Timor Lorosa'e harus memiliki proses pembangunan dan tidak mempercayakan kepada yang lainnya. Ada benarnya kita mempelajari banyak hal dalam beberapa bidang dari sejawat dan teman kerja dari luar negeri. Apabila memungkinkan, bantuan khusus ini hendaknya diberikan oleh pakar internasional dalam peranannya sebagai "penasehat", sedangkan orang Timor Lorosa'e yang menduduki posisi penting dimaksud. Hal ini adalah relevan untuk semua bidang pembangunan, baik dalam pemerintah atau dalam perancangan program pembangunan dan manajemen dalam masyarakat sipil. Hal ini perlu dilaksanakan dengan segera sehingga orang Timor Lorosa'e berada dalam posisi sebagai pengambil keputusan, didukung oleh para penasehat yang dapat memberi masukan mengenai bagian-bagian tindakan yang potensial dan membantu mengurangi pengaruh kesalahan yang kita buat dalam mempelajari sesuatu yang baru. Hal ini menjadi pusat dari peningkatan kemampuan.

Dalam sektor pemerintah, kita sedang mencoba untuk lebih banyak melibatkan orang Timor Lorosa'e melalui perekrutan yang lebih cepat, terutama pada tingkat manajemen senior. Di NPDA, saya cenderung untuk menempatkan orang-orang Timor Lorosa'e di seluruh posisi manajemen senior dalam badan ini dalam waktu yang singkat. Dalam beberapa unit di badan ini, seperti Unit Perlindungan Lingkungan (EPU), staf orang Timor Lorosa'e sudah mulai melaksanakan peran penting dalam perumusan kebijakan dan perencanaan atas masalah-masalah penting yang ada dalam pembangunan berkelanjutan.

Anda akan mendengar dari anggota staf Unit Perlindungan Lingkungan mengenai pekerjaan mereka yang berkaitan dengan polusi dan limbah dalam konferensi ini.

Untuk lebih mendukung pelibatan orang Timor Lorosa'e dalam pemerintahan, NPDA sedang berusaha untuk merekrut orang Timor Lorosa'e sebagai konsultan pemerintah yang akan bekerja mengenai inventarisasi keseluruhan program dan proyek yang saat ini sedang dirancang dan dilaksanakan di Timor Lorosa'e. Aspek utama dari tugas mereka adalah untuk menyajikan data ini dalam cara yang mudah dipahami oleh seluruh masyarakat, sehingga masyarakat luas memiliki pemahaman atas bantuan yang sedang ditujukan kepada mereka. Hal ini akan membuat masyarakat tahu dan akan lebih terlibat secara aktif, mengarahkan penggunaan bantuan ini.

Di luar pemerintah, kita ingin melihat peningkatan yang serupa terhadap keterlibatan orang Timor Lorosa'e dalam perancangan dan pembagian program-program pembangunan. Saya ingin melihat LSM-LSM Timor Lorosa'e serta kelompok masyarakat lebih bersatu dalam pembangunan. Pendekatan ini mungkin akan lebih membutuhkan lebih banyak tugas dari LSM internasional dan partner masyarakat sipil. Penting bahwa begitu bantuan internasional diberikan, sifat berkelanjutan dari

semua tugas-tugas yang diselesaikan dapat dinilai melalui sebuah satgas pengembangan orang Timor Lorosa'e yang terlatih dan trampil. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan di Timor Lorosa'e hari ini dan besok akan bersifat berkelanjutan.

4. Prioritas

Akhirnya, saya akan membicarakan tugas yang sedang dikerjakan untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan nasional berada dalam program inti pemerintah. Tiga bentuk utama pengeluaran masyarakat dalam pembangunan adalah melalui anggaran nasional Timor Lorosa'e, dana perwalian untuk Timor Lorosa'e dan bantuan pembangunan bilateral dari pemerintah-pemerintah pendonor. Hampir seluruhnya didanai melalui bantuan donor.

Proses anggaran nasional untuk tahun anggaran yang akan datang akan segera dimulai. Anggaran tahun kedua untuk Timor Lorosa'e, tahun 2001-2002, akan menggabungkan ketiga sumber utama pendanaan dalam satu proses. Hal ini akan meluruskan prioritas pembangunan Timor Lorosa'e secara lebih baik dan hendaknya memastikan pemaduan yang lebih baik antara semua program keuangan masyarakat. Kabinet akan menilai usulan anggaran sampai pada tahun anggaran yang baru dan sebuah regulasi pemberian anggaran akan diserahkan kepada Dewan Nasional untuk disetujui sebelum diadakannya konferensi donor di Jenewa bulan Juni. Melalui proses ini, ETTA akan menetapkan prioritas-prioritas utama untuk pembangunan di Timor Lorosa'e.

Pada saat yang sama, Kabinet telah membuat daftar mengenai prioritas pembangunan yang belum didanai, yang akan digunakan oleh NPDA untuk mencari pendonor yang akan membiayai kegiatan prioritas yang tidak dapat diluar program-program yang ada. Daftar ini akan membantu untuk memastikan bahwa, sedapat mungkin, bantuan donor sesuai sepenuhnya dengan prioritas pembangunan Timor Lorosa'e. Peran NPDA adalah untuk meyakinkan bahwa usulan-usulan ETTA kepada pendonor memenuhi seluruh faktor-faktor lingkungan, keuangan dan sosial yang berkelanjutan.

Hal ini hanya merupakan tinjauan singkat atas kegiatan yang akan dan sedang dilaksanakan oleh NPDA dan ETTA untuk memperbaiki penyebaran hasil pembangunan yang berkelanjutan di Timor Lorosa'e. Saya percaya bahwa staf saya dan saya sendiri akan memiliki kesempatan untuk bekerja dengan anda untuk mencapai hal ini.

Saya ingin menyimpulkan dengan harapan bahwa anda semua dapat berdiskusi dan membuat pertimbangan-pertimbangan dengan baik dalam beberapa hari mendatang ini. Saya percaya bahwa konferensi ini memiliki potensi untuk menyampaikan pesan pembangunan yang berkelanjutan di Timor Lorosa'e ke masyarakat luas. Kita hendaknya berusaha untuk memastikan bahwa hasil konferensi ini dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dan kita menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat kembali usaha-usaha kita untuk memastikan bahwa semua pelaksana pembangunan dapat bekerja sama untuk membangun masa depan Timor Lorosa'e yang berkelanjutan.



Pembangunan Berkelanjutan - Suatu Pengenalan untuk Timor Lorosa'e

Dr. Arthur J Hanson

International Institute for Sustainable Development (IISD)

Pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk kemakmuran dan kualitas hidup di Timor Lorosa'e. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan generasi sekarang, tetapi juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan generasi berikutnya. Awal mulanya pembangunan berkelanjutan merupakan keadilan sosial dan pembangunan kembali, dengan mementingkan perawatan lingkungan hidup untuk masyarakat desa dan masyarakat kota, dan mementingkan strategi pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup. Pemerintahan yang baik akan menerima pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu tujuan utamanya, mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan undang-undangnya, keterbukaan, pertanggungjawaban, dan partisipasi. Dunia usaha dan masyarakat mengambil peran utama karena pemerintahan sendiri tidak dapat sepenuhnya merencanakan dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan secara sukses. Strategi pembangunan berkelanjutan secara lokal dan secara internasional diperlukan karena rumitnya persetujuan internasional mengenai lingkungan hidup, perdagangan dan lain-lain. Terdapat juga kemungkinan melaksanakan cara baru untuk pemberian dana, yang menghubungkan sumber-sumber internasional, tarif pemakaian, dan alat-alat ekonomi. Pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan tujuan-tujuan yang akan meningkatkan kualitas hidup di Timor Lorosa'e.

Jalan ke depan

Pembangunan berkelanjutan bukanlah sesuatu yang tidak dapat diabaikan sampai masa depan yang lebih baik. Bahkan, pembangunan berkelanjutan seharusnya tidak dilaksanakan secara memecah-belah, secara lebih mahal, atau bertentangan dengan kebutuhan-kebutuhan utama seperti mengurangi kemiskinan dan pembangunan kembali. Pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan baik untuk negara-negara kaya maupun untuk negara-negara yang paling miskin. Pembangunan berkelanjutan adalah tujuan yang penting sekali untuk Timor Lorosa'e, seperti halnya untuk negara-negara lain, karena pembangunan berkelanjutan menghubungkan antara manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya merupakan tujuan-tujuan tertulis, tetapi merupakan suatu proses. Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (World Commission on the Environment and Development-WCED) pada tahun 1987 mengakui bahwa "krisis kerusakan lingkungan hidup yang makin buruk mengancam keamanan nasional, dan mungkin juga mengancam kelangsungan hidup yang mungkin merupakan sesuatu yang lebih berbahaya daripada ancaman militer dari negara lain". Bahkan, krisis ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup telah menjadi saling terkait.

WCED membuat definisi pembangunan berkelanjutan yang dipahami oleh paling banyak orang: "pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya." Ada tujuh perintah yang masih tetap berarti sejak dibuat 15 tahun yang lalu: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; mengubah kualitas pertumbuhan; memenuhi keperluan akan pekerjaan, makanan, energi, air minum, dan kebersihan; memastikan tingkat kependudukan yang berkelanjutan; menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam; mengorientasi kembali teknologi dan menghindari risiko; dan menggabungkan lingkungan hidup dan ekonomi dalam mengambil keputusan.

Negara-negara dunia pada *Rio Earth Summit* pada tahun 1992 telah mengakui pentingnya pembangunan berkelanjutan. Pemimpin-pemimpin dunia menyetujui beberapa prinsip; dokumen yang rumit, Agenda 21, menentukan perintah-perintah tentang pembangunan berkelanjutan dan juga menentukan persetujuan-persetujuan mengenai perubahan cuaca, perbedaan biologis, dan masalah-masalah penting lainnya seperti *desertification*, pulau-pulau kecil dan pemancingan laut lepas. Sejak itu, pemerintahan, organisasi internasional, usaha-usaha, dan masyarakat sipil menerima prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Bahkan, laju perubahan makin besar, disebabkan karena kombinasi pembaharuan teknologi, kelembagaan, dan kemasyarakatan.

Kita berkata bahwa pembangunan berkelanjutan bukanlah "bisnis seperti biasa". Akan tetapi, pandangan itu tidak cukup sebagai titik awal dari pembicaraan mengenai pembangunan berkelanjutan di Timor Lorosa'e, negara yang sudah mengalami banyak kesusahan. Titik awalnya adalah keadilan sosial, dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, membangun kehidupan, dan membangun ekonomi yang menguntungkan, tidak merugikan dasar ekologis, tanah, air, dan laut di Timor Lorosa'e. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membicarakan bagaimana caranya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Cara tersebut adalah cara yang menggabungkan dan berorientasi pada inovasi dalam mencari penyelesaian yang mempunyai "triple bottom line", dengan hasil yang menguntungkan untuk masyarakat, lingkungan hidup, dan ekonomi.

Segitiga pembangunan berkelanjutan

Bayangkanlah suatu bentuk segitiga dengan tiga titik, yang merupakan kesehatan ekologi, kekuatan sosial dan budaya, dan kemakmuran ekonomi. Ini yang namanya segitiga pembangunan berkelanjutan. Garis-garis segitiga itu berhubungan dengan ketiga titik tersebut. Ketiga hubungan tersebut kadang mengalami kesulitan. Hubungan tersebut harus diakui dan dipahami, khususnya dalam mengambil keputusan untuk kebijaksanaan nasional, dunia usaha, dan masyarakat.

Hubungan tersebut jauh lebih rumit dari pertama kita kira, misalnya tunjangan untuk pertanian mungkin akan menimbulkan hasil yang buruk terhadap lingkungan hidup, seperti polusi atau penghancuran keanekaragaman hayati. Lembaga keuangan yang meminjamkan uang yang tidak membuat perintah-perintah yang menuntut kelestarian lingkungan hidup yang memadai di suatu negara, ikut menanggung kerusakan lingkungan hidup dan kegagalan ekonomi dengan hasil masalah-masalah sosial. Apabila perencanaan tidak sesuai dengan keadilan sosial, orang-orang yang paling miskin yang paling merasakan kerusakan lingkungan hidup tersebut, karena mereka yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas sosial. Masalah-masalah yang dibahas di atas merupakan pelajaran dari Asia dengan harapan tidak akan terjadi kembali di Timor Lorosa'e.

Di Timor Lorosa'e, ketiga titik di bentuk segitiga itu dapat dipahami sebagai berikut: **Kesehatan Ekologi:** perawatan lingkungan hidup di tingkat desa dan di tingkat kota; strategi lingkungan hidup dan keamanan, termasuk pencegahan dan tanggapan terhadap bencana; pengelolaan sumber daya alam secara terus-menerus; pemulihan ekologi dan perlindungan alam; pengawasan dan pencegahan polusi.

Kekuatan Sosial dan Budaya: kesehatan dan pendidikan untuk perempuan dan laki-laki; pemeliharaan kebudayaan dan pengetahuan tradisional; hak-hak dan akses yang tertulis terhadap sumber daya alam; keadilan sosial dan lingkungan hidup.

Kemakmuran Ekonomi: usaha-usaha kecil dan menengah yang terus-menerus; kehidupan desa dan kota yang terus-menerus; kebijaksanaan ekonomi (makro- fiskal, perdagangan, penyesuaian dan peminjaman, perbankan dan investasi, nilai mata uang) yang terus-menerus; kredit kecil; strategi-strategi ilmu pengetahuan alam dan teknologi.

Hasil-hasil yang memuaskan akan memberi kontribusi pada empat model utama yang mendukung keberlanjutan: alam, manusia, masyarakat, dan bangunan. Yang penting, jangan sampai ada jalan atau bangunan yang dibangun apabila pembangunan itu merusak hutan, atau kesehatan masyarakat terancam disebabkan karena polusi industrial.

Pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan

Sekarang ini, pemerintahan yang baik akan mengambil peranan besar dalam bidang pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan pemikiran maju, undang-undang, keuntungan-keuntungan, kelembagaan, kemampuan mengukur kemajuan, dan mempunyai hubungan dengan masyarakat yang bersifat jujur dan transparan. Pembangunan berkelanjutan bersifat integrasi, memasuki semua bidang pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tergantung juga pada partisipasi dunia usaha dan masyarakat.

Pertanyaan yang wajar adalah siapa yang memimpin. Pemimpin negaralah yang seharusnya juga memimpin suatu strategi nasional pembangunan berkelanjutan. Semua anggota kabinet seharusnya menjelaskan peran dan tanggung jawabnya terhadap pembangunan

berkelanjutan. Di Kanada ada pemimpin lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang secara teratur meninjau keberhasilan setiap departemen pemerintahan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan dia melaporkan hasil tinjauannya ke parlemen. Pertanggungjawaban dan kapasitas untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sangat penting karena pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia.

Masalah pembangunan berkelanjutan juga menyentuh masyarakat lokal dan kelakuan perusahaan dan orang besar. Pemerintah dapat memfokuskan pada pembicaraan dan partisipasi, tetapi juga pada pembagian pertanggungjawaban, misalnya proyek yang berasal dari masyarakat lokal, seperti proyek kesehatan, lingkungan hidup, dan pengelolaan sumber daya alam. Usaha-usaha kecil dapat merencanakan perintah-perintah pembangunan berkelanjutan, dan mencari kesempatan seperti *ecotourism* (pariwisata ekologis) yang dapat membantu melindungi lingkungan hidup sambil memberi keuntungan sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Suatu hal yang penting adalah dimana masyarakat mengambil inisiatif sendiri untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, daripada disuruh dan diawasi secara terus-menerus.

Pelaksanaan secara lokal sampai internasional

Pembangunan berkelanjutan akan gagal apabila pelaksanaan gagal pada tingkat lokal dan nasional. Namun semua negara ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan mengenai perintah-perintah perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan untuk bumi ini. Ada yang berpendapat bahwa dalam sepuluh tahun terakhir ini, kita lebih banyak berbicara daripada mengambil tindakan yang jelas terhadap perlindungan lingkungan hidup. Namun, negara-negara seperti Cina, Vietnam, dan negara-negara kecil seperti Maldives sudah mengalami efek globalisasi, perdagangan internasional, perubahan cuaca, dan masalah-masalah keanekaragaman hayati. Persetujuan-persetujuan internasional dalam bidang lingkungan hidup, perdagangan, dan kemajuan sosial dan ekonomi dan keamanan perlu dipertimbangkan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kadang persetujuan-persetujuan tersebut bertentangan dan tidak jelas yang mana yang betul.

Timor Lorosa'e tidak dapat mengabaikan jaringan internasional ini, dan sebetulnya Timor Lorosa'e seharusnya dapat mengambil keuntungan dari beberapa ketentuan internasional. Secara ideal, seharusnya ada kemandirian yang tinggi antara tingkat internasional, nasional, dan lokal, akan tetapi memang tidak ada kemandirian seperti itu dalam suatu negara manapun sekarang ini. Strategi nasional pembangunan berkelanjutan dapat membantu mengisi kekosongan itu.

Membiayai pembangunan berkelanjutan

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berhasil akan terjadi dengan perencanaan yang tepat, tidak hanya dengan dana. Lebih masuk akal apabila kita



mengurangi jumlah energi yang digunakan daripada mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Untuk Timor Lorosa'e, yang menghadapi proyek pembangunan kembali yang besar sekali dan mempunyai dorongan kesempatan-kesempatan ekonomi, dana untuk semua prioritas merupakan tantangan besar. Maka, isi anggaran nasional adalah sangat penting untuk menilai sikap pemerintahan terhadap pembangunan berkelanjutan. Bagaimana dana yang terbatas dibagikan untuk kebutuhan sehari-hari, perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan memang penting. Akan tetapi, penting juga mengamati sistem perpajakan suatu negara, seperti pajak dan subsidi, misalnya pajak untuk sumber daya alam, air minum, dan kredit impor. Inisiatif pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola sendiri dapat dilaksanakan dengan memberi tarif pajak pemakaian. Pendekatan tersebut memang mempunyai daya tarik, dan dapat mengurangi jumlah dana yang dikeluarkan.

Pemasukkan dana untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tertentu dari masyarakat internasional merupakan suatu hal yang baru, tetapi mudah-mudahan Timor Lorosa'e akan menerima sebagian dari dana tersebut untuk kebutuhan pembangunan berkelanjutannya sendiri. Dana tersebut mungkin akan diberikan oleh Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (ADB), Fasilitas Lingkungan Hidup Internasional (GEF), dan Program Pembangunan PBB (UNDP), sektor swasta, dan sumber-sumber dari yayasan. Pada umumnya, dana seperti itu dapat membantu dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dengan memulai proyek-proyek masyarakat lokal (grassroots) dan pembangunan prasarana teknis, tetapi dana tersebut paling bernilai apabila digunakan untuk pembangunan kelembagaan, perumusan kebijakan, dan peningkatan kapasitas.

Sebagian besar dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan adalah pembagian pertanggungjawaban karena tidak ada suatu pemerintahan sendiri yang

mampu sepenuhnya melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa cara untuk mencari dana untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, misalnya kredit kecil, bekerja untuk mendapat makanan, liburan pajak (tax holiday), dan produk sumber daya alam yang bertambah nilainya. Kemandirian ekonomi pada tingkat masyarakat dan dunia usaha akan memberi jaminan yang paling baik untuk kehidupan dan usaha yang terus-menerus.

Pemerintahan Timor Lorosa'e dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan apa yang dibelinya sendiri. "Green Guidelines" atau "Garis Pedoman Lingkungan Hidup" untuk pembelian akan membuat penjual-penjual lebih memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Esok dan lima tahun kemudian

Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan secara bertahap. Kita dapat mulai dengan apa yang bisa kita lakukan, dengan cara dan kemampuan yang terbatas. Kita harus berkomunikasi dengan mereka yang akan mengalami pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan tersebut. Proses pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan pengetahuan mengenai apa yang pernah berhasil di tempat lain. Yang dibicarakan di atas adalah beberapa masalah yang perlu dibicarakan. Di lima tahun kemudian mudah-mudahan Timor Lorosa'e akan pulih dari krisis ini dan mulai melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Cara yang menentukan adalah peningkatan kualitas hidup. Dan akan ada perasaan bangga dan kemandirian di Timor Lorosa'e yang akan mendorong masyarakat untuk lebih maju lagi. Cara pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan cepatnya kemajuan adalah di setiap negara. Tetapi kita bisa berbagi satu visi bersama dan mengharapkan masa depan yang lebih cerah.

Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan yang Melibatkan Pelbagai Pihak yang Berkepentingan

Ella S. Antonio

Manajer Kawasan Asia Pasifik di Dewan Bumi (Earth Council)

Agenda 21, program aksi global untuk pembangunan berkelanjutan yang merupakan hasil utama dari Konferensi Lingkungan dan Pembangunan PBB pada tahun 1992 (UNCED). Program tersebut meminta negara-negara membuat Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan (NSSD) sendiri. Pada tahun 1997, Majelis Umum PBB menentukan rencana pelaksanaan rencana ini. Rencana Pelaksanaan tersebut menyatakan: "Sampai tahun 2002, perumusan dan perluasan NSSD, yang mencerminkan sumbangan dan tanggungjawab semua pihak yang berkepentingan, harus diselesaikan dengan bantuan yang disediakan bila diperlukan, melalui kerja sama internasional." Sampai sekarang, kurang dari sepuluh negara di Asia-Pasifik sudah membuat NSSD. Kurang-lebih 25 negara di

kawasan Asia-Pasifik telah membuat Rencana Lingkungan Nasional (NEAP), wakil terbatas NSSD.

MISP (Pembangunan yang melibatkan pelbagai pihak yang berkepentingan)

Berkelanjutannya suatu pembangunan tergantung pada sifat keikutsertaan dari proses perencanaan, maupun pada rencana-rencananya sendiri. Oleh karena itu, Dewan Bumi¹ sedang mengembangkan dan memajukan proses pembangunan berkelanjutan yang disebut "Perencanaan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan pelbagai pihak yang berkepentingan, yang berintegrasi dan berkelanjutan (MISP)." Dewan Dunia sudah menyiapkan garis pedoman (lihat www.ecouncil.ac.cr) yang menggambarkan pendekatan

perencanaan yang memenuhi syarat Agenda 21 mengenai integrasi dan partisipasi pelbagai pihak yang berkepentingan. Juga, karena semua negara berbeda, garis pedoman itu harus menyediakan cukup kelonggaran untuk menerima pemahaman dan ide-ide baru.

Pada dasarnya, pembangunan berkelanjutan adalah suatu kerja sama antara semua anggota masyarakat dan lingkungannya. Sifat dan proses pembangunan berkelanjutan terlalu rumit, saling terkait, holistik, dan berkepentingan rakyat untuk dibiarkan untuk satu pelaku utama. Walaupun pemerintah diberikan tanggungjawab dan rakyat mengharapkan mereka yang memimpin, tetapi penting juga bila pihak-pihak dari semua sektor masyarakat (budaya, ekonomi, sosial, ekologi, rohani dan politik) juga secara aktif ikut serta dalam proses pengambilan keputusan ke arah pembangunan yang berkelanjutan.

MISP merupakan suatu proses dimana ada beragam pihak yang berkepentingan, beragam disiplin, beragam tingkat, dinamis, koordinatif, dan interaktif. Proses MISP bertujuan mendamaikan kepentingan pihak-pihak yang berbeda secara interaktif dan kooperatif.

MISP mengajukan proses yang terus menerus untuk mengejar kepentingan masyarakat dengan mengumpulkan wakil-wakil dari bidang-bidang tertentu, yang ditunjuk oleh para pemilih, yang bekerja untuk kepentingan dan keuntungan masyarakat. Proses ini harus menggunakan cara yang memberdayakan semua tingkat masyarakat dan memadukan semua kepentingan-kepentingan yang berbeda, menjadi keseluruhan yang terpadu.

Proses MISP

Proses-proses MISP mengikuti proses perencanaan yang standar. Perbedaan utama adalah dengan cara pelaksanaannya. Langkah-langkah pelaksanaan dilakukan dengan mengingat beberapa pertanyaan yang harus ditanggapi secara efektif. Berikut ini adalah langkah-langkah MISP:

1. Mengembangkan visi...Kita mau jadi apa?
2. Menganalisis situasi sekarang...Kita ada dimana sekarang?
3. Menentukan cita-cita, tujuan, dan sasaran...Kita mau kemana dan kapan?
4. Membuat strategi-strategi pembangunan...Bagaimana kita bisa ke sana?
5. Membuat Program Investasi, Mekanisme Pelaksanaan, Agenda Aksi (termasuk Agenda Legislatif)...Bagaimana kita menjamin bahwa tujuannya tercapai?
6. Membuat cara untuk pemantauan dan evaluasi...Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang berhasil?

MISP dan NCSD

Suatu badan pihak-pihak yang berkepentingan telah terbukti sebagai mekanisme yang paling baik untuk memulai dan memantau proses perencanaan berkelanjutan dan memastikan pelaksanaan dan pembaharuannya. Mekanisme ini, yang pada umumnya disebut Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan (NCSD), sudah dibentuk di kurang-lebih 70 negara. Pengalaman positif dari NCSD mendorong negara lain untuk membentuknya. Biasanya, NCSD dibentuk apabila suatu negara memutuskan untuk membentuk NSSD dengan cara yang paling tepat guna.

Keinginan politik dan keperluan-keperluan lain

Keinginan politik merupakan unsur paling penting untuk menyiapkan dan melaksanakan NSSD. Tanpanya, MISP tidak bisa jalan, atau hanya bisa menyelesaikan sedikit saja. Keinginan politik harus datang dari dua tingkat: pimpinan resmi dan masyarakat.

Bahkan, proses MISP membutuhkan hampir semua, bila tidak semua, dari hal-hal berikut ini untuk menjadi efektif dan menghasilkan NSSD yang diharapkan:

- Perwakilan semua pihak yang berkepentingan dalam tim perencanaan. Pihak-pihak yang berkepentingan harus mencari dan mengejar hal-hal yang baik dan kepentingan masyarakat walaupun kepentingan-kepentingannya berbeda.
- Para perencana harus bertanggungjawab, mempunyai komitmen dan bisa bekerja dalam tim, yaitu mereka mau mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat-pendapat dan keprihatinan rekan kerjanya.
- Pemimpin yang dinamis bisa menghadapi dan menimbang keprihatinan pihak-pihak yang berkepentingan secara kritis.
- Sekretariat yang dapat memberikan dukungan yang efektif dan tepat guna.
- Rencana pelaksanaan yang jelas untuk rencana kerja itu sendiri.
- Kemajuan perencanaan harus dipantau terus-menerus.

1 Dewan Bumi (Earth Council) adalah suatu LSM internasional yang mempromosikan keberlanjutan dengan membantu mengembangkan rencana-rencana, program-program, mekanisme-mekanisme dan proses-proses keberlanjutan masing-masing.





Sumber Daya Alam Timor Lorosa'e **Suatu Tinjauan mengenai Keadaan Fisik, Geografis dan Ekologis**

Mario R. Nunes

Manajer Badan Kehutanan, ETTA, Presiden East Timor Forestry Group (ETFOG)

Keadaan geografis

a. Letak, batas dan luas wilayah

Secara geografis Timor Lorosa'e terletak di ujung timur P. Timor, membentang antara garis 123°25' dan 127°19' bujur timur, antara 8°17' dan 10°22' lintang selatan. Luas keseluruhan wilayah Timor Lorosa'e lebih kurang 14.609,38 km² yang meliputi: wilayah dataran seluas 13.670 km², wilayah Ambeno seluas 787,50 km², Pulau Atauro seluas 140,625 km² dan Pulau Jaco seluas 11,250 km².

Timor Lorosae mempunyai batas wilayah sbb:

- Sebelah utara berbatasan dengan selat Wetar dan selat Ombai.
- Sebelah timur berbatasan dengan selat Maluku
- Sebelah selatan berbatasan dengan laut Timor
- Sebelah barat berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur.

b. Topografi

Dari prospektif topografis, wilayah Timor Lorosa'e sebagian terdiri dari daerah-daerah pegunungan yang terbentang dari timur ke barat. Bentangan-bentangan pegunungan ini ada kalanya terputus, sehingga membentuk lembah-lembah dan jurang-jurang yang dalam. Ditengah mengalir banyak sungai kecil yang sangat mempersulit transportasi. Tanahnya banyak mengandung kapur, karang, tanah liat yang pekat, pasir dan hanya sedikit yang tergolong tanah vulkanik.

Di Timor Lorosae terdapat tujuh buah gunung yang ketinggiannya lebih dari 2000 m dpl seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Nama Gunung	Distrik	Tinggi diatas permukaan laut
1. Tatamailau	Ainaro	2.963 meter
2. Sabiria	Aileu	2.495 meter
3. Usululi	Baucau	2.620 meter
4. Harupai	Ermera	2.293 meter
5. Cablake	Manufahi	2.495 meter
6. Laklo	Manatuto	2.050 meter
7. Matebian	Baucau	2.373 meter

Secara garis besar aliran sungai yang terdapat di Timor Lorosa'e dapat dikelompokkan menjadi dua buah daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS utara dan DAS selatan. Dari berbagai sungai yang ada terdapat beberapa sungai yang airnya dapat mengalir sepanjang tahun yaitu sungai Laklo di distrik Manatuto, sungai Seical di Distrik Baucau, sungai Bulobo, Marobo, Malibaka dan Nunura di Distrik Bobonaro; sungai Gleno di Distrik Ermera; sungai Karau Ulun di Distrik Manufahi; sungai

Dilor, Uca, Uwetoko, Bebui dan Irabere di Distrik Viqueque; sungai Loes di Distrik Liquiça dan sungai Tono di Distrik Ambeno.

Iklim di Timor Lorosa'e pada umumnya tergolong iklim tropis dengan suhu minimum 18°C - 21°C sedangkan suhu tertinggi bervariasi antara 26°C - 32°C. Di bagian utara sampai di Baucau, musim hujan pada bulan Nopember dan pada umumnya diikuti dengan angin barat (muson), bulan Mei dan Oktober merupakan peralihan. Bulan September merupakan musim kemarau.

Berbeda keadaannya, di bagian timur dan selatan, musim hujan turun pada pertengahan bulan April tahun berikutnya. Bulan Mei merupakan musim kemarau dan awal Juni sampai Agustus merupakan musim hujan kembali. Apabila di Australia sedang musim dingin (Agustus-Oktober), kadang-kadang suhu di Timor Lorosa'e turun sampai 18°C.

Begitu pula sebaliknya, apabila di Australia sedang musim panas, di daerah pesisir, suhu menjadi tinggi walaupun musim hujan.

Keadaan Ekologis Timor Lorosae

Keadaan ekologis Timor Lorosae sesuai dengan kondisi topografinya banyak didominasi oleh ekosistem laut dan pesisir, habitat darat, dan keanekaragaman hayati di daerah pegunungan.

a. Ekosistem laut dan pesisir

Laut Timor Lorosa'e terdapat bermacam macam ikan yang bernilai ekonomis tinggi seperti (tongkol, cakalang, tenggiri, kakap dsb) yang dapat dimanfaatkan secara bekesinambungan untuk mendukung ekonomi nasional. Pada daerah pesisir terutama di pantai utara dan timur terdapat terumbu-terumbu karang yang hidup berbagai macam biota laut dan merupakan obyek pariwisata alam yang tinggi nilai jualnya.

Terdapat pula hutan bakau di pantai utara Timor Lorosa'e yang masih utuh dan tempat habitat beberapa burung laut, kelelawar dan lain sebagainya, dan di beberapa pantai seperti pantai Tutuala dan P. Jaco terdapat tempat bertelur beberapa jenis penyu.

b. Habitat darat

Habitat darat di Timor Lorosa'e terdapat perbedaan flora antara bagian utara, selatan dan timur dan daerah pegunungan. Di bagian utara didominasi oleh jenis-jenis seperti *Eucalyptus alba*, *Tamarindus indicus* dan beberapa jenis perdu yang dapat tumbuh pada kondisi tanah yang kering dan curah hujan minim.

Di bagian timur dan selatan terdapat kondisi flora yang lebih bervariasi dimana didominasi oleh *Canarium*, Kayu merah (*Pterocarpus indicus*), *Chamaecarpus* (*Taona sureni*) dan jenis kayu komersial lainnya yaitu Jati (*Tectona grandis*). Terdapat juga beberapa jenis angrek, tumbuhan bawah sangat variatif. (sebagai contoh: keadaan flora di ujung Timor Lorosa'e yaitu di gunung Paicau bagian utara terdapat sisa-sisa hutan hujan tropika basah dimana kelembaban di tempat itu sangat tinggi, namun sangat lebat namun sangat kering dan tidak ada air).

Pada daerah pegunungan atau dataran tinggi didominasi oleh *Eucalyptus urophylla* dan beberapa jenis tanaman paku-pakuan. Ada beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh tersebar merata di seluruh wilayah antara lain: Cendana (*Santalum album*), Cemara (*Casuarina equisetifolia*).

Fauna Timor Lorosa'e terdiri dari beberapa jenis mamalia seperti: Rusa (*cervus timorensis*), Kuskus, babi

hutan, kera, Reptilia seperti: buaya, ular sanca timor, biawak dls; Aves seperti: Kakoak, Lori, Kakatua, Elang darat, Elang laut, Perhutut dls.

Keadaan Aktual

Karena begitu lama Timor Lorosa'e berada di bawah kekuasaan orang lain maka sumber daya alam di negara ini pengelolaannya tidak mendapat perhatian yang serius sehingga sampai hari ini ada beberapa jenis tumbuhan dan hewan khas Timor Lorosa'e terancam punah bila tidak mendapat perhatian dari semua orang Timor Lorosa'e. Sebagai contoh kayu cendana, jati, beberapa jenis burung (kakatua, loriku, elang, kakoak dll).

Jadi kalau kita mau membangun Timor Lorosa'e lebih baik bagi masa depan maka perlu diperhatikan semua faktor supaya tidak merusak lingkungan di Timor Lorosa'e.

Pelestarian Keanekaragaman Hayati- Masalah-Masalah Kritis untuk Negara-Negara Kecil yang Sedang Berkembang

Dr. Graham Baines
Environment Pacific

Supaya berhasil dan bertahan lama, pelestarian keanekaragaman hayati harus menjadi bagian yang sangat penting dari pembangunan ekonomi dan sosial. Memang tidak mudah menerapkan cita-cita tersebut. Keperluan-keperluan Timor Lorosa'e mungkin lebih baik dipenuhi dengan serangkaian langkah-langkah jangka pendek, dan strategi yang lebih panjang dan terinci baru dibentuk sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang didapat dari fase pertama tersebut. Berdasarkan kesamaan dengan negara-negara Kepulauan Pasifik, ada beberapa masalah penting yang diajukan sebagai dasar pembicaraan.

Keanekaragaman hayati terdiri dari banyak tanaman dan binatang yang memberi dasar bagi kehidupan. Beberapa tanaman dan binatang ini digunakan langsung oleh manusia untuk makanan, obat-obatan, pakaian, dan perumahan. Yang lain bermanfaat secara tidak langsung, misalnya binatang kecil dan bakteri di lapisan tanah membuat tanah subur; pohon hutan memperlambat jatuhnya hujan, dan membantu air masuk tanah dan mengalir ke sungai-sungai kecil. Pelestarian alam adalah bagian dari pembangunan. Kata "melestarikan" kebetulan berarti "memakai sumber daya alam secara hemat".

Keanekaragaman hayati Timor Lorosa'e sudah sangat berkurang. Tidak realistis untuk mengharap bahwa semuanya yang sudah hilang dapat dikembalikan lagi, tetapi sebagian mungkin dapat direstorasi. Pelestarian alam tidak hanya termasuk "daerah terlindung", tetapi apabila berhasil, konsep pelestarian keanekaragaman hayati harus terlibat dalam suatu program pembangunan berkelanjutan, didukung oleh proses perencanaan yang bersifat keikutsertaan masyarakat. Pernah diusulkan bahwa Timor Lorosa'e seharusnya pertama menekan pada 1) dukungan terhadap intervensi untuk pemakaian dan pengurusan keanekaragaman hayati tanah dan laut oleh masyarakat pedesaan, dan sementara itu, 2) melaksanakan strategi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup yang menuntun dan mengurus pembangunan perkotaan dan industri.

Langkah-langkah pertama sebaiknya adalah:

- Menghadapi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat dalam pemakaian konsep keanekaragaman hayati;
- Berusaha supaya kecenderungan berkurangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya alam diperlambat;
- Menegakkan kecenderungan pemakaian sumber daya alam tanah dan laut yang bersifat berkelanjutan;
- Memperkenalkan cara-cara untuk melindungi sumber-sumber air dan penampungan air;
- Menjamin supaya pembangunan industri dan perkotaan direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan metode-metode "best-practice" yang mencegah kerusakan sumber-sumber alam di tanah dan di laut;
- Memperkenalkan jenis-jenis binatang dan tempat-tempat yang bersifat keanekaragaman hayati;
- Membuat penelitian mengenai keadaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, dan hak-hak dan hubungan masyarakat setempat terhadapnya;
- Mengambil ciri-ciri kuatnya pengelolaan dan pengetahuan tradisional terhadap sumber daya alam.

Keperluan-keperluan pelestarian alam tidak disebut secara terinci di daftar tadi. Beberapa kebutuhan tersebut akan muncul di tahap pertama, dan bisa ditangani dengan diberlakukannya beberapa strategi

perlindungan yang sederhana. Pelestarian alam akan menjadi bagian yang sangat penting dari strategi-strategi jangka waktu pendek dan menengah, yang akan dikembangkan di kemudian hari.

Di negara-negara kepulauan Pasifik, keanekaragaman tidak bisa dianggap terpisah dari keanekaragaman budaya. "Sejak lama dasar kepulauan Pasifik adalah hubungan di antara peseorangan, suku, dan lingkungan hidup".

Ada beberapa persoalan yang harus ditangani pemerintahan Timor Lorosa'e yang juga terlihat di negara-negara kepulauan kecil yang lain. Dari pengalaman negara-negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah kritis termasuk:

1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan-kebutuhan pembangunan ekonomi tanpa lebih merusak lagi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.
2. Memperbarui potensi tempat-tempat tanah dan laut yang sudah rusak, supaya bisa digunakan untuk menghasilkan sumber daya alam, memelihara proses-proses ekologi penting, dan mempertahankan keanekaragaman genetika.
3. Memelihara kualitas lingkungan tanah dan laut supaya tetap menghasilkan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi semua warga negara.
4. Memahami dan menghargai pentingnya

keanekaragaman hayati genetika, jenis-jenis binatang, dan ekologis.

5. Mencari cara yang baik untuk mencocokkan sistem-sistem hak pemilikan tanah dan laut yang tradisional dengan kerangka pembangunan masyarakat dan pembangunan nasional. Sementara itu, memanfaatkan pengetahuan dan cara tradisional dalam pendekatan pembangunan yang baru, yang mengambil sifat baiknya tradisi, diperkuat dengan pengetahuan dan cara-cara moderen.

Ada tanda-tanda bahwa Timor Lorosa'e mempunyai kesempatan untuk mendirikan dan mengikuti jalan pembangunan berkelanjutan- akan tetapi, kesulitan-kesulitannya memang banyak. Berdasarkan pengalaman di tempat lain, ancaman keberhasilan dalam bidang pembangunan berkelanjutan datang dari tekanan untuk mencari untung dengan cepat tetapi tidak bersifat berkelanjutan dari sumber daya alam, dan juga dari ketidaktahuan tentang nilai dan peran keanekaragaman hayati dalam pembangunan. Selama tahun 60-an dan 70-an beberapa negara-negara kepulauan Pasifik menyadari akan pentingnya keanekaragaman hayati. Keberhasilannya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati kurang dari yang diharapkan. Walaupun demikian, ada beberapa contoh pelestarian keanekaragaman hayati dari negara-negara tersebut yang mungkin bermanfaat di Timor Lorosa'e.

Pembangunan Kehutanan yang Berkelestarian

Jorge Rui Martins

Badan Kehutanan, ETTA, East Timor Forestry Group (ETFOG)

Latar Belakang

Hutan di negara berkembang pada umumnya merupakan sumber bahan bakar di samping lahan untuk berladang, lebih kurang 1,5 milyar penduduknya menggunakan kayu untuk memasak dan pemanasan sebesar satu milyar meter kubik, atau sekitar 80% dari yang di butuhkan (di luar untuk ekspor) setiap tahunnya. Di Republik Korea untuk konsumsi energi alternatif membutuhkan 15% dari biaya rumah tangganya, bahkan di daerah Andes dan Sahel mencapai 25%, Keadaan ini memaksa penduduk miskin untuk mempergunakan kayu bakar yang di perolehnya dari hutan. Kawasan penggembalaan di dunia meliputi tiga trilyun hektar atau dua puluh tiga persen dari luas daratan bumi.

Desertifikasi atau perubahan kawasan bervegetasi menjadi gurun pasir akibat penggembalaan liar, terjadi di Sahel-Afrika, Sudan Afrika-Utara, daerah Mediteranin, dan Timur Tengah, di Himalaya dan Andes. Kegiatan ini menimbulkan bencana erosi dan penurunan kualitas tanah dan merusak hutan. Tekanan penduduk terhadap lahan hutan di daerah aliran sungai untuk lahan pertanian, berdampak positif bagi penggarapnya dalam kurun waktu yang relatif singkat, 2-3 tahun, namun dampak negatifnya berupa menurunnya kualitas lingkungan, timbulnya bencana longsor, banjir dan erosi,

serta kekurangan air di musim kemarau. Hutan Hujan Tropis di Timor Lorosa'e sebagai ekosistem yang unik, merupakan penyangga bagi kehidupan, dan pemanfaatannya perlu di kaji menurut fungsinya. Kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi dengan hutan kita di masa yang akan datang, kita hanya bisa menduga dari kejadian yang sedang kita alami, terhadap malapetaka yang mungkin muncul, seperti : kekurangan zat asam, penipisan lapisan ozon, pemanasan bumi, kenaikan permukaan laut, dan punahnya berbagai jenis kehidupan liar yang terlibat aktif dalam proses daur ulang secara alami di hutan. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hutan pada dasarnya di tujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi bangsa, namun distribusi dari kesejahteraan tersebut belum merata. Masyarakat kecil dan penduduk yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan masih sangat sedikit yang dapat menikmatinya, penebangan liar yang di lakukan oleh penduduk kayunya di tampung dan di selundupkan oleh oknum pengusaha yang tidak bertanggung jawab, adalah salah satu indikator dari kesenjangan yang terjadi di lapangan antara pemilik modal/pengusaha dan penduduk setempat.

Keadaan dan Luas Wilayah

Berdasarkan letak geografis Timor Lorosa'e terletak di antara 8°17'-10°22' LS dan 123°25'-127°19' BT, keadaan umum mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah bertani dan beternak. Luas total wilayah negara ini adalah 14.609 km² dengan luas kawasan hutannya berdasarkan TGHK adalah 699.000ha dengan lahan kritis 91%(HTI, Timor-Timur,1998). Luas hutan produksi tetap 45.211ha, sebagian besar berupa padang rumput, savana, dan semak belukar. Untuk industri kayu perkakas dengan kapasitas produksi sedang, tiap tahun minimal membutuhkan bahan baku sebesar 6000 m³ atau setara dengan 12000 m³ atau sebanding dengan 21500 volume tegakan setelah di perhitungkan faktor koreksi 70% dan faktor eksploitasi 80% (statistik kehutanan Timor-Timur, 1998). Saat ini kebutuhan kayu untuk kebutuhan rekonstruksi nasional masih di datangkan dari luar negara Timor-Lorosa'e.

Permasalahan Kehutanan di Timor-Lorosa'e

Permasalahan

Berdasarkan data penelitian di lapangan saat ini permasalahan kehutanan yang ada di negara Timor Lorosa'e adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya garis kebijakan struktur pemerintahan yang kuat dan berwibawa dalam bidang kehutanan.
2. Masih terbatasnya dana yang berasal dari anggaran pemerintah untuk implementasi kegiatan kehutanan.
3. Masih terbatasnya perangkat struktur organisasi kehutanan, dalam hal pengadaan staff national, di sebabkan oleh alasan-alasan administrasi, finansial dan lain-lain. Perangkat staff ini memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan kehutanan di seluruh wilayah negara.
4. Tidak adanya mekanisme pemerintahan yang kuat dalam hal implementasi peraturan-peraturan pemerintah yang saat ini telah ada.
5. Tidak tersedianya data potensi luar dan potensi dalam dari kawasan hutan yang akurat bagi seluruh kawasan hutan di negara Timor- Lorosa'e.
6. Tingginya angka pengangguran sehingga tekanan terhadap eksploitasi hasil hutan meningkat, seiring dengan membumbungnya harga bahan bakar minyak, maka salah satu alternatif untuk pembakaran rumah tangga harus di andalkan dari pemanfaatan hasil hutan yang tersedia.
7. Tingginya angka penebangan liar yang merata hampir di seluruh wilayah negeri ini.
8. Tidak adanya survey dan inventarisasi hutan potensi hutan untuk kepentingan pengadaan data kehutanan nasional.
9. Belum adanya sistem nasional yang mengatur tentang kepemilikan lahan (land tenure).
10. Dalam periode transisi saat ini bidang kehutanan tidak menjadi salah satu prioritas dalam alokasi dana pembangunan dari bank dunia.

Peluang dan Strategi

Peluang

Devisi Agriculture Affairs dengan seksi Forestry Unit sebagai organ tunggal yang memegang tanggung jawab penuh saat ini untuk mengembangkan kegiatan kehutanan di negara ini sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan transisi, telah berupaya keras untuk mengembangkan suatu sistem kehutanan nasional yang terpadu dan efisien dengan menyiapkan program-program yang merupakan peluang bagi penyelesaian masalah-masalah kehutanan nasional.

Peluang-peluang tersebut di antaranya adalah:

1. Telah di keluarkannya peraturan pemerintahan transisi no.2000/17, tentang pelarangan penebangan kayu secara liar dan ekspor hasil hutan ke luar negara Timor Lorosa'e.
2. Telah pula di keluarkan peraturan pemerintahan transisi no.2000/19, tentang daerah-daerah perlindungan alam dan konservasi.
3. Peraturan pengelolaan hutan secara lestari yang akan merupakan acuan nasional dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan, sekaligus adalah perangkat aturan kebijakan pemerintah nasional dalam pengelolaan hutan.
4. Terdapatnya LSM lokal dan internasional yang memiliki program pembangunan kehutanan .
5. Adanya sokongan dana dari dunia internasional dalam pengembangan hutan dan kehutanan nasional.
6. Adanya profesional group dalam bidang kehutanan yang siap mengabdikan diri bagi pembangunan kehutanan.

Strategi

Kegiatan pemanfaatan dan pengusahaan hutan harus di pandang sebagai upaya pemanfaatan sumber daya hutan sesuai dengan fungsinya, yang berlandaskan kepada anggapan bahwa sumber daya hutan pada dasarnya merupakan bagian dari suatu sistem.

Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam upaya pemanfaatan dan pengurusan hutan ini adalah :

Teknis:

Pemanfaatan sumber daya hutan harus benar-benar di sesuaikan dengan fungsi dan keadaan hutannya menurut hasil inventarisasi hutan. Dalam penentuan sistem silvikultur yang akan di terapkan, hendaknya benar-benar di uji di lapangan dan bukan berlandaskan teori saja. Selain itu pembangunan hutan tanaman hendaknya hanya pada hutan yang benar-benar tidak produktif saja, yaitu: lahan hutan yang berbentuk tanah kosong, semak belukar, dan hutan kritis.

Ekonomis:

Pemanfaatan dan pengawasan sumber daya hutan harus di lakukan sedemikian rupa agar secara



ekonomis dapat di pertanggung jawabkan. Pemanfaatan yang bersifat ekonomis ini hendaknya di lakukan pada setiap macam pengurusan hutan menurut fungsinya dan tidak hanya pada hutan produksi saja. Untuk keperluan tertentu di perlukan adanya kejelasan mengenai besarnya nilai hutan serta hak dari nilai tersebut.

Sosial:

Pemanfaatan dan pengurusan sumber daya hutan harus mampu memberikan manfaat sosial yang memadai, terutama kepada masyarakat kecil yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Manfaat sosial tersebut dapat di peroleh melalui: penyediaan lapangan kerja, pengukuhan terhadap hak-hak masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya tertentu yang terdapat dalam hutan, sehingga akan berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar hutan, yang pada gilirannya di harapkan akan mampu

meningkatkan partisipasinya dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Politik:

Kebijakan Nasional yang akan di ambil dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengurusan sumber daya hutan harus bersifat menunjang bagi terselenggaranya kebijakan politik daerah maupun nasional yang pada dasarnya bertujuan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat secara utuh dan tercapainya stabilitas dinamis kehidupan berpolitik.

Institusi:

Peningkatan peran dan partisipasi serta koordinasi di antara lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemanfaatan dan pengurusan sumber daya hutan baik instansi pemerintah, koperasi, dan swasta.



Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan di Dunia yang Sedang Berubah

Ringkasan

Dr. Don Gilmour

International Union for Conservation of Nature, Laos, dan RECOFTC

Faktor-faktor penyebab perubahan-perubahan kebijakan belakangan ini

Fokus pada pembangunan berkelanjutan

Istilah “pembangunan berkelanjutan” sering dipahami secara berbeda-beda tergantung pada persepsi-persepsi dari kelompok-kelompok yang kepentingannya berbeda-beda. Sebagaimana digunakan dalam makalah ini, istilah ini mengacu kepada definisi yang diberikan dalam “*Caring for the Earth*”:

“.....memperbaiki kualitas kehidupan manusia sambil hidup dalam kapasitas ekosistem pendukung”

Terdapat tujuan yang jelas dalam definisi ini, untuk secara eksplisit menyatukan baik kesejahteraan umat manusia maupun komponen-komponen biofisika yang sering termasuk dalam diskusi-diskusi tentang pembangunan berkelanjutan.

Pihak-pihak berwenang dalam pengelolaan hutan telah menjawab fokus global pada pembangunan yang berkelanjutan dengan mencakup sebuah perubahan penting dalam kebijakan kehutanan; dari kebijakan yang menekankan ketetapan berkelanjutan dari produk-produk yang dominan, terutama serabut kayu, kepada yang menekankan pengelolaan sebuah sistem sumber daya alam yang kompleks dan berharga, yang menghasilkan campuran luas barang dan jasa.

Globalisasi

Globalisasi ekonomi dunia (khususnya pembukaan ekonomi-ekonomi nasional pada kekuatan-kekuatan pasar internasional) telah menciptakan perubahan keadaan ekonomi yang mengharuskan perubahan-perubahan pada pengaturan institusional untuk pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan-kebijakan penyesuaian struktur dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia telah menjadi pengaruh utama yang mendorong perubahan-perubahan ini di negara-negara yang sedang berkembang dan negara-negara dengan ekonomi dalam transisi. Akan tetapi, keperluan yang sama sedang mempengaruhi negara-negara lain melalui pendorong yang berhubungan untuk rasionalisasi ekonomi.

Kebanyakan negara sedang menjalani proses-proses pembaharuan kebijakan dan ada beberapa tema yang bersamaan dalam arah proses-proses ini. Pemerintah-pemerintah sedang memperkecil (mengurangi bentuk birokrasi mereka) dan melakukan desentralisasi dalam pembuatan keputusan atas pengelolaan hutan dari tingkat yang atas sampai tingkat yang lebih rendah, dan (dalam banyak kasus) memindahkan tanggung jawab (dan kadang-kadang kekuasaan) pada berbagai elemen masyarakat sipil seperti LSM dan masyarakat lokal.

Hak-hak masyarakat pribumi dan lokal.

Di seluruh dunia pengakuan yang meningkat mengenai hak-hak orang-orang pribumi dan masyarakat lokal, berkenaan dengan keterlibatan mereka dalam

pembuatan keputusan tentang pengelolaan sumber daya alam di mana mereka melaksanakan hak tertentu, mulai tumbuh. Khususnya dalam situasi dimana masyarakat pribumi hidup dalam dan di sekitar hutan dan menggunakan sumber daya hutan untuk tujuan penyambung hidup atau untuk menghasilkan pendapatan tunai. Tindakan-tindakan pemerintah di masa lalu yang menasionalkan hutan sering kali mencabut hak dari orang-orang ini dan mengesampingkan mereka “di luar” hukum. Hak-hak masyarakat lokal yang pribumi semakin diakui di dalam perdebatan-perdebatan kebijakan nasional.

Jawaban-Jawaban yang Praktis Terhadap Perubahan Kebijakan Untuk Mencapai Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan

Suatu akibat dari perubahan fokus kebijakan yang diuraikan diatas adalah bahwa pengelolaan menjadi lebih cangguh (dan menantang) jika para manajer berusaha untuk menyeimbangkan banyak tujuan, dan bekerja dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Pengelolaan secara Bersama-sama

Selama beberapa dekade yang lalu, pemerintah-pemerintah di seluruh dunia telah mengadopsi berbagai bentuk pengelolaan bersama atas sumber daya alam, dalam usaha untuk mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan. Di beberapa negara pendekatan-pendekatan ini telah tersebar luas dan dimasukkan ke dalam kebijakan nasional dan diterjemahkan ke dalam program-program lapangan berskala besar.

Ungkapan “pengelolaan bersama” menjadi semakin populer sebagai suatu deskripsi umum untuk jajaran pendekatan-pendekatan yang melibatkan semacam bentuk kerjasama di antara pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan yang lain, khususnya kelompok-kelompok yang mata pencahariannya berkaitan erat dengan sumber daya alam. Fisher (1995) telah menyarankan bahwa pendekatan-pendekatan kerjasama terhadap pengelolaan sumber daya alam seharusnya memuat pengakuan atas:

- Keperluan untuk menyatupadukan perlindungan alam dan pembangunan
- Legitimasi hak-hak dari orang-orang lokal untuk menjamin masa depan ekonomi mereka
- Manfaat dari keterlibatan aktif orang lokal dalam rangka pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan.

Pengelolaan bersama mengacu pada¹

- Pengaturan pengelolaan yang dinegosiasikan oleh banyak pihak yang berkepentingan dan berdasarkan serangkaian hak dan hak istimewa (persetujuan akan hak atas tanah²) yang diakui oleh pemerintah dan diterima secara luas oleh para pengguna sumber daya alam; dan,
- Proses untuk membagi kekuasaan diantara para pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan dan menjalankan kontrol atas penggunaan sumber daya alam.

Jadi pengelolaan bersama-sama adalah sesuatu yang dilakukan oleh banyak pihak yang berkepentingan. Sifat ini dengan sendirinya menunjukkan perbedaan utama dari bentuk-bentuk pengelolaan yang lebih konvensional dimana satu pihak menjadi penanggungjawab satu-satunya atas pembuatan keputusan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lain tinggal di pinggiran.

Biasanya pendekatan terhadap pengelolaan diikat dengan hak atas tanah yang mendefinisikan ikatan dan alokasi hak dan hak istimewa untuk menggunakan sumber daya alam (Fisher 1995).

Pada umumnya, berbagai sistem hak atas tanah dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori; tanah milik negara, milik pribadi, milik bersama, dan milik terbuka. Tentu saja, pengakuan pada hak atas tanah tergantung pada siapa yang menuntut. Negara boleh tidak mengakui beberapa hak pribadi atau hak komunal yang diterima oleh para pengguna sumber daya alam lokal dan sebaliknya pengguna-pengguna lokal boleh tidak

menghargai beberapa tuntutan kepemilikan yang dibuat oleh negara melalui berbagai dewan pemerintahan. Sewaktu-waktu, tuntutan-tuntutan baru akan timbul atau yang lama akan dipertanyakan. Ketika ada persengketaan terhadap hak dan hak istimewa pribadi, pengelolaan menjadi problematis karena akan ada kurang kepercayaan apakah keputusan-keputusan yang dibuat oleh setiap pihak akan disetujui dan diikuti.

Pengelolaan secara bersama-sama berarti bahwa pemerintah dan para pengguna sumber daya alam bersetuju tentang hak atas tanah sehingga didirikan berdasarkan kepercayaan dan legitimasi untuk pengelolaan. Kerjasama tersebut berarti bahwa akan ada kemauan untuk menyelesaikan pertentangan dan upaya untuk menegosiasikan urusan hak atas tanah yang dapat diterima. Secara aktif atau pasif, pemerintah biasanya berperan dalam sistem pengelolaan bersama, walaupun ia terbatas pada hanya mengizinkan alokasi hak dan hak istimewa untuk penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam.

¹Definisi ini mengecualikan situasi di mana pengguna lokal mengelola sumber daya alam yang dituntut di bawah pemilikan-negara, tanpa izin lebih dulu dari pemerintah. Sistem-sistem semacam ini, yang disebut sistem pengelolaan "asli atau tradisional", seringkali berhasil dan melibatkan banyak kerjasama antara para pengguna. Namun begitu, definisi yang dipakai di sini akan meliputi saja urusan bekerjasama yang dikesahkan dan dikuatkan oleh pengakuan dari pemerintah. Patut ditegaskan bahwa identifikasi sistem pengelolaan asli dan perkembangan kekuatannya merupakan langkah kritis menuju pendirian sistem pengelolaan yang diizinkan oleh pemerintah.

²Tenurial arrangements tidak perlu formal – bisa ad hoc (khusus untuk s.s.t maksud) atau tacit (tahu sama tahu)

Referensi

Fisher, R.J. (1995) Collaborative management of forests for conservation and development. Issues in Forest Conservation. IUCN and WWF, Gland, Switzerland.

Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Hutan-Hutan di Timor Lorosa'e

Adalfredo do Rosario Ferreira

Badan Kehutanan, ETTA dan East Timor Forestry Group (ETFOG)

Latar Belakang

Menurut konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup dan Pembangunan, yang diadakan di Rio de Janeiro, bulan Juni, 1992, terdapat dua masalah lingkungan hidup yang utama: pemanasan dunia, atau perubahan cuaca, dan keanekaragaman hayati. Di Timor Lorosa'e, pembangunan kembali membutuhkan pemakaian sumber-sumber alam, tetapi pemakaian secara tidak berkelanjutan dan eksploitasi berarti hilangnya yang tidak dapat diperoleh kembali keanekaragaman hayati genetik, jenis-jenis binatang dan tumbuhan, dan sistem ekologi. Untuk memperhentikan keadaan demikian, penggunaan sumber-sumber alam harus bersifat berkelanjutan secara ekologi, ekonomi, dan sosial.

Selama pendudukan dan administrasi Indonesia, pemerintah mendirikan kebijaksanaan pelestarian lingkungan hidup untuk Indonesia, yang termasuk Timor Lorosa'e, tetapi kebijaksanaan tersebut tidak pernah terlaksana. Sekarang di Timor Lorosa'e, pemakaian sumber-sumber alam adalah sangat penting untuk kehidupan manusia.

Masalah-Masalah:

1. Selama pendudukan Indonesia dan Portugal, tidak ada sistem atau lembaga yang bertanggung jawab atas

pengelolaan keanekaragaman hayati.

2. Pada masa lalu terjadi eksploitasi sumber-sumber alam yang tidak terhingga.
3. Belum ada penilaian, penentuan atau klasifikasi sumber-sumber alam di Timor Lorosa'e.
4. Pemberian dana dan sumber-sumber lain dibutuhkan untuk mempermudah penilaian dll.
5. Masyarakat mengandalkan pemakaian sumber-sumber alam dan harus terlibat, dikonsultasi, dan dididik tentang pemakain sumber-sumber alam secara berkelanjutan.

Tindakan:

1. Menjalankan inventarisasi sumber-sumber alam termasuk penilaian, penentuan, dan klasifikasi.
2. Pengaturan, dan penegakan hukum.
3. Pemerintah harus mengembangkan kebijaksanaan terhadap pelestarian lingkungan hidup, pembangunan, dan pemakaian sumber-sumber alam secara berkelanjutan.
4. Keterlibatan masyarakat, partisipasi, dan pendidikan-pendekatan dari bawah ke atas.
5. Memelihara hubungan dengan lembaga-lembaga internasional dan lokal (pemerintah-pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, masyarakat madani, dll).

Perspektif Asia terhadap Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan

Dr. Somsak Sukwong
RECOFTE

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kehutanan secara berkelanjutan makin diutamakan dan dilaksanakan di kawasan Asia selama beberapa tahun belakangan ini. Keterlibatan tersebut dipromosikan karena dianggap sebagai jalan praktis untuk pengelolaan hutan, dan juga karena dianggap penting untuk hak-hak manusia, dan pembangunan masyarakat. Naskah ini akan membicarakan beberapa pendekatan pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat, dari beberapa negara di kawasan Asia. Beberapa pelajaran pokok ditentukan: 1) Pentingnya peranan masyarakat dalam pengambilan keputusan, 2) Pentingnya hak-hak akses yang terjamin ke daerah perhutanan bagi masyarakat setempat dan 3) Perlunya perubahan birokrasi supaya pengelolaan dari masyarakat dapat dilaksanakan.

Selama kira-kira 20 tahun belakangan ini telah diadakan banyak percobaan dengan keterlibatan masyarakat dalam rangka pengelolaan hutan yang berkelanjutan di wilayah Asia. Ada dua alasan utama mengapa pengelolaan masyarakat dianjurkan:

- ❖ *Pengelolaan masyarakat adalah jalan praktis untuk mengelola hutan.* Pengikutsertaan masyarakat telah terlihat jelas sebagai cara yang efektif untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan. Jika kita melihat pengelolaan hutan sebagai hak untuk masuk ke dalam dan menggunakan hutan secara teratur, maka orang-orang yang tinggal dekat hutan dan memanfaatkannya tiap hari dengan jelas menjadi aktor utama. Sudah bertahun-tahun departemen-departemen berusaha untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan hutan dengan paksaan tanpa hasil yang nyata. Aksi bersama oleh masyarakat (seringkali dalam kerjasama dengan para pihak yang berkepentingan lainnya) menjadi sebuah alternatif.
- ❖ *Pengelolaan masyarakat penting bagi hak-hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat.* Rakyat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan seringkali bergantung sekali pada hasil-hasil kehutanan. Penyediaan hak untuk mendapat akses ke sumber daya alam ini penting dari sudut pandang keadilan dan juga dapat memberikan kesempatan bagi pembangunan ekonomi di tingkat masyarakat.

Tidak ada satu saja "Perspektif Asia" mengenai keterlibatan masyarakat dalam rangka pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Banyak pendekatan yang berbeda telah diambil di berbagai negara, tergantung pada keadaan sosial, ekonomi, politik dan kondisi lingkungan yang berbeda.

- ❖ Di Nepal, ada suatu program nasional berskala besar dalam mana kelompok-kelompok pengguna hutan tingkat masyarakat lokal menerima hak-hak penggunaan permanen sesuai dengan sebuah rencana pengelolaan yang dinegosiasikan dengan dan disetujui oleh departemen kehutanan. Inilah sebuah program nasional yang benar. Hingga saat ini lebih dari 700.000 ha hutan telah diserahkan kepada kira-kira 9.700 kelompok pengguna hutan meliputi lebih dari satu juta rumah tangga. Hal ini terjadi di negara dengan penduduk yang berjumlah 20 juta. Hasil-hasilnya sejauh ini sangat bagus, baik dari segi kondisi hutan maupun hasil pembangunan pedesaan.
- ❖ Di beberapa negara bagian India terdapat suatu

Program Pengelolaan Hutan Bersama melalui mana kelompok-kelompok masyarakat menerima hak untuk mendapat produk-produk hutan dan beberapa keuntungan ekonomi sebagai imbalan jasa bagi kegiatan – kegiatan perlindungan dan reboisasi hutan.

- ❖ Di Thailand terdapat banyak program perlindungan dan pengelolaan hutan masyarakat. Hal ini pada umumnya diprakarsai secara lokal dan terjadi tanpa dukungan perundangan-undangan, tetapi dengan dukungan dari masyarakat sipil dan simpatisan pejabat-pejabat kehutanan.
- ❖ Di Vietnam dan beberapa negara yang menjalankan ekonomi sosialis dan pasca-sosialis yang lain, tanah kehutanan sedang ditransfer kepada masyarakat setempat untuk tujuan pengelolaan. Hal ini pada umumnya terjadi pada tingkat individu daripada di tingkat masyarakat dan ada beberapa kesulitan terkandung didalamnya.

Walaupun kasus-kasus ini sungguh beraneka ragam, dan belum ada satupun contoh pengelolaan hutan masyarakat, atau kemungkinan suatu contoh akan muncul di masa depan, ada beberapa pelajaran umum yang bisa diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang beraneka ragam ini.

- ❖ Istilah 'keikutsertaan' digunakan dengan banyak cara, mulai dari manipulasi sampai pemaksaan, melalui penggunaan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja belaka dan "meyakinkan mereka" akan nilai atau manfaat hutan, hingga memperbolehkan mereka benar-benar mengambil suatu peranan dalam pembuatan keputusan (diartikan sebagai penetapan tujuan pengelolaan). Pengelolaan hutan masyarakat yang berhasil memerlukan sejumlah masukan dari masyarakat dalam pembuatan keputusan.
- ❖ Kemungkinan diadakan pengelolaan masyarakat yang efektif meningkat ketika masyarakat mempunyai hak yang terjamin untuk mendapat hasil hutan. Ini tidak perlu berbentuk "kepemilikan" yang mutlak, tetapi bisa juga dalam bentuk hak penggunaan yang terjamin atau persetujuan-persetujuan yang dinegosiasikan antara pemerintah dan masyarakat.
- ❖ Pelaksanaan pengelolaan masyarakat berskala besar memerlukan suatu perubahan pola model pada pihak pejabat kehutanan, dari peran-peran kebijakan dan "teknosentris" (mengutamakan teknologi) menuju peran fasilitator. Oleh karena itu perubahan institusional (birokratis) merupakan suatu tantangan utama, jika bukan yang paling utama, dalam melaksanakan pengelolaan masyarakat.

Sumber Air Tawar Dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Secara Terpadu

Alvaro Abrantes

Badan Air Bersih dan Sanitasi (Water and Sanitation), ETTA

Air merupakan faktor utama dalam kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lain. Oleh karena itu, air seharusnya dilindungi dan sifat kelanjutannya dijaga, demi kelangsungan hidup, dan kuantitas dan kualitas air.

Pusat perkotaan dan pedesaan di Timor Lorosa'e sedang mengalami kekurangan air dan menghadapi masalah dengan kualitas air. Alasan utama untuk kekurangan air tersebut dikarenakan oleh kerusakan infrastruktur pasca jajak pendapat pada tahun 1999, dan sistem air yang tidak baik dan tidak terpelihara. Pada krisis tahun 1999, semuanya dirusak, termasuk pipa masuk, kolam air, dan prasarana pembersihan air.

Banyak juga masalah yang berhubungan dengan pengelolaan daerah aliran sungai di Timor Lorosa'e. Masalah-masalah tersebut termasuk penebangan pohon dan kebakaran hutan di tempat penangkapan air, yang menyebabkan bertambahnya sedimentasi di lembah sungai. Masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan memakai cara biasa yang praktis dan sederhana. Masalah pertambahan erosi dan sedimentasi biasanya muncul karena hujan dan ciri-ciri lembah sungai, dan sangat terpengaruh oleh perubahan pemakaian tanah disebabkan oleh intervensi manusia.

Masalah utama sumber air tawar

Air merupakan komponen hidup utama untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Air juga berperan utama dalam keberhasilan pembangunan nasional maka seharusnya diakui dengan kesadaran pemerintah dan masyarakat. Masyarakat harus sadar bahwa air semakin lama semakin kurang tersedianya.

Apabila sumber air seperti sungai kecil, air tanah, sungai dan kolam air (termasuk pabrik pembersih air) tidak dilindungi dan keberlanjutannya tidak dijaga, hasilnya penurunan hasil-hasil pembangunan.

Terdapat masalah dengan pencemaran air dari bahan biologis, kimiawi, dan fisik. Misalnya, kualitas air sangat rendah di distrik Viqueque dan Manatuto. Dalam suatu penelitian yang dijalankan di Distrik Viqueque, hanya 22% dari contoh air sesuai dengan standar fisik, kimiawi, dan bakteri distrik tersebut, dan di Distrik Manatuto, hanya 25% dari contoh air sesuai dengan standar-standar yang sama. Rendahnya kualitas air tersebut merupakan beban berat bagi masyarakat setempat, bagi pengoperasian dan pemeliharaan sistem air, dan bagi sumber air sendiri.

Karenanya, sumber-sumber air tawar harus dipertahankan dalam keadaan berkelanjutan, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Pengelolaan daerah aliran sungai dan sumber air tawar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan kualitas air, dan merupakan suatu wujud usaha manusia dalam pencegahan penurunan kualitas air, dan mengupayakan agar air yang digunakan berkualitas standar.

Sekarang ini, kualitas dan kuantitas sumber-sumber air di Timor Lorosa'e sedang berkurang. Di musim kemarau, air dari mata air dan sungai berkurang sedangkan kegiatan-kegiatan manusia seperti membakar rumput dan menebang hutan bertambah. Pengurangan kualitas air disebabkan oleh pencemaran dari limbah domestik dan industri.

Di daerah pantai di Timor Lorosa'e, masyarakat juga

mengalami masalah bercampurnya air asin dengan air tawar dalam sumur.

Masalah-masalah utama terhadap kuantitas air dan pengelolaan kualitas air

- Ketidakseimbangan di antara tuntutan untuk air dan kemampuan persediaan air.
- Kekurangan dalam kualitas dan kuantitas air di musim kemarau yang disebabkan oleh pembuangan limbah domestik dan industri.
- Bertambahnya erosi dan sedimentasi disebabkan oleh buruknya keadaan tumbuhan-tumbuhan di daerah penangkapan air, yang akhirnya menyebabkan sedimentasi dan kapasitas penampungan yang lebih rendah dalam tempat penampungan air.

Kekurangan dalam kualitas dan kuantitas air dan bertambahnya sedimentasi akhirnya akan menghasilkan pengaruh yang negatif terhadap Strategi Air dan Sanitasi Nasional (WSS), karena akan meningkatkan biaya operasi untuk pabrik pengolahan air.

Tujuan

Kualitas air sudah menjadi masalah utama dalam pengelolaan sumber air, sehingga tujuan utama untuk pengelolaan kualitas air adalah untuk melindungi kualitas sumber air.

Perlindungan kualitas air harus terdiri dari rencana utama, yang harus termasuk, antara lain, standar kualitas air dan pemantauan yang terus-menerus.

Pemantauan dan pelaporan harus dapat dipercaya karena akan digunakan untuk persiapan tindakan-tindakan untuk peningkatan kualitas air.

Apabila kualitas air meningkat, kuantitas air yang terbatas dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan dan usaha-usaha penyimpanan air dapat juga tercapai.

Luasnya Rencana Utama adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebijakan, program, undang-undang, dan peraturan-peraturan pemerintah.
2. Semua program dari setiap bagian harus terdiri dari pengelolaan daerah aliran sungai, pengelolaan kualitas dan kuantitas air, pengelolaan pengendalian banjir, dan pengelolaan lingkungan sungai.
3. Perkiraan tuntutan air dari sektor pengelolaan domestik, pertanian, industri sungai, dan sektor-sektor lain yang membutuhkan air.
4. Program-program pengembangan sumber-sumber air.
5. Program-program terinci untuk melaksanakan akses terhadap air yang seimbang untuk semua jiwa penduduk di lembah air.

6. Analisa dampak lingkungan untuk pelestarian lingkungan hidup, kebutuhan-kebutuhan, dan metode-metode.

Kesimpulan

Air merupakan komponen utama untuk kelangsungan hidup. Sumber air seharusnya dilindungi dan tetap dijaga sifat berkelanjutannya, baik dari aspek kualitas, maupun kuantitas.

Satu cara untuk mencapai tujuan demikian adalah dengan melaksanakan pengelolaan kualitas dan kuantitas sumber air sesuai dengan Rencana Utama, yang didirikan untuk pengendalian dan pencegahan kerusakan sumber-sumber air.

Timor Lorosa'e dan Perubahan Iklim: Keamanan dan Pembangunan Berkelanjutan

Ringkasan¹

Merrilyn Wasson

Australian National University

Dimensi Manusia Internasional dari Program Perubahan Lingkungan Hidup Global: UNESCO/IGCSU

1. Pendahuluan: Pembangunan Berkelanjutan dalam Keadaan Iklim yang Berubah

Merupakan suatu kenyataan abad ke 21 bahwa perencanaan pembangunan yang berkelanjutan harus turut memperhitungkan perubahan terhadap iklim dan ekosistem alam yang merupakan hasil dari emisi gas rumah kaca ke udara yang tidak berkelanjutan. Emisinya sangat merusak. Karbon dioksida merupakan hal paling lazim dan problematis akibat gas rumah kaca. Hal itu sekarang sudah mencapai suatu konsentrasi dalam atmosfer bumi yang sekitar 66% lebih tinggi dari setiap saat selama eksistensi manusia di planet. Kenaikan lebih kecil dalam CO₂ dalam catatan sejarah masa lalu mengakibatkan gangguan signifikan pada sistem iklim planet.

Konsensus internasional dan ilmiah adalah bahwa perubahan iklim merupakan kenyataan yang sudah berdampak didukung oleh kecenderungan yang dapat dilihat dan diperkirakan.

Sesuai dengan itu, hampir semua bangsa meratifikasi *UN Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) (Konvensi Kerangka Kerja PBB) tentang Perubahan Iklim dan menerima bahwa:

- Perubahan iklim merupakan sebuah realitas dan hal itu sudah berpengaruh besar dan mendalam, dan
- Perubahan iklim merupakan ancaman serius terhadap keamanan makanan dan air, dan karenanya terhadap kesehatan dan keamanan manusia, dan
- Karenanya ada risiko terhadap pertumbuhan ekonomi dan nafkah yang berkelanjutan.

Meski konsensus internasional ini, negosiasi dari Piagam pada Konvensi, yang harus diberi komitmen oleh bangsa-bangsa dari negara industri hingga suatu reduksi mencapai rata-rata 6% pada tingkat tahun 1990 dari *Greenhouse gas* (GHG) (emisi gas rumah kaca), yang dirinci dalam bulan November 2000. Negosiasi akan selesai pertengahan 2001, dalam suatu upaya untuk menyelesaikan rincinan yang dipersengketakan dari *Kyoto Protocol* (Piagam Kyoto).

Penanggungan dalam negosiasi ini memberi Timor Lorosa'e kesempatan untuk berkontribusi untuk memperdebatkan masalah kontroversial dari Piagam tersebut, suatu peluang yang harus diukur. Karena Timor Lorosa'e tidak hanya menghadapi masalah serius dari perubahan iklim, tetapi bangsa itu banyak mendapat manfaat dari suatu strategi yang secara serentak menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan membantu pulau tersebut untuk mengadaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Mendanai pembangunan berkelanjutan merupakan bagian integral dari Konvensi Perubahan iklim dan Piagamnya. Satu ketentuan keuangan dari Piagam tersebut, *Clean Development Mechanism* (CDM) (Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB)) didedikasikan untuk menunjang keberlanjutan penurunan pertumbuhan emisi rumah kaca pada negara-negara berkembang. Suatu ketentuan kedua, "Adaptasi dan Pelonggaran Dana" bagi negara-negara tertentu mudah diserang terhadap dampak dari perubahan iklim. Timor Lorosa'e akan mendapat manfaat dari kedua sumber pendanaan.

¹Diringkaskan oleh komite pengorganisasia

Timor Lorosa'e yang mudah kena serang Perubahan Iklim

Dampak pantai, Tingkat pasang air laut, Pengurangan habitat ikan:

Timor Lorosa'e sama-sama mudah terkena serangan pada pasang naik seperti terhadap semua negara-negara penghuni kepulauan akibat cairnya lapisan es di Antarktika dan lapisan es di kutub Utara. Pencairan es sedang berlangsung.

Salah satu efek untuk Timor Lorosa'e karenanya akan berupa pergeseran garis pantai dan kehilangan parsial dari ekosistem pasang-surut yang diperlukan untuk pembiakan ikan dan habitat, yang paling menyolok adalah bakau dan rumput laut (Fox, Applegate dan Wasson, 2000).

Hal demikian akan diperburuk dengan kehancuran eko-sistem pekarangan. Perubahan iklim merupakan hal utama dalam penekanan dan pengurangan cepat ekosistem pekarangan di mana-mana di dunia.

Ekosistem batu karang dari Laut Arafura dan Laut Timor dan Selat Sunda bukan merupakan kekecualian, dan sejak episode El Nino tahun 1997/98 mengalami beberapa pemutihan terburuk dan penurunan semua karang tropis (Wilkinson et. al. 2000).

Pohon bakau, rumput laut dan batu karang penting karena semuanya mempunyai kemampuan untuk 'membenam' atau mengurangi konsentrasi karbon di bumi atmosfer (Asuki 1998). Meski bila ditekan atau dirusak, namun, semuanya memancarkan karbon kembali ke atmosfer.

Variabilitas Iklim, Panen dan Vegetasi

Suatu keprihatinan dampak jangka panjang adalah efek variasi iklim akan mengena pada pertanian.

Karena variabilitas iklim merupakan suatu kelebihan perubahan iklim, dampak global pada keamanan bahan pangan merupakan keprihatinan bahwa hal itu menjadi faktor dorongan dalam penerimaan internasional akan keperluan mengurangi emisi dan langkah lambat dari Perubahan Iklim.

Bila iklim nasional atau regional bergantung pada angin musim, risikonya paling besar. Timor Lorosa'e merupakan suatu bangsa yang dipengaruhi oleh pola angin musim.

Dikhawatirkan bahwa dalam kurun waktu kurang dari lima puluh tahun, ketidakmampuan flora dan fauna dan panen untuk menyesuaikan diri dengan variabilitas iklim akan menjadi masalah besar, dan sebagai akibatnya, akan terjadi kehilangan hutan dan panen yang berarti.

Peningkatan frekuensi El Nino

Sama halnya dengan Asia Tenggara dan Pasifik, Timor Lorosa'e dan tetangga terdekatnya dipengaruhi oleh kekeringan yang menyertai kejadian El Nino. Kini dipikirkan bahwa frekuensi dan kerasnya kejadian El Nino mungkin ditambah oleh perubahan iklim (CSIRO 1999).

Sayangnya untuk semua negara yang dipengaruhi oleh kejadian El Nino, hal ini dapat berarti kegagalan beberapa spesies pohon dan tanaman panen untuk mengadaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat

timbul lebih dini daripada yang diprediksi sebelumnya. Sebagaimana halnya dengan ekosistem pesisir, perubahan-perubahan yang diprediksi terhadap tanaman panen, spesies pohon dan keanekaragaman hayati Timor Lorosa'e nampak suram.

Bersamaan, proyeksi-proyeksi ini menyajikan suatu pandangan yang suram untuk keamanan pangan dan air, kesehatan dan mata pencaharian yang berkelanjutan bagi penduduk Timor Lorosa'e, kecuali strategi-strategi untuk pembangunan yang berkelanjutan yang juga membantu bangsa untuk mengadaptasi variasi iklim yang meningkat.

Kontribusi Timor Lorosa'e dalam emisi gas rumah kaca

Kontribusi Timor Lorosa'e terhadap emisi GHG global hampir dapat dipastikan diabaikan. Namun, hal ini akan berubah, mengingat Timor Lorosa'e dengan tepat mengambil kendali dari sumber minyak bahan bakar fosil di daerah Selat Timor dan Arafura yang termasuk negara-negara di Zona Ekonomi Eksklusif.

Produksi dan ekspor minyak bumi dan gas cair akan meningkatkan emisi GHG nasional Timor Lorosa'e. Namun, hal itu juga menyajikan suatu peluang untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan yang juga mengurangi emisi karbon, setidaknya di mana menyangkut ekspor gas cair.

Piagam Kyoto dan mekanisme untuk mendanai pembangunan yang berkelanjutan

Konvensi Perubahan Iklim mempunyai dua tujuan: pertama untuk menurunkan emisi GHG ke bumi, yang lainnya untuk menunjang Pembangunan Berkelanjutan (Pasal. 2 UNFCCC, Mukadimah Piagam Kyoto).

Berdasarkan perintah blok G77 negara-negara yang sedang berkembang bahwa bantuan pertumbuhan ekonomi jadi melekat dalam Konvensi dan Piagamnya, sebagai harga dari kerjasama dengan penurunan emisi GHG. Mekanisme Pembangunan Bersih (Pasal.12 Piagam Kyoto) merupakan sarana dimana Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim dan Piagamnya mencapai tujuan ganda menurunkan emisi GHG dan menunjang pembangunan berkelanjutan.

Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) dalam Ikhtisar

"MPB" adalah suatu investasi oleh perusahaan swasta atau negara dari negara-negara yang tercatat dalam Lampiran 1, dalam sebuah proyek di negara-negara berkembang yang memberi jasa penurunan emisi GHG. Negara, perusahaan atau masyarakat tersebut, mempertahankan kepemilikan secara penuh atau sebagian dari proyek tersebut dan keuntungannya, sementara investor menerima imbalan atas penurunan GHG.

Investasi MPB: Manfaat untuk bangsa-bangsa yang sedang berkembang

- Sebagai investasi asing langsung, pendanaan MPB tidak menaikkan hutang nasional, suatu fakta yang menjadikannya sebuah bentuk investasi yang dapat diterima oleh negara-negara sedang berkembang.



- Izin untuk proyek MPB merupakan hak negara tuan rumah untuk menentukan, yang diharapkan dapat mengendalikan investasi dalam areal prioritas nasional.
- Proyek MPB harus memenuhi kriteria keberlanjutan dan diharapkan memberi jaminan manfaat sosial ekonomi atau ekologi.

Dana Adaptasi dan Timor Lorosa'e

Piagam Kyoto memperkenalkan sebagai suatu pajak “mekanisme fleksibilitasnya”, termasuk MPB. Pertukaran Emisi dan Mekanisme Pelaksanaan Bersama. Tujuan pajak ini adalah untuk membentuk “Dana Adaptasi” yang akan digunakan untuk membantu mengembangkan negara-negara “yang teramat mudah kena serangan yang merugikan akibat perubahan iklim dalam mencapai akibat adaptasi”. Timor Lorosa'e jelas berada dalam kategori teramat mudah kena serangan terhadap akibat yang merugikan.

Strategi pembangunan berkelanjutan untuk adaptasi Perubahan Iklim

Pilihan pembangunan yang berkelanjutan secara ringkas memberi garis besar di sini berdasar konsep yang sudah diberlakukan pada negara-negara Kepulauan Tropika yang sedang berkembang dalam mana menghadapi risiko yang mirip dan dengan beberapa kemiripan dalam ekosistem. Tetapi akan ada pilihan yang unik untuk negara, yang menganjurkan setiap negara untuk menentukan prioritasnya.

Sumber Gas Cair

Sebagaimana dibahas di atas, gas cair merupakan sumber emisi CO₂, tetapi merupakan bentuk energi yang emisinya jauh lebih sedikit ketimbang batubara atau minyak tanah. Karenanya, menggantikan baik batu bara maupun minyak bumi dengan gas cair merupakan pengurangan emisi. Dengan asumsi bahwa Selat Timor menghasilkan baik gas cair maupun minyak bumi, maka Timor Lorosa'e akan mendapat manfaat bagi perekonomiannya dan keamanan dan dengan mempromosikan ekspor gas cair.

Terdapat peningkatan kebutuhan akan gas cair di wilayah Asia Pasifik, didorong oleh masalah cuaca dan efisiensi ekonomi, sehingga strategi ini pasti menghasilkan hasil yang positif.

Energi berkelanjutan dari pasang-surut permukaan air laut

Timor Lorosa'e mungkin ingin meneruskan sumber energi bahan bakar minyak non-fosil, melalui investasi MPB dalam suatu proyek energi yang berkelanjutan atau oleh dana adaptasi. Energi selisih pasang naik dan pasang surut sudah merupakan pilihan menarik bagi negara-negara dengan variasi perbedaan pasang surut permukaan air laut yang berarti; teknologi baru membuat semakin menarik, biaya rendah dan pilihan energi bebas emisi untuk pulau-pulau.

Reboisasi Bakau: Investasi MPB dengan kesejajaran manfaat sosial ekonomi dan ekologi luar biasa

Lebih dari 50% pohon bakau dirusak (WRI 2000) dan bersama itu suatu habitat pembiakan ikan, sebuah filter karbon tanah dan suatu protektor habitat lain, juga rumput laut dan batu karang [Ayukai (ed.), 1998]. Tanpa filter dari bakau, endapan dari pantai berkontribusi dalam perusakan habitat ikan, pemiskinan masyarakat pesisir, kelompok sosial ekonomi pantai yang paling miskin dan paling mudah kena serangan. Bakau penting dalam mengembalikan kehilangan habitat ikan, dan untuk memulihkan industri perikanan pantai. Bakau sekarang dianggap sebagai “jenis batu penentu” bagi ekosistem pantai tropis [Fox, Applegate dan Wasson (ed) 2000].

Yang sangat berarti bagi suatu negara kepulauan seperti Timor Lorosa'e adalah kemampuan pohon bakau untuk menyimpan endapan pantai. Sekarang ternyata bahwa bakau mungkin juga berperan dalam memperlambat atau membantu pantai untuk mengadaptasi tingkat permukaan laut.

Pengasingan karbon dalam ekosistem bakau, rumput laut dan batu karang

Persediaan karbon per area unit dari ekosistem bakau hasilnya luar biasa. Oleh karena keseluruhan ekosistem bakau berfungsi sebagai ember karbon, peremajaan hutan bakau permanen mungkin sesuai di antara bentuk penghasil terbesar dari pengasingan bak.

Pembangunan berkelanjutan

Berlandaskan manfaat kolateral sosial ekonomi berdasar lingkungan peremajaan bakau. Manfaat ekologi yang dibahas di atas, membawa akibat restorasi tata kehidupan masyarakat nelayan pantai. Hal ini dapat langsung muncul dengan pengerahan desa dalam tahap pembentukan proyek reboisasi bakau. Hal itu juga akan berkontribusi terhadap daya tahan jangka panjang industri perikanan.

Reboisasi

Area yang tersedia bagi reboisasi dan hutan produksi yang berkelanjutan mungkin terbatas di Timor Lorosa'e tetapi berharga untuk menyelidikinya sebagai suatu pilihan, karena reboisasi dan peremajaan hutan yang rusak mempunyai efek mengasingkan karbon dari atmosfer.

Rehabilitasi hutan yang dirusak: Manfaat ekologi dan ekonomi

Terdapat perbedaan di antara manfaat ekologi dan sosial ekonomi dari rehabilitasi hutan yang amat dirusak untuk perkayuan gelondongan yang selektif dan pendirian perkebunan industri di areal hutan yang sudah digunduli. Secara umum, yang pertama memberi manfaat kolateral ekologi lebih banyak termasuk:

- *Perbaikan kualitas air sebagai akibat suatu pertumbuhan kembali. Ini merupakan satu penyebab mengapa Cina mengarahkan investasi MPB terhadap peremajaan dan reboisasi di seputar penampungan air di sungai.
- *Stabilisasi tanah dan kualitas kadar gizi yang meningkat dari biomas tanah.
- *Pemulihan bermutu dari keanekaragaman hayati.



Mengingat ekosistem sifatnya dinamis, kelihatannya tidak cenderung bahwa pemulihan hutan akan mengakibatkan komposisi flora yang sama, tetapi cenderung mendukung suatu kenaikan keanekaragaman hayati baik dalam flora maupun fauna.

Perkebunan, Pelestarian Tanah dan Pemanfaatan Karbon sepenuhnya

Perkebunan spesies tunggal memberi manfaat sampingan ekologi yang lebih sedikit, tetapi punya banyak manfaat ekonomi, dalam bentuk lowongan kerja dan produk kayu untuk pasar domestik dan global.

Dengan perkebunan jenis tunggal, kehilangan tanah dapat mengurangi karbon yang diasingkan oleh pertumbuhan pohon. Karena tanah tropis umumnya rendah kadar gizinya dalam siklus pertumbuhan yang diulang diikuti dampak yang besar akibat panen yang membawa dampak negatif pada mutu tanah, akan memperburuk masalah pelarian tanah. Di mana pembakaran digunakan untuk membuka lahan untuk perkebunan, pelarian lahan naik sepuluh kali lipat dan kapasitas retensi air dari tanah berkurang [Schweithelm, 1999].

Sebagai akibat masalah ini, mungkin bahwa menilai CER (Certified Emission Reductions) proyek penurunan perkebunan akan memerlukan penggunaan perkiraan karbon yang penuh, yang menggantikan emisi dari tanah yang terganggu selama panen dibanding pengasingan dan penimbunan pohon-pohon.

Ini akan menopang penggunaan teknik pelestarian tanah pada tahap peka dari siklus proyek, termasuk jerami yang menyampah dan mengukunya pada tanah untuk memelihara karbon organik dan bahan gizi lain dan menanam kembali tanaman pada jerami yang membusuk. Hasilnya adalah pengurangan pengaliran ke luar, kurangnya kebutuhan pupuk dan reduksi netto dalam emisi tanah untuk mengisi reduksi emisi bumi [Bruenig 1996].

Sebagai kesimpulan, kontribusi investasi proyek MPB terhadap keberlanjutan jangka panjang ekosistem hutan dan produk kehutanan baik untuk pasar domestik maupun untuk ekspor mempunyai manfaat baik terhadap ekologi maupun ekonomi sosial Timor Lorosa'e, manfaat yang akan dimaksimumkan bila apa

yang dieksplorasi memberi nilai tambah bagi negara. Namun, kontroversi berada di seputar investasi MPB kehutanan yang berkelanjutan, karena "dapat berbaliknya" proyek-proyek kehutanan (hal itu dapat menjadi sumber emisi kecuali kehutanan yang berkelanjutan dilaksanakan dengan hati-hati). Ketidakpastian mengenai kapasitas beberapa jenis untuk mengadaptasi menambah bahan perdebatan. Peremajaan ekosistem bakau jauh kurang kontroversial, mengingat bakau biasanya akan ditanam sebagai dasar atas kegiatan komersial lain seperti peremajaan lahan perikanan dan budidaya kelautan.

Kesimpulan

Timor Lorosa'e menempati posisi yang unik dalam mendasari perekonomian berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan negara kepulauan untuk mengadaptasi dan meminimalkan dampak atas perubahan iklim. Sebagai negara yang makanan, air dan keamanan manusia sangat mudah diserang terhadap risiko pasang naik dan variabilitas iklim yang ekstrim, Timor Lorosa'e harus mampu menarik pendanaan yang berarti dari ketentuan-ketentuan dalam Piagam terhadap Konvensi Perubahan Iklim bagi pengurangan emisi gas rumah kaca yang berkelanjutan.

Eksistensi minyak bumi dan gas cair di Selat Timor dapat membuat Timor Lorosa'e menjadi suatu pemancar bersih dari karbon, tetapi hal itu juga memberi pemerintah Timor yang akan datang suatu peluang unik untuk memberi tekanan pada perusahaan-perusahaan energi untuk memaksimalkan penggunaan gas cair, sebagai bahan bakar fosil dengan emisi per unit energi paling rendah.

Hal itu juga menempatkan negara pada posisi yang sangat baik untuk melakukan negosiasi Proyek Pembangunan Bersih dalam sektor lain termasuk bakau dan rehabilitasi habitat ikan, reboisasi, perkebunan, panen resistan terhadap variasi iklim, dan teknologi energi baru pasang-surut. Tema penting adalah bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus turut diperhitungkan, dan meminimumkan dampak perubahan iklim.

Referensi

- Ayukai, T. (ed) 1998 'Carbon Fixation and Storage' in *Mangroves and Salt Marshes* Vol. 2, No. 4. Desember 1998.
- CSIRO Division of Atmospheric Research 1999, *El Nino Frequency and Elevated CO₂*.

Pengelolaan Polusi dan Limbah Lingkungan di Timor Lorosa'e



Carlos Conceicao

Petugas Lingkungan, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (EPU), ETTA

Pengelolaan polusi dan limbah menjadi masalah-masalah kunci bagi pembangunan Timor Lorosa'e yang berkelanjutan. Presentasi ini menjelaskan: kerangka kerja pengaturan dan institusional untuk pengelolaan polusi lingkungan yang utama (masa lalu, sekarang dan yang akan datang) masalah-masalah lingkungan dihubungkan dengan pengelolaan limbah; dan langkah-langkah yang ditempuh sekarang ini oleh EPU. Sumber-sumber polusi sekarang ini termasuk kepariwisataan, pemrosesan-agro, penanganan bahan bakar, pemakaian pertanian, tempat-tempat pembuangan limbah dan kotoran-kotoran rumah tangga. Undang-undang pengelolaan lingkungan Indonesia (1997) adalah bagian dari peraturan utama yang mengatur polusi lingkungan di Timor Lorosa'e. Peraturan-peraturan sekunder meliputi pemberhentian limbah-limbah zat-zat cair atau kotoran, polusi laut, polusi udara dan pengelolaan limbah-limbah yang berbahaya. Tidak ada peraturan-peraturan yang sekarang diterapkan sehubungan dengan pengelolaan limbah yang keras. Pihak EPU menjalankan investigasi masalah-masalah polusi dalam menanggapi keluhan-keluhan masyarakat dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan polusi dalam tinjauan lingkungan dari penanaman modal yang baru. Pihak EPU sedang dalam proses penerbitan prosedur-prosedur pengontrolan polusi termasuk sistem ijin lingkungan untuk fasilitas industri. Pengontrolan kualitas air tanah direncanakan untuk kabupaten-kapupaten terpilih dan juga penyelidikan tempat yang kotor menjadi sasaran pada ketersediaan dana-dana yang ada.

Pendahuluan

Pencemaran dan sampah merupakan penyebab dari kegiatan manusia yang kurang atau tidak mengerti tentang dampak terhadap lingkungan. Hal ini merupakan isu lingkungan hidup yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menangani masalah pencemaran terhadap lingkungan. Untuk mengatasi masalah dampak lingkungan ini, bukan saja tanggung jawab EPU sebagai pengambil kebijakan melainkan tanggung jawab bersama pihak-pihak terkait seperti Air Bersih, Kesehatan Lingkungan, Infrastruktur, LSM dan masyarakat Timor Lorosa'e pada umumnya.

Latar Belakang

Pencemaran dan sampah merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap struktur kimia, air tanah dan udara serta dapat merubah nilai keindahan suatu lingkungan. Pencemaran dan sampah dapat berpengaruh juga terhadap kesehatan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.

Pengertian

Pencemaran adalah masuknya zat-zat atau bahan beracun dari kegiatan industri, sampah-sampah yang terbuang dari populasi daerah pemukiman sehingga dapat mengakibatkan perubahan struktur kimia pada lingkungan (air, tanah dan udara).

Maksud dan Tujuan

- Untuk menghindari pencemaran terhadap lingkungan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat
- Menjaga kemungkinan sampah yang telah dibuang tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan
- Tercapainya pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan

datang.

- Melindungi negara dari kegiatan luar wilayah negara, yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Pembahasan

A. Sumber-sumber pencemaran

Saat sekarang

Limbah

- Sisa bahan makanan dari rumah tangga
- Kertas, plastik, kardus, botol-botol bekas yang dibuang secara sembarangan di jalan dan pusat-pusat keramaian (kota maupun pedesaan).
- Air limbah rumah tangga.

Konstruksi

- Potongan besi, kaleng-kaleng bekas dan asbestos.

Pertanian

- Pupuk anorganik yang dipakai oleh petani secara berlebihan.
- Pestisida.

Kendaraan Bermotor

- Asap dari kendaraan bermotor dan jenis mesin lainnya.
- Oli bekas

Pariwisata

- Limbah padat dan cair.
- Masalah dengan penduduk lokal.

Masa Depan

- Industri dan pabrik-pabrik.
- Infrastruktur.



- Pertambangan (batu bara, marmer, emas,...dll).
- Perminyakan dan gas.
- Pariwisata.

B.Peranan EPU

Peranan EPU dalam pengendalian terhadap lingkungan meliputi:

- Menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang pengendalian dampak pencemaran lingkungan.
- Pengkajian dan penyusunan kebijakan teknis Nasional di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- Penetapan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan.
- Pengembangan sistem informasi dan layanan masyarakat dalam rangka pengendalian dampak pencemaran lingkungan.
- Pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.

C.Regulasi

Untuk menegakan hukum tentang lingkungan hidup di Timor Lorosa'e, maka Pemerintah (EPU) berupaya untuk menerapkan beberapa peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup, namun sebelumnya kami mohon maaf karena di antara peraturan yang akan disajikan ini, sebagian besar masih mengadopsi peraturan pemerintah Indonesia, sedangkan satu diantaranya adalah produk pemerintahan transisi (UNTAET). Peraturan yang dimaksud adalah:

- 1.Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1990 tentang pencemaran air.
- 2.Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 1997 pasal 6 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut: setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

- 3.Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- 4.Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara.
- 5.Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya atau beracun.
- 6.Peraturan UNTAET No 19 Tahun 2000 tentang kawasan yang dilindungi.

Peraturan-peraturan ini dalam pelaksanaannya sangat sulit, mengingat ini adalah peraturan Indonesia, sedangkan sebagai negara baru kita tentunya perlu peraturan sendiri yang sesuai dan cocok untuk keadaan kita sendiri.

Kesimpulan

Penangan terhadap sumber-sumber pencemaran dan sampah di Timor Lorosa'e, harus dilaksanakan dengan serius dan baik. Sosialisasi peraturan-peraturan lingkungan hidup kepada masyarakat harus dilaksanakan. Pencemaran dan sampah mempunyai pengaruh negatif terhadap kesehatan masyarakat.

Saran

- Perlu menerbitkan peraturan tentang pencemaran dan sampah di Timor Lorosa'e
- Perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang mengatur masalah pencemaran dan sampah.
- Koordinasi antara Departemen dan NGO dalam rangka penanganan masalah pencemaran dan sampah misalnya, bagian Air Bersih, Civpol, bagian Penanaman Modal dan Urusan Hukum.



Memperkirakan Kebutuhan-Kebutuhan Lingkungan Hidup dan Prioritas-Prioritas di Timor Lorosa'e

UNDP, oleh Odd Terje Sandlund, Pemimpin Tim

Jan Bryceson, Demetrio de Carvalho, Narve Rio, Joana da Silva, Maria da Silva

Penyajian ini akan memfokuskan pada maksud, tujuan jangka pendek dan hasil-hasil, serta beberapa kesimpulan awal dari proyek "Memperkirakan Kebutuhan-Kebutuhan Lingkungan Hidup dan Prioritas-Prioritas di Timor Lorosa'e".

Maksud

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperdebatkan isu-isu dan prioritas-prioritas lingkungan hidup, sebagai dasar untuk penentuan dan pengembangan usulan-usulan prioritas untuk disajikan kepada CNRT, UNTAET, dan masyarakat pemberi donor.

Obyektif-Obyektif Jangka Pendek

- Menentukan dan mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pembicaraan mengenai masalah-masalah lingkungan hidup dan prioritas-prioritas di Timor Lorosa'e
- Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman lingkungan hidup dan kebutuhan-kebutuhan lingkungan hidup
- Mengumpulkan informasi mengenai latar belakang sistem-sistem alamiah dan ekologi sosial masyarakat Timor Lorosa'e
- Menentukan dan mengembangkan usulan-usulan yang paling penting dan realistis dalam rangka mencari sumber perdanaan

Hasil-hasil

- Sebuah laporan mengenai masalah-masalah dan prioritas-prioritas lingkungan hidup
- Usulan-usulan proyek yang diprioritaskan dan dapat dilaksanakan yang dirancang dalam rangka menyelesaikan prioritas-prioritas yang bersangkutan

Informasi didapat dari

1. Pertemuan dan wawancara dengan:

- Petani, nelayan, masyarakat kota, dan arganegara yang lain
- Kepala suku, dan pihak-pihak yang berwenang yang lain
- Pemimpin-pemimpin distrik dan kecamatan
- Staf ETTA dan UNTAET di tingkat nasional, distrik dan kecamatan
- Organisasi-organisasi nasional (mis. OMT)
- LSM-LSM lokal

2. Pengamatan kami sendiri

- Mengikuti perjalanan di Distrik Dili, Manatuto, Baucau, Lautem, Aileu, Liquica, Bobonaro, Ermera, Suai, Oecussi dan;
- Membuat survei seluruh Timor Lorosa'e dari helikopter

3. Sumber-sumber Sekunder

- Buku-buku dan laporan-laporan yang diterbitkan

- Data yang tidak diterbitkan

Masalah-masalah yang diidentifikasi

- Penggundulan hutan/pengelolaan daerah penangkapan air
- Pengelolaan daerah pesisir
- Lembaga-lembaga dan perundang-undangan lingkungan hidup
- Kesadaran masyarakat dan pendidikan
- Pencemaran dan limbah padat di daerah perkotaan
- Penilaian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati

Penggundulan hutan/Pengelolaan daerah penangkapan air. Berhubungan dengan:

- Kualitas dan persediaan air minum
- Persediaan air untuk irigasi
- Degradasi tanah/erosi tanah
- Produksi pertanian
- Pencegahan musibah (tanah longsor dll)
- Pembangunan jalan dan pemeliharaannya
- Konservasi keanekaragaman hayati
- Iklim mikro (microclimate)

Pengelolaan daerah pesisir. Nilainya:

- Perikanan dan sumber-sumber alam lain
- Konservasi keanekaragaman hayati
- Nilai rekreasi dan pariwisata

Ancaman:

- Pemakaian tanah yang tidak terencana
- Pariwisata yang tidak dikelola
- Tumpahan dari eksplorasi minyak
- Pencemaran dan limbah dari kotoran perkotaan dan industri

Perundang-undangan lingkungan hidup

Harusnya termasuk:

- Perundang-undangan lingkungan hidup
- Perundang-undangan AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan)
- Pengintegrasian masalah-masalah lingkungan hidup di semua perundang-undangan lain
- Pengintegrasian undang-undang dan kebiasaan-kebiasaan tradisional (mis. *Tara Bandu*)
- Keterbukaan dan transparansi

Kesadaran masyarakat dan pendidikan

- Masalah lingkungan hidup termasuk dalam kurikulum sekolah di semua tingkat sekolah
- Penyuluhan lewat media massa
- Keterlibatan masyarakat lokal
- Jasa-jasa pertanian dan kehutanan
- Kampanye kesadaran yang partisipatif

Lokakarya-Lokakarya Sumber Daya Alam dan Pelestarian Alam

Lokakarya Pembangunan Berkelanjutan

Masalah-masalah: Partisipasi pada tingkat nasional dan tingkat daerah • Hak-hak asasi manusia • Sistem politik • Masyarakat sendiri yang berhak menentukan bagaimana pengaturan tanahnya • Hak-hak kepemilikan tanah • Pentingnya budaya lokal • Konsultasi publik • Pendidikan umum

Isu-isu prioritas	Strategi-strategi
Pemberdayaan kemampuan	<ul style="list-style-type: none"> • Kooperasi Universitas • Mendekati Masyarakat
Sumber daya Finansial	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan sistem perpajakan • Industri dan Pembangunan • Peminjaman luar negeri
Perwakilan dan Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dari atas ke bawah ketemu dengan dari bawah ke atas • Pemerintah disahkan oleh masyarakat • Memberi masyarakat kemampuan untuk partisipasi
Perundang-undangan dan Sistem Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan masyarakat dari akarnya • Penerangan yang terbuka • Pemberdayaan masyarakat sipil

Lokakarya Pencemaran dan Limbah

Masalah-masalah: Plastik • Sampah yang diimpor • Komunikasi dengan masyarakat di luar kota • Informasi dan pendidikan • Implementasi regulasi • Pembuangan sampah tidak legal • Ekonomi kelas bawah (terpaksa) • Infrastruktur pembuangan sampah • Knalpot (asap kendaraan bermotor) • bekas oli • Sampah/limbah pabrik • Polusi kimia • Manajemen sampah/limbah • Pengembangan kemampuan • Polusi anorganik (pertanian) • Penerapan • Penelitian dan pengawasan • Bahan berbahaya dan beracun.

Isu-isu prioritas	Perubahan yg dibutuhkan	Strategi-strategi
1. Pengelolaan dan pengaturan sampah	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan teknologi-teknologi sederhana • Staf (tim kerja) • Penyebaran penerangan • Penilaian (Keadaan sekarang, hasil pelaksanaan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat program-program prioritas • Menyatukan kelompok dari berbagai jurusan untuk menentukan pemecahan masalah yang praktis. • Pendidikan yang resmi dan tidak resmi untuk masyarakat, bisnis • Mengumpulkan dan mengurai data
2. Peraturan dan Pelaksanaan, Kesadaran Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Sangsi-sangsi hukum (& denda yg sesuai) • “Sosialisasi” (yaitu: partisipasi masyarakat dan pendidikan) sebelum peraturan dilaksanakan • Peningkatan kesadaran rakyat • Membuat peraturan baru yang menyadari kebutuhan-kebutuhan khusus dan budaya Timor Lorosa'e 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendirikan panitia lingkungan hidup di tingkat kecamatan • Mengurus pembersihan mingguan lewat Kepala de Aldeia/Kepala Desa • Menyebarkan penerangan tentang pembuangan yang dilarang (Dampak, Peraturan) • Kampanye promosi (Radio, spanduk) • Mempromosikan fasilitas pembuangan sampah yang layak (Pemerintah).
3. Plastik-plastik	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat peraturan-peraturan khusus Timor Lorosa'e • Tambah usaha daur ulang 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong daur ulang di sektor swasta • Mengurangi pemakaian botol plastik air aqua • Kampanye pendidikan dan penerangan • Mendorong pemakaian bahan tradisional (mudah dibuang atau dipakai lagi) • Memakai teknologi baru untuk mengulangi/ mendaur ulang plastik

Lokakarya Kehutanan

Masalah-masalah: Pengelolaan yang kurang • Kayu untuk dibakar (penebangan yang berlebihan) • Perladangan berpindah • Penebangan dilarang • Perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat • Tidak ada sanksi hukum • Tidak ada kepemilikan tanah yang jelas, hutan / sumber-sumber dari hutan • Penangkapan berlebihan • Perbedaan antara hukum adat & hukum Pemerintah • Ternak yang makan rumput secara berlebihan • Kebakaran hutan secara tidak terkendali • Batas-batas kawasan hutan tidak jelas • Tidak ada pendidikan bagi masyarakat • Tidak ada panduan pelaksanaan • Kemiskinan/keperluan ekonomi untuk memakai produk hutan • Penggunaan kayu untuk bangunan lokal • Pertentangan antara kepercayaan adat dengan pengelolaan • Eksploitasi oleh orang kota terhadap orang desa • Kehilangan & modifikasi habitat • Tidak ada kebijakan penggunaan tanah • Kurangnya pendekatan yang terpadu + multi-disiplin • Tidak ada cukup banyak tanah yang di bawah kepemilikan orang-orang lokal • Kurangnya data/akses pada data • Kurangnya kapasitas, sumber daya alam & prioritas • Kurangnya kooperasi terhadap pembiayaan • Tidak ada struktur pemerintahan.

Isu-isu prioritas	Strategi-strategi
Kepemimpinan yang buruk pada hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Memakai pekerja kehutanan yang mempunyai pengalaman. • Mengadakan kerjasama di antara Departmen Kehutanan, pengelolaan air dan pertanian. • Membangun strategi-strategi dan prinsip-prinsip pembinaan dalam proses kegiatan dan pendidikan.
Pembatasan dan Kepemilikan tanah yang tidak jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang dasar harus menjelaskan kepemilikan hutan • Membangun kebijaksanaan kehutanan nasional dan kebijaksanaan penggunaan tanah nasional.
Kekurangan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan dan kepemilikan sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan lebih banyak untuk pelatihan pada tingkat masyarakat. • Menetapkan inventaris hutan nasional • Menemukan alternatif untuk bahan bakar masak selain kayu • Mengajarkan masyarakat mengenai kayu mana yang pantas atau tidak, contohnya kayu kering.
Tidak ada pedoman mengenai penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistim penegakan hukum serta dendanya, dan • Menyediakan sumberdaya untuk menetapkan. • Kerjasama dengan gereja dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hutan

Lokakarya Sumber-Sumber Air

Masalah-masalah: Penebangan hutan • Pembakaran hutan • Ketidak-merataan distribusi air di daerah-daerah di Timor Lorosa'e • Kemutuan air dan masalah-masalah kesehatan • Tidak adanya laborator untuk testing • Perlindungan penampungan air • Perubahan iklim • 7 tempat di Dili mengalami kekurangan air • Perlunya pelatihan untuk pengelolaan sumber-sumber air • Kontrol bahan kimia yang diimpor • Sanksi untuk pencemar (baik untuk orang lokal, maupun untuk yang dari pemerintah) • Sumber air di pinggir laut makin asin • Penurunan tingkat air tanah • Peningkatan pemakaian air oleh yang mampu beli pompa besar • Informasi terhadap mutu air

Isu-isu prioritas	Strategi-strategi
Penebangan dan mempertimbangkan pembakaran hutan-tanah gundul, erosi, tanah longsor dan berkurangnya ketersediaan air.	<ul style="list-style-type: none"> • Program pendidikan melibatkan penduduk setempat • Pengembangan praktek-praktek pertanian dan penggunaan tanah yang berkelanjutan.
Kualitas air tawar yang kurang, dan kurangnya kesehatan umum	<p>PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangka pendek – pemeliharaan air (contohnya air rebus) dan sumber-sumber alternatif, contohnya mengumpulkan air hujan. • Jangka menengah – memagar dan memelihara tempat penampungan air, instalasi sanitasi dan pendidikan kesehatan. • Jangka Panjang – mengarahkan masyarakat untuk pemeliharaan/ perlindungan penampungan air secara keseluruhan (kontrol erosi dan menanam hutan kembali)
Melindungi penampungan air di area perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman hutan kembali • Mendirikan kehutanan umum untuk menghindari perebutan tanah oleh swasta. • Memerlukan departemen kehutanan yang kuat
Kurangnya keefektifan untuk melindungi sumber-sumber air	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan untuk mencegah polusi air dari tambang dan industri • Memperkuat peran hukum adat dalam mencegah penggundulan dan polusi. • Membutuhkan sumber-sumber yang kuat dalam badan kehutanan



Kaitan antara Makro-ekonomi dan Lingkungan Hidup: Dampak terhadap Kebijakan Lingkungan Hidup di Timor Lorosa'e

George Bouma

Wakil Kepala, Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (EPU), ETTA

Pendahuluan

Dalam 9 tahun terakhir sejak Pertemuan Puncak Dunia di Rio, cukup banyak penelitian dilaksanakan untuk membuktikan bahwa makro-ekonomi dan lingkungan terkait. Kaitan ini mempunyai implikasi atas bagaimana pemerintah harus membentuk dan memelihara aset dan kualitas lingkungan. Proses pembuatan kebijakan merupakan proses integral untuk memastikan bahwa perhatian yang memadai diberikan kepada pemeliharaan lingkungan. Makalah ini mengajukan pendapat bahwa untuk Timor Lorosa'e, penting agar keputusan kebijakan-kebijakan ini dilaksanakan secepat mungkin. Hal itu juga menyorot beberapa masalah kebijakan yang menghadapi perekonomian dengan pendapatan rendah seperti Timor Lorosa'e.

Hubungan Ekonomi dengan Lingkungan

Bagi kebanyakan para ahli ekonomi dan lingkungan hidup jelas bahwa terdapat kaitan antara makro-ekonomi dengan lingkungan hidup (Ouattara 1997). Kini diterima secara luas bahwa konsep lingkungan sebagai suatu mitra pertumbuhan memang tepat. Paradigma lama, yang melihat lingkungan hidup (dan ahli lingkungan hidup) sebagai penghambat perkembangan, tidak lagi tepat. Dengan demikian, bagaimana timbulnya kaitan-kaitan tersebut?

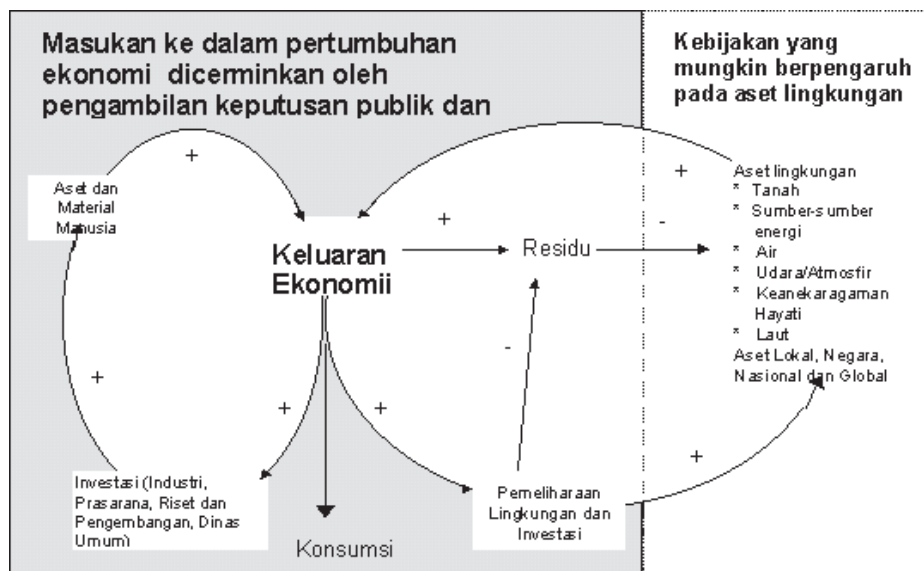
Model makro-ekonomi tradisional tidak menyertakan sistem-sistem ekologi. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun sistem-sistem ekologi tetap berada di luar kerangka kerja pengambilan keputusan mengenai makro-ekonomi (Daly 1991). Misalnya,

sumber-sumber lingkungan, seperti tanah, hutan dan mineral merupakan masukan terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian juga, keluaran dari kegiatan ekonomi seperti, gas rumah kaca, limbah padat dan cair, dibuang kembali ke lingkungan (Anderson, 1990). Hubungan antara makro-ekonomi, pembuatan kebijakan dan lingkungan diperlihatkan dalam Bagan di bawah.

Model ini memperlihatkan akumulasi modal atau model investasi pertumbuhan. Jalur sebelah kiri memperlihatkan bagaimana akumulasi dan penggunaan aset material bergabung untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, akumulasi dan investasi tenaga kerja dan modal di proses produktif menghasilkan keluaran ekonomi. Konsumsi keluaran ini sering digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi.

Sisi kanan model ini memperlihatkan kebutuhan atas kebijakan yang meminimalkan dampak terhadap aset lingkungan. Aset lingkungan merupakan masukan positif bagi pertumbuhan dan dari pertumbuhan ekonomi, unsur-unsur pencemaran dimasukkan lagi ke lingkungan. Transfer unsur-unsur pencemaran merupakan hal positif bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi, dampaknya terhadap lingkungan dapat bersifat negatif. Kemampuan melindungi aset lingkungan tergantung pada pemeliharaan lingkungan dan investasi. Pemeliharaan dan investasi ini dapat dilihat dalam bentuk:

- Peraturan-peraturan penguasaan dan pengendalian;
 - Analisa Dampak Lingkungan, atau;
 - Peralatan pendapatan dan pembiayaan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Nasional.
- Bila pemeliharaan dan investasi lingkungan tidak mencukupi, sistem ekonomi dapat mendorong pengurangan dalam jumlah aset lingkungan (Anderson, 1990).
- Karenanya terjadi kesejajaran antara pemeliharaan yang diperlukan untuk aset material dan pemeliharaan aset lingkungan, sebagai suatu masukan untuk pertumbuhan, diperlukan untuk penghasilan ekonomi yang berkelanjutan dan keberlanjutan ekonomi jangka



Gambar 1. Kaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan (Anderson 1991)

panjang (Anderson, 1990).

Hal ini mempunyai implikasi bagi pembuatan kebijakan pemerintah yang harus mengirim pesan kepada para pelaku ekonomi (yaitu sektor swasta) untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Dalam suatu ekonomi penyambung hidup seperti halnya di Timor Lorosa'e, hal ini merupakan kesulitan tambahan mengingat masyarakat sangat mengandalkan pada areal ekonomi pertanian yang mungkin marginal dan berdasar pada masalah lingkungan yang signifikan. Namun, di bidang perkembangan ekonomi, apabila pemeliharaan lingkungan yang diberikan kepada berbagai sektor tidak memadai, maka selain akan timbul masalah makro-ekonomi, juga akan berdampak pada masalah sosial dan lingkungan. Sebaliknya hal ini akan berdampak lebih besar lagi terhadap pendanaan. Akibatnya, penting bahwa baik sektor pemerintah maupun sektor swasta memperhatikan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup di Timor Lorosa'e.

Implikasi bagi Kebijakan Lingkungan di Timor Lorosa'e.

Dengan menentukan kaitan antara ekonomi dan lingkungan kita dapat meninjau implikasi untuk pengembangan kebijakan lingkungan di Timor Lorosa'e.

1. Pendanaan – Kebijakan fiskal hingga sekarang sudah dikembangkan oleh administrasi UNTAET. Perkiraan pengeluaran nasional berkisar sekitar US\$43 juta untuk dana Timor Lorosa'e yang dikonsolidasi. Mayoritas pengeluaran terjadi di sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Namun, porsi yang cukup signifikan dibagikan untuk biaya hukum dan ketertiban. Menurut Fox (2000), angka itu mendekati 17% dari anggaran 2000-2001. Dana terkonsolidasi yang relatif kecil mempunyai implikasi struktural bagi Timor Lorosa'e yang terlihat dalam pengeluaran yang relatif rendah (US\$0.7juta) ditujukan kepada sektor sumber daya alam seperti pertanian. Dengan karakteristik fisik lingkungan di Timor Lorosa'e dan dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatan-kegiatan pertanian penyambung hidup, kebijakan pemerintah seharusnya mencerminkan pengembangan sektor pertanian terhadap pelaksanaan praktek-praktek berkelanjutan dengan pendanaan dari dana terkonsolidasi dan dari masyarakat donor.

Selanjutnya, perkembangan ekonomi Timor Lorosa'e di masa depan harus berupaya mengembangkan pasaran yang menghindari timbulnya eksternalitas seperti yang sudah timbul di negara-negara berkembang yang lain. Contoh ekstrim tempat khusus pembuangan pencemaran seperti di Meksiko dan di Filipina, memberi peluang eksploitasi bagi perusahaan-perusahaan multi nasional yang berupaya memaksimalkan keuntungan. Pada akhirnya, terjadi degradasi lingkungan yang hebat, yang sebaliknya menimbulkan dampak sosial dan pendanaan untuk setiap kegiatan pembersihan pencemaran menjadi tanggung jawab pemerintah nasional yang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembersihan. Hal ini memperlihatkan kebutuhan atas suatu kerangka kerja peraturan penguasaan dan pengendalian yang ditata oleh pemerintah.

2. Peraturan Penguasaan dan Pengendalian tetap

merupakan dasar metode kebanyakan negara untuk menjamin pemeliharaan kualitas lingkungan hidup. Peraturan-peraturan ini dikembangkan dan dilaksanakan untuk memberi bimbingan bagi perkembangan ekonomi dan menetapkan standar-standar yang harus dipatuhi oleh pelaku-pelaku ekonomi. Misalnya,

- ❖ Analisa dampak lingkungan menetapkan suatu proses pengambilan keputusan bagi pemerintah untuk menentukan kesesuaian perkembangan proyek. Melalui proses pembuatan ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum terhadap perkembangan tersebut, berguna untuk menginternalkan biaya kinerja lingkungan yang tepat pada pengembang dan bukannya pada masyarakat.

- ❖ Peraturan pasar sumber daya alam merupakan contoh lain yang menjamin bahwa perilaku pencari keuntungan sektor swasta diminimumkan. Daerah Pinggiran Sungai Comoro di Dili merupakan satu contoh kasus di sini di mana kurangnya peraturan dan pengendalian berakibat pada terjadinya penggalian kerikil yang tidak terkoordinasi, yang jelas merupakan sumber masyarakat dan karenanya, seharusnya berada di bawah kendali pemerintah. Bila pasar sumber daya alam memberi harga terlalu rendah maka pelaku ekonomi yang tidak dikendalikan akan melakukan eksploitasi berlebihan yang pada akhirnya akan menyebabkan praktek-praktek yang tidak bersifat berkelanjutan terhadap lingkungan.

- ❖ Peraturan kegiatan pemerintah seperti halnya kegiatan prasarana juga merupakan hal yang penting. Sistem pemerintahan harusnya menjamin kemandirian terhadap pendekatan pembuatan peraturan. Maksudnya para pemberi jasa tidak boleh mengatur kegiatan mereka sendiri.

3. **Kebijakan Lingkungan** – dibentuk oleh administrasi pemerintah, memberi bimbingan tentang lingkungan hidup di tingkat yang lebih rendah. Kebijakan-kebijakan ini biasanya dikembangkan untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatannya. Kebijakan-kebijakan ini berbentuk bimbingan teknik atau pendapat terhadap bagaimana pemerintah mengelola masalah-masalah tertentu. Misalnya, bimbingan teknik yang berurusan dengan pendekatan untuk penanganan bahan bakar dan minyak, perlindungan sumber air tanah, atau pengurusan limbah padat dan cair. Bahkan, kebijakan dapat menentukan suatu pernyataan niat misalnya suatu kebijakan nasional mengenai keanekaragaman hayati, sungai, hutan dan pengelolaan pesisir. Umumnya, kebijakan-kebijakan tersebut memerlukan komitmen keuangan dari pemerintah.

4. **Pengetahuan Lingkungan Hidup** – dalam pemerintahan dan masyarakat umum merupakan suatu aspek kritis bagi perkembangan Timor Lorosa'e. Selama bertahun-tahun ada kekurangan kesempatan untuk melaksanakan penelitian dan mengerti lebih baik tentang kualitas lingkungan Timor Lorosa'e. Penting bahwa kesempatan penelitian ditentukan, dan informasi ini disampaikan kepada pemerintahan untuk membantu dengan pembentukan kebijakan-kebijakan



pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, kekurangan kesadaran dan pendidikan di masyarakat tentang masalah-masalah lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang kritis terhadap perkembangan manusia. Dengan pertumbuhan ekonomi di Timor Lorosa'e, pengembangan sosial dan bertambahnya kesadaran akan masalah-masalah lingkungan hidup sangat diperlukan.

Kesimpulan

Analisis di atas menimbulkan kesimpulan-kesimpulan berikut:

- Pembiayaan tetap merupakan isu untuk pelaksanaan program-program dan proyek-proyek lingkungan hidup di Timor Lorosa'e. Akan tetapi, dengan pengurangan kebutuhan-kebutuhan rekonstruksi kritis, kesempatan untuk menentukan prioritas-prioritas yang meningkatkan kualitas lingkungan hidup seharusnya ditentukan. Dengan proses tersebut, rencana pembiayaan yang cocok dapat ditentukan.

- Ada keperluan untuk mendirikan suatu kerangka peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan lingkungan hidup yang khusus untuk Timor Lorosa'e, yang dirancang untuk memastikan bahwa biaya untuk pemeliharaan kualitas lingkungan hidup termasuk dalam modal swasta asing.
- Struktur administrasi pemerintahan Timor Lorosa'e harusnya mempermudah kemandirian dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, supaya memastikan bahwa potensi pembangunan jangka panjang negara ini tidak terancam oleh kegiatan-kegiatan yang tidak berkelanjutan.

Sesuai dengan semua aspek yang diuraikan di atas, saya mendorong pemimpin-pemimpin Timor Lorosa'e untuk memastikan bahwa UNTAET dan staf internasional di sini bekerja dengan rekan-rekan orang Timor Lorosa'e, supaya memenuhi tugas pentingnya, yaitu menuntun negara ini sampai mencapai kemerdekaan.

Referensi

- Anderson, 1990, Environmental Policy Implications for Low Revenue Developing Economies. *World Bank Research Paper* No, World Bank, New York.
- Fox, J.J. 2000, 'East Timor: the task of creating a new nation' in *The Maritime Dimensions of Independent East Timor*, eds Rothwell, R. Donald, Tsamanyi, Martin, Centre for Maritime Policy, University of Wollongong, Australia
- Ouattara, Alassane, D. 1997, Macro-economics and Sustainable Development. Address by the Deputy Managing Director of the International Monetary Fund at the World Bank's Fifth Annual Conference on Environmentally and Socially Sustainable Development.

Pertalian Antara Globalisasi, Perdagangan, Investasi dan Lingkungan

Ringkasan ¹

Helder Da Costa, Ph.D

Kepala, Pusat Penelitian, Universitas Nasional Timor Lorosa'e

Pendahuluan

Dalam perkembangan politik belakangan ini, keperluan untuk menyusun kembali ekonomi Timor Lorosa'e sudah memaksa para pembuat kebijakan Timor Lorosa'e untuk memikirkan kembali peran perdagangan dan investasi di dalam ekonomi, masyarakat dan lingkungan. Mulai dengan penerbitan Laporan Brundtland pada tahun 1987 (World Commission, 1987) prinsip pembangunan berkelanjutan sudah cepat menjadi hal penting dalam ekonomi Timor Lorosa'e.

Perhatian terhadap keberlanjutan menghadapkan para pembuat kebijakan perdagangan dengan tantangan yang berat: bagaimana membangun dorongan pasar yang tepat, struktur kelembagaan dan sistem teratur yang tidak hanya cocok dengan pembangunan yang berkelanjutan, tetapi juga menyumbang kepadanya. Untuk persoalan tersebut, para produsen, pemasok, produsen, badan marketing dan pemerintah perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang berikut:

- Bagaimana integrasi ekonomi dan lingkungan secara

internasional, yang sedang mendalam, mempengaruhi tujuan-tujuan kebijakan domestik Timor Lorosa'e?

- Bagaimana persetujuan perdagangan internasional dan lingkungan membentuk dan menghalangi bagaimana para penyandang dan pedagang menggunakan sumber-sumber alam?

Pertanyaan-pertanyaan seperti yang tersebut di atas menimbulkan permintaan-permintaan untuk negara-negara kecil, termasuk Timor Lorosa'e untuk menyumbang secara aktif, dengan cara-cara yang saling menyokong, kepada cita-cita bersama pembangunan berkelanjutan dan memperbaiki kualitas hidup.

Mengapa Pertalian antara Perdagangan dan Lingkungan bermakna

Selama dasawarsa terakhir ini ada kebangkitan dalam perhatian terhadap pertalian antara perdagangan dan Foreign Direct Investment (FDI) di satu sisi, dan di sisi lain standar-standar lingkungan.

Beberapa contoh dari perluasan masalah-masalah

¹ Diringkaskan oleh komite pengorganisasian

internasional yang berhubungan dengan lingkungan global adalah pemanasan global (global warming) dan penipisan ozon. Gas rumah kaca memperbesar perubahan iklim dan CFC mengurangi lapisan ozon, tanpa memperhatikan negara mana yang mengeluarkannya. Oleh karena itu ada kekuatiran bahwa apabila satu kumpulan negara mencoba memajak atau membujuk firma-firmannya supaya mengurangi emisinya, keuntungan lingkungan dari tindakan tersebut akan ditutupi apabila firma-firma tersebut memindahkan tempat kegiatannya kepada negara-negara dengan standar-standar yang lebih rendah (Anderson, 1996). Isu-isu tersebut memerlukan kerjasama secara internasional. Ini bisa dicapai dengan kepastian umum dan sistem bayaran, dan dengan koordinasi pengiriman internal dan tindakan nasional dalam negara-negara yang tidak mampu membayar.

Sumber-Sumber Timor Lorosa'e

Teori standar perubahan keuntungan komparatif di dalam ekonomi dunia yang sedang bertumbuh dibangun tanpa mempertimbangkan soal lingkungan, tetapi menurut Anderson (1996) bisa dirubah dengan mudah untuk memasukkan paling sedikit beberapa soal lingkungan.

Endowment triangle Leamer (Leamer 1987) bisa membantu menjelaskan jalan pembangunan suatu negara saat merubah keuntungan komparatifnya dari keadaan yang menggunakan banyak tenaga kerja pada yang memerlukan banyak modal. Teori yang didukung secara empiris, usulkan bahwa negara-negara bercenderung merubah keuntungan komparatifnya tahap demi tahap dari tanah dan industri yang menggunakan sumber-sumber alam kepada yang memerlukan modal dan keahlian (khususnya para produsen dan pelayan)

Perdagangan, Globalisasi dan Kebijakan Investasi bagi Timor Lorosa'e ²

Pengaruh proses globalisasi sudah terasa dalam ekonomi-ekonomi miskin. Keterbukaan dan saling ketergantungan antara ekonomi-ekonomi nasional memberikan kesempatan baik maupun tantangan untuk ekonomi-ekonomi miskin. Globalisasi meningkatkan keuntungan bagi ekonomi yang memilih pemerintahan yang baik, tetapi juga meningkatkan kerugian kepada ekonomi dengan pemerintahan ekonomis yang buruk.

Oleh karena sebagian besar basis politik dan birokratik Timor Lorosa'e dihancurkan pada tahun 1999, negara baru ini mempunyai kesempatan emas untuk memilih strategi pembangunan yang optimal. Keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi asing merupakan kunci untuk meningkatkan standar kehidupan dalam ekonomi seperti Timor Lorosa'e.

Kasper (2000) menegaskan bahwa disiplin eksternal tanpa syarat perdagangan bebas dan arus modal bebas akan menambah pengendalian konstitusional kekuasaan politik di dalam pemerintah kecil yang akan didirikan. Selanjutnya, Kasper menekankan bahwa keterbukaan

adalah cara untuk mengolah kebiasaan dan aturan main perilaku politik dan ekonomis yang perlu untuk kooperasi dan perukunan kembali.

Misi kebijakan perdagangan Timor Lorosa'e adalah untuk menetapkan kerangka kebijakan dan institusi yang luas untuk membangun kembali perdagangan dan industri, perusahaan dan kewiraswastaan untuk pembangunan berkelanjutan sosio-ekonomis Timor Lorosa'e (UNTAET 2000).

Salah satu pertanyaan penting: isu-isu kebijakan perdagangan yang mana yang akan menjadi terpenting bagi Timor Lorosa'e? Sifat-sifat dasar kebijakan perdagangan untuk pembangunan di Timor Lorosa'e termasuk yang berikut:

- Pembangunan kemampuan bagi birokrat-birokrat supaya memungkinkan mereka menghargai kebijakan-kebijakan sistem perdagangan yang terbuka;
- Memudahkan perdagangan, termasuk efisiensi dan transparansi administrasi cukai; dan
- Pencarian secara aktif jalur regional dan multilateral untuk memperluas keterbukaan pasar bagi para eksportir Timor Lorosa'e.

Diambil dari strategi pembangunan ekonomi yang baru dan pengalaman-pengalaman dari situasi-situasi pasca-konflik yang lain, prinsip-prinsip inti untuk strategi pembangunan baik dalam kerangka jangka menengah maupun kerangka jangka panjang bagi Timor Lorosa'e termasuk:

- Membangun ekonomi pasar dengan intervensi pemilih oleh negara yang berorientasi mengekspor dan berpandangan keluar;
- Menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia;
- Meletakkan landasan bagi pemerintahan yang baik, yang didasarkan demokrasi, pertanggungjawaban, transparansi dan hak asasi manusia.

Sangat membesarkan hati untuk menyatakan bahwa Timor Lorosa'e sudah mengikat diri pada mengikuti kebijakan perdagangan yang terbuka dan liberal, dan kerjasama regional dari permulaannya yang bertujuan mengintegrasikan ekonomi Timor Lorosa'e ke dalam pasar regional dan internasional.

Kebijakan Investasi Asing

Sesuai dengan strategi keterbukaan, Timor Lorosa'e mengambil kebijakan investasi liberal.

Pertanyaan kebijakan tepat yang ditanyakan pada permulaannya adalah apakah investasi asing harus didorong dalam semua sektor sebagai cara merangsang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, atau seharusnya pembatasan-pembatasan ditempatkan dalam beberapa bidang. Sudah nyata, ekonomi Timor Lorosa'e tidak akan bertumbuh kecuali apabila dapat mengatasi kekurangan kronis modal dan penarikan investasi. Larcombe (1999) mengusulkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam program prasarana mempunyai prioritas, penggunaan dana bantuan, pinjaman kelonggaran multilateral atau persekutuan

² Sebagian diambil dari Da Costa (2000)

³ Pernyataan Terinci Tujuan dan Strategi Pembangunan Ekonomi Timor Lorosa'e, Final Report of the East Timor Strategic Development Conference diadakan di Melbourne, 5-8 April 1999.



dengan sektor swasta mungkin akan merangsang investasi. Sektor-sektor kunci menurut Duncan (1999) termasuk tenaga, komunikasi dan transportasi, sedangkan Hill (2000) mengusulkan bahwa tantangan kebijakan FDI dasar berkenaan dengan resim pengaturan dan fiskal. Kedua-duanya harus dibina dengan sederhana dan secara transparan. Pada dasarnya apakah sektor-sektor atau kegiatan tertentu seharusnya ditutup pada FDI muncul pertanyaan politik. Supaya menarik investasi asing dalam sektor pertambangan, proyek pariwisata dan beberapa hasil bumi untuk perdagangan, hak-hak kepemilikan tanah harus ditetapkan disamping mencipta suasana pro-perusahaan dan stabilitas politik untuk melanjutkan pembangunan ekonomi bangsa.

Salah satu cara penting dalam mendorong investasi asing adalah dengan mendirikan kerangka hukum yang tepat. Undang-undang Investasi Asing Timor Lorosa'e sedang disiapkan dan kemungkinan besar akan disusun sesuai dengan standar praktek internasional sebagai akibat dari kehadiran PBB.

Strategi untuk mencipta lingkungan bersifat persaingan diperlukan untuk menghindari pengalaman banyak negara pulau kecil yang dieksploitasi dengan harga yang harus dibayar setelah korporasi global sudah mendirikan basis yang kuat. Sangat penting untuk mengembangkan kebijakan investasi asing yang menjelaskan secara terinci hak-hak legal dan obligasi perusahaan asing. Serupa dengan kebanyakan negara Kepulauan Pasifik yang sering menawarkan konsesi untuk menarik investasi, salah satu dilema yang dihadapi Timor Lorosa'e adalah bahwa korporasi yang sangat kuat mempunyai banyak pilihan lokasi global dan oleh karena itu memerlukan perangsang.

Jalan ke depan

Untuk memaksimalkan kesempatan-kesempatan daripada membuka ekonomi kepada perdagangan dan investasi asing, Timor Lorosa'e perlu membangun hubungan ekonomis bilateral dengan Indonesia dan negara-negara lain, khususnya Australia dan Selandia Baru, dan mencari keanggotaan dalam organisasi daerah dan multinasional. Ini sangat penting bagi negara yang mudah diserang seperti Timor Lorosa'e. Akan tetapi prioritas utama adalah menstabilkan hubungan bilateral dengan Indonesia, dimana pertukaran barang dagangan

akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomis. Sudah jelas bahwa Timor Lorosa'e harus mempertahankan rezim perdagangan yang terbuka. Hill (2000) menegaskan bahwa sekutu utama perdagangan yang tak dapat terelakkan adalah Australia dan Indonesia.

Prioritas kedua adalah keanggotaan ASEAN, sebagai penegasan mandat-mandat resmi Timor Lorosa'e sebagai anggota baru masyarakat negara-negara Asia Tenggara. Timor Lorosa'e perlu menyelidiki kemungkinan menjadi anggota ACP/Konvensi Lome dan World Trade Organisation (WTO), atau paling sedikit anggota yang tidak resmi, supaya dapat belajar lebih banyak tentang manfaat-manfaat sistem perdagangan yang berdasarkan pada peraturan.

Kesimpulan

Sebagai penutup, meskipun ukuran kecilnya dan permulaan yang lambat, ada kesempatan untuk menempatkan kebijakan dalam dan luar negeri yang dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi

Makalah ini berusaha untuk memusatkan perhatiannya kepada keperluan untuk strategi yang berpandangan luas bagi Timor Lorosa'e sebagai bagian daripada pembangunan strategis secara menyeluruh. Potensi ekonomis Timor Lorosa'e terkait erat dengan perkembangan eksternal. Peningkatan kerjasama ekonomi internasional dan peningkatan dalam perhatian terhadap soal lingkungan baik di dalam maupun diluar negeri, sudah memaksakan para pembuat kebijakan Timor Lorosa'e untuk berantisipasi peran yang bisa dimainkan oleh perdagangan dan investasi di dalam ekonomi, masyarakat dan lingkungan.

Makalah ini mengusulkan bahwa walaupun mempunyai landasan ekonomi yang rendah, Timor Lorosa'e berkemungkinan memperoleh keuntungan terbesar memakai kebijakan investasi dan perdagangan yang liberal dan transparan di dalam negeri untuk memastikan negaranya mengambil kesempatan untuk berintegrasi ekonominya dengan daerahnya dan diluar daerahnya.

Kebijakan yang berpandangan kedepan akan memaksimalkan kesempatan-kesempatan untuk membuka diri terhadap perdagangan dan investasi asing yang pada saat yang sama tidak akan merugikan lingkungan.

Referensi

- Anderson, Kym (ed) (1996), *Strengthening the Global Trading System, from GATT to WTO*, Centre for International Economic Studies, Adelaide.
- Da Costa, Helder (2000), *Building East Timor's Economy: The Roles of Foreign Aid, Trade and Investment*, Unpublished PhD Thesis, School of Economics, Adelaide University, South Australia.
- Duncan, Ron (1999), *Development Lessons for East Timor*, Bulletin of Indonesian Economic Studies 35 (1): 129-32.
- Hill, Hal (2000), *East Timor Development Policy Challenges for the World's Newest Nation*, Working paper No. 2000/09, RSPAS, ANU, Canberra.
- Kasper, Wolfgang (2000), *A Recovery Plan for East Timor*, Policy, Summer, Canberra.
- Larcombe, Graham (1999), *East Timor: Prospects and Economic Policy Options*, Paper presented at the Strategic Development Planning for East Timor Conference, Melbourne, 5-8 April.
- Leamer, Edward E. (1984), *Sources of International Comparative Advantage, Theory and evidence*, MIT Press, Cambridge MA.
- UNTAET (2000), *Trade Policy Objectives*, Trade, Tourism, and Commerce Division (<http://www.gov.east-timor.org/English>).
- World Commission on Environment and Development (1987), *Our Common Future*, Oxford Univeristy Press, London.

Perdagangan, Globalisasi dan Lingkungan Hidup

Victoria Pettit
Protimos Foundation

Sumber daya alam seperti tumbuhan dan binatang liar, pohon-pohon dan bibit-bibit merupakan sumber daya hayati yang menyediakan antara lain makanan, taman-tanaman dagangan, dan obat-obatan. Sebagian besar perdagangan di tingkat global merupakan perdagangan sumber daya hayati dan produk-produk hasilnya.

Sudah terjadi peningkatan besar dalam perdagangan global yang menyebabkan peningkatan penekanan pada sumber daya hayati, sampai sumber daya hayati tersebut menjadi langka atau bahkan punah sama sekali. Hal tersebut merupakan hal yang penting karena:

- Apabila suatu sumber daya alam hilang (mis. kayu cendana), perdagangan sumber alam tersebut tidak dapat diteruskan, sehingga penghasilan dari perdagangan sumber alam tersebut juga hilang;
- Pengurangan dalam jumlah dan keanekaragaman sumber daya hayati. Pengurangan demikian merusak bumi kita dengan merusak atau menghancurkan total ekosistem yang kita andalkan;
- Banyak unsur keanekaragaman hayati mempunyai kegunaan medis (obat-obatan) yang belum diketahui, dan akan hilang selamanya apabila dirusak;
- Pada umumnya sumber daya alam menambah kualitas hidup.

Ada beberapa cara yang diusulkan supaya perdagangan sumber daya hayati, termasuk produk-produk obat-obatan, dapat bermanfaat terhadap negara dan masyarakat dari mana sumber daya alam tersebut diambil, dan bermanfaat untuk masyarakat yang pengetahuannya membantu proses pembuatan produk-produk tersebut. Sangat penting bahwa mekanisme struktural dan hukum diterapkan untuk pengelolaan sumber daya hayati, supaya tidak dirusak dan dapat ikut serta dalam pembangunan berkelanjutan. Contoh yang akan saya berikan di sini adalah mengenai produk medis, tetapi prinsip yang sama dapat diterapkan untuk produk-produk yang lain.

Pembangunan teknologi sudah menunjukkan bahwa banyak sumber daya hayati yang ditemukan di negara-negara yang masih berkembang dapat digunakan untuk membuat barang-barang dagangan dan medis yang berguna. Perusahaan, yang biasanya berasal dari negara-negara yang sudah berkembang, mempunyai uang dan teknologi untuk menjalankan penelitian, dan mengembangkan produk-produk sesuai dengan hasil penelitian tersebut. Apabila suatu proyek penelitian berhasil, dan produk baru, seperti obat-obatan baru, dihasilkan, perusahaan yang menghasilkan produk tersebut dapat mendapat banyak uang dari penjualannya.

Kedua demikian terjadi karena produk-produk tersebut dilindungi oleh "hak cipta" atas ide-ide dan pengetahuan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Apabila sudah diterapkan "hak cipta", tidak ada seseorang atau suatu perusahaan yang boleh (secara hukum) membuat atau memperbanyak produk tersebut.

Sistem perlindungan hukum ini dikenal sebagai "intellectual property" (kepemilikan intelektual). Suatu produk terbuat dari sumber daya hayati yang diambil dari negara masih berkembang, pengetahuan mengenai guna dan manfaat produk tersebut didapat dari pengetahuan masyarakat tradisional, akan tetapi masyarakat di negara itu tidak pernah menerima manfaat atas pembuatan produk tersebut.

Pada tahun 1992, undang-undang internasional yang bernama Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati ditandatangani sebagai jawaban atas keprihatinan internasional akan hilang dan rusaknya sumber daya hayati di seluruh dunia, serta ketidakadilan praktek perdagangan terhadap sumber daya hayati tersebut. Tujuan-tujuan Konvensi tersebut adalah sebagai berikut:

- Perlindungan keanekaragaman hayati
- Penggunaan secara berkelanjutan komponen-komponen keanekaragaman, misalnya sumber daya genetik
- Pembagian secara adil dan seimbang manfaat dan keuntungan dari penggunaan sumber daya genetik.

Konvensi tersebut mengakui bahwa semua negara berhak mengelola akses terhadap sumber daya alamnya sendiri, dan mengakui peran penting pengetahuan dan kebiasaan tradisional, serta masyarakat tradisional, terhadap pelestarian sumber daya alam.

Konvensi menguraikan beberapa cara agar tujuan-tujuannya dapat tercapai:

- Akses terhadap sumber daya genetik hanya bisa didapatkan apabila negara pemilik sudah memberi izin, dan hanya bila pemerintahan dan masyarakat di negara pemilik sudah diberitahu mengenai maksud dan tujuan perusahaan atau pengusaha yang ingin mengakses sumber daya alam tersebut.
- Teknologi-teknologi yang berkaitan dengan pelestarian atau penggunaan sumber daya genetik seharusnya diberikan kepada negara-negara lain yang sudah menandatangani konvensi tersebut, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang adil.
- Hasil dan keuntungan dari penelitian terhadap sumber daya genetik, dan pengembangan sumber daya genetik tersebut, harus dibagi secara adil dan seimbang.

Mekanisme-mekanisme tersebut hanya akan berlaku di Timor Lorosa'e apabila dilaksanakan dalam bentuk undang-undang nasional, dan lembaga-lembaga dan praktek-praktek di tingkat pemerintahan dan di tingkat lokal. Walaupun Timor Lorosa'e di masa depan mungkin tidak ingin menandatangani konvensi, tetapi kita masih harus mempertimbangkan cara bagaimana mengatur akses terhadap sumber daya hayati. Lebih baik memanfaatkan mekanisme dan syarat-syarat yang tercatat di Konvensi supaya mengatur akses terhadap sumber daya hayati, dan memastikan pembagian hasil pengolahan sumber daya alam tersebut secara adil untuk

masyarakat Timor Lorosa'e.

Satu cara untuk melakukan demikian adalah dengan menjalin hubungan di antara konsep "kepemilikan intelektual" terhadap produk-produk, dengan tujuan-tujuan dan mekanisme-mekanisme yang tercatat di Konvensi. Suatu contoh datang dari India. Di sana ada tanaman yang disebut "Jeevani". Tanaman tersebut mempunyai banyak manfaat kesehatan, yang sudah lama diketahui dan digunakan masyarakat setempat, yang dikenal sebagai suku Kani. Sebuah lembaga mendapat pengetahuan mengenai tanaman "Jeevani" dari konsultasi dengan suku Kani. Kemudian lembaga tersebut membuat penelitian terhadap tanaman "Jeevani", dan bagaimana bisa mengambil manfaat-manfaat yang memberi kesehatan dari tanaman tersebut.

Lembaga tersebut diberi hak paten (salah satu bentuk kepemilikan intelektual) terhadap proses pengeluaran unsur-unsur kesehatan dari tanaman tersebut, supaya perusahaan lain atau orang lain tidak boleh mengeluarkan unsur-unsur kesehatan tanaman "Jeevani" tanpa membayar pada lembaga tersebut. Kemudian lembaga tersebut menjual ijin pada perusahaan lain, supaya perusahaan itu dapat memakai pengetahuan lembaga pertama tentang cara pengeluaran unsur-unsur kesehatan dari tanaman "Jeevani" untuk membuat produk-produk kesehatan berdasarkan tanaman "Jeevani". Jadi baik lembaga dan perusahaan mendapat banyak uang dari penggunaan tanaman "Jeevani". Akan tetapi baik tanaman "Jeevani" maupun

pengetahuan mengenai penggunaannya sebetulnya didapat dari suku Kani, yang tidak pernah diberitahu tentang semua peraturan hukum yang diuraikan di atas.

Pertanyaannya adalah: Apa hasil proses tersebut untuk suku Kani? Bagaimana mereka dapat memperoleh untung atas pemanfaatan pengetahuan tradisionalnya oleh perusahaan dan organisasi moderen?

Dalam hal ini, perusahaan setuju untuk membagi bayaran atas hak cipta dan penghasilan lain dengan suku Kani, maka mereka membuat persetujuan legal secara sukarela. Mekanisme legal sangat penting di tingkat pemerintah dan di tingkat lokal, supaya perusahaan wajib membuat suatu persetujuan demikian. Pembuatan persetujuan demikian membantu memastikan bahwa pengetahuan tradisional mengenai keanekaragaman hayati dihargai.

Terdapat banyak cara bagaimana mekanisme legal dapat diterapkan, misalnya terhadap hak ijin dan struktur pembayaran. Akan tetapi hal yang paling penting adalah untuk memastikan bahwa perdagangan sumber daya hayati akan menguntungkan masyarakat Timor Lorosa'e secara berkelanjutan dengan pemakaian mekanisme legal dan struktural yang cocok. Maka masalah peraturan terhadap akses dan mekanisme perdagangan berkelanjutan harus dibahas. Saya menyarankan bahwa Timor Lorosa'e memakai mekanisme yang terdapat di Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati.

Perdagangan, Industri, dan Pembangunan yang Berkelanjutan

Dr. Arthur J. Hanson

Institut Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan (International Institute for Sustainable Development (IISD))

Pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat sipil sedang mendorong perubahan dalam persetujuan-persetujuan dan standar-standar perdagangan dengan cara baru yang tidak terbayangkan sepuluh atau lima belas tahun yang lalu. Pembaharuan-pembaharuan tersebut ada yang sukarela, tetapi sedikit demi sedikit akan bersifat mengikat. Pembaharuan-pembaharuan di bidang-bidang lain dapat mengubah standar-standar yang lama. Perubahan-perubahan tersebut secara menyeluruh akan mempengaruhi kerja Organisasi Perdagangan Sedunia (World Trade Organisation- WTO), persetujuan-persetujuan di suatu daerah, aturan-aturan "phytosanitary", keuangan ekspor (export financing) dan agen-agen penanam modal, dan juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan di dunia usaha. Tidak ada negara besar atau kecil yang tidak akan diawasi, dan mungkin akan diberi sanksi, apabila melanggar peraturan-peraturan pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, peraturan-peraturan perdagangan dan lingkungan hidup mungkin dapat dianggap sebagai perlindungan yang berlebihan (protectionism), dan biaya untuk mengikuti aturan-aturan tersebut dapat menjadi beban besar untuk usaha-usaha kecil. Walaupun demikian kesempatan-kesempatan ekonomi baru dapat berkembang. Sekarang, masalah perdagangan, lingkungan hidup, dan pembangunan tidak terkait dan dapat menimbulkan masalah, dan perlu juga dibicarakan di tingkat internasional dan tingkat daerah. Ketidak-terkaitan tersebut hanya akan diselesaikan apabila ada pembicaraan tentang perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, daripada tidak membicarakan masalahnya.

Pembahasan

Perdagangan seharusnya merupakan alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu, pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, selama dekade terakhir ini, pengamat perdagangan tidak setuju dengan adanya peraturan-peraturan pelestarian lingkungan hidup,

sedangkan pengamat lingkungan hidup menginginkan peraturan-peraturan perdagangan diubah agar tidak merusak lingkungan hidup. Negara-negara yang sedang berkembang tidak menginginkan perlindungan yang berlebihan, dan yang mereka inginkan adalah jalan

masuk yang lebih mudah ke pasar internasional. Perselisihan-perselisihan ini dibicarakan di pertemuan WTO di Seattle pada tahun 1999. Sementara itu, ada banyak pembaharuan-pembaharuan selain di bidang perdagangan yang dimulai oleh dunia usaha, organisasi pembeli, dan organisasi perlindungan lingkungan hidup. Organisasi-organisasi tersebut menginginkan "ecolabelling" (memberi label yang menunjuk apabila sesuatu dibuat secara ekologis). Misalnya, *ISO 14001*, *Environmental Management Certification*, *Forest Stewardship Council*, dan *Marine Stewardship Council Certification*, yang berkaitan dengan bidang kehutanan dan pemancingan, serta *Green Globe Label* untuk usaha-usaha yang bertanggung jawab melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Semua usaha tersebut dilaksanakan agar dapat menunjukkan kerelaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga terjadi persaingan di antara usaha masing-masing. Institut Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan (IISD) sudah mendefinisikan beberapa hal yang diperlukan agar terjalin hubungan yang baik di antara bidang perdagangan dan bidang pembangunan berkelanjutan. Peraturan-Peraturan perdagangan seharusnya mengikuti peraturan-peraturan perlindungan lingkungan hidup, meningkatkan penanaman modal ekonomi dan pembangunan, dan meningkatkan kemakmuran sosial, daripada mengurangi keberhasilan hal-hal tersebut. Ada tujuh prinsip yang menunjukkan hubungan ini: efisiensi, internalisasi biaya, keutuhan lingkungan hidup, keadilan, ilmu pengetahuan alam dan pencegahan risiko, kerjasama internasional, dan keterbukaan.

Kesulitan yang terus menerus dalam mencapai keberhasilan pada tingkat internasional merupakan masalah baik untuk negara-negara kaya, maupun untuk negara-negara miskin. IISD mengeluarkan dokumen tentang perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, dan tentang apa yang dibutuhkan apabila ada keinginan untuk maju dalam bidang tersebut. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengikuti kepentingan-kepentingan pembangunan saja tidak akan mengarah pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, sedangkan mementingkan masalah-masalah lingkungan hidup saja tidak akan menyelesaikan masalahnya.
- Harus ada saling pengertian di antara bidang lingkungan hidup dan bidang perdagangan, dan harus ada pengertian tentang keinginan dan kebutuhan negara-negara yang sedang berkembang.
- Pengamat-pengamat lingkungan hidup harus bertindak agar masalah-masalah lingkungan hidup tidak menjadi masalah perlindungan yang berlebihan.
- Hubungan antara bidang lingkungan hidup dan bidang perdagangan adalah sangat berbeda sekali apabila dibandingkan dengan hubungan antara bidang perburuhan dan bidang perdagangan. Hubungan di antara bidang lingkungan hidup dan bidang perdagangan membutuhkan kerjasama internasional yang sangat luas, sehingga sistem peraturan-peraturan perlindungan lingkungan hidup dapat dilaksanakan.

- Memisahkan bidang lingkungan hidup dan bidang perburuhan akan menyebabkan kesulitan karena hak-hak buruh, keadilan sosial, dan peraturan perlindungan lingkungan hidup saling terkait.
- Walaupun masalah perburuhan memang terkait, masalah-masalah perburuhan tersebut biasanya tidak diselesaikan secara internasional karena dapat diselesaikan pada tingkat nasional, dan kerjasama dengan Organisasi Buruh Sedunia (International Labour Organisation- ILO), dimana serikat buruh mempunyai kekuasaan yang diakui.
- Ada persepsi bahwa agenda lingkungan hidup di WTO didorong oleh negara-negara yang sudah berkembang dan masalah lingkungan hidup seringkali dianggap kurang penting untuk negara-negara yang sedang berkembang. Agenda lingkungan hidup yang lebih seimbang perlu dilaksanakan karena kepentingan-kepentingan negara-negara yang sedang berkembang seringkali tidak dihiraukan dalam forum internasional.
- Adalah salah apabila kita menganggap masalah pembangunan dan masalah lingkungan hidup sebagai dua masalah yang tidak berkaitan. Tujuan-tujuan pelestarian lingkungan hidup tidak bisa tercapai di forum internasional apabila tidak ada keadilan untuk negara-negara yang sedang berkembang. Sedangkan tujuan-tujuan pembangunan tidak bisa tercapai apabila lingkungan hidup dirusak.
- Organisasi-organisasi yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama seharusnya bekerja sama untuk mengubah sistem perdagangan internasional, dan cara kerja WTO.

Perubahan-perubahan seperti itu harus mementingkan:

- ❖ WTO harus menerima bahwa sistem perdagangan internasional harus mendukung dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh di setiap negara.
- ❖ Mementingkan masalah-masalah yang terjadi sebab kebebasan perdagangan, yang mempengaruhi usaha-usaha kecil, masyarakat desa, pertumbuhan ekonomi, atau lingkungan hidup.
- ❖ Berusaha agar sistem perdagangan dan sistem lingkungan hidup internasional saling berkaitan dan mendukung, dengan meninjau kembali persetujuan-persetujuan perdagangan.
- ❖ Berusaha agar negara-negara yang sedang berkembang dapat mengambil peran yang lebih besar di dalam forum WTO.
- ❖ Meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat sipil di negara-negara yang sedang berkembang, untuk mementingkan kebijaksanaan perdagangan, dan menuntut perubahan-perubahan yang mengutamakan pembangunan berkelanjutan di WTO.
- ❖ Mementingkan masalah-masalah pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan yang menjadi masalah besar di *Uruguay Round*, termasuk kemungkinan ada beberapa persetujuan yang harus dirubah, dan meningkatkan kesempatan untuk ikut berperan pada organisasi masyarakat sipil, sambil meningkatkan sifat terbuka di WTO.



- Perubahan-perubahan tersebut seharusnya dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan sistem perdagangan, dan aturan-aturan lembaga-lembaga umum. Walaupun demikian, ada beberapa kepentingan yang dapat ditangani oleh lembaga-lembaga swasta. Tidak hanya di sektor umum, tetapi juga sektor swasta yang dapat ikut berperan di dalam sistem perdagangan.
- Pengamat-pengamat lingkungan hidup seharusnya dengan nyata menyatakan ketidak-setujuannya dengan perlindungan yang berlebihan. Mereka menganggap perlindungan yang berlebihan sebagai sesuatu yang tidak baik untuk perdagangan, tidak baik untuk lingkungan hidup, dan tidak baik untuk pembangunan.
- Pengamat-pengamat tersebut seharusnya melaksanakan agenda lingkungan hidup di WTO yang dapat diikuti baik oleh negara-negara yang sudah berkembang, maupun oleh negara-negara yang sedang berkembang.
- Pengamat-pengamat lingkungan hidup seharusnya mendukung usaha-usaha untuk melaksanakan sistem peraturan yang mengurangi pertentangan di antara masalah kebebasan perdagangan dan pengelolaan lingkungan hidup. Walaupun melaksanakan peraturan-peraturan itu sangat sulit, memang harus dilaksanakan agar perlindungan lingkungan hidup

tercapai.

- Negara-negara yang sedang berkembang harus diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat di forum WTO. Perlindungan lingkungan hidup dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa dukungan negara-negara yang sedang berkembang.

Di kawasan Asia, APEC dan ASEAN dapat dijadikan tempat untuk melaksanakan sistem perdagangan dan pembangunan berkelanjutan. Tetapi apabila dibandingkan dengan kesepakatan daerah lainnya seperti NAFTA (Amerika Serikat), Maastricht (Uni Eropa), dan Mercosur (Amerika Latin), kemajuan sekarang ini sangat terbatas. International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) adalah tempat yang digunakan untuk mencari informasi tentang negosiasi yang sedang berjalan.

Beberapa persetujuan internasional dan daerah akan mempengaruhi beberapa industri di Timor Lorosa'e, seperti industri kopi dan industri kayu. Industri-industri tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan keberhasilan industri pemancingan, minyak dan gas di Timor Lorosa'e. Bahkan ada jenis penanaman asing di Timor Lorosa'e diharapkan mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pertanian Timor Lorosa'e: Sebuah Tinjauan Peralihan Pembangunan

Jose D. R. J. Abel

Jakultas Ekonomi, Universitas Nasional Timor Lorosa'e

"Hanya dengan wawasan lingkungan, pembangunan dapat memberi manfaat kepada manusia, dan hanya dengan manusia yang memiliki 'environmental sense yang baik', pembangunan akan dapat mengarah kepada pengetrapan prinsip-prinsip konservasi, keanekaragaman, keseimbangan dan keserasian secara optimal untuk generasi berikutnya". Seandainya Charles Darwin menulis bukunya di awal Millenium III ini, karya besarnya mungkin akan diberi judul "The Disappearance of the Species". Pada tahun 1869, Darwin melalui gubahannya "The Origin of the Species" telah mencetuskan sebuah revolusi intelektual dan menjadi perdebatan di antara para ahli waktu itu dan sesudahnya. Seperempat abad kemudian, planet bumi mengalami perubahan yang besar, mulai dari kehilangan berbagai jenis makhluk dan tumbuhan dalam jumlah besar yang sebelumnya belum pernah terjadi. Demikian pula ekologi kehidupan di bumi maupun di atmosfer telah pula mengalami perubahan besar yang mengancam kehidupan di planet ini.

Tidak ada contoh kehancuran yang lebih relevan dan tragis daripada bencana kelaparan yang melanda kebanyakan negara di benua Afrika. Baru saja di tahun 1970, negara-negara di Afrika mampu berswasembada pangan, tetapi di tahun 1980, sekitar 140 juta penduduknya dari keseluruhan 530 juta terpaksa "disuapi" pangan dari luar negeri (*State of the World*, 1987). Masyarakat umumnya, dan pers khususnya,

masih tetap mengaitkan bencana kelaparan di atas dengan "kemarau panjang". Padahal, kemarau panjang walaupun merupakan suatu kejadian yang menakutkan, bukanlah unsur sebab utama. Kemarau panjang hanya merupakan akibat akseleratif yang membawa kemerosotan kuantitas produksi (pertanian) dan kemerosotan kualitas kehidupan manusia yang terus berlangsung menuju kepada suatu "titik perhatian". Kemerosotan ini terutama berkaitan dengan tiga kecenderungan pokok, yakni: 1) tingginya tingkat pertumbuhan penduduk 2) penggundulan hutan dan erosi tanah yang meluas, dan 3) kegagalan pemerintah-pemerintah di Afrika dalam memberikan perhatian yang memadai dan dukungan yang dibutuhkan oleh sektor pertanian yang berurusan langsung dengan kebutuhan dasar manusia.

Demikian pula di Timor Lorosa'e, masa pergolakan dan okupasi Indonesia lebih memperparah sumber daya yang ada. Akibat tindakan opresif regim pendudukan, sumber daya pertanian yang ada mengalami pengrusakan dalam operasi-operasi militer. Juga terjadi penurunan jumlah ternak yang tajam, demikian pula sarana dan prasarana pertanian yang lain dan perkembangan ini ikut menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan.

Dalam dekade-dekade terakhir ini, terjadi beberapa perbaikan dalam teknologi produksi serta infrastruktur telah menunjukkan hasilnya, khususnya pada komoditas

beras dan jagung. Demikian pula secara perlahan, terjadi peningkatan dalam jumlah populasi ternak.

Beberapa kemajuan dan perbaikan di atas tidak bertahan lama, karena beberapa saat kemudian pemerintah okupasi menurunkan “program pembumihangusan” yang paling tragis yang berdampak secara luas pada semua aspek kehidupan masyarakat serta sumber daya tumpuan hidup (petani) Timor Lorosa’e.

Sektor pertanian di Timor Lorosa’e merupakan sektor ekonomi yang penting, baik dilihat dari kontribusinya yang dominan dalam GNP maupun kapasitasnya dalam penyerapan tenaga kerja dan besarnya jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini, di samping sebagai penyedia bahan pangan untuk konsumsi nasional dan mungkin ekspor. Multi fungsi sektor pertanian sebagaimana digambarkan di atas bertumpu pada sumberdaya yang secara potensial dapat dikatakan cukup besar, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.

Pertanian dan lingkungan-alam bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dan saling berpengaruh satu sama lain. Aktivitas produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia sering dimanifestasikan melalui berbagai upaya untuk mempengaruhi bahkan mengubah lingkungan sekitarnya agar dapat memberikan hasil yang lebih baik.

Dalam hubungan ini, terdapat dua pandangan akan kedudukan manusia terhadap lingkungan. Pandangan pertama, manusia adalah penguasa alam lingkungan, dan dapat berbuat menurut kehendaknya dalam memanfaatkan sumberdaya lingkungan yang ada. Pandangan ini adalah pandangan optimis yang menempatkan manusia terlepas dari alam dan setiap masalah lingkungan yang timbul sebagai akibat suatu kegiatan, pasti dapat ditanggulangi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pandangan kedua manusia merupakan bagian dari alam sehingga setiap tindakan manusia harus tidak menimbulkan kerusakan. Pandangan yang terakhir mulai berkembang setelah terjadinya banyak masalah dimana daya dukung lingkungan-alam semakin menurun atau melampaui ambang batas kritis.

Timor Lorosa’e dapat dikatakan berpenduduk relatif kecil (863 617 jiwa). Apabila kita menelusuri perkembangan pemanfaatan potensi sumber daya pertanian yang ada, dapat dikatakan masih sangat rendah. Dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, sektor pertanian memiliki potensi relatif besar dalam menopang perekonomian nasional, terutama dalam mengangkat tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Namun, ironisnya mayoritas penduduk yang bergelut di sektor produksi pertanian masih berada pada suatu kondisi sosial-ekonomi yang memprihatinkan dengan tingkat pendapatan perkapita yang rendah atau sangat rendah.

Aktivitas produksi pertanian semakin meningkat seiring dengan semakin bertambahnya populasi penduduk. Pertambahan populasi penduduk ini, menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan pangan untuk konsumsi maupun kebutuhan industri dan sebagai komoditi perdagangan. Kecenderungan yang umum terjadi ialah upaya menaikkan kualitas

hidup selalu disertai oleh kenaikan konsumsi sumberdaya dan akibat-akibat penyertainya. Dalam kerangka ini, aspek-aspek penting dan berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian yang perlu dikaji adalah:

- (1) Aspek pertambahan populasi penduduk,
- (2) Aspek pencemaran lingkungan,
- (3) Aspek kemampuan, kesesuaian dan daya dukung lahan dan,
- (4) Pengaruh timbal-balik kegiatan produksi dan lingkungan.

Lalu bagaimana pembangunan pertanian Timor Lorosa’e di era kemerdekaan?

Mengacu pada paparan profil pertanian Timor Lorosa’e di atas, beberapa tantangan dilihat dari aspek teknis, sosial dan ekonomi adalah relevan untuk diangkat disini, untuk selanjutnya menjadi pemikiran bersama, yakni:

- ❖ Bagaimana meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian Timor Lorosa’e?
- ❖ Bagaimana menciptakan sentra-sentra produksi yang mengacu pada comparative advantage atau spesialisasi produksi setiap daerah?
- ❖ Bagaimana aktivitas produksi pertanian dapat memperluas peluang usaha dan menciptakan kesempatan kerja bagi para pencari kerja yang makin membesar mulai dengan kegiatan produksi sampai kepada pemasaran, konsumsi antara dan konsumsi akhir?
- ❖ Bagaimana fasilitas perkreditan yang mudah dijangkau oleh petani kecil kita?

Sampai sejauh mana efisiensi dan efektivitas penggunaan/pemanfaatan dana bantuan baik multilateral atau bilateral dalam pembangunan pertanian dan serta bagaimana dampak akseleratifnya terhadap perekonomian pedesaan serta hubungannya dengan era globalisasi dan eko-labeling yang telah melanda kehidupan kita? Dengan pemikiran bahwa Timor Lorosa’e sebagai suatu negara yang giat mempersiapkan kemerdekaan penuh beberapa waktu mendatang, dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif sangat rendah, pembangunan mutlak perlu dilakukan dan merupakan satu-satunya jalan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat. Fase ini adalah fase penting dalam pencaharian bentuk dan pendekatan pembangunan nasional, khususnya pembangunan pertanian yang dapat diadaptasikan dengan kondisi alam dan perkembangan sosial-ekonomi-budaya masyarakat Timor Lorosa’e.

Sistem pembangunan pertanian di era baru ini, peranan dan partisipasi masyarakat petani harus diperbesar sejak dari perancangan program dan implementasinya. Intervensi pemerintah harus diperkecil atau bahkan ditiadakan. Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan pengambil kebijakan pembangunan serta regulasi-regulasi untuk implementasi pembangunan pertanian. Aktivitas produksi pertanian di era inipun di samping meningkatkan produksi, harus disertai perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana dipaparkan di atas adalah kemandirian dan berorientasi futuristik. Dalam hubungan ini, keberkelanjutan pembangunan pertanian yang terintegratif baik ke



pasaran domestik maupun internasional dapat dicapai bila terjadi:

- 1) efisiensi produksi,
- 2) investasi,
- 3) diversifikasi produksi dan
- 4) keseimbangan eksternal dalam perekonomian nasional.

Di samping itu, secara ekologi untuk menjamin keberlanjutan pembangunan pertanian melalui interaksi manusia dan lingkungan, 5 unsur kunci perlu dikedepankan yaitu:

- 1) Keanekaragaman hayati (Biological diversity),
- 2) Konservasi ekosistem (Ecosystem conservation),

- 3) Kesalingterkaitan antar unsur-unsur alamian dalam aktivitas produksi (Interconnectedness),
- 4) Meminimalisasi tingkat kerusakan lingkungan dan
- 5) Kontrol dampak-dampak aktivitas produksi pertanian dan aktivitas sektor ekonomi terkait.

Kesalingterkaitan antara unsur-unsur lingkungan serta aktivitas sektor lain terkait dan tidak terkait turut menentukan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Keseimbangan yang tercipta dapat memberi suatu jaminan kesejahteraan dan keberlanjutan produksi pertanian baik untuk generasi sekarang dan generasi berikutnya.

Pertanian Organik

Scott Kinnear

Ketua, Federasi Organik Australia

Pendahuluan

Pertanian organik ada banyak macam, mulai dari pertanian perusahaan besar, dengan banyak pemakaian pupuk alami dan mesin-mesin, sampai pertanian untuk sekedar menyambung hidup tanpa masukan apa-apa kecuali kerja petani. Dalam banyak kasus, masyarakat dari dulu selalu bertani secara organik, tanpa tahu tentang istilah itu. Dalam banyak kasus lain, "organik" merupakan istilah yang muncul di negara-negara di mana pertanian industrial merupakan cara pertanian yang utama.

Petani-petani, setelah melihat penurunan kualitas tanah yang disebabkan oleh pupuk yang dilarutkan air dan pestisida, mengembangkan konsep pertanian organik, yang sekarang sudah diformalisasi dalam standar-standar dan sertifikasi di seluruh dunia. Badan Internasional Pengerakan Pertanian Organik (IFOAM) beranggotakan 700 organisasi dari seluruh dunia, dan lebih dari 200 di antaranya merupakan organisasi yang berfungsi sebagai organisasi pemberi sertifikasi. Sistem sertifikasi formal merupakan sistem yang lebih umum di pasaran negara-negara yang sudah berkembang seperti Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Australia, dan dalam kebanyakan kasus, sistem sertifikasi negara-negara sedang berkembang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasaran negara-negara yang sudah berkembang.

Para pemakai juga makin berkeinginan untuk menghindari produk-produk dari pertanian industrial, dan sebaliknya ingin memakai produk-produk makanan dengan serat yang organik. Pasar produk-produk organik yang sudah diterangkan sekarang sudah bernilai \$20 milyar USD pertahun, dan diperkirakan akan sampai \$100 milyar USD sampai tahun 2006.

Selama kita menghadapi perluasan tanah yang makin berkurang karena makin bertambahnya penduduk, dan adanya kerusakan di tingkat yang tidak pernah terjadi sebelumnya pada tanah-tanah yang bisa ditanai, penting sekali bagi kita membahas arti pembangunan berkelanjutan, dan cara mencapainya.

1. Peranan petani-petani industri kecil dalam pemberian sertifikasi lokal dan daerah, dan pembangunan pasaran domestik dan ekspor dan penanam kecil.

Petani industri kecil tidak hanya penting dalam pelaksanaan pertanian yang berkelanjutan, tetapi juga penting sekali untuk pemeliharaan dan kesehatan masyarakat pedesaan. Petani-petani industri kecil memasukkan lebih banyak manfaat pada masyarakat pedesaan daripada petani-petani perusahaan besar. Bahkan, petani-petani industri kecil merupakan petani-petani keturunan, dan merekalah yang paling cocok untuk mengambil keputusan-keputusan tentang pemakaian tanah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan pembaharuan tanah. Kami menganjurkan kebijakan dukungan untuk petani-petani industri kecil, memberikan hak akan tanah dan bantuan yang sesuai kepada mereka dengan penelitian, pembangunan, nasehat dan penyuluhan supaya mereka mendapat hasil pertanian yang menguntungkan sambil memperbarui tanah yang sudah rusak dan menghasilkan makanan yang berkualitas paling bagus, untuk dimakan. Pengembangan pasaran pertama harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan lokal dan daerah, dan kedua memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pasar ekspor. Tidak mengejutkan bahwa lebih dari 70% dari negara-negara di dunia mengalami kekurangan makanan, tetapi tetap mengeksport komoditi untuk mendapat uang.

Sertifikasi diperlukan supaya mendapat akses ke pasar Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Timor Lorosa'e seharusnya bersifat bijaksana dalam pemakaian sertifikasi untuk mendapat akses ke pasar-pasar, dan memperkenalkan sertifikasi domestik yang tepat guna apabila diperlukan. Di Australia, belum ada syarat-syarat yang bersifat wajib untuk penanam yang menyediakan pasar domestik. Apabila memungkinkan, rencana penerangan penanam industri kecil akan mengurangi biaya sertifikasi, yang cenderung lebih mahal di negara-negara yang sedang berkembang.¹

Koperasi juga merupakan struktur yang bagus sekali untuk pengolahan, transportasi, dan pemasaran produk-produk organik, sehingga mengurangi biaya sertifikasi.

2. Mengapa masyarakat suka membeli produk-produk organik? Apa yang dilakukan untuk memasarkan produk-produk organik?

Orang-orang membeli produk-produk organik karena berbagai alasan. Orang mungkin membeli produk-produk organik untuk alasan pribadi, seperti mencari pengobatan penyakit, atau suka pada rasa atau kualitas makanannya. Alasan-alasan yang lain merupakan alasan-alasan yang lebih altruistik, atau mementingkan kepentingan orang lain, seperti kepedulian terhadap lingkungan hidup, masyarakat, dan keselamatan binatang. Kepedulian pembeli terhadap efek pestisida tinggi, dan di pasar-pasar tertentu terlihat keprihatinan terhadap makanan yang diubah secara genetik.

Pemasaran makanan organik berbeda-beda tergantung pada negaranya, misalnya di Eropa beberapa pemerintahan mendukung pergantian ke sistem pertanian organik, dan memajukan pemakaian makanan organik dalam masyarakatnya.² Di tingkat internasional, pembicaraan mengenai standar-standar dan pemakaian makanan organik mempertimbangkan masalah jarak yang harus ditempuh sebelum makanan sampai pada pemakai³, produksi daerah, dan konsumsi makanan, penentuan harga makanan berdasarkan biaya produksi (bukannya ditentukan oleh sistem pembelian global), dan saling tergantungnya petani-petani industri kecil di masyarakat pedesaan.

3. Peran standar-standar dan sertifikasi, dan hasil-hasil yang diharapkan dari sistem produksi organik, termasuk keuntungan-keuntungan sosial dan perdagangan dari suatu sistem organik.

Standar-standar organik sangat penting untuk peresmian pertanian organik. Standar-standar menentukan masukan-masukan apa yang boleh dan tidak boleh digunakan dalam suatu sistem produksi organik. Pupuk dan pestisida yang tidak bersifat alami tidak boleh digunakan. Standar-standar juga menunjukkan praktek-praktek apa yang boleh dan tidak boleh digunakan. Misalnya, memberi makanan kepada binatang yang tidak bebas (dikurung), dan produksi telur di mana ayam-ayam dikurung, dilarang. Terdapat banyak pembahasan di komite-komite pengembangan standar-standar internasional di IFOAM, mengenai implikasi sosial dan budaya dari pertanian yang organik, dan bagaimana implikasi-implikasi tersebut dapat diperkenalkan pada standar-standar organik. Terdapat juga tindakan untuk memasukkan standar-standar daerah di seluruh dunia, supaya memuat perbedaan alami di antara belahan bumi utara dan selatan, dan perbedaan tropis dan suhu.

Di sebagian besar negara, sertifikasi dilakukan oleh organisasi yang keanggotaannya berdasarkan pada para

penanam, yang memeriksa petani-petani yang menjadi anggotanya, untuk memastikan dipenuhi standar-standar organik. Di beberapa negara, pemerintah yang menjalankan sistem penerangannya⁴, dan di beberapa negara yang lain, seperti Australia, pemerintah memberikan verifikasi sebagai kelompok ketiga dari organisasi-organisasi penerangan independen. Biaya di Australia adalah sekitar \$500 AUD per tahun, per usaha tani. Seringkali juga kena pajak 0.5% dari hasilnya. Rencana penanam kecil lebih hemat biaya.

Lama kelamaan, pertanian organik dapat menyampaikan beberapa hasil lingkungan hidup, perdagangan, dan sosial, yang bersifat positif. Perubahan strategis ke pertanian organik di setiap negara perlu dijalankan bersama dengan kesadaran masyarakat yang makin besar terhadap keuntungan dari dan dukungan bagi pertanian organik. Hubungan antara petani dan pemakai, apakah itu bersifat lokal atau ekspor, seharusnya berencana jangka panjang dan bersifat bertanggung jawab. Di jangka panjang, kita berharap ini akan menyebabkan penentuan harga yang menghitung biaya produksi petani, daripada biaya yang ditentukan oleh pasar dunia. Cara demikian akan menghasilkan keuntungan untuk petani-petani industri kecil, dan keadaan ekonomi yang sesuai yang akan membantu masyarakat pedesaan.

4. Pertentangan tentang GMO (Makanan yang dirubah secara genetik) dan produk-produk organik, dan menolak mitos-mitos dan alasan-alasan emosional

Pertentangan seluruh dunia tentang perubahan genetik (Genetic Engineering- GE) dipimpin dari Eropa karena keprihatinan terhadap keamanan pertanian industrial dititikberatkan oleh menjalarnya penyakit sapi gila (Mad Cow Disease). Salah satu salah pengertian terhadap GE adalah bahwa kita perlu GE untuk menghasilkan cukup banyak makanan untuk seluruh dunia. Solusi sosial dan politik lebih mungkin menghasilkan makanan yang cukup untuk seluruh dunia daripada teknologi produksi GE. Ada juga masalah kesehatan dan keamanan yang terus-menerus, dan masalah lingkungan hidup dengan kemungkinan gengen GE dapat pindah dari satu jenis ke jenis lain. Keprihatinan-keprihatinan yang lain termasuk tidak adanya pengujian bersifat jangka panjang, dan pengenalan yang cepat dari tanaman-tanaman percobaan di lapangan, dan penyebaran umum tanpa pemberitahuan tentang penanaman yang tepat. Standar-standar organik melarang pemakaian GE dan petani-petani organik dapat dicemarkan oleh berjalannya serbuk.⁵ Banyak orang tidak percaya pada para pengembang teknologi yang dalam banyak kasus memperkenalkan bahan kimia ke pertanian dan kemudian mendesain revolusi hijau.

1 Di negara-negara di mana tidak ada organisasi sertifikasi, organisasi-organisasi dari Eropa atau Amerika Serikat mengirimkan pengawas, dengan mengeluarkan biaya yang cukup mahal, untuk memberi sertifikasi kepada petani-petani. Proses tersebut meningkatkan biaya sertifikasi. Beberapa negara mensubsidi biaya penerangan, misalnya Swiss.

2 Di Denmark, setahun yang lalu pemerintah memasukkan \$500 AUD sebagai dukungan untuk pertanian organik, untuk masa periode lima tahun.

3 "Food miles" artinya jarak yang harus ditempuh sebelum makanan sampai pada pemakai; di Amerika Serikat jarak tersebut telah sampai kira-kira 2500 mil. Ini merupakan kenaikan 30% dalam waktu 10 tahun.

4 Di Swiss, pemerintah yang memberi sertifikasi kepada semua petani-petani organik.

5 Di Kanada, hampir tidak ada tanaman minyak Canola yang bebas dari GE karena berjalannya serbuk.



Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Timor Lorosa'e

Marcal Avelino Ximenes
Divisi Pertanian, ETTA

Kerusakan lingkungan hidup tidak hanya diakibatkan oleh bencana alam saja (letusan gunung berapi, kekeringan, banjir, dll.) tetapi juga oleh perbuatan manusia melalui kegiatan-kegiatannya, baik oleh masyarakat secara individu maupun kelompok, perusahaan-perusahaan dan kegiatan lainnya.

Pengelolaan sumberdaya alam yang tidak bijaksana dan tidak mengindahkan kaidah-kaidah pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akan berakibat menimbulkan **dampak negatif terhadap lingkungan hidup** itu sendiri yaitu berupa kerusakan lingkungan baik di tempat berlangsungnya kegiatan maupun di lingkungan sekitar lokasi kegiatan.

Untuk memenuhi kebutuhan akan lahan usaha tani, petani peladang berpindah akan merambah hutan untuk dijadikan lahan usaha taninya yang baru. Biasanya para petani perambah hutan hanya bertahan antara 2 – 3 tahun setelah itu tanah tersebut ditinggalkan dan merambah hutan berikutnya lagi, mereka tidak mengetahui teknik-teknik konservasi tanah dan air, selain itu dengan adanya usaha pembukaan lahan akan semakin memperburuk keadaan. Akibatnya tanah menjadi tererosi, gundul dan tidak subur lagi.

Dengan meluasnya tanah gundul di kawasan hutan, akan mengakibatkan fungsi hutan sebagai penyimpan dan penahan air itu akan makin berkurang bahkan lama kelamaan akan hilang sama sekali. Sebagai akibat akan timbul bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, hilangnya mata air dan lain-lain.

Kerusakan lingkungan juga timbul akibat kegiatan manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam untuk mencari keuntungan yang semaksimal mungkin tanpa melakukan tindakan pelestarian lingkungannya misalnya penambangan yang berlebihan, pembukaan hutan primer, pengelolaan lahan miring di daerah tangkapan air, kegiatan-kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan, dll.

Kerusakan lingkungan dapat terjadi akibat penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Pupuk yang terbawa oleh aliran air ke badan air (SUNGAI, WADUK) mengakibatkan bertambah suburnya gulma-gulma air seperti Eceng Gondok yang berkembangbiak dalam jumlah yang besar yang akan mengakibatkan perairan tersebut kekurangan oksigen sehingga akan mengganggu kehidupan biota air yang ada didalamnya. Pencemaran oleh pestisida yang diakibatkan oleh kegiatan pertanian yang menggunakan pestisida secara berlebihan juga akan mengakibatkan berkurangnya jumlah maupun jenis ikan yang hidup di perairan yang tercemar pestisida, karena pestisida ini merupakan racun. Beberapa ikan yang tahan/resisten terhadap pestisida karena adaptasi, sehingga sebenarnya terjadi akumulasi logam berat yang akan sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia.

Introduksi atau pengenalan suatu varietas tanaman baru di suatu areal usaha tani juga dapat pula merupakan hal yang mengundang serangan hama tertentu, misalnya babi hutan, tikus di daerah bukaan baru atau merupakan tanaman inang bagi hama tertentu yang menyerang tanaman yang sudah ada di areal usaha tani.

Dampak lainnya yang dapat diakibatkan oleh kegiatan bidang usaha pertanian misalnya:

- Penyakit yang timbul akibat limbah yang dihasilkan oleh kondisi lingkungan yang tidak baik, dan;
- Kebisingan bagi penduduk / masyarakat yang tinggal di daerah sekitar lokasi mesin-mesin penggilingan padi,
- Mesin las dari bengkel-bengkel pertanian dan pula menimbulkan kecelakaan bagi pekerja bila tidak menguasai sistem operasionalnya.

Mengamati perkembangan pertanian di Timor Lorosa'e dan masalahnya bagaimana dapat memberi makan penduduk yang ± 800 ribu jiwa, maka pemikiran kita sebagai pemerintah dan petani langsung tertuju pada pertanian intensif yang harus menyediakan pupuk buatan/ anorganik dan pestisida pabrik dari berbagai formula dan merk dagang yang begitu beragam. Seolah-olah tidak ada pilihan lainnya lagi. Benarkah pemikiran demikian yang selalu terjadi pada masyarakat kita? Jika memang demikian kita harus mencari akar penyebab semua itu.

Sering tergambar dalam pemikiran kita secara tidak sadar jika tidak menggunakan pupuk buatan (organik) dan pestisida pabrik akan mengalami penurunan hasil atau bahkan kegagalan.

Petani harus dipacu dan berlomba meningkatkan produksi secara maksimal dengan berbagai upaya yang ditempuh dan tidak jarang menyimpang dari ketentuan teknis penggunaan pupuk buatan maupun pestisida pabrik. Para petani kurang menyadari dampak negatif yang timbul akibat pengurasan lahan dan adanya keterbatasan daya dukung lahan.

Penerapan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Bagaimana mengatasi permasalahan diatas yang merupakan lingkaran setan di dunia pertanian?

Pertama-tama jika kita ingin keluar dari lingkaran setan terlebih dahulu kita cari setannya. Sering kita mencari setannya di luar diri kita, padahal kalau kita mau jujur setan itu sering ada dalam pola pikir, pola hidup dan cara bertindak diri kita sendiri.

Semua permasalahan diatas kita telusuri bersama pada gaya hidup kita yang cenderung bergaya modern, boros dan kurang berpikir jangka panjang, sikap hedonisme, pemujaan teknologi tinggi yang berlebihan tanpa berpikir bahwa hidup yang layak perlu berdamai dengan alam, menjadikan alam sebagai sahabat dan

bukan hanya mengeksploitasi untuk sekedar memuaskan ego kita. Tetapi bukan berarti kita musti terlena ke dalam romantisme alami/ natural yang cenderung alami secara berlebihan dan takut mengusiknya atau mengelolanya.

Pertanian berkelanjutan atau sering disebut pertanian organik/ alami merupakan salah satu pilihan bijak dalam menyiasati pemenuhan kebutuhan pangan yang mendasarkan pada keselarasan dengan alam. Pertanian yang tanpa menggunakan pupuk buatan dan pestisida buatan.

Permasalahan pembangunan pertanian berkelanjutan yang mendasar adalah bagaimana kita memandang ciptaan Tuhan sebagai karunia yang harus kita jaga, kita rawat dan kita gunakan sebagai sarana untuk memudahkan kita dekat dengan Tuhan dan kembali memuliakan-Nya. Maka di dalam penerapannya tanah /lahan bukan semata-mata dipandang sebagai tempat berproduksi dan harus dimanfaatkan serta dikuras sehabis-habisnya, melainkan sebagai karunia tempat dimana kita dan generasi berikutnya menggantungkan hidup dan kehidupannya dari kemurahan alam tanpa menimbulkan kerusakan. Dalam bahasa populer biasa dikatakan pertanian yang mengambil hasil namun tanah/lahan tetap tidak kehilangan kesuburannya dan unsur-unsur alam lainnya tetap dalam kondisi ideal untuk mendukung kehidupan manusia.

Jadi seolah-olah kita sebagai manusia yang mengambil hasil dari lahan tanpa mengurangnya, meminta tanpa memberi kembali, atau tanah/lahan digambarkan sebagai **susu ibu** yang tak habis diteteki bayi demi kelangsungan kehidupan generasi selanjutnya.

Tanah/lahan dipersonifikasikan sebagai **payudara ibu yang selalu siap memberi air kehidupan bagi si BAYI yang lemah** dan bayi tersebut merupakan simbol diri kita yang sebenarnya lemah dan sangat tergantung pada alam sekelilingnya.

Tugas kita semestinya adalah sebagai berikut:

- a. Memacu kemampuan alamiah sistem tanah-tanaman-atmosfir dalam mengkonservasikan unsur-unsur lingkungan menjadi sesuatu yang berguna bagi manusia.
- b. Melakukan adaptasi tanaman dan ternak pada lingkungan hidup setempat lewat seleksi pemuliaan (Breeding) konvensional atau melalui rekayasa genetik.

c. Membangun kelembagaan yang mendukung rasionalisasi usaha tani, pemberian nilai tambah pada hasil pertanian dan pelancaran pemasaran hasil usaha tani.

d. Mendorong penggunaan pupuk organik di dalam budidaya pertanian dan menerapkan pengendalian terpadu terhadap organisme pengganggu tanaman pertanian.

Semua tindakan ini dimaksudkan untuk:

- a. Membatasi ketergantungan pada pertanian masukan teknologi komersial seperti pestisida pabrik, pupuk buatan, subsidi dan kredit.
- b. Membatasi usikan kegiatan atas lingkungan, berarti mengurangi dampak negatif atas lingkungan.
- c. Mengokohkan usaha tani sebagai mata pencaharian sebagian terbesar masyarakat kita di Timor Lorosa'e.

Keberhasilan dan dampak pertanian berkelanjutan dapat terlihat jika tingkat kesadaran masyarakat tani terhadap lingkungan semakin bertambah.

Untuk itu diperlukan penyadaran terus-menerus, kerja keras, berbagi pengalaman, menjalin kemitraan dengan semua pihak yang peduli pada lingkungan demi generasi berikutnya dan bukan hanya terbatas pada pemenuhan perut kita sekarang saja.

Dan yang lebih penting adalah kemauan politik dan niat baik pemerintah yang memberi kebebasan penuh bagi petani untuk mengelola pertaniannya dengan pilihan yang semakin beragam.

Dalam pertanian berkelanjutan dibutuhkan kemauan dan kekuatan moral yang tinggi untuk melihat permasalahan lingkungan sebagai masalah transedental yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Kita harus buktikan kepada anak cucu kita, bahwa kita bukan generasi perusak dan penikmat saja, namun merupakan generasi yang menyiapkan kehidupan generasi mendatang dengan lebih baik dan bijak sehingga harkat, martabat dan citra manusia terutama generasi mendatang mendekati citra Sang Pencipta.

Semoga!

MEMBANGUN SWASEMBADA EKONOMI

Gil Rangel da Cruz and Fernando Salsinha

*Proyek Thai Battalion bekerja sama dengan Divisi Penghasilan Tanaman,
Departemen Pertanian, ETTA*

Pendahuluan

Proyek Swasembada Ekonomi adalah proyeknya Raja Thailand. Self-Sufficient atau swasembada atau kecukupan diri berarti pemenuhan makanan dalam hidup normal dan hidup tergantung pada diri sendiri. Sebagian besar penduduk Thailand adalah petani dengan posisi sebagai petani miskin.

Masalah yang selalu terjadi adalah kerusakan hutan dan kesejahteraan sosial. Sebagian besar disebabkan oleh

kemiskinan dan kekurangan makanan. Jadi permasalahan ini, membuat penduduk pindah ke kota untuk mencari pekerjaan dan penebangan hutan.

Proyek swasembada ekonomi sangat membantu untuk memperbaiki kemiskinan, karena orang dapat menghasilkan makanan bagi mereka sendiri yang mana dapat membuat hidup lebih baik dan persoalan kemiskinan dapat dikurangi.

Untuk model E.M. Proyek mempunyai 4 (empat) kegiatan utama sebagai berikut:

1. Reduksi/penekanan harga produksi padi, tanaman palawija dan hortikultura lain menggunakan Efektif Mikroorganisme (EM)

Alasan mengapa kami melakukan proyek ini karena kebanyakan masyarakat adalah petani dan buruh tani. Jadi dapat menolong masyarakat itu, artinya kami menolong untuk merubah/memperbaiki ekonomi, sosial dan lingkungan TL. Biasanya mereka menggunakan pupuk kimia dan bahan beracun untuk menekan pertumbuhan gulma yang mana membutuhkan biaya yang banyak setiap tahun. Untuk memacu proyek ini kami menyarankan kepada petani untuk menerapkan sistem pertanian alami (natural agriculture) dengan menggunakan mikroorganisme dan bahan-bahan alami untuk membuat pupuk. Sejak kami menjalankan proyek ini, kami dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan penghasilan petani.

2. Budidaya Ikan dan Katak dalam Kolam Plastik Ukuran Kecil

Karena kualitas tanah yang tidak dapat menahan air, jadi kita dapat menggunakan lembaran plastik pada kolam sebelum budidaya ikan dan katak. Untuk makanan ikan dan katak, kami menyarankan untuk menggunakan bahan berupa sisa makanan atau bahan masakan dan rayap (*termites*). Dalam hal menggunakan rayap dapat mencegah masyarakat untuk membakar hutan karena dapat dipunggut dari hutan atau sisa kayu yang telah lapuk.

3. Menanam Tanaman Sayuran disekitar Kolam Ikan dan Sepanjang Pagar

Seperti kita sebutkan sebelumnya bagaimana menggunakan air yang cukup menguntungkan, jadi kami menyarankan pada penduduk setempat untuk menanam tanaman sayuran disekitar kolam dan sepanjang pagar dengan menggunakan air dari kolam untuk menyiram tanaman. Karena air dalam kolam ikan mempunyai makanan yang cukup untuk menyuburkan tanaman lebih cepat tumbuh dan membantu rotasi air dari kolam tersebut.

4. Budidaya Ayam Kampung dengan Menggunakan Rayap (*Termites*=English, *Mirain*=Tetun)

Budidaya ayam kampung pada umumnya seperti biasa, jadi mereka dapat menekan biaya makanan. Kami menyarankan dan memperkenalkan kepada penduduk setempat untuk menumbuhkan rayap (*termites*) sebagai makanan tambahan untuk ayam. Secara sederhana dilakukan dengan jalan menggali lubang, letak batang kayu kering, daun, rumput dibawahnya dan menutupi dengan karung goni, dan siram dengan larutan EM. Setelah dibiarkan antara 3 – 5 hari Rayap (*termites*) akan tumbuh. Membuat banyak lubang dan lakukan pergiliran setiap lubang sebagai sumber makanan, itu akan menekan biaya makanan ayam. Dan karena Rayap mempunyai kandungan protein yang tinggi, jadi ketika ayam memakan rayap itu akan membuat ayam sehat.

Apakah EM itu?

EM adalah bakteri yang baik atau bermanfaat. Biasanya di alam terdapat banyak bakteri dalam tanah, air, dan udara. Kehidupan bakteri tidak dapat dilihat dengan mata manusia, kita dapat melihat dengan menggunakan mikroskop. Bakteri dapat menguraikan bahan organik, ketika bakteri menguraikan bahan organik itu akan memberi makanan dan energi yang bermanfaat untuk tanaman dan ternak.

Kita dapat membagi bakteri dalam dua group, yaitu: 1. Bakteri aerobik, dan 2. Bakteri an aerobik. Untuk kedua grup ini dapat dibagi lagi menjadi tiga (3) tipe: 1. Bakteri baik; 2. Bakteri netral; dan 3. Bakteri jelek. Bakteri netral mempunyai 80 % dari total bakteri. Salahsatu bakteri baik atau jelek memiliki aktivitas masing-masing, dan bakteri netral akan mendukung atau merusak aktivitas salahsatunya.

Sebagai mikroorganisme, memerlukan makanan. Seluruh bahan organik merupakan makanan E.M.

Pada kesempatan pertama, diberikan makanan yang mengandung gula/manis seperti molases (residu gula hasil dari pengolahan tebu menjadi gula pasir), juice jeruk dan air kelapa, bahkan dapat menggunakan air hasil cucian beras dan urine.

Aplikasi EM

Cara Memperbanyak E.M.dari Larutan Asli.

Dengan mencampuri sedikit EM asli dengan air bersih, molases, juice jeruk, air kelapa, air cucian beras, atau urine, dan simpan di tempat teduh, setelah 3 hari, campuran EM tersebut sudah seperti EM asli.

Sifat EM

- E.M yang baik yaitu larutannya berwarna coklat, bau harum, dan
- Jika EM dituangkan ke dalam air, akan menguraikan sampah dalam air dan menjaga kebersihan air.
- Jika kita menyemprotkan EM untuk tanaman, EM akan menguraikan bahan organik di dalam tanah dan memberikan makanan dengan energi yang berguna untuk tanaman.
- Jika diberikan untuk ternak, maka EM akan membantu pencernaan ternak dan ternak dapat tumbuh dengan cepat dan sehat.
- Jika semprot EM pada sampah, EM akan mengurai/ membuat bakteri yang busuk dan memberi rasa sedap.

Kesimpulan

Model Proyek ini telah berhasil dikembangkan di Thailand dan dapat membantu penduduk Thailand cukup banyak dalam hal swasembada makanan dan ekonomi. Salah satu indikasi keberhasilan kegiatan dengan menggunakan EM (pupuk EM) adalah dapat meningkatkan produksi padi (jerami dan bulir lebih besar serta selalu nampak hijau sampai saat panen) dan tanaman lainnya. Dengan menggunakan bantuan EM juga dapat mereduksi biaya produksi padi dari 3,000 Thai Baht/hektar menjadi 240 Thai Baht/hektar (AUD \$128 sampai AUD \$10 per hektar) dengan kenaikan produksi 2,400 kg/hektar.



Pengaruh Nelayan Kecil terhadap Ekonomi dan Lingkungan Hidup

Abilio Da Fonseca

Pelayanan Perikanan dan Kelautan (FMES), ETTA

Hampir seluruh Timor Lorosa'e dikelilingi laut kecuali batasan-batasan darat dengan Nusa Tenggara Timur. Tidak seperti batasan-batasan darat, batasan-batasan laut masih sangat tidak tentu. Sampai sekarang, Timor Lorosa'e, di bawah perintah PBB, belum menentukan Batasan Pemancingan Eksklusifnya.

Dengan garis pantai berjumlah 656.6 kilometer, dan sebagian besar pantai dekat dengan Indonesia, timbul masalah dengan kegiatan pemancingan orang Indonesia yang mempunyai pengaruh buruk terhadap sumber-sumber ikan, lingkungan laut, dan kesejahteraan ekonomi Timor Lorosa'e.

Masalah penentuan Batasan Pemancingan Timor Lorosa'e akan dititikberatkan oleh rekan saya, Richard Mounsey, di lokakarya nanti sore. Di sesi ini, saya akan membicarakan kegiatan pemancingan nelayan laut berskala kecil, dan nelayan sungai.

Pada tahun 1999, sebelum kerusakan, kira-kira 20 000 orang Timor Lorosa'e bekerja di industri makanan laut. Pemancingan laut menghasilkan kira-kira 2600 ton, dan sekitar 3 juta dolar US per tahun.

Pada waktu yang sama, ada sekitar enam tempat penetasan ikan di daerah pegunungan di Timor Lorosa'e, yang menyediakan ikan gurame ke masyarakat desa di setiap pelosok Timor Lorosa'e.

Petani-petani lokal memelihara ikannya, yang dikenal sebagai Ikan Mas, untuk menambah jumlah protein yang dimakan keluarganya. Data tentang beratnya ikannya, dan jumlah yang dimakan masih kurang, tetapi laporan dari masyarakat desa menunjukkan bahwa mereka sedang mengalami kekurangan protein, karena tidak lagi disediakan dengan ikan mas.

Dilihat dari segi lingkungan hidup, diperkirakan bahwa kolam-kolam ikan tidak mempengaruhi lingkungan hidup di sekitarnya.

Tempat penetasan ditampung di tempat tertutup dan air yang sudah digunakan didaur ulang untuk pemakaian pertanian.

Walaupun usaha penetasan ikan tersebut tidak menghasilkan banyak uang, tetapi mengambil peran besar dalam mempertahankan kesehatan masyarakat pertanian. Oleh karena itu, petani-petani yang sehat bisa bekerja lebih keras, dan menghasilkan lebih banyak uang.

Sayangnya, pada bulan September 1999, militia merusak semua tempat penetasan, dan persediaan ikan mas berhenti.

Sekarang ada lagi beberapa pengusaha kecil yang menumbuhkan ikan mas. Jumlah yang disediakan oleh mereka masih sangat sedikit daripada yang dibutuhkan.

Strategi Pelayanan Perikanan dan Kelautan (FMES) adalah untuk memperbaiki dan menjalankan lagi dua tempat penetasan bekas milik pemerintah, di Same dan Viqueque. Pekerjaan ini baru mulai. Anggaran Perikanan kami tidak cukup untuk memperbaiki dan menjalankan

tempat penetasan pemerintah yang lain, tapi kami akan mendukung lembaga apapun yang bersedia membantu kami dalam hal ini.

Program jangka panjang adalah untuk menswastakan semua tempat penetasan bekas pemerintah karena selama penjajahan Indonesia, semua tempat penetasan pemerintah rugi, sementara tempat penetasan swasta untung.

Di daerah pesisir, masyarakat desa lebih mengandalkan ikan laut. Tetapi pada bulan September 1999, militia merusak 90% dari industri makanan laut. Sampan, mesin, jala, tali pancing, dan perangkap dikumpulkan dan dibakar semua. Industri makanan laut sama sekali hancur.

Tim dari Bank Dunia tidak melihat perlunya untuk memulihkan industri perikanan, baik industri perikanan darat (kolam ikan), maupun laut. Anggaran ETTA untuk program ini berjumlah \$50 000, tetapi belum bisa diakses karena masalah birokrasi. Tanpa bantuan dari lembaga-lembaga penolong seperti AUSAid dan ICEIDA, bantuan dari Dili District atau Timor Aid, hampir tidak mungkin industri makanan laut dapat mulai jalan lagi. Tentu saja, yang paling bertanggung jawab atas berjalannya proses pemulihan industrinya, adalah pekerja makanan lautnya sendiri.

Dengan pemulihan kembali beberapa sektor, ada beberapa masalah yang mulai muncul. Senjata-senjata yang ditinggalkan militia berarti bahwa pemboman karang laut menjadi masalah besar. Walaupun sudah berkurang kejadiannya sekarang, tetapi kadang masih terjadi. Sebagian besar pemboman tersebut dilakukan oleh pemancing Indonesia.

Dengan keinginan kuat untuk membantu, beberapa organisasi mengimpor jala untuk membantu pemancing-pemancing. Banyak dari jala-jala tersebut tidak cocok, dan mungkin dapat menyebabkan pemancingan kelebihan dari ikan-ikan yang masih terlalu kecil.

Masalah yang paling besar sekarang yang dihadapi sumber-sumber ikan di daerah pesisir, masalah potensi pemancingan yang berlebihan di daerah Dili. Dili merupakan tempat di mana kita bisa mencari uang banyak. Sebagian besar nelayan tidak mempunyai akses ke kendaraan atau es, maka mereka datang ke Dili untuk memancing.

Nilai ikan di daerah pesisir yang terjangkau oleh armada sampan mungkin akan tetap sekitar 3 juta dolar US per tahun, apabila dikelola dengan baik.

Seharusnya tidak boleh ada usaha untuk meningkatkan jumlah penangkapan ikan lebih dari jumlah tahun 1998. Peningkatan dalam jumlah tangkapan mungkin akan menyebabkan gagalnya industri perikanan. Gagalnya tidak hanya akan menyebabkan kesulitan ekonomi untuk masyarakat pemancing, tetapi juga akan menyebabkan pengangguran dan masalah-masalah kesehatan.

Strategi Pelayanan Lingkungan Hidup Pemancingan

dan Kelautan untuk pemancingan di daerah pesisir bertujuan mencari dana untuk pemantauan persediaan ikan dan untuk mendirikan jaringan pasar yang mengurangi hasil yang terbuang, di daerah pantai utara. Jaringan-jaringan tersebut harus menggunakan dana dari Hera Ice Works dan Peralatan Pemancingan Cina apabila kita ingin berhasil dalam usaha kita untuk mengangkut ikan yang lebih murah dari luar Dili,

supaya tidak begitu banyak orang yang datang ke Dili khusus untuk memancing.

Rancangan strategi tersebut sedang disiapkan oleh FMES, untuk disetujui Kabinet.

Akan tetapi, usaha-usaha kita yang dibahas dalam makalah ini tidak akan bisa berhasil tanpa dukungan internasional dan dukungan finansial.

Pengaruh terhadap Ekonomi dan Lingkungan Hidup Disebabkan oleh Pemancingan Lepas Pantai

Richard Mounsey

Pelayanan Perikanan dan Kelautan (FMES), ETTA

Selama pendudukan Indonesia di Timor Lorosa'e, tempat-tempat perikanan yang dikelola oleh pemerintahan lokal relatif kecil. Seratus enam puluh pegawai perikanan mengelola perairan di pedalaman dan tempat di sekeliling perairan kecil pantai. Nilai penangkapan ikan tidak pernah melebihi 3 juta USD, dan semua operasi perikanan selalu merugi.

Setelah kekerasan pada bulan September 1999 yang diikuti dengan pendirian UNTAET, status perundang-undangan yang memerintah perairan di sekeliling Timor Lorosa'e menjadi tidak jelas dan sampai sekarang tetap tidak jelas. Sebelum masa tersebut, Timor Lorosa'e diperintah sebagai salah satu propinsi Indonesia (Timor Timur) dan karenanya masalah kelautan memakai undang-undang yang sama seperti propinsi-propinsi Indonesia yang lain. Sekarang Timor Lorosa'e harus menentukan identitasnya dengan menentukan batasan laut yang sebenarnya yang dimilikinya, dan mengembangkan undang-undang yang sesuai untuk pengelolaan dan penguasaan industri-industri kelautannya. Dengan demikian, harus mulai ada perbincangan antara Timor Lorosa'e, Australia, Indonesia, dan Badan Pengelolaan Kelautan PBB.

Dengan bantuan dari badan donor untuk menentukan Batasan Pemancingan Eksklusif (EFZ) Timor Lorosa'e yang sebenarnya, Timor Lorosa'e dapat dengan cepat menentukan EFZnya. Perkiraan pertambahan tempat-tempat perikanan yang resmi adalah kira-kira 33 kali lipat dari masa lalu, dan penguasaan lautan lepas pantai akan menjadi tanggung jawab nasional. Nilai penangkapan tahunan, di daerah yang sudah diperluas tersebut, diperkirakan 5 sampai 10 kali lebih tinggi daripada sumber-sumber pedalaman. Perkiraan tersebut berdasarkan 25% dari penangkapan yang sekarang diperkirakan diambil dari daerah tersebut oleh Indonesia.

Perkiraan tersebut dihitung berdasarkan pada jumlah kapal yang pada saat ini beroperasi tepat di dan di sekitar Pantai Sahul di selatan Timor Lorosa'e. Pada bulan September tahun lalu saya sendiri menghitung 187 kapal di daerah tersebut. Informasi dari Australia terhadap penangkapan kapal asing di daerah tersebut memberi kita pengetahuan terhadap jumlah ikan yang ditangkap.

Kebanyakan kapal di Pantai Sahul adalah kapal kail, tali pancing, dan perangkap yang beroperasi di kawasan

di tingkat air sekitar 100 meter. Akan tetapi pada bulan Oktober 1999, setelah kekerasan di Timor Lorosa'e, Indonesia membuka daerah tersebut supaya dapat digunakan untuk menjaring ikan. Sekitar 7 kapal scampi besar sekarang secara teratur beroperasi di kedalaman di antara 200 dan 450 meter di utara dari Pantai Sahul. Sebagian dari kapal jaring ikan yang dimiliki India tersebut pernah juga mengapalkan penangkapan yang didapat dari selatan Betano, lewat pelabuhan Dili. Ikan scampi yang harganya lebih dari 2 juta USD dikapalkan dalam enam bulan terakhir tahun lalu.

Selain dari tujuh kapal scampi, ada sekitar 130 kapal jaring ikan 'stern' yang diperbolehkan beroperasi di tempat tersebut. Keadaan tersebut sangat menguatirkan.

Kebanyakan ikan yang sudah tertangkap di Pantai Sahul adalah dari jenis ikan snapper, emperor, dan cod.

Jumlah besar kapal kail, tali pancing dan perangkap yang beroperasi di Pantai Sahul kemungkinan akan berkurang jumlah ikan yang ada di tempat tersebut dalam skala besar, tetapi kebaikannya, operasi tersebut biasanya tidak merusak tempat tinggal ikan. Akan tetapi, apabila kapal penjaring ikan tersebut mulai beroperasi di perairan yang lebih dangkal, ada kemungkinan lingkungan tempat hidup cod dan snapper, karang dan bunga karang yang mudah rusak akan hilang selamanya. Cukup banyak bukti menunjukkan hasil-hasil yang buruk sekali terjadi pada tahun 70-an dari penjaringan ikan yang tidak dikendalikan di daerah perikanan barat daya Australia. Tempat tersebut dekat sekali dengan daerah perikanan yang sedang kita bicarakan.

Pantai Sahul, tempat perikanan yang bernilai jutaan dolar, harus segera dilindungi!

Sayangnya, Timor Lorosa'e belum menentukan Batasan Pemancingan Eksklusifnya, dan sebelum ditentukan, tidak banyak yang dapat dilakukan dalam mengambil tindakan untuk melindungi tempat tersebut.

Persediaan ikan di Pantai Sahul di dalam dan di luar daerah yang dikenal sebagai Tempat Perbatasan Kerja Sama Celah Timor, dapat ditingkatkan atau diancam oleh pengeboran oli dan gas bumi. Dua tempat pengeboran sudah beroperasi di daerah yang akan menjadi bagian dari Perbatasan Pemancingan Eksklusif Timor Lorosa'e, dan lebih banyak lagi direncanakan. Untuk alasan keamanan, semua operasi pengeboran dan pemompaan

memerlukan batasan daerah terlarang di sekitarnya. Hal ini ditambah dengan masalah pipa bawah laut yang direncanakan untuk sampai ke Darwin, akan menyebabkan masalah untuk industri perikanan dan menambah kekhawatiran terhadap kecelakaan lingkungan hidup. Di sisi lain, tempat pengeboran dan pemompaan akan berperan sebagai batu karang palsu, dan menjadi tempat kediaman ikan, yang akan berperan penting untuk kesejahteraan ikan-ikannya.

Lebih dekat lagi ke Timor Lorosa'e terletak Parit Timor (Timor Trench). Isi Parit Timor ini belum diketahui dan merupakan bahan penelitian yang menarik. Isi dekat permukaan air sudah diketahui. Ikan tongkol sirip kuning, ikan tongkol bermata besar, ikan pedang, 'marlin', hiu, 'makarel', 'skipjack' dan ikan terbang, semuanya ada, dan terkadang dalam jumlah besar. Sebagian dari jenis-jenis ikan tersebut sangat berharga, dan karenanya dipancing terus oleh kapal-kapal asing.

Kedua tempat tersebut berkapasitas mendukung industri ekspor yang berarti bagi Timor Lorosa'e, dan perlu ditentukan, diumumkan dan dikelola secepat mungkin.

Akan tetapi, tidak ada industri perikanan yang dapat dikelola atau digunakan secara efektif apabila pemerintahan dan pegawai-pegawai industrinya tidak

tahu akan komposisi sumber daya dan jumlah penangkapan yang bersifat berkelanjutan. Apabila Timor Lorosa'e ingin memaksimalkan hasil-hasil lautannya, maka dengan cepat dia harus tahu akan jumlah hasil penangkapan ikan yang dapat dicapai secara berkelanjutan. Proses tersebut akan makan waktu lebih dari satu tahun, dan akan merupakan bagian dari kegiatan pemerintah dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang apabila Batasan Pemancingan Eksklusif sudah diumumkan, dan dana untuk mendukung penelitian yang diperlukan sudah dicari.

Sebagai kesimpulan, suatu hal yang menarik adalah bahwa masyarakat pantai di Timor Lorosa'e sudah lama mengandalkan hasil-hasil laut. Bertentangan dengan pendapat sebagian orang, banyak orang lokal berketrampilan sebagai pemancing. Sedikitnya ada 100 nelayan muda yang sudah berpengalaman memancing di laut lepas di Lautan Pasifik, Lautan Selatan, dan Lautan Indonesia. Sedangkan di Pulau Atauro, kebiasaan memancing jauh dari tempat tinggal masih terus berlangsung sampai sekarang.

Sayangnya, kita akan membutuhkan lebih dari pemancing yang trampil untuk mengembangkan dan mengelola sumber-sumber laut lepas pantai.



Pengembangan Industri Perikanan yang Berkelanjutan

Joeli Veitayaki

Program Studi Kelautan, Universitas South Pasifik Selatan, Fiji

Walaupun sumber-sumber perikanan di Timor Lorosa'e dapat digunakan untuk membantu usaha-usaha rekonstruksi, dan memberikan kepada masyarakat kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, cita-cita tersebut hanya dapat tercapai apabila sumber-sumber perikanan digunakan secara berkelanjutan. Industri perikanan yang berkelanjutan mengharuskan bahwa pengembangan sumber-sumber perikanan dijalankan dengan cara yang berbeda dengan kebiasaan di komunitas daerah pantai. Metode-metode baru harus menggunakan semua informasi yang tersedia untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidang pengembangan industri perikanan, dan mengusulkan pendekatan, kebijakan-kebijakan, dan strategi-strategi baru. Komponen-komponen pengembangan industri perikanan yang berkelanjutan yang akan diutamakan dalam makalah ini termasuk masyarakat dan kegiatan-kegiatan masyarakat; tempat tinggal masyarakat, dan sumber-sumber alam yang tersedia digunakan oleh mereka; tingkat teknologi; cara produksi; dan lembaga-lembaga yang diperlukan.

Sekarang merupakan waktu yang cocok untuk melaksanakan pembangunan industri perikanan yang berkelanjutan di Timor Lorosa'e. Periode rekonstruksi ini melambangkan permulaan baru dalam pelaksanaan ide-ide yang lebih sering dibicarakan tetapi dengan lamban dilaksanakan di bidang pengembangan industri perikanan. Beberapa tema yang diajukan termasuk keterlibatan masyarakat, berkelanjutannya proyek-proyek pembangunan, pemeliharaan persediaan ikan yang sehat, pengajuan "aquaculture" sebagai alternatif untuk tempat perikanan penangkapan, pengajuan tempat-tempat terlindung, dan penekanan pada pentingnya pemeliharaan dan pemasaran ikan setelah dikembangkan.

- Walaupun sumber-sumber ikan memang penting untuk pembangunan kembali Timor Lorosa'e dan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya, tetapi cita-cita tersebut hanya dapat tercapai apabila pengembangan industri
- Sektor-sektor industri perikanan utama termasuk industri perikanan untuk bertahan hidup saja, komersial, industrial, "aquaculture", dan rekreasi.
- Masyarakat merupakan intisari dari setiap bentuk pembangunan berkelanjutan, yang perlu diiringi dengan kemajuan ekonomi dan pengurangan dalam ketidakadilan etnik dan sosial.
- Masyarakat harus terlibat dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan-kegiatan pengembangan industri perikanan, supaya berkelanjutan.
- Tempat pengembangan industri perikanan sangat penting, karena pembangunan berkelanjutan sangat tergantung pada sumber-sumber alam dan ciri-ciri lingkungan hidup yang saling terkait.
- Sumber-sumber alam dapat dikatakan berkelanjutan, tetapi sumber-sumber tersebut seharusnya tidak dibiarkan berkurang kualitasnya sebagai akibat dari penggunaannya.
- Industri perikanan berkelanjutan bila "tingkat pemancingan tidak mengurangi kapasitas tempat perikanan untuk menghasilkan jumlah ikan yang sama terus-menerus" (NMFS dan NOAA 1997:5)
- Pembangunan berkelanjutan harus menggunakan tingkat-tingkat produksi, metode-metode, dan teknologi-teknologi yang dimengerti oleh orang-orang yang terlibat.
- Pembangunan berkelanjutan membutuhkan kapasitas untuk menggerakkan sumber-sumber sosial, politik, dan ekonomi bagi tingkat masyarakat yang dirugikan.
- Masalah-masalah industri perikanan yang berkelanjutan disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan teori dan pendekatan pembangunan yang tidak cocok, cara hidup yang berbeda-beda, bantuan pembangunan yang tidak efisien, dan pengaruh dari berbagai budaya yang berbeda-beda.
- Sumber-sumber dan modal yang terbatas, dan sumber daya manusia yang tidak terlatih secara penuh, menyebabkan beberapa kesalahan pembangunan yang bersifat merusak.
- Proyek-proyek seharusnya diubah supaya tidak bersifat "dari atas ke bawah", dan tidak bersifat pendekatan dari luar.
- Keterlibatan masyarakat di berbagai distrik di Timor Lorosa'e dalam beberapa proyek pembangunan yang berbeda-beda, seharusnya berdasarkan ketepatangunaan uang, serta berdasarkan syarat-syarat obyektif yang lain.
- Pembangunan berkelanjutan membutuhkan rancangan yang terpadu dan yang dikoordinir secara hati-hati, dalam suatu proses yang mengikutsertakan semua pihak-pihak yang berkepentingan.
- Sebuah "Badan Pembangunan Berkelanjutan" (SDA) yang mandiri seharusnya mengawasi pelaksanaan proyek-proyek dan pengenalan proyek-proyek pembangunan.
- Orang-orang yang terlibat dalam proyek-proyek pembangunan industri perikanan seharusnya diberikan pelatihan mendalam dan kegiatan-kegiatan lanjutan, untuk memperdalam pengetahuan barunya.
- Kegiatan-kegiatan pembangunan berkelanjutan seharusnya melibatkan orang-orang yang sudah siap untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan.
- Bantuan dari pemerintah harus digunakan untuk menyediakan infrastruktur dan kelembagaan yang cocok.
- Keterlibatan sektor swasta harus dipromosikan dan ditekankan.
- Sistem pembiayaan yang baru harus diperkenalkan untuk menghindari dari pengenalan proyek-proyek yang bersifat sepihak, dan penekanan pada periode pembiayaan.
- Perubahan-perubahan yang diajukan di sini sangat ideal untuk periode rekonstruksi di Timor Lorosa'e ini karena pendekatan-pendekatan yang agak sulit untuk dilaksanakan dalam keadaan biasa dapat dengan mudah dilaksanakan dengan keadaan di Timor Lorosa'e sekarang.

Timor Lorosa'e: Pertambangan, Industri Penghasil Bahan-Bahan Baku

Alfredo Pires

CNRT- Komisi Sumber Pertambangan dan Energi

Pendahuluan

Sebagai negara baru, kita mempunyai manfaat belajar dari kesalahan negara-negara lain terhadap kegagalannya melindungi lingkungan hidupnya dari eksploitasi pertambangan. Kita harus belajar dari pengalaman mereka supaya mencegah kerusakan lingkungan hidup yang sangat mahal. Pada bulan Mei tahun 2000, dalam Konferensi Pembangunan di Tibar disarankan bahwa Timor Lorosa'e memakai teknologi pertambangan yang ramah terhadap lingkungan hidup. Saran tersebut merupakan indikasi yang positif bahwa masyarakat Timor Lorosa'e sadar akan masalah-masalah yang berhubungan dengan pertambangan dan lingkungan hidup. Masalah pertambangan yang berkelanjutan di Timor Lorosa'e harus diselesaikan sekarang, supaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Mudah-mudahan kesadaran mengenai pertambangan yang berkelanjutan akan mendorong pelaksanaan proses pelatihan spesifik orang-orang Timor Lorosa'e di bidang pertambangan berkelanjutan, sebelum dimulainya eksploitasi pertambangan.

Adakah industri pertambangan di Timor Lorosa'e?

Menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat sejarah eksplorasi geologi di Timor Lorosa'e. Secara geologi, masih banyak yang harus dilakukan supaya kita tahu akan potensi sepenuhnya industri pertambangan Timor Lorosa'e, tidak termasuk Celah Timor atau kegiatan pertambangan lepas pantai yang lain. Angka-angka menunjukkan keberadaan minyak bumi, gas, emas, perak, khrom, betonite, tanah liat, batu pasir, marmer, basal, dan silika antara lain, di daratan Timor Lorosa'e. Pemanfaatan sumber-sumber tersebut hanya dapat terjadi dengan proses pertambangan.

Apa yang harus dipertimbangkan sebelum memulai proses pertambangan di Timor Lorosa'e?

Sebelum mengijinkan pengambilan apa pun dari tanah Timor Lorosa'e, kita harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup. Keanekaragaman lingkungan hidup, demografis, suku dan bahasa di Timor Lorosa'e berarti pertambangan yang bersifat berkelanjutan merupakan tantangan besar terhadap dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup.

Ekonomi- Terhadap masalah ekonomi, kita harus mempertimbangkan kesehatan ekonomi negara Timor Lorosa'e, serta mempertimbangkan proses peningkatan kualitas ekonomi di Timor Lorosa'e yang lebih ramah terhadap lingkungan. Kita harus memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber pertambangan supaya

meningkatkan penghasilan dan pekerjaan.

Sosial- Peningkatan kekayaan dan penghasilan yang cepat dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat yang berhubungan secara erat. Bahkan, penghasilan yang lebih tinggi akan menarik petani dari pekerjaan tradisional. Kita juga harus mempertimbangkan banyaknya tenaga kerja asing yang mempunyai nilai-nilai sosial yang berbeda.

Budaya- Terdapat berbagai tempat keramat/tradisional yang nilai budayanya sangat tinggi, yang lebih baik tidak diganggu. Terdapat juga beberapa tempat yang harus dihormati kesuciannya karena merupakan tempat kejadian pembunuhan besar-besar. Kadang tempat keramat dapat menghalangi proyek pertambangan yang sangat menguntungkan.

Lingkungan Hidup - Bolehkah kita tetap menjalankan suatu proyek pertambangan walaupun ada kemungkinan bahan-bahan kimia yang berbahaya akan dilepaskan ke saluran air? Bolehkah kita melaksanakan proyek pertambangan di daerah pegunungan hanya karena ditemukan marmar di gunung tersebut? Pertambangan di Timor Lorosa'e merupakan pencaharian keseimbangan yang paling tepat antara faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup.

Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisa Dampak Lingkungan yang baik membutuhkan proses penelitian dan pengumpulan data yang terinci. Proses tersebut menuntut biaya banyak dan makan banyak waktu. Proses tersebut seharusnya menentukan harapan-harapan masyarakat terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, dan harapan-harapan tersebut harusnya dimasukkan ke AMDAL. Kita juga harus mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan kita akan persediaan sumber-sumber alam, dan harapan-harapan kita akan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman. Garis-Garis Pedoman AMDAL dan pelestarian lingkungan hidup terhadap eksplorasi pertambangan seharusnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Garis Pedoman untuk Persiapan Analisa Dampak Lingkungan (ADL)

- Gambaran lingkungan hidup
- Ciri-ciri khas
- Gambaran terinci usulan
- Pertimbangan pilihan/jalan lain
- Penilaian dampak-dampak dan rencana pencegahan untuk mencegah atau mengurangi dampak-dampak tersebut.
- Keperluan untuk setidaknya-tidaknya dua rencana, Rencana Tempatkan- skala 1:25 000, dan Rencana

Pertambangan- skala 1:2000.

Garis Pedoman untuk Pelestarian Lingkungan Hidup terhadap Eksplorasi Pertambangan

- Proyek kerja awal
- Eksplorasi peninjauan
- Kegiatan pengeboran
- Peninjauan tempat-tempat pertambangan yang lain
- Tempat pertambangan yang ditinggalkan
- Hubungan dengan masyarakat setempat

Pelatihan Pelestarian Lingkungan Hidup terhadap Proyek Pertambangan di Timor Lorosa'e.

Seperti sudah dinyatakan, ada kemungkinan akan dilaksanakan proyek pertambangan di Timor Lorosa'e, barangkali pertambangan marmer, minyak bumi, dan emas. Maka kita harus memberikan pelatihan spesifik untuk orang-orang Timor Lorosa'e di bidang pelestarian

lingkungan hidup terhadap proyek-proyek pertambangan tersebut.

Kesimpulan

Kita berharap strategi-strategi pertambangan Timor Lorosa'e di masa depan akan meliputi model-model pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan masalah ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup.

Pertambangan di Timor Lorosa'e harus mementingkan kesejahteraan masyarakat Timor Lorosa'e, serta penghargaan terhadap lingkungan hidup. Pertambangan seharusnya tidak pernah dianggap hanya sebagai cara untuk meningkatkan kualitas perekonomian negara. Suatu proyek pertambangan yang dianggap tidak berkelanjutan seharusnya tidak diijinkan terus berjalan.

Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Igor O'Neill

Mineral Policy Institute (Institute Kebijakan Pertambangan)

"Kami sudah belajar dari pengalaman kami, dan saya memberitahukan dengan gamblang pada negara-negara Kepulauan Pasifik untuk berhati-hati terhadap negosiasi dengan perusahaan-perusahaan pertambangan"- Sir Michael Somare, Menteri Pertambangan Papua Nugini, memperingatkan pemerintah-pemerintah negara-negara Kepulauan Pasifik bahwa walaupun pertambangan dianggap bagus sebagai sumber dana pembangunan, tetapi ada banyak kerugian yang seharusnya diwaspadai pemerintah-pemerintah. [hal. 3, Fiji Daily Post, 8 Mei 2000]. Keuntungan ekonomi dari pertambangan tidak sebesar yang diperkirakan karena ketidakberhasilan dalam membuat suatu sistem perpajakan, dan kerugian dalam bidang lingkungan hidup dan bidang sosial. Pekerjaan lokal di perusahaan pertambangan tidak banyak karena kebanyakan pekerja adalah orang asing, dan banyak yang membawa uangnya pulang, daripada menggunakan uangnya dalam negeri. Pengaruh terhadap lingkungan hidup termasuk pembuangan limbah ke sungai dan laut- kelakuan yang tidak mungkin diterima di negara perusahaan tersebut sendiri, seperti di Amerika Serikat atau Australia. Pengaruh sosial yang disebabkan oleh ekonomi kontan yang mendadak dapat betul-betul menghancurkan suatu komunitas, dan kemudian perusahaan meninggalkan tempat tersebut setelah beberapa tahun menambang, tanpa meninggalkan apa-apa. Setiap komunitas seharusnya mempunyai hak untuk mengijinkan pertambangan di lingkungannya hanya apabila sudah dilaksanakan Analisa Dampak Lingkungan Hidup (ADL), dan masyarakat setuju atas pertambangan, dengan sudah menerima penjelasan mengenai efek-efek pertambangan.

Keuntungan-keuntungan yang menyebabkan proyek pertambangan dan minyak terlihat menarik bagi pemerintahan dan masyarakat termasuk: pembayaran honorarium; pajak yang dipotong dari keuntungan perusahaan; kesempatan-kesempatan pekerjaan; dan kemandirian dalam pembuatan energi.

Akan tetapi, keuntungan-keuntungan ekonomi untuk negara-negara yang sedang berkembang tidak sebesar yang seharusnya diterima. Studi Bank Dunia terhadap Tambang Ok Tedi BHP di PNG menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, pertambangan menghasilkan keuntungan sedikit sekali untuk pemerintah PNG. Keuntungan yang sedikit sekali tersebut disebabkan hilangnya uang publik karena korupsi, perusahaan tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarnya, dan biaya infrastruktur yang didanai pemerintah untuk mempermudah proses pertambangannya, misalnya jalan khusus, bandara, dan persediaan tenaga listrik. Perusahaan pertambangan

seringkali menyakinkan pemerintah setempat untuk memakai uang masyarakat untuk melakukan survei dari pesawat dan pembuatan peta geologi, sebetulnya ini berarti masyarakat mensubsidi keuntungan perusahaan.

Keuntungan pekerjaan dari proyek pertambangan dan minyak memang sedikit, karena pertambangan secara moderen menggunakan mesin-mesin teknologi yang sangat rumit, yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, dan yang membutuhkan tingkat ketrampilan teknis yang tinggi sekali. Kebanyakan yang bekerja di pertambangan adalah orang asing, dengan kualifikasi yang sulit untuk dicapai orang lokal. Sebetulnya, beberapa pertambangan di kawasan Asia-Pasifik menggunakan sistem bekerja "fly-in, fly-out", "ke sana untuk bekerja, kemudian pulang lagi", yang berarti pekerja asing memakai gajinya di negara sendiri, tidak dalam ekonomi lokal.

Sayangnya, proyek pertambangan seringkali menyebabkan kerakusan dan kekerasan. Contoh-contoh

yang sudah terkenal: Celah Timor- kolusi di antara Indonesia dan Australia; pertambangan tembaga di Bogenvie- perang saudara, dan tentara upahan dikontrak oleh pemerintah PNG untuk mengamankan pertambangannya; pertambangan minyak di Aceh dan pertambangan gas dan emas di Papua Barat- keduanya menjadi penyebab utama penindasan dari militer Indonesia.

Pertambangan- Ancaman Lingkungan Hidup dan Sosial yang seharusnya dihindari:

- Pembuangan pencemaran dari pertambangan- contoh, pertambangan Ok Tedi dan Freeport di Papua. Pencemaran dari pertambangan sudah merusak sungai Ok Tedi, dengan 70-90% dari ikannya sudah hilang dari sungai itu. Akan makan waktu beberapa abad sampai sungai itu kembali seperti biasa, dan manajer BHP pernah mengatakan bahwa dia menyesal bahwa BHP “sudah pernah membuka” pertambangan di sana.

- Pembuangan pencemaran dari pertambangan ke laut, praktek pertambangan baru, yang menyebabkan masyarakat Indonesia marah, karena jumlah ikan yang ditangkap mulai berkurang, dan masalah-masalah kesehatan mulai timbul. Praktek demikian sama sekali tidak dipandang dengan dapat diterima di tempat asal usul perusahaan pertambangan, seperti di Amerika atau Australia.

- Masalah-masalah sosial banyak yang terjadi karena tercipta lonjakan ekonomi kontan yang mendadak. Keadaan demikian seringkali menyebabkan munculnya ketidakadilan-ketidakadilan sosial, pelacuran, penyalahgunaan alkohol, dan kekerasan di rumah, khususnya kekerasan terhadap wanita. Komunitas-komunitas pertambangan di PNG mempunyai kecepatan infeksi HIV (AIDS) yang mengagetkan. Masyarakat yang tidak biasa dengan ekonomi kontan yang bersifat sementara akan mulai lupa akan pertanian untuk bertahan hidup, dan akan membeli bahan-bahan pokoknya di toko, mereka kemudian akan mengalami kesulitan bila pertambangannya sudah tutup.

Hak-hak Masyarakat:

Pertambangan seharusnya tidak dijalankan apabila belum ada persetujuan dari masyarakat, yaitu Analisa Dampak Lingkungan Hidup (EIS), yang berlaku untuk eksplorasi. Masyarakat seharusnya berhak untuk memveto proyek-proyek yang mereka tidak suka. Akhirnya, jangan mengabaikan pentingnya pendapat LSM-LSM dan masyarakat setempat- banyak perusahaan pertambangan dan pemerintahan yang menyesal bahwa mereka tidak menghiraukan pendapat LSM-LSM dan masyarakat setempat, khususnya karena masalah-masalah yang mereka kira tidak penting menjadi masalah besar dan masyarakat setempat minta diganti rugi.

Wawasan Nasional untuk Pariwisata di Timor Lorosa'e



*Pedro Lebre
Vila Harmonia*

Menanggapi Rencana Pembangunan Nasional untuk Industri Pariwisata, pariwisata ekologis merupakan ciri penting untuk dipertimbangkan. *Tujuan pariwisata ekologis adalah untuk berperan dalam integritas ekologi dan sosio-budaya serta pertanggungjawaban dan keberlanjutan.*

Mengingat akan hal ini, diharapkan bahwa industri pariwisata yang dinamis, beraneka ragam, makmur, dan saling mendukung akan dikembangkan, berdasarkan pada inisiatif-inisiatif masyarakat, dan mengerti akan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kepekaan masyarakat dan lingkungan hidup.

Keberhasilan industri pariwisata tergantung pada perubahan-perubahan struktural dan kemauan politik pembuat kebijakan-kebijakan. Strategi-Strategi pembangunan perlu secara aktif mendukung industri pariwisata, dan memberikan arahan dan syarat-syarat yang diperlukan terhadap pembangunan berkelanjutan ekologis dan kemakmuran ekonomi. Terhadap pariwisata ekologis, keuntungan ekonomi akan tercapai melalui proses pelestarian sumber daya alam, yang berguna baik bagi negara rumah maupun bagi tamunya, dan harus berdasarkan pada standar keberlanjutan sosial, kelangsungan hidup ekonomi, dan kapasitas ekologis.

Tujuan

Memulai proses perencanaan untuk pembangunan pariwisata dengan mengembangkan sistem pelayanan pariwisata yang berbasis di desa-desa.

Rencana Aksi

- Membuat kebijakan perusahaan penerbangan dan jaringan perusahaan penerbangan nasional;
- Meningkatkan kualitas sarana-prasarana transportasi, komunikasi dan penginapan;
- Melaksanakan program-program pendidikan kesadaran pariwisata dan wisatawan dalam masyarakat pedesaan;
- Menentukan pelayanan pariwisata dan pemberi pelayanan yang saling melengkapi di daerah dan menjalin hubungan di antar daerah;
- Memberi pelatihan untuk para pemberi pelayanan;
- Memperbaharui tempat-tempat kebudayaan dan tempat-tempat bersejarah;
- Menentukan prioritas tempat-tempat pelestarian keanekaragaman hayati dalam rangka mengembangkan kesempatan-kesempatan pembangunan pariwisata ekologis.

Kelompok-Kelompok yang dituju

Pengunjung dari semua sektor seharusnya merupakan sasaran bagi industri pariwisata ekologis, termasuk pekerja dari badan-badan dan organisasi-organisasi internasional dan pemberi dana, LSM-LSM, kelompok-kelompok gereja, PBB, badan-badan multi nasional, sektor usaha dan swasta, serta para pengunjung yang berekreasi dan para wisatawan yang membeli paket kunjungan.

Sumber-sumber yang dibutuhkan

Tim Perencana Pariwisata seharusnya didirikan oleh CNRT guna melaksanakan rekomendasi-rekomendasi tersebut.



Ikhtisar Makalah

Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan di Timor Lorosae: Beberapa Tinjauan dari Asia Tenggara

Ringkasan

Professor R W (Bill) Carter

University of Queensland, CRC for Sustainable Tourism, dan

Vicente Ximenes

University of Queensland, Anggota JRETLSN

Kecenderungan pariwisata dunia

Organisasi Pariwisata Dunia melaporkan 664 juta wisatawan yang melakukan perjalanan sepanjang tahun 1999, membuat pengeluaran sebesar US\$455 miliar, tidak termasuk ongkos perjalanan (US\$93 miliar). Pariwisata mempertahankan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 7% setiap tahun selama 50 tahun. Di tahun 1950, hanya ada 15 negara yang menikmati manfaat ekonomi dari pariwisata. Kini, lebih dari 70 negara menerima lebih dari satu juta kunjungan wisatawan internasional. Pariwisata merupakan sumber utama pendapatan valuta asing bagi hampir 40% negara dan merupakan salah satu dari lima sumber penghasilan utama bagi hampir 85% negara.

Pada tahun 1999, wilayah Asia Pasifik menerima 92 juta wisatawan internasional. Hanya dalam jangka waktu 10 tahun, Laos dan Kamboja menerima kedatangan sekitar 300 000 wisatawan, sedangkan Vietnam mendapat kenaikan tujuh kali lipat dalam jumlah wisatawan hingga mencapai hampir 2 juta pengunjung. Merupakan hal yang penting diperhatikan bagi Timor Lorosa'e, bahwa negara-negara ini mempunyai sejarah perjuangan sipil dan perang, namun pertumbuhan pariwisata berlangsung cepat.

Kelihatannya ada kesempatan untuk tujuan-tujuan wisatawan yang baru untuk memasuki pasar pariwisata serta peningkatan dalam jumlah pengeluaran uang dari setiap kedatangan wisatawan. Timor Lorosae tidak dapat mengabaikan kesempatan ini. Industri pariwisata mampu memberi pekerjaan pada sebagian besar penduduk. Pariwisata mempunyai potensi menjadi sumber utama modal asing.

Bila Timor Lorosae dapat menarik 100 000 orang pengunjung, maka pengeluaran wisatawan diharapkan berkisar sekitar US\$35-60 juta. Jumlah kamar yang diperlukan akan berkisar kurang lebih 6 hingga 7 hotel kecil. Perkiraan ini kelihatan dapat dicapai dan risiko investasi tampaknya rendah. Profil demikian menarik bagi para investor luar negeri (dengan syarat bahwa keamanan terjamin), akan tetapi pasti mereka akan mendapat keuntungan. Pariwisata memerlukan keterlibatan masyarakat Maubere dalam jumlah besar. Hal ini berdampak bagi sektor industri lain dan penyebaran penduduk (demografi), bila pariwisata berkembang hanya di sekitar daerah pantai.

Negara-negara Asia Tenggara lain mengalami pertumbuhan pariwisata yang sporadis. Dengan demikian, masyarakat sering tidak siap menerima perubahan, dan manajemen sumber-sumber alam tidak

cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Sehingga berdampak pada masalah-masalah sosial-budaya dan lingkungan, dan masyarakat setempat sering kehilangan kuasa, sehingga kemudian beralih kepada penanaman modal asing. Pendekatan *laissez faire* terhadap pariwisata, termasuk penanaman modal asing yang tidak terkendali, mungkin membuat kenaikan dalam penghasilan ekonomi tetapi juga memaksimalkan dampak sosial dan budaya.

Status pariwisata di Timor Lorosae

Meskipun keinginan untuk mengembangkan pariwisata menjadi bagian dari masa depan ekonomi Timor Lorosa'e sering diungkapkan, lembaga-lembaga internasional tidak bertindak. Pariwisata tidak mempunyai status sekarang ini di Timor Lorosa'e. Kebutuhan prasarana seperti tenaga, air bersih, akses jalan dan telekomunikasi tidak dapat diandalkan. Kebanyakan kota tetap memperlihatkan puing yang merusak pemandangan akibat kerusakan yang terjadi pasca jajak pendapat. Kebutuhan atas pelatihan bagi staf industri pariwisata belum diperhatikan. Masa depan pariwisata Timor Lorosa'e menderita akibat tidak adanya keputusan (meski saat ini [Februari 2001] ETTA sedang mengembangkan beberapa program). Namun, masa depan pariwisata di Timor Lorosa'e tetap cerah: pasar pariwisata ada, hanya menunggu untuk ditarik. Masalah-masalah yang perlu ditindaklanjuti termasuk usulan atas bentuk pariwisata yang cocok di Timor Lorosa'e dan bagaimana kepemimpinan Timor Lorosa'e dapat "mempercepat penciptaan kondisi pariwisata yang sesuai" dengan aspirasi rakyat Maubere.

Menuju pariwisata Maubere

"Pariwisata Maubere" mencakup konsep pariwisata berkelanjutan, eko-pariwisata dan pariwisata budaya tetapi akan sangat diwarnai oleh aspirasi masyarakat lokal dan akan didorong dan disampaikan oleh mereka. Konsep-konsep ini sudah didukung oleh CNRT dan didokumentasikan dari konferensi-konferensi yang diselenggarakan untuk merencanakan rekonstruksi Timor Lorosa'e.

Prinsip-prinsip yang diangkat untuk bidang pariwisata termasuk:

- Mengembangkan suatu produk yang berbeda dari produk pariwisata para pesaing;
- Menggunakan sumber-sumber alam dan budaya

sebagai dasar pengembangan produk-produk pariwisata;

- Membuat supaya pengalaman bermutu sebagai produk pariwisata;
- Menyediakan “pengalaman yang berharga” sebagai imbalan dari ongkos yang dikeluarkan;
- Maubere menguasai penyajian sumber-sumber budaya;
- Melibatkan masyarakat sepenuhnya dalam proses perencanaan yang terus-menerus;
- Menilai sukses berdasarkan kepuasan para wisatawan dan masyarakat; dan
- Merencanakan pertumbuhan industri pariwisata yang mantap dan dapat dipraktikkan.

Keperluan-keperluan lain yang disetujui termasuk:

- Perencanaan kepariwisataan berdasarkan inventarisasi sumber-sumber daya yang didasarkan prinsip berkelanjutan dan perlindungan sumber-sumber alam dan budaya;
- Suatu program pelajaran melalui tindakan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam mempersiapkan pariwisata;
- Jasa prasarana harus ditingkatkan agar masyarakat dapat menjadi tuan rumah bagi pariwisata; dan
- Hanya proyek-proyek pariwisata yang memanfaatkan masyarakat secara langsung yang seharusnya didukung.

Tindakan-tindakan yang dapat dengan cepat membantu dalam pembentukan lembaga-lembaga praktis dan meningkatkan kemampuan manusia untuk menerima inisiatif pariwisata di kemudian hari termasuk:

1. Membentuk suatu sistem taman nasional, melalui kerjasama masyarakat lokal;
2. Mengembangkan prasarana pariwisata, supaya para wisatawan dapat diakomodasi, diberikan pengalaman yang mengesankan, dan dikenai biaya yang tepat atas pelayanan;

3. Meningkatkan kemampuan manusia, yang difokuskan pada masyarakat lokal, untuk mengelola dampak pada sumber-sumber wisata, memberi layanan sebagai tuan rumah, dan mendapat manfaat ekonomi; serta
4. Membentuk program peremajaan budaya guna memantapkan ekspresi budaya dan mempertahankan ciri-ciri khasnya masyarakat Timor Lorosa'e sebagai suatu bangsa.

Kesimpulan

Pariwisata dapat menarik investasi asing, menyediakan peluang pekerjaan dan membantu dalam mencapai suatu keseimbangan perdagangan yang memuaskan. Pariwisata dapat menjadi fokus bagi pengembangan inisiatif ekonomi berkelanjutan yang lain dan dapat memberi perangsang untuk peremajaan budaya serta perlindungan sumber-sumber alam, seperti halnya meningkatkan perdamaian dan stabilitas. Kecenderungan mengisyaratkan bahwa industri pariwisata mempunyai resiko ekonomi yang rendah. Namun, manfaatnya tidak akan direalisasikan bila pengembangan pariwisata bersifat reaksioner. Dari awal, pariwisata perlu diatur untuk mengatur kepemilikan asing dan memberi waktu untuk pemberdayaan kemampuan masyarakat lokal. Proyek-proyek masyarakat diperlukan supaya pariwisata dapat berintegrasi dan tumbuh dalam masyarakat, budaya, lingkungan dan perekonomian Timor Lorosa'e yang berubah-ubah.

Inisiatif kebijakan pariwisata mencerminkan wawasan kepemimpinan Timor Lorosa'e. Namun, belum terlihat tindakan-tindakan yang nyata. Kekurangan perhatian atas potensi pariwisata bersifat jangka pendek dan tidak responsif terhadap kepentingan masyarakat. Pariwisata dapat dibentuk dan berkembang demikian cepat sehingga manajemen yang efektif akan menjadi sangat sulit. Perencanaan dan program masyarakat diperlukan sekarang, atau Timor Lorosa'e tidak akan siap untuk satu penjajahan lagi di kemudian hari: wisatawan.



LOKAKARYA-LOKAKARYA EKONOMI

Lokarkarya Pertambangan

Masalah-masalah: Hukum harus mengakui hak dari pada masyarakat lokal, dan kebutuhan-kebutuhan, dan keinginan-keinginannya • Hukum harus memperhatikan hal-hal seperti sosial, budaya, dan lingkungan • Perlu keterbukaan media massa agar mendapat informasi yang obyektif • Masyarakat perlu tahu dampaknya sebelum pertambangan berjalan • Perlu aturan hukum • Perlu tahu latar belakang dari pada perusahaan pertambangan • Akankah ada pelatihan untuk orang Timor Lorosa'e? • Perusahaan pertambangan juga harus mendidik anak-anak lokal supaya mereka dapat mengoperasikan pertambangannya sendiri kelak • Bagaimana Timor Lorosa'e mengawasi proses pembangunan? • Perlu departemen pertambangan • Perlu konsultasi dan partisipasi dengan masyarakat • Perlu merancang kebijakan nasional dalam hal pertambangan - baru membuat skala prioritasnya • Memberi penjelasan tentang siapa pemilik dari pada kekayaan alam - pemerintah atau masyarakat? • Perlu adanya analisis dampak lingkungan daripada pertambangan - dan masyarakat perlu diikutsertakan • Perlu suatu studi kelayakan • Pemerintah harus menentukan tentang keuntungan yang didapat untuk masyarakat • Para ahli orang Timor Lorosa'e harus menganalisis lebih dulu dari usulan-usulan penambangan, sebelum ahli-ahli dari luar • masyarakat harus diberitahu secara jelas sebelum suatu proyek pertambangan dimulai • Perlunya pengawasan dari pada prosesnya • Jaminan kompensasi dari perusahaan.

ISU-ISU UTAMA	STRATEGI-STRATEGI
Penilaian terhadap dampak lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Departemen pemerintah memastikan telah dilakukan penilaian terhadap dampak lingkungan hidup. • Memastikan bahwa ada hukum yang mengatakan pertambangan tidak dapat dimulai sebelum dilakukan penilaian terhadap dampak lingkungan. • Komunitas/LSM-LSM diharuskan telah memastikan bahwa penilaian terhadap lingkungan hidup telah dilakukan, dan melakukan peninjauan kembali.
Pertanggunggun jawaban perusahaan tambang	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan harus mendepositkan uang jaminan kepada pemerintah sebelum memulai kegiatan. • Perusahaan harus memberikan informasi kepada penduduk setempat. • Pemerintah harus melakukan pemantauan dan pelaksanaannya • Perusahaan harus memenuhi keperluan dana pemerintah dalam membangun fasilitas umum bagi masyarakat
Pemberdayaan oleh para investor	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan swasta harus memberikan beasiswa untuk program belajar (tidak hanya training untuk keperluannya semata)
Hukum adat	<ul style="list-style-type: none"> • Ada hukum yang harus mengakui hak-hak penduduk asli dan hukum adatnya. • Perlu ada sistem yang memastikan bahwa penduduk setempat memperoleh hasil yang adil • Kompensasi harus adil
Penyadaran komunitas sebelum eksplorasi tambang	<ul style="list-style-type: none"> • Melatih pelatih, diskusi, seminar-seminar di komunitas • Perusahaan harus menterjemahkan dokumen-dokumen ke bahasa setempat/ lokal. • Komunitas harus diberikan informasi independen mengenai dampak pertambangan • Memberikan penilaian terhadap dampak lingkungan hidup kepada komunitas • Perusahaan harus mendaftarkan diri pada pemerintah sebelum memulai kegiatannya di komunitas • Komunitas sadar dan mengerti keterlibatannya • Mengakui hak-hak pribumi (termasuk hukum adat) • Pemberdayaan masyarakat/komunitas oleh para investor • Para investor sungguh-sungguh bertanggung jawab • Penilaian dampak lingkungan hidup (Enviromental Impact Assesment /AMDAL)

Lokarkarya Pertanian

Masalah-Masalah: Komunikasi (banyak bahasa), dan kurangnya pendidikan • Menurunnya keanekaragaman panen • Kurangnya kesempatan pasaran • Kurangnya pelatihan pertanian • Struktur organisasi kurang baik • Kurangnya kebijaksanaan pemerintah • Hilangnya metode-metode tradisional dalam pertanian organik • Kurangnya dukungan pemerintah untuk hasil panen setempat • Kurangnya pendidikan tianian yang khusus • Cara pertanian tambang dan bakar • Dana untuk pelatihan lokal • Kurangnya pengkajian ilmiah mengenai metode tani • Kurangnya dana/kredit kecil untuk petani •

(berlanjut di halaman berikut)

Perlunya perencanaan yang mulai dari dasar • Perlu ilmu moderen untuk menemukan metode-metode pertanian tradisional yang baik dan berguna • Perlu kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lengkap/tepat untuk pertanian ladang berpindah (ancaman terhadap infrastruktur) • Kebijakan irigasi • Petani tidak mengerti istilah pertanian organik • Penerimaan kebijaksanaan Bank Dunia • Asumsi pertanian organik adalah metode pertanian yang paling baik • Kurang banyak staf • Perlu hasil panen yang cukup untuk orang setempat • Jaringan distribusi yang kurang • Pendapatan petani kurang • Kerusakan dari militia • Percobaan metode dulu sebelum disebarkan/diangkat petani-petani • Perlunya ilmu, alat, dan guru di sekolah-sekolah • Petugas pengembangan pertanian perlu mengerti baik pengetahuan tradisional tentang pertanian maupun metode moderen, dan membuat saluran komunikasi dua jalan • Kurangnya pembatasan tanah yang menandai kepemilikan tanah • Kebijakan untuk membataskan kewilayahan • Keamanan pangan/sumber bibit terjamin

ISU-ISU UTAMA	STRATEGI-STRATEGI
Perlu perencanaan dari tingkat dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya sistim perencanaan dari tingkat dasar (kelompok petani yang mempunyai kepentingan). • Perlu adanya penghubung (wakil) petani dan peternak dalam parlemen dan pemerintahan untuk memperjuangkan kepentingan petani dan peternak • Pelatihan bagi kelompok tani untuk membuat perencanaan dari bawah dan penghubung • Perlu adanya jaringan kerja (network) antar kelompok tani untuk mengetahui informasi actual yang sedang berkembang • Perlu adanya mitra kerja petani dan peternak (pengusaha, lembaga penelitian, universitas, perbankan, dan pemerintah)
Kurangnya komunikasi dan pendidikan dasar untuk petani	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu untuk mengembangkan kebijaksanaan yang jelas mengenai pertanian. • Menempatkan penyuluh pertanian untuk implementasi kebijaksanaan. • Dana untuk menempatkan ulang pegawai penyuluh pertanian termasuk perumahan, infrastruktur dasar, transportasi, komunikasi, pelatihan, alat-alat informasi seperti brosur dan leaflet, sistim pemasaran.
Kurangnya sumberdaya Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah harus memutuskan bagaimana cara untuk menangani ekonomi pasar bebas. • Bagian Pertanian seharusnya menyarankan kebijaksanaan yang didasarkan pada keperluan petani. • Skema seperti Program Memperdayakan Masyarakat dari Bank Dunia harus digunakan untuk mendapat informasi dari tingkat dasar. • Pemerintah seharusnya mendukung dan mendengarkan LSM-LSM yang bekerja di tingkat dasar. • Menjalankan program pelatihan untuk menjelaskan cara-cara pertanian yang berbeda-beda dengan contoh-contoh dan penilaian. Belajar dari pengalaman positif lokal dan internasional. • Memakai kaum muda dari sekolah pertanian untuk melakukan pelatihan. • Hubungi mantan staff pertanian untuk melakukan proyek pelatihan jangka pendek (UNTAET mempunyai daftar orang-orang) • Banyak yang akan melakukan ini secara sukarelawan apabila mereka dapat melihat hasil yang positif dari usaha mereka yang mempunyai dampak baik terhadap lingkungan hidup. • Dukungan internasional untuk inisiatip pertanian organik berarti akan ada kesempatan untuk ekspor. • Membuat kebijaksanaan untuk mengatur praktek tambang bakar (slash and burn). • Dukungan logistik, teknis dan kearahannya dari pemerintah. • Tidak memasukkan tumbuhan atau daging yang telah dirubah secara genetik ke Timor Lorosa'e. • Proyek infrastruktur yang besar harus melewati penelitian dampak, lingkungan hidup dan sosial.
Perlunya penataan tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengakui Kepemilikan • Bukti kepemilikan – sistim pendaftaran kepemilikan tanah yang tepat. • Konsultasi dengan kepala desa/suku, apakah tanah itu tanah pemerintah atau tanah masyarakat. • Mendirikan sebuah kantor pertanahan di pemerintah. • Mendirikan sebuah kelompok untuk menentukan sifat tanah, melakukan pemetaan tanah dan melakukan penyelidikan geologi. • Pembagian wilayah seharusnya dilakukan oleh pemerintah dengan konsultasi dengan masyarakat.



Lokakarya Perikanan

Masalah-masalah: Kawasan perikanan tidak jelas • Armada penangkapan • Kapasitas perikanan setempat • Kesetaraan pembagian tempat memancing antara para nelayan • Belum ada kebijaksanaan dan peraturan • Pendidikan di industri perikanan • Regulasi perikanan • Regulasi mengenai kapal asing yang masuk, juga ikan apa yang boleh ditangkap • Mencegah impor ikan dari luar.

ISU-ISU UTAMA	STRATEGI-STRATEGI
Membangun industri perikanan domestik	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan • Perlengkapan menangkap ikan: <ul style="list-style-type: none"> - Kapal - Jaring • Pengendalian mutu • Pemasaran • Prasarana perikanan = pergudangan • Pelatihan lepas pantai pemberian kesempatan kerja • Pendanaan (RP)
Memastikan Timor Lorosae menerima keuntungan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan Kebijakan Perikanan Keikutsertaan Timor Lorosae dalam segala hal perikanan: <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan - Perikanan - Pengelolaan - Menjual izin - Memastikan turun barang di Timor Lorosae, mencari pelatihan dan pekerjaan untuk masyarakat local - Pendidikan perikanan masyarakat, pelatihan untuk penangkapan ikan secara pas-pasan. - Menghindari cara yang kurang baik - Memastikan menegakkan regulasi
Tidak ada penentuan EFZ yang jelas	<p>Mempersiapkan peta untuk EFZ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Badan/organisasi yang mandiri dengan pemantau dari Timor Lorosae, Indonesia & Australia. 2) Sumberdaya- Memorandum of Understanding (MOU) – Persetujuan <ul style="list-style-type: none"> • Negosiasi dan memastikan pembatasan

Lokakarya Industry, Perdagangan dan Globalisasi

Masalah-masalah: Harga kopi yang rendah • Perkembangan kapasitas • Pengembangan kemasyarakatan • Pemasaran kopi • Standard 'keberlanjutan' internasional/negara • Kesadaran kualitas • Sertifikasi • Globalisasi • Langkah apa saja yang diambil untuk masuk pasar dunia dalam zaman perdagangan bebas sekarang ini? • Ketidakberhasilan industri untuk bersaing • Belum ada kebijaksanaan impor/ekspor • Keamanan setempat • Kelapa dan kemiri, adakah pasar? • Impor dan kekurangan kesempatan lokal • Perdagangan bebas • Mata uang

ISU-ISU UTAMA	STRATEGI-STRATEGI
Kompetisi dan industri	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah ekspor dengan meningkatkan kualitas produksi dan mengurangi impor • Membentuk asosiasi untuk membuka jaringan dengan para pesaing. • Menciptakan skala kecil nasional dan industri-industri lokal supaya saling bersaing.
Pembangunan Masyarakat dan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi aktif dari komunitas • Informasi • Sistem pendidikan
Kopi, Kayu Cendana, dan Kelapa	<ul style="list-style-type: none"> • Mendesak pemerintah transisi segera mungkin mengakhiri pembelian kopi yang dimonopoli oleh salah satu perusahaan di Timor Lorosae. • Mempromosikan kopi Timor sebagai komoditi ke pasar dunia • Pemerintah transisi memberikan kesempatan bagi investasi asing untuk mendirikan industri kayu cendana dan kelapa
Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Badan perwakilan perdagangan Timor Lorosae. • Harus memiliki mata sendiri. • Ekspor dari berbagai negara harus memperhatikan keberadaan manusia, pekerja, lingkungan dan hak-hak sipil. • Mengeluarkan rupiah dari Timor Lorosae.



Lokakarya Pariwisata

Masalah-masalah: Keamanan Politik • Kekurangan prasarana • Prasarana untuk orang-orang Timor merupakan keperluan penting • Pengetahuan tentang kemajuan • Kekurangan model-model • Kekurangan atraksi pariwisata • Pelajaran/pengembangan kemampuan • Kebijaksanaan Pemerintah • Kurang perhatian dari UNTAET • Kurang informasi • Kurangnya undang-undang investasi • Masalah pemilikan tanah • Kurang percaya diri dari orang lokal tentang hasil – hasilnya • Kesulitan bahasa (banyak bahasa) • Masalah budaya • Kerusakan lingkungan hidup • Keikutsertaan masyarakat • perencanaan industry • Masalah kesehatan • Konsep-konsep pariwisata • Masalah dengan pariwisata kelebihan (budaya, infrastruktur, lingkungan hidup) • Tantangan sosio-budaya (komersilisasi) • Mengikuti pasar yang mana? • Kekurangan pasaran/gambaran (promosi) • Kerusakan pada sumberdaya pariwisata oleh orang asing (tempat, lingkungan hidup, budaya) • Ancaman dari pariwisata (terhadap budaya dll.) • Pandangan bahwa Timor Lorosa'e tidak aman • Pilihan: Instabilitas; Undang-undang dll (perencanaan strategi/mengenai pariwisata yang kelebihan); Infrastruktur; Tantangan budaya; pelatihan/ pengembangan kemampuan.

ISU-ISU UTAMA	STRATEGI-STRATEGI
Instabilitas Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur pemerintahan yang jelas (masih membingungkan) • Ekonomi yang tetap (instabilitas politik yang kurang dan masalah lain) • Mengembangkan kesadaran politik masyarakat • Memperbaiki sistim pendidikan • Memperdayakan masyarakat dan kewajiban masyarakat sipil • UNTAET keluar dari peran pemerintahan dan masuk ke peran nasihat (Timor Lorosa'e akan mengatur pemerintah sendiri)
Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • UNTAET bukan berperan sebagai pemerintahan – penasihat saja • Kekuatan lebih banyak untuk orang Timor Lorosa'e untuk mengatur pemerintahan sendiri • Memperdayakan orang Timor Lorosa'e dan masyarakat sipil • Proses 'Timorisasi' <ul style="list-style-type: none"> - terlalu pelan - kurang tepat guna • Orang Timor Lorosa'e belum diperdayakan dalam pekerjaan – staff UNTAET hanya sebagai supir, pembantu • Kurang pengalaman dalam mengambil keputusan – kepemimpinan, administrasi dll. • Pariwisata akan terjadi, pertanyaannya adalah dalam bentuk apa dan siapa yang akan mengendalikannya.
Infrastruktur (kurangnya)	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan orang setempat harus dilihat dahulu • Kekurangan pariwisata • Pelatihan dan pengembangan kemampuan
Tantangan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya kesadaran/pendidikan masyarakat untuk menegaskan nilai budaya Timor Lorosa'e • Membina masyarakat agar bangga karena mereka adalah orang Timor Lorosa'e





Teknologi dan Lingkungan Hidup

Joao Carrascalao

Menteri Kabinet untuk Sarana-Prasarana

Terima kasih atas undangan berbicara di sini.

Guna menyegarkan kembali ingatan kita- apakah Pembangunan Berkelanjutan itu?

"Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan (ekonomi, sosial dan lingkungan hidup) generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi berikut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya".

Seperti dikatakan di Laporan Komisi Dunia Lingkungan Hidup dan Pembangunan, "Masa Depan Bersama Kita" (1987).

- Dengan demikian, pada intinya kita harus mengembalikan kepada lingkungan hidup apa-apa yang kita rusak guna memenuhi pembangunan ekonomi dan kelangsungan hidup kita, supaya anak cucu kita tidak mengalami kekurangan dalam lingkungan alam. Bahkan, usaha-usaha kita atas peningkatan standar-standar hidup kita, tidak boleh mengganggu keselarasan dalam lingkungan alam dan keseimbangan ekologi.
- Timor Lorosa'e harus mengembangkan suatu strategi pembangunan berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan sarana-prasarana yang berkelanjutan sambil memperbaharui kerusakan lingkungan hidup dan melestarikan sumber-sumber alam untuk generasi-generasi berikut.
- Pelestarian sumber-sumber alam di Timor Lorosa'e tidak dapat diabaikan karena selama puluhan abad terakhir ini masalah-masalah lingkungan hidup tidak diperhatikan.
- Penting sekali bahwa masalah pembangunan berkelanjutan tidak hanya diperhatikan di bidang lingkungan hidup, tetapi juga terhadap masalah-masalah kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan kebuta-hurufan, agar masalah lingkungan hidup tidak diperhatikan berlebihan sampai masalah-masalah lain di masyarakat kita kurang diperhatikan. Hal ini relevan sekali di Timor Lorosa'e. Dengan demikian harus tercipta suatu keseimbangan dalam pembiayaan semua bidang-bidang tersebut dan terhadap prioritas-prioritas antar-bidang.
- Sebagai Menteri Kabinet Sarana-Prasarana, saya sangat sadar akan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap lingkungan hidup pada setiap rencana dan pelaksanaan Departemen saya.

Sarana-Prasarana dan Lingkungan Hidup

Sarana-Prasarana dan lingkungan hidup saling terkait. Misalnya, apabila jalan baru dibangun, menyebabkan deboisasi, erosi tanah, dan lumpurnya sungai.

Demikian pula, pembangunan bandar udara menyebabkan pemindahan masyarakat, gangguan terhadap habitat alam, dan pencemaran bunyi yang sangat buruk. Pembangunan pelabuhan mengganggu kehidupan laut, menyebabkan pencemaran laut dari pelayaran, dan mempengaruhi metode-metode mencari hidup tradisional dalam masyarakat pesisir. Pembangkit tenaga listrik mengeluarkan pencemaran bunyi, dan membuang minyak dan minyak pelumas yang mencemarkan air di bawah tanah. Terhadap sanitasi, usaha pembuangan limbah tanpa mencemarkan sungai merupakan masalah besar. Memelihara persediaan air bersih dalam masyarakat merupakan tantangan besar disebabkan karena pencemaran dari berbagai sumber.

Di masa depan saya akan membuat suatu strategi terinci terhadap pencegahan masalah-masalah lingkungan hidup. Tetapi sekarang saya hanya ingin membicarakan beberapa tindakan yang diperlukan dalam upaya mencegah masalah-masalah berikut dalam bidang sarana-prasarana.

Contoh masalah-masalah lingkungan hidup dan cara menyelesaikannya.

- Erosi tanah → Menanam rumput/pohon;
- Pelumpuran palung sungai disebabkan oleh bahan-bahan tanah dan limbah → Penentuan tempat-tempat yang cocok untuk pembuangan limbah;
- Perubahan mendadak dalam cara hidup masyarakat-masyarakat tertentu → Fasilitas-Fasilitas pemindahan penduduk dan pendirian industri-industri alternatif. Kebijakan mengenai Pemindahan Penduduk secara Paksa.
- Pencemaran bunyi dari peralatan bangunan → Perundang-undangan dan pemakaian rintangan bunyi.
- Pencemaran dari knalpot mobil → Menentukan standar-standar emisi dalam perundang-undangan.
- Emisi dari pembangkit tenaga listrik panas → Menentukan standar-standar emisi dalam perundang-undangan.

Kebijakan-Kebijakan yang perlu dikembangkan

Suatu Strategi Pembangunan Berkelanjutan Nasional untuk Timor Lorosa'e dan perundang-undangan lingkungan hidup perlu dikembangkan. Kebijakan-kebijakan harus ditetapkan agar Analisa Dampak Lingkungan dilakukan bersamaan dengan Studi Kelayakan proyek-proyek sarana-prasarana. Pengelolaan data juga sangat penting untuk perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif. Kebijakan yang cocok perlu dikembangkan terhadap pengurusan penduduk.



Nilai Pelestarian Lingkungan Hidup

Timor Lorosa'e tidak mempunyai dana banyak. Kita tidak punya cukup banyak uang untuk sarana-prasarana dan keperluan-keperluan mendesak lain dalam masyarakat kita. Walaupun pelestarian lingkungan hidup memang penting sekali, uang kita terbatas. Warga negara dan LSM-LSM harus mendukung dan melakukan tindakan terhadap pelestarian lingkungan hidup, karena pemerintahan tidak bisa melakukan semuanya.

Pengalaman Negara-Negara Kepulauan Pasifik

Saya ingin menjalin hubungan dengan Negara-Negara Kepulauan Pasifik agar belajar dari pengalaman mereka dalam masalah pembangunan sarana-prasarana, tanpa kerusakan lingkungan hidup dan dengan persediaan dana yang terbatas.

Pemecahan Masalah sesuai dengan Kebudayaan Timor Lorosa'e sendiri

Walaupun kita akan mempertimbangkan usulan-usulan dari masyarakat internasional, Timor Lorosa'e seharusnya mengembangkan cara-cara tradisional untuk pemecahan masalah-masalah lingkungan hidup, sesuai dengan kebudayaannya sendiri.

Rekomendasi Konferensi dan Pembentukan Satuan Tugas

Saya menanti-nantikan rekomendasi-rekomendasi yang nyata dan dapat dikerjakan dari konferensi ini, dan tentu saja saya dengan senang hati memilih salah satu petugas saya sebagai wakil Departemen Sarana-Prasarana untuk duduk dalam Satuan Tugas Pembangunan Berkelanjutan yang diusulkan.

Mempertimbangkan Pembangunan Sarana Prasarana Berkelanjutan di Perkotaan



Jonas Rabinovitch

Penasehat Tinggi Kebijakan, Badan Pembangunan Perkotaan untuk Kebijakan Pembangunan, Program Pembangunan PBB (UNDP)

Dokumen ini menguraikan kondisi prasarana di Timor Lorosa'e, mempertimbangkan kondisi sebelum masa krisis dan sesudahnya. Tantangan yang paling besar adalah untuk memperbaiki sarana prasarana dengan cara berkelanjutan dari perspektif sosial. Karena adanya kondisi khusus di Timor Lorosa'e, jawaban atas tantangan-tantangan masalah sarana prasarana harus mempertimbangkan kebutuhan mendesak untuk memikirkan kembali pendekatan-pendekatan yang konvensional. Penyajian ini akan menjelaskan keadaan sarana prasarana di Timor Lorosa'e, masalah-masalah utama, pendekatan-pendekatan yang seharusnya dipertimbangkan dan kesempatan-kesempatan untuk perbaikan.

Pembahasan ini mengacu pada sarana prasarana tidak hanya dari perspektif sarana "murni", tetapi juga persepektif sarana sumber daya manusia relevan untuk dibahas. Secara luas, sarana prasarana termasuk masalah perumahan, transportasi, air, penjagaan kebersihan, saluran air, pengelolaan sampah, komunikasi, jalan-jalan dan sebagainya.

Kurungan dalam kualitas sarana prasarana di Timor Lorosa'e menjadi lebih buruk setelah masa gawat darurat pada bulan September 1999, waktu milisi pro-tonomi melakukan kekerasan, perampokan dan pembakaran rumah-rumah dengan sengaja di seluruh negeri, seperti sudah diketahui semua orang.

Diperkirakan bahwa 85 000-90 000 rumah dirusak pada waktu itu. Di daerah perkotaan, tingkat kerusakan rumah sampai 70-100%. Sebelum krisis, 52% kepala keluarga tidak mempunyai akses ke air minum, dan 62% tidak mempunyai akses ke fasilitas penjagaan kebersihan. Situasi tersebut menjadi lebih buruk karena tempat persediaan air dan sistem-sistem penjagaan kebersihan juga dirusak pada waktu krisis. Misalnya,

pompa-pompa, mobil-mobil, pabrik-pabrik pembersih air, kantor-kantor dan pipa saluran, semuanya dirusak.

Angka-angka terbaru dalam CCA (Penilaian Negara Bersama), dari survei yang dilakukan oleh badan-badan PBB, menunjukkan bahwa kondisi sarana prasarana sebelum masa krisis jauh dari memadai, tetapi menjadi lebih buruk dikarenakan masa krisis pada bulan September 1999. Sekarang, sarana prasarana nyata mengalami kekurangan (fasilitas fisik dan peralatan), ada kekurangan sumber daya manusia (pendidikan, kemampuan masyarakat lokal untuk mengoperasikan dan memelihara sarana prasarana, pemerintahan dan pembangunan kelembagaan) dan keperluan untuk investasi dari masyarakat internasional. Pembahasan ini mengajukan pendapat bahwa persoalan-persoalan sarana prasarana di Timor Lorosa'e tidak dapat dipecahkan secara berkelanjutan bila masalah pendanaan untuk prasarana fisik dikembangkan secara tidak terkait dengan masalah kebutuhan sarana sumber daya manusia yang diuraikan di atas.

Tantangan-tantangan

Tantangan-tantangan utama yang harus dipertimbangkan apabila mengembangkan sarana prasarana secara lebih berkelanjutan adalah sebagai berikut.

Tantangan Kelembagaan

Lembaga-lembaga apa yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengoperasian fasilitas prasarana tersebut?

Tantangan Pemberdayaan Kemampuan

Apakah ada cukup banyak orang yang terlatih untuk mengoperasikan sistemnya?



Kemampuan Keuangan, Investasi, Pilihan Teknologi dan Tantangan Pengembalian Biaya

Teknologi apa yang berkelanjutan secara finansial, lingkungan dan sosial? Apakah masyarakat mampu membayarnya? Bagaimana membayarnya? Bagaimana pemakaian sistem ongkos-pemakai dapat diterapkan?

Tantangan Partisipasi

Apakah masyarakat diikutsertakan dalam perancangan, pengembangan dan pengoperasian sistem tersebut?

Tantangan Gender

Bagaimana intervensi-intervensi tersebut akan mempengaruhi laki-laki dan perempuan?

Tantangan Pendidikan dan Budaya

Apakah pengembangan sarana prasarana dirancang sesuai dengan pertimbangan budaya? Apakah masyarakat mengerti akan keuntungan kesehatan yang

didapatkan? Kampanye pendidikan apa saja yang diperlukan?

Menuju Jalan yang Berkelanjutan

Pendekatan-pendekatan terhadap jalan yang cocok dan berkelanjutan, adalah:

- Penyelidikan di negara-negara berkembang, contoh Curitiba, Brasilia, di mana kebijakan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan sistem transportasi umum telah dilaksanakan secara bertahap selama 30 tahun terakhir;
- Pendekatan bersifat ketenagakerjaan;
- Masalah kepemilikan tanah;
- Pelaksanaan daerah penyangga untuk perlindungan lingkungan hidup di daerah perkotaan;
- Perlindungan lembah-lembah sungai dan mata air;
- Hubungan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan;
- Pengelolaan limbah dan daur ulang;
- Penjagaan kebersihan secara ekologis;
- Pertanian di daerah perkotaan;
- Pengangkutan umum.

Arsitektur Baru yang Berkelanjutan di Timor Lorosa'e

Antony Edye, David Baggs, Gareth Cole
Ecological Architects Association

Ada peluang unik di Timor Lorosa'e untuk membentuk suatu ekonomi dengan daya berkelanjutan, berdasarkan ekologi sebagai suatu fondasi untuk rekonstruksi perumahan dan prasarana. Bangunan-Bangunan dan sarana prasarana yang rusak dan dihancurkan, memberi peluang untuk kembali memulai dari awal. Menggabungkan antara bahan-bahan dan metode tradisional dan inovatif untuk pembangunan, dapat menciptakan Arsitektur yang Berkelanjutan di Timor Lorosa'e.

Setiap bangunan atau proyek sarana prasarana baru seharusnya didesain bagi keberlanjutan baik dari pandangan ekologis maupun sosial.

Sarana Prasarana dan Keberlanjutan

Makalah ini akan mengetengahkan sarana prasarana dari dua jurusan, sebagai berikut:

1. Suatu garis besar isu-isu utama yang perlu ditengahkan untuk mencapai keberlanjutan ekologis dan sosial, yang relevan dengan konteks perkotaan dan pedesaan; dan
2. Kebijakan-Kebijakan yang diperlukan untuk pelaksanaan praktek-praktek berkelanjutan di Timor Lorosa'e.

Teknologi-Teknologi, sistem-sistem dan rancangan-rancangan untuk bangunan-bangunan dan sarana prasarana yang akan dibangun baru atau diubah dalam rangka mencapai keberlanjutan ekologis akan dibahas.

Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan

- Pendidikan terhadap semua hal keberlanjutan

lingkungan hidup dan keberlanjutan pribadi;

- Penggunaan desain yang diperbaharui yang sesuai dengan iklim dan budaya setempat, dengan menggunakan teknologi dan cara pembangunan yang tradisional dan beraneka ragam;
- Konservasi air dan pemakaiannya kembali—menangkap, menyimpan, menyalurkan dan mengalirkan air pada pipa air hujan, dan pendidikan mengenai keamanan minum air hujan;
- Manajemen limbah, termasuk daur ulang, penggunaan kembali dan pengolahan air kotor;
- Mengurangi dampak transportasi terhadap lingkungan hidup;
- Meningkatkan pemakaian sumber tenaga yang dapat diperbaharui—matahari, angin, air;
- Meningkatkan ketepatangunaan tenaga pada semua kegiatan yang memakai tenaga;
- Meningkatkan pemakaian sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui, seperti bahan-bahan dan cara-cara tradisional, dan meningkatkan ketepatangunaan dengan memakai sumber-sumber daya yang tidak dapat diperbaharui;
- Meningkatkan ketepatangunaan ekologis dan akses terhadap jasa dan prasarana masyarakat—air, listrik, saluran air limbah, telepon, jalan gas, jembatan, dan terowongan;

Bahan-Bahan dan Teknologi-Teknologi yang Berkelanjutan dan Baru

Material dan teknik bangunan tradisional sudah dikembangkan sebagai tanggapan terhadap

keprihatinan daya berkelanjutan antar generasi. Banyak yang sudah disingkirkan atau diadaptasi dalam beberapa bidang karena pengaruh berbagai unsur kolonial atau unsur-unsur lainnya. Tidak semua perubahan ini menguntungkan. Menurut warga Timor Lorosa'e yang kami ajak berbicara, banyak laporan betapa panas dan tidak nyamannya beberapa rumah modern. Suatu arsitektur Timor Lorosa'e memerlukan paduan dengan yang terbaik dari bahan-bahan kontemporer dan tradisional serta desain dari suatu pandangan kenyamanan, kesehatan dan ekologi dapat dicapai. Apakah ada dukungan di Timor Lorosa'e untuk mencoba melakukan lompatan maju dari "negara yang berkembang" dalam menggunakan teknik yang dapat dilestarikan dari seluruh dunia dan diadaptasi agar sesuai untuk Timor Lorosa'e?

Contoh 1: Penampungan Air dari Atap

Sementara beberapa masalah budaya dan kesehatan terkait dengan mengarah pada peningkatan pasokan air yang dapat diminum melalui penampungan lewat atap, kelihatannya merupakan ide baik untuk mengeksplorasi masalah lain berkaitan dengan bangunan dalam penampungan dan penyimpanan air yang dapat diminum.

Guna memungkinkan penangkapan air, bahan yang tahan air diperlukan. Walaupun lembar baja merupakan solusi yang nyata, baja perlu diinsulasi supaya tidak panas sekali, dan insulasi tersebut membutuhkan rongga atap dan tahan rayap. Baja merupakan solusi cepat tetapi tidak cocok.

Teknologi dari Latin America dapat diadaptasi pada keadaan di Timor Lorosa'e dengan memberi atap "*bio-composite ferro-cement*" pada penduduk desa, dimana semen tipis diperkuat oleh bambu, termasuk misalnya anyaman jerami menjadi struktur atap yang tahan air, berinsulasi, dan bisa berdiri sendiri, dan memungkinkan penangkapan air.

Contoh 2: Bahan-Bahan Struktural yang dapat Diperbaharui

Mempermudah masyarakat Timor Lorosa'e "Membentuk Rumah Sendiri".

Sementara dalam jangka pendek, kelihatannya kayu serut yang persegi perlu diimpor untuk mengatasi keperluan pengatapan kembali dan pembangunan kembali langsung, pertimbangan harus diberikan terhadap perluasan akses seluruh masyarakat Timor Lorosa'e terhadap jenis-jenis bahan-bahan bangunan tradisional.

Salah satu sumber kayu yang paling cepat berkembang yang terutama terdapat di Asia adalah bambu. Studi lokal terhadap praktek-praktek tradisional telah menentukan jenis bambu yang khas Timor Lorosa'e yang bisa tumbuh sampai 200mm garis tengah dengan ketebalan sampai 15mm meskipun penyebaran geografisnya terbatas. Potensi untuk pemakaian bambu yang cocok untuk bangunan besar dianggap sangat berguna karena jenis bambu tersebut sudah tumbuh dewasa dalam jangka waktu 4 tahun saja. Dengan banyaknya lahan yang tidak ditutupi, hutan bambu merupakan harapan serta potensi sumber makanan dan ekspor yang berarti.

Guna menentukan kecocokan memperluas tersedianya bambu dan bahan-bahan bangunan yang lain, perlu dilakukan penelitian mengenai jenis-jenis bahan-bahan bangunan. Suatu program dibutuhkan untuk:

- Menentukan kecocokan berbagai jenis terhadap iklim dan geografi supaya dapat disebarkan ke kebun-kebun bibit yang mempunyai iklim yang sesuai, yang akan dikelola oleh masyarakat setempat di setiap desa;
- Menentukan cara yang paling baik supaya bambu tahan rayap;
- Memperluas kesempatan-kesempatan pendidikan supaya masyarakat dapat belajar mengenai penggunaan semua bahan-bahan tradisional.

Contoh 3: Toilet Kompos

Masyarakat Barat tergugah pada manfaat kesehatan dan lingkungan dengan membuat kompos kotoran manusia daripada membiarkannya mencemari tanah dan air tanah dengan memakai kakus tanah atau tangki kotoran. Penelitian dibutuhkan untuk memilih suatu sistem yang memakai kotoran manusia sebagai masukan pada siklus biologis alami menghasilkan sumber-sumber yang sehat dan dapat digunakan. Sistem-Sistem tersebut:

- Dapat dibangun dengan bahan-bahan dan tenaga kerja masyarakat setempat dengan tidak mengeluarkan banyak biaya;
- Menuntut sedikit pendidikan dan pelatihan untuk penggunaan saniter yang berhasil;
- Sistem tersebut bersih dan bukan sumber penyakit;
- Memungkinkan gizi dari kotoran manusia didaur ulang;
- Melindungi lingkungan hidup dengan memungkinkan gizi dan air didaur ulang;
- Meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menampung dan membasmi secara efektif mikro-organisme;

Sumber-Sumber Daya: "Menyuarakan Pikiran"

Dengan memikirkan mengenai sumber energi yang tersedia untuk Timor Lorosa'e, lapangan minyak bumi dan gas Celah Timor merupakan sumber-sumber energi yang jelas dapat dieksploitasi. Dalam kaitan dengan keberlanjutan, rumah kaca dan kredit karbon, apakah akan lebih baik untuk meninggalkan minyak di tanah untuk digunakan di kemudian hari sebagai suatu sumber kimia daripada dijadikan suatu bahan bakar fosil. Apakah pemakaian potensial gas secara hemat dalam sel bahan bakar di masa depan relevan mempertimbangkan keperluan-keperluan teknologi yang dibutuhkan?

Isu tersebut merupakan isu politik yang sangat membebani yang sekarang diperdebatkan antara Timor Lorosa'e dengan Australia, tetapi hal itu mengena pada inti pendekatan secara filsafat pada keberlanjutan berdasarkan keadaan pada waktu ini.

Organisasi-organisasi Australia seperti APACE telah berhasil secara berarti di Kepulauan Solomon dengan membawakan sistem 'micro-hydro' ke desa-desa di pinggir kota. Apakah 'micro-hydro' dan program



pendidikan pemeliharaan pembantu relevan untuk Timor Lorosa'e? Sistem tersebut relatif berbiaya rendah dan ongkos pemeliharaannya juga rendah dan dapat menyediakan tenaga untuk sampai 20 rumah dan industri skala kecil. Apakah cukup sumber daya manusia dan sumber daya angin untuk tenaga angin yang dapat digunakan di daerah pegunungan?

Sementara pembangkit arus listrik tenaga surya mungkin tidak sesuai untuk pemakaian di desa, apakah hal itu relevan untuk digunakan dalam konteks perkotaan? Bila kepentingan komersial dilibatkan dengan pendanaan eksternal, apakah relevan dari sudut pandang kebijakan untuk meminta masukan minim dari sumber energi yang berkelanjutan?

Kebijakan-Kebijakan untuk Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan

Kebijakan yang efektif akan mengetengahkan persyaratan desain bangunan, pembangunan dan perawatan bangunan komersial, perkotaan dan pedesaan secara minim.

Isu-Isu yang mungkin perlu dipertimbangkan termasuk:

- Bagaimana menilai keberlanjutan mis. dengan memakai kerangka kerja Persyaratan Sistem Berkelanjutan "Langkah Nasional Institut Australia" dan membentuk penilai kualitas lingkungan dan proses penetapan tolok ukur;
- Masalah-Masalah Perencanaan Kota konvensional seperti tinggi bangunan, skala, pengunduran dan ukuran lapangan;
- Estetika desain menyeluruh dan konteks budaya;
- Penggunaan bahan-bahan dan metode-metode tradisional;
- Ketepatangunaan energi, termasuk insulasi, areal jendela, peneduhan, warna, ventilasi alami dan pencahayaan;
- Standar-Standar lansekap dan konsep "permaculture";
- Sistem dan sumber energi yang dapat diperbaharui;
- Koridor ventilasi, akses cahaya matahari;
- Pasokan dan konservasi air yang dapat diminum;
- Manajemen dan pengolahan limbah;
- Konsultasi masyarakat;
- Pengambilan keputusan melalui konsensus – sudah biasa di Timor Lorosa'e;
- Prosedur penyelesaian perselisihan.

Hal yang sama dalam semua kebijakan adalah perlunya melibatkan masukan dari masyarakat dengan cara yang relevan tergantung pada tipe dan kepekaan masing-masing proposal perkembangan. Keberlanjutan

juga tergantung pada daya berkelanjutan budaya sosial dan ekologi, dan Timor Lorosa'e mempunyai suatu tradisi konsensus dan perdamaian, yang akan membentengi setiap kebijakan. Prosedur penyelesaian perselisihan juga diperlukan dalam hal bahwa konsensus tidak tercapai.

Penting bahwa penekanan yang berarti diberikan pada menentukan harapan masyarakat dan bekerja untuk menyertakan bahan-bahan tradisional dan harapan budaya. Perkembangan suatu visi atas bagaimana Timor Lorosa'e dapat berkembang adalah kritis, mis. pembangunan secara Barat yang tidak terkekang atau suatu estetika arsitektur peka budaya tradisional yang berkelanjutan? Bagaimana estetika suatu kota atau desa Timor Lorosa'e yang kohesif?

- Kaca gaya Barat, bangunan baja dan beton atau desain tradisional dan bahan-bahan yang dipadu secara peka dengan bahan-bahan peka ekologi yang inovatif dan tepat lainnya?
- Lalu lintas yang kacau atau memelihara dan memperluas kawasan pejalan kaki/pasar?
- Bangunan tingkat rendah diteruskan?
- Dicemari atau murni?

Suatu Model Ekonomi yang Berkelanjutan bagi Timor Lorosa'e?

Dalam pembentukan suatu ekonomi baru, ETTA cenderung akan memberi pertimbangan cermat dalam membentuk suatu proses model Ekonomi Nasional dan pelaporan. Perekonomian Barat mengadopsi model-model ekonomi yang menganggap masalah lingkungan sebagai hal eksternal. Model yang salah merupakan inti masalah lingkungan di semua perekonomian Barat dan yang sedang tumbuh. Mungkin dengan sebuah negara seperti Timor Lorosa'e untuk mengambil suatu model ekonomi yang menganggap praktek destruktif terhadap lingkungan sebagai suatu kerugian bagi ekonomi dan bukannya pendapatan? Model-model demikian ada- hal ini merupakan kesempatan untuk memajukan ekonomi Timor Lorosa'e supaya menjadi lebih maju daripada "perekonomian yang sudah maju". Apakah hal ini mungkin? Hal ini perlu ditelusuri – dan pengakuan diberikan pada kesimpulan yang jelas – bila hal itu tidak dilakukan pada tahap awal pembentukan struktur ekonomi pemerintah Timor Lorosa'e yang baru, mungkin tidak akan pernah terjadi.



Tenaga yang Sesuai dan Berkelanjutan untuk Timor Lorosa'e

Phillip Calais

Pusat Teknologi Lingkungan Hidup, Universitas Murdoch, Perth, Australia Barat

Tenaga adalah darah hidup masyarakat dan seperti darah, biasanya tidak dihargai sampai tidak ada cukup banyak untuk mempertahankan standar hidup yang kita inginkan.

Walaupun begitu, tidak sama dengan darah, terdapat banyak jenis sumber tenaga, yang masing-masing mempunyai keuntungan dan kerugiannya sendiri. Sedangkan minyak, gas dan batu bara mempunyai keuntungan sendiri seperti mudah didapat, ongkosnya rendah dan penggunaan yang fleksibel dan luas. Akan tetapi bahan-bahan bakar ini juga mempunyai beberapa sifat yang buruk. Sifat-sifat tersebut termasuk kesulitan, ongkos dan sumber daya yang besar sekali yang diperlukan untuk pencarian, ekstraksi/penarikan bahan-bahan tersebut, dan proses pengolahannya. Sehingga proses-proses tersebut merupakan ajang lembaga-lembaga multi-nasional besar. Bahkan, sumber daya minyak, gas dan batu bara terbatas, dan penggunaan bahan bakar dari bumi ini berdampak terhadap lingkungan bumi, baik pada skala lokal disebabkan karena kegiatan pertambangan, tumpahan dan pengeluaran sisa gas yang kotor, maupun di skala global yang termasuk masalah-masalah seperti perubahan iklim.

Tidak bisa diragukan, eksplorasi dan ekstraksi minyak dan gas dari Laut Timor akan membantu Timor Lorosa'e mendapatkan kemerdekaan finansial serta politik. Tetapi, di beberapa daerah di Timor Lorosa'e yang lebih terpencil dan sebenarnya di seluruh Timor Lorosa'e, dimana pengangkutan bahan bakar menjadi masalah, seharusnya tujuannya menjadi pembangunan yang menciptakan tenaga yang tidak merusak lingkungan hidup dan yang bersifat berkelanjutan.

Sebagai bagian dari solusi terhadap keperluan tenaga Timor Lorosa'e, tenaga yang dapat diperbarui memainkan peran yang penting sekali, bersama dengan kebijakan tenaga yang terpadu. Selain memberi masyarakat Timor Lorosa'e bentuk tenaga yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan hidup, penggunaan tenaga dari matahari, angin dan air pada skala kecil bisa juga mempromosikan kemandirian pribadi dalam suatu lingkungan demokratis.

Sebagai contoh penggunaan tenaga yang dapat diperbarui dan cocok adalah penggunaan "sistem rumah yang memakai tenaga matahari". Sistem "matahari" tersebut kecil dan agak murah, yang biasanya terdiri dari satu atau dua modul fotovoltaik, (panel matahari/solar), bersama dengan aki yang berputaran dalam dan alat kontrol berkekuatan aki, dan juga mungkin sebuah alat yang mengubah listrik DC yang bertegangan rendah menjadi listrik AC yang bertegangan tinggi. Sistem seperti itu bisa dimasukkan secara cepat dan murah ke dalam desa pegunungan yang terpencil dan akan memberi cukup banyak tenaga untuk menghidupkan lampu, radio dan beberapa alat kecil untuk satu keluarga kecil.

Sistem yang lebih besar dapat memberi cukup banyak tenaga untuk menjalankan alat listrik yang lebih besar seperti kulkas dan komputer, dan karenanya sangat bernilai untuk klinik medis, sekolah dan perkantoran kecil.

Untuk hal yang lebih besar lagi, sistem yang bisa dipasang, mungkin bersama dengan generator solar atau turbin angin dapat memberi cukup banyak listrik untuk memberi tenaga kepada sebuah desa.

Matahari juga dapat digunakan untuk memberi air panas dengan penggunaan alat pemanas air yang bertenaga surya. Alat ini cukup mudah dan murah untuk dibuat di tempat dan juga efektif.

Oleh karena saya baru tiba di Timor Lorosa'e, saya kurang tahu apabila tenaga angin merupakan suatu kemungkinan di sini, karena banyak tempat yang iklimnya tropis biasanya cuacanya tenang, tetapi kadang-kadang terjadi angin siklon yang keras. Baik iklim yang tenang maupun angin siklon yang keras bukanlah suatu keadaan ideal untuk sistem tenaga angin. Bagaimanapun begitu, kemungkinan pelaksanaan sistem tenaga angin merupakan suatu hal yang perlu diteliti dan mungkin Timor Lorosa'e memang merupakan tempat yang cocok untuk tenaga angin.

Air yang mengalir merupakan kemungkinan lain lagi dengan banyaknya sungai dan mata air di pegunungan di Timor Lorosa'e yang memberi kesempatan bagus sekali untuk menghasilkan tenaga listrik dari sumber tersebut. Sekali lagi, sistem-sistem besar, sedang dan kecil bisa dibangun, mungkin di daerah terpencil, untuk menghasilkan tenaga listrik untuk pelayanan dasar.

Tenaga pasang surut mungkin juga merupakan sebuah kesempatan di kawasan perairan laut. Dalam beberapa tahun terakhir ada kemajuan cepat dalam bidang penghasilan tenaga listrik ini. Di barat-laut Australia Barat, sebuah pabrik penghasilan tenaga pasang-surut yang ukurannya sedang, akan dibangun, yang akan menghasilkan listrik untuk kota-kota tropis yang terpencil.

Sebuah jenis tenaga yang bisa diperbarui lain adalah 'biomass', dengan memakai tumbuhan dan produk dari tumbuhan sebagai sumber tenaga. "Biomass" biasanya dibuat dengan mengumpulkan dan membakar kayu, tetapi ada banyak kegunaan lain untuk 'biomass'.

Satu di antaranya yang mungkin cocok untuk digunakan di Timor Lorosa'e adalah penggunaan minyak tanaman, seperti minyak kelapa dan minyak kelapa sawit, yang cocok untuk diproduksi di sini. Beberapa minyak dari tumbuhan, seperti kelapa, bisa digunakan sebagai pengganti solar dan dapat digunakan dalam kendaraan, untuk lampu dan untuk menghasilkan tenaga listrik. Baru-baru ini saya diberitahu bahwa sudah selama lebih dari seratus tahun sebuah rumah mercu suar di pantai barat daya di Australia Barat dijalankan dengan memakai minyak kelapa dan minyak palma.

Solar bio, Biodiesel, sebuah solar yang sintetik dibuat dari minyak sayur, sudah tersedia di banyak negara Eropa dan apabila saya sudah kembali ke Australia saya ingin menjalankan mobil baru saya dengan biodiesel buatan sendiri.

Biomass merupakan sumber tenaga yang mempunyai berbagai kegunaan dan bentuk, dan juga bisa digunakan dalam tungku pembakaran untuk menghasilkan panasnya yang kemudian digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik. Dalam banyak bagian Australia timur-laut, pembuangan dari tebu digunakan sebagai salah satu sumber daya tenaga utama.

Sama dengan semua teknologi, selalu ada masalah dan faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan bila digunakan. Tidak ada teknologi yang baik saja atau tidak baik saja, dan bahkan penggunaan tenaga yang dapat diperbarui mungkin ada dampak terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Banyak daerah hutan ditebangkan pohon-pohonnya untuk kayu bakar, dan banyak masyarakat adat, sistem sejarah dan sistem ekologi musnah disebabkan oleh penempatan bendungan-bendungan yang tidak bijaksana atau tidak dipertimbangkan terlebih dahulu.

Sebuah sumber tenaga yang dapat diperbarui hanya dapat diperbarui dan bersifat berkelanjutan apabila

diperkenankan begitu.

Karena terbatasnya waktu, saya tidak bisa memperinci teknologi-teknologi tersebut, jadi saya akan menyelesaikan dulu, dan mengatakan bahwa teknologi-teknologi berkelanjutan ini hanya dapat diciptakan dan digunakan apabila ada kelompok orang yang berpikiran terbuka dan yang berkeinginan meninjau masalah-masalah tersebut dan mengembangkan ide-ide yang dipadukan menjadi kebijakan yang praktis dan dapat dimengerti, dan dapat maju.

Saya ingin menyatakan bahwa semua ini sudah terjadi di Australia, tetapi hal ini tidak benar. Saya mohon orang Timor Lorosa'e supaya memeriksa kebijakan-kebijakan tetangganya supaya mampu menghindari dari kesalahan-kesalahan di sana, tetapi juga supaya bisa menarik komponen-komponen yang berguna dari kebijakan-kebijakan tersebut agar dapat mengembangkan sebuah masyarakat yang demokratis dan bersifat berkelanjutan.

Sudah lama orang Timor Lorosa'e berjuang untuk kemerdekaan politik. Biarkan kita juga berjuang untuk kemerdekaan Timor Lorosa'e dalam kepentingan seperti tenaga, makanan, air, perumahan dan semua keperluan-keperluan lain.

Tenaga Surya dan Keberlanjutan

Frank Gnanam

Manajer Bisnis Daerah - Infrastruktur Pedesaan, BP Solar, Australia

Penggunaan tenaga surya berkembang jauh dari suatu teknologi yang hanya digunakan untuk luar angkasa. Sekarang kami sudah turun ke bumi dan teknologi tenaga surya sudah dipasang dimana-mana di seluruh dunia, di gedung-gedung perdagangan, di rumah-rumah, bahkan di tempat pompa bensin, yang disambung dengan jaringan listrik. Tenaga surya merupakan bagian penting dalam pembangunan pedesaan di negara-negara Asia dan Pasifik. Tenaga Surya juga penting untuk pembangunan kembali Timor Lorosa'e.

Tenaga surya memberikan manfaat yang unik- tenaga bersih yang langsung tersedia di tempat pemakaiannya. Tenaga surya tidak mengeluarkan emisi atau bunyi, tidak perlu bahan bakar dan perbaikan atau pemeliharannya minimal. Sistem pemakaian tenaga surya mudah dipasang dan bisa dibuat dalam ukuran apa saja. Sistemnya berdiri sendiri dan tidak tergantung pada jaringan listrik.

Pengalaman BP Solar dengan proyek-proyek pembangunan desa menunjukkan bahwa tenaga surya sungguh merupakan alat perubahan hidup. Daripada menganggap tenaga surya sebagai sumber listrik, kami melihat tenaga surya sebagai teknologi yang memberikan masyarakat air bersih, menaikkan mutu fasilitas kesehatan di daerah terpencil dan menyediakan peralatan pendidikan untuk sekolah-sekolah di pedesaan.

Di mana saja di dunia ini, semua orang perlu air bersih, fasilitas kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan dasar ini merupakan prasyarat untuk

pembangunan.

Sekarang di Malaysia, kami terlibat dalam kerja sama jangka panjang dengan pemerintah Malaysia untuk memasang ribuan sistem tenaga surya di rumah-rumah pedesaan dan klinik kesehatan. Proyek enam tahun ini menyebabkan kenaikan besar dalam kualitas kesehatan, kesejahteraan sosial dan standar standar kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Di Filipina kami menyediakan berbagai macam sistem tenaga surya di masyarakat kepulauan. Dengan memompa air bersih ke desa, keluarga-keluarga menghemat banyak jam untuk berjalan kaki mengambil air dari sungai terdekat. Mutu fasilitas dan pelayanan kesehatan ditingkatkan dengan menyediakan kulkas vaksin dan tenaga listrik untuk pusat kesehatan pedesaan atau rumah sakit. Kehadiran anak-anak di sekolah meningkat 300 persen setelah program pendidikan harian pemerintah disiarkan dengan sistem TV dan video tenaga surya yang disediakan di sekolah-sekolah pedesaan.

Karena gambar lebih jelas daripada kata-kata saja, saya mau menunjukkan dengan video, sebuah proyek di Filipina. Anda bisa menilai sendiri apakah tenaga surya cocok untuk Timor Lorosa'e.

Sebagai kesimpulan, saudara-saudara, BP Solar ingin memainkan peran yang penting dalam pembangunan kembali Timor Lorosa'e, apabila kalian mengijinkannya. Hari ini kami hanya minta kepada anda untuk mempertimbangkan dengan baik kecocokan tenaga surya bagi Timor Lorosa'e.



Sistem Pengelolaan Sampah di Timor Lorosa'e

Jose Mestre

Bagian Air Bersih dan Sanitasi, ETTA

Sistem pengelolaan sampah adalah salah satu persoalan pokok untuk pembangunan yang berkelanjutan di Timor Lorosa'e.

Presentasi ini menggambarkan tentang gambaran umum kondisi pengelolaan sampah setelah jajak pendapat; keadaan pengelolaan sampah saat ini dikaitkan dengan pengaruh yang akan timbul; bagaimana tahapan proses pengelolaan sampah dan program-program yang perlu dilaksanakan.

Gambaran Umum

Bahwa Timor Lorosa'e setelah jajak pendapat tanggal 30 Agustus 1999, yang diikuti dengan letusan kekerasan yang tersebar luas mengakibatkan penghancuran dan pembakaran serta perampasan hak milik orang lain dan masyarakat. Mulai saat itu semua kegiatan pemerintahan untuk melayani masyarakat terutama dalam hal pengelolaan sampah tidak berjalan lagi. Keadaan pada waktu itu sampai sekarang di wilayah Timor Lorosa'e boleh dikatakan sangat jelek yang diakibatkan oleh tumpukan sampah dimana-mana. Jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat lebih banyak adalah sisa kebakaran tanpa suatu penanganan pengelolaan atau pembersihan dan pengangkutan, membuat suatu kondisi lingkungan yang tidak sehat baik di dalam pusat kota yang padat dengan kegiatan manusia maupun di daerah pinggiran kota.

Kekurangan yang paling besar dalam pengelolaan persampahan adalah suatu kenyataan yang ada sekarang di wilayah ini.

Keadaan Pengelolaan Sampah saat ini

Timor Lorosa'e adalah suatu wilayah yang mempunyai karakteristik desa walaupun di dalam pusat kota, hal mana sebagian besar sampah yang dihasilkan adalah sampah daun-daunan. Penanganan sampah-sampah tersebut adalah kebanyakan membuangnya di dalam pekarangan sendiri, yang membuat suatu kondisi yang kurang baik yang mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat umum.

Sisa-sisa sampah makanan digunakan untuk makanan binatang piaraan dan sampah-sampah yang tak dapat digunakan untuk makanan binatang piaraan mereka tanam di kebun atau dibakar bersama dengan sampah yang lain.

Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat ini di Timor Lorosa'e terdapat sebagian besar orang yang berasal dari negara-negara lain yang dapat dikategorikan sebagai penduduk sementara yang menghasilkan sampah yang berasal dari bahan-bahan import.

Dapat disimpulkan bahwa "situasi umum dalam wilayah Timor Lorosa'e saat ini membutuhkan suatu penanganan segera dalam jangka pendek, baik dalam menentukan satu institusi yang jelas sebagai penanggung jawab pengelolaan sampah, maupun dalam memberikan penyuluhan, informasi untuk membina masyarakat agar ikut berperan serta dalam pengelolaan sampah".

Pengaruh yang dapat timbul

Keadaan pengelolaan sampah di Timor Lorosa'e yang saat ini belum ditangani secara baik, maka jelas akan membawa gangguan yang akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan terhadap kesehatan individu.

Adapun gangguan-gangguan yang saat ini kita rasakan bersama, khususnya di Kota Dili terhadap lingkungan yaitu:

- Pencemaran udara akibat bau sampah karena dibiarkan saja
- Banjir akibat saluran air tersumbat sampah
- Menjadi sarang lalat, tikus, kecoak yang merupakan perantara penyakit.

Juga bisa menimbulkan gangguan terhadap kesehatan individu yaitu: munculnya penyakit diare, tipus, sakit perut, demam berdarah, malaria, dan lain-lain.

Sistem Pengelolaan Sampah

Ditinjau dari segi teknik operasionalnya pengelolaan persampahan meliputi kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir. Operasi bersifat integral dan terpadu, karena setiap proses tidak dapat berdiri sendiri melainkan saling pengaruh mempengaruhi.

Program yang perlu dilaksanakan

Program jangka panjang

Di jangka panjang fasilitas-fasilitas perlu dikembangkan supaya memastikan kesehatan lingkungan hidup. Suatu program pemisahan sampah perlu diperkenalkan guna mengurangi jumlah sampah, dan suatu program pengelolaan sampah dengan partisipasi masyarakat juga perlu dikembangkan. Keperluan-keperluan tersebut dapat dilaksanakan dengan pendidikan dan pemberdayaan kemampuan, dan dengan pengembangan perundang-undangan dan peraturan-peraturan untuk pengelolaan sampah di Timor Lorosa'e.

Program jangka pendek

- 1) Menetapkan satu struktur organisasi yang jelas untuk pengelolaan sampah di setiap kabupaten.
- 2) Menyelenggarakan pelatihan atau kursus untuk tenaga teknik dan tenaga administrasi.
- 3) Mengadakan studi kelayakan untuk mendefinisikan dan merencanakan proyek-proyek yang perlu dilaksanakan.
- 4) Menciptakan proyek-proyek untuk:
 - Sistem kebersihan lingkungan
 - Sistem pewadahan
 - Sistem pengumpulan dan pengangkutan
 - Sistem pengelolaan tempat pembuangan akhir.

Pengelolaan Air Kotor di Timor Lorosa'e

Sharad Adhikary

Penasihat Kesehatan Lingkungan Hidup Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

Latar Belakang

Profil kesehatan Timor Lorosa'e yang disiapkan pada tahun 1998 menunjukkan bahwa 52% penduduk tidak mempunyai akses ke air tawar, dan 62% penduduk tidak mempunyai akses ke sistem pembuangan kotoran yang sehat. Suatu survei terhadap pelayanan air dan sanitasi menunjukkan bahwa terdapat pengetahuan yang rendah dalam masyarakat terhadap pentingnya air tawar dan sanitasi untuk mencapai tingkat kesehatan yang lebih tinggi.

Kebutuhan-kebutuhan pedesaan dan perkotaan terhadap sanitasi selalu berbeda dan seharusnya dipandang secara terpisah. Teknologi sanitasi di tempat merupakan sistem sanitasi yang cocok dan tidak terlalu mahal untuk rumah tangga-rumah tangga di daerah pedesaan di Timor Lorosa'e, sedangkan sistem pembuangan kotoran merupakan cara satu-satunya untuk pembuangan air sampah di Dili, kota yang kemungkinan akan mengalami urbanisasi cepat dan pertambahan air buangan di masa yang akan datang. Fasilitas sanitasi di tempat di daerah perkotaan yang padat mungkin akan mengalami masalah-masalah dengan tanah yang terbatas untuk pengumpulan atau pembuangan sampah, terkontaminasinya tempat air yang dekat dengan WC, kotoran mengalir ke luar ke got-got, serta masalah sistem sanitasi yang tidak memadai apabila akan digunakan setiap hari.

Masalah-masalah Kesehatan terhadap Air Kotor

Air kotor disebabkan oleh berbagai kegiatan domestik, industrial atau kelembagaan. Aliran air sampah yang terkendali atau tidak terkendali mungkin akan mencemarkan air yang ada di atas atau di bawah tanah, apabila air tersebut digunakan untuk air minum. Terkontaminasinya air minum dari kotoran manusia, yang biasanya disebabkan oleh pembuangan kotoran manusia di tempat yang tidak tertutup, dan aliran air sampah yang tidak terkendali, menyebabkan beberapa infeksi bakteri, viral, protozoan dan parasit dan penjaralan penyakit seperti diare, disentri, kolera, giardiasis, dan demam tipus. Nyamuk dari kelompok jenis *Culex Pipiens*, yang membawa penyakit filariasis biasanya berkembang biak dalam kotoran manusia.

Sanitasi di Daerah Pedesaan

Kakus tanah atau tangki kotoran biasanya dibangun di tempat pedesaan, akan tetapi kira-kira sepertiga penduduk Timor Lorosa'e masih membuang kotorannya secara terbuka. Sekitar 15% penduduk memakai WC umum. Sebagian besar WC yang didirikan oleh organisasi-organisasi bantuan internasional tidak digunakan oleh masyarakat setempat.

Perlu untuk mengembangkan dan mengajukan berbagai sistem sanitasi di tempat yang cocok di berbagai keadaan daerah di pedesaan-pedesaan yang berbeda-

beda sifatnya, serta disetujui oleh masyarakat setempat dan tidak terlalu mahal. Tergantung pada kemampuan masyarakat untuk membayar, WC dengan kakus berlapis satu atau dua dengan alat penuang-pendirus WC merupakan macam WC yang paling cocok untuk daerah pegunungan. Lapisan kakus mungkin diperlukan. Kakus perendam atau tempat saluran untuk mengumpulkan kotoran yang mengalir keluar dari tangkinya seharusnya selalu mengikuti pembangunan tangki kotoran. Di dataran rendah dengan tingkat air tanah yang dangkal, seharusnya dibangun kakus tanah yang ditinggikan. Kakus perendam atau tempat saluran yang terpisah dapat dibangun sebagai penyalur air sampah rumah tangga.

Program pendidikan sanitasi dapat mendorong masyarakat untuk membangun WC sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan program-program sanitasi dengan partisipasi masyarakat akan sangat membantu untuk meningkatkan tuntutan untuk sistem sanitasi dan diterima dan didukung sepenuhnya oleh masyarakat dan pemakaian WC secara efektif. Banyak LSM-LSM internasional dan lokal yang bekerja di Timor Lorosa'e. Mendirikan jaringan di tingkat Pusat dan tingkat Distrik dengan LSM-LSM yang bekerja di bidang persediaan air dan sanitasi dapat mempertinggi koordinasi antara LSM-LSM dan pemerintah. Program-program kesadaran, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan ilmu kesehatan dan sanitasi dapat dikembangkan dan diadakan di masyarakat dengan inisiatif dan dukungan dari LSM-LSM tersebut.

Pengelolaan Air Sampah di Dili

Kota Dili mempunyai potensi besar untuk pertumbuhan dan pembangunan yang cepat dalam waktu dekat, karena Dili akan menjadi ibu kota Negara Timor Lorosa'e yang baru. Kota Dili mungkin akan menarik banyak orang yang pindah ke Dili dari tempat-tempat lain di Timor Lorosa'e.

Tidak ada sistem pembuangan kotoran di Dili, dan rumah-rumah modern pun dibangun dengan tangki-tangki kotoran. Kakus tanah di dataran rendah dan tangki kotoran tanpa tempat perendam atau saluran pengumpul kotoran menyebabkan pencemaran air tanah di tingkat rendah dan mencemari air permukaan yang mengalir ke got-got. Aliran air kotor secara luas mungkin akan menambah kelembaban yang meningkatkan jumlah pembawa penyakit.

Fasilitas-Fasilitas penyaluran aliran air permukaan di daerah perkotaan termasuk Dili membawa sebagian dari air kotor yang keluar dari tangki kotoran dan kakus tanah yang banjir pada waktu hujan lebat. Kapasitas got-got tidak memadai dan terbuka di beberapa tempat. Pembaharuan got-got, peningkatan kapasitasnya, dan pemberian tutupan apabila diperlukan merupakan salah satu langkah penting terhadap pengurangan

pencemaran lingkungan hidup di daerah perkotaan di Timor Lorosa'e. Sistem persediaan air yang sudah ada di Dili akan diperbaharui dan meningkat kualitasnya dalam waktu dekat.

Sistem pembuangan kotoran merupakan pilihan yang paling bagus untuk Dili dan dapat memberikan fleksibilitas dalam memuat bertambahnya jumlah air kotor dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun. Pada tahap awal, sistem pembuangan kotoran dapat dibangun di pusat kota Dili dengan kemungkinan bahwa sistemnya dapat diperluas di kemudian hari sampai ke pinggir kota apabila masyarakat setempat sudah mampu membiayainya.

Sistem pembuangan kotoran terdiri dari koneksi pipa-pipa (pipa-pipa penyaluran kotoran) ke rumah-rumah untuk pengumpulan dan pengangkutan air buangan ke tempat pengolahan sampah. Jumlah kotoran dalam air dikurangi secara besar-besaran dengan berbagai proses pengolahan. Oleh karena di Dili cuacanya panas, kotoran dapat diolah secara ekonomis di tempat penampungan stabilisasi sampah. Sekarang tempat-tempat penampungan demikian digunakan di skala kecil untuk mengolah kotoran yang diambil dari tangki-tangki kotoran oleh perusahaan swasta yang dikontrak UNTAET di Dili. Setelah pengolahan, kotoran dari proses terakhir pengolahan dengan jumlah zat-zat pencemaran yang rendah sekali dapat dibuang ke laut.

Di Asia Tenggara, biaya per kapita untuk sambungan pipa-pipa pembuangan kotoran di daerah perkotaan pada tahun 1985, mulai dari \$45 USD sampai \$400 USD dengan biaya rata-rata \$80 USD. Apabila kita menganggap biaya demikian masih berlaku di Dili sekarang, dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk sekitar 3% per tahun, biaya perkiraan untuk pembangunan sistem tersebut dengan perkiraan 214 000 jumlah penduduk di 20 tahun ke depan (berdasarkan jumlah penduduk sekarang 118 529), adalah sekitar \$17 juta USD. Apabila pembangunan sistem pembuangan kotoran direncanakan dalam dua tahap, tahap pertama untuk pusat kota Dili, dan tahap kedua untuk daerah-daerah di pinggir kota Dili, biaya pembangunan per tahap dapat sampai \$10 juta USD untuk pusat kota Dili, dan \$7 juta USD untuk pinggir-pinggir kota. Biaya tinggi

tersebut untuk suatu sistem pembuangan kotoran dapat dibenarkan dengan menghitung manfaat kesehatan dalam jangka panjang, yang dapat dicapai dengan mengurangi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan air buangan.

Perlunya sistem pembuangan sampah di Dili seharusnya diprioritaskan dan diajukan oleh masyarakat Dili/Timor Lorosa'e, dan juga oleh bagian-bagian teknis dan administratif di ETTA, termasuk Departemen Pelayanan Kesehatan dan Divisi Pelayanan Air dan Sanitasi, badan-badan pendukung dari luar, dan LSM-LSM baik yang lokal maupun yang internasional. Dukungan tersebut dapat tercapai dengan mengadakan seminar atau lokakarya untuk membantu meningkatkan profil suatu sistem pembuangan sampah, dan menekankan pentingnya suatu sistem pembuangan sampah di Dili.

Kesimpulan

Program persediaan air dan sanitasi seharusnya selalu dikaitkan karena dua-duanya saling melengkapi. Sanitasi dan pengelolaan air sampah biasanya mendapat perhatian yang rendah dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan yang lain. Akan tetapi sanitasi merupakan salah satu jasa dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kekurangan jasa tersebut atau pengelolaannya yang tidak baik berpengaruh langsung kepada masyarakat.

Timor Lorosa'e dalam waktu dekat akan menjadi negara yang mandiri. Oleh karena itu, proses-proses pemberdayaan kemampuan di pemerintahan dan LSM-LSM seharusnya juga menentukan tugas-tugas yang diperlukan untuk membuat rencana-rencana strategis dan memulai pelatihan sumber daya manusia untuk pengelolaan air sampah dan sistem persediaan air. Pendidikan terhadap ilmu kesehatan dapat menyadarkan dan mendorong masyarakat untuk menuntut sistem sanitasi yang lebih baik. Proses partisipatif dalam pendidikan dan kesadaran mengenai ilmu kesehatan sebelum pelaksanaan fasilitas-fasilitas pelayanan sanitasi secara fisik akan membantu dalam mencapai persetujuan dan penggunaan sistem-sistem tersebut oleh masyarakat dalam jangka panjang.



LOKAKARYA-LOKAKARYA TEKNOLOGI

Lokakarya Pola yang Berkelanjutan

Masalah-masalah: Desain rumah/gedung yang tak pantas • Kebutuhan pendidikan untuk memberitahukan masyarakat • Pengaruh media asing/barat terhadap masyarakat • Kekurangan perencanaan • kekurangan zonifikasi • Mahalnya bahan bangunan yang diimpor, dan juga dapat merusak ekonomi lokal • Kota Dili belum tahu akan sifatnya sendiri • perlunya pendekatan holistik dalam perencanaan • Bagaimana mendapatkan rekonsiliasi di antara adanya semen, dan kurang adanya kayu • Masalah globalisasi menyebabkan hilangnya identitas lokal-idealisme • Ilmu pengetahuan dan material yang bersifat lokal- ideal • Kebutuhan studi-studi supaya masyarakat dapat memilih secara sudah berpengetahuan • asosiasi tentang status dengan desain yang datang dari luar • Salah satu prioritas adalah rumah-rumah bagi masyarakat • Dibutuhkan memberihati kepada para arsitek lokal • Ketermasuk pendidikan tentang lingkungan hidup di sekolah-sekolah dan desa-desa • Menerapkan model desain yang berkelanjutan • kebutuhan akan program pelatihan untuk para pembangun Australia • Kerja sama di antara kelompok-kelompok yang mengajukan hak terhadap bangunan dan para arsitek • Pendidikan desain yang berkelanjutan di sekolah-sekolah teknik • Bagaimana penyelesaian: masalah-masalah segera/urgen/penting sekali; masalah-masalah kedua; masalah-masalah berjangka panjang • Bongkarkan bangunan-bangunan yang tidak pantas • Dibutuhkan membuat kode khusus untuk implementasi desain teknik • urban (kota)- bekerja, tinggal di desain urban; rural (pedesaan)- dibangun dengan cara tradisional • Bambu cocok untuk bangunan-bangunan kecil • bambu bisa dibuat secara laminasi • Penelitian sangat dibutuhkan untuk menentukan jenis-jenis bambu yang cocok • memakai lagi bahan-bahan bangunan dari gedung-gedung yang sudah rusak.

ISU-ISU UTAMA	STRATEGI-STRATEGI
Perlu model-model dan contoh	<ul style="list-style-type: none"> • Mendirikan sebuah contoh dari model pola yang berkelanjutan • Perlu membina arsitek lokal dan bidang arsitektur • Pola berbeda untuk situasi pedesaan dan kota • Melakukan penelitian mengenai bambu yang sesuai untuk pembangunan dan pengobatan untuk pengawetan • Bambu digunakan untuk bangunan yang kecil • Menyelidiki kemungkinan untuk memakai bambu yang telah dilaminasi (sudah dilakukan di perudahan di Timor Barat)
Perlu pendidikan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan lingkungan (termasuk pola yang berkelanjutan) pelajaran untuk sekolah dan desa • Pelajaran pola yang berkelanjutan dimasukkan kedalam sekolah teknik dimana tukang bangunan sedang dilatih
Desain/Rancangan bangunan yang tidak cocok	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalankan seminar untuk tukang bangunan dari Australia dan perusahaan bangunan • Mengembangkan kooperasi diantara kelompok hak perumahan dan arsitek pola yang berkelanjutan lokal • Bongkar bangunan yang tak pantas. • Daur ulang bahan dari bangunan yang rusak
Perencanaan yang tidak sesuai	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu menjelaskan masalah yang berjangka pendek, menengah dan panjang. • Perumahan masyarakat adalah prioritas • Merancang pedoman bangunan untuk melaksanakan pola teknik dan memastikan pihak yang mempunyai kepentingan tidak boleh memotong jalan pendek • Perencanaan secara seluruhnya harus memperhatikan limbah, energi dan air

Lokakarya Energi

Masalah-masalah: Harganya- bagaimana orang desa bisa mampu membelinya • Sesudah masyarakat mengetahui teknologinya, perlu tenaga ahli, bila tidak, teknologi itu berguna untuk jangka pendek saja • Lama-lama harga energi lebih murah daripada bentuk energi tradisional • Untuk membuat tenaga alternatif perlu lebih banyak sumber daya alam, berapa lama sampai hasil energi itu lebih besar daripada sumber yang digunakan untuk membuat energi itu • Bagaimana menerapkan pengetahuan baru ini di desa-desa • Perlu pelatihan tentang pengetahuan baru itu di masyarakat lokal • Perlu kebijaksanaan yang dikeluarkan kelompok yang mewakili keperluan masyarakat • Harga solar untuk menjalankan mesin-mesin listrik sangat mahal untuk Timor Lorosa'e di masa yang akan datang *(berlanjut di halaman berikut)*

ISU-ISU UTAMA	STRATEGI-STRATEGI
<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana orang bisa mampu membelinya • Harga solar untuk menjalankan mesin-mesin listrik sangat mahal untuk Timor Lorosa'e di masa akan datang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cara untuk mengurangi pemakaian energy • Lama – lama tenaga energi lebih murah dan sederhana • Pemerintah dan ahli-ahli teknologi kerja sama untuk memberikan produk-produk energi kepada masyarakat pedesaan • Dana diperlukan • Pemerintah/perusahaan listrik membangun dan memelihara sistemnya – masyarakat membayar listrik dengan memakai meteran setiap minggu
Sesudah masyarakat mengetahui teknologi dan perlu tenaga ahli – Teknologi Jangka Pendek	Memanfaatkan struktur masyarakat yang ada dan melatih untuk memelihara dan menentukan kebutuhan mereka akan energi
Kebijaksanaan yang dikeluarkan dari kelompok yang mewakili keperluan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya Celah Timor agar mempunyai hubungan strategi dengan pengembangan energi alternatif • Celah Timor berkewajiban untuk melindungi lingkungan hidup di Timor Lorosa'e • Saran-saran yang transparan dan jelas di tingkat masyarakat tentang kebutuhan energi • Perlu dengan segera pemerintah membentuk kelompok yang akan mengembangkan energi yang berkelanjutan • Masyarakat perlu menyadari akibat negatif apabila energi disediakan

Lokakarya Limbah

Masalah-masalah: Limbah/sampah padat: tempat pembuangan sampah baik yang berada di rumah maupun di jalan raya • Apakah UNTAET mempunyai rencana untuk pembersihan kota/infrastruktur yang dibutuhkan • Kenaikan jumlah sampah padat sejak PPB datang; perubahan dalam sifat sampah • Kekurangan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan • Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembuangan sampah • Belum adanya lembaga/institusi • Sampah yang tidak bisa terurai bertambah sejak jaman Indonesia • Tidak ada tempat penampungan air; air dimasukkan ke dalam bak-bak penampungan yang kotor yang akan masuk ke sungai dan ke laut • Polusi di air menyebabkan ikan-ikan mati • Tidak ada perbedaan terhadap air • air yang keluar dari tempat penampungan yang kotor • Penyakit terbawa air kotor, menyebabkan penyakit-penyakit di masyarakat • Akibat dari tumpahnya oli, bensin dari kendaraan.

ISU-ISU UTAMA	STRATEGI-STRATEGI
<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan besar dalam jumlah sampah sejak PBB tiba. • Sampah yang tidak bisa terurai menjadi masalah sejak Indonesia berada di Timor Lorosa'e. • Tidak adanya tempat-tempat sampah untuk membuang sampah: rumah atau umum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi penyuluhan/ informasi, institusi yang khusus untuk mengumpulkan sampah itu/pendidikan lingkungan • Institusi spesial untuk pengelolaan sampah daur ulang • Menyediakan alat-alat sumbangan • Pendidikan lewat jalur formal dan informal • Menyediakan tempat-tempat pembuangan sampah • Cara mengurangi/ menghindari sampah • Tempat pembuangan sampah berakhir dengan menyediakan undang-undang lingkungan • Sebaiknya limbah cair dimasukkan ke dalam tempat penampungan • Sistem daur ulang perlu teknologi yang benar • Cara-cara untuk menaikkan limbah cair dengan penampungan-penampungan yang bersifat sementara
<ul style="list-style-type: none"> • Limbah Air - Tidak ada tempat untuk membuang limbah air - Dibuang ke kali, pantai, tanah - Polusi, kontaminasi, bunuh ikan dan hewan laut lain. - Tidak ada pemisahan diantara air hujan dan air dari rumah - Air yang keluar dari bak WC - Dampak terhadap manusia: kesehatan dan penyakit yang timbul dari air - Oli, bensin dari mobil - Got-got 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi untuk air limbah • Membuat kelompok-kelompok dari anggota masyarakat untuk dapat membuat tempat-tempat penampungan limbah cair • Kampanye pemerintah kepada masyarakat untuk menggunakan limbah secara baik dan benar • Menanam sayur-sayuran di dalam tempat penampungan air • Diperlukan suatu sistem untuk limbah-limbah tersebut, yang terletak di tempat yang khusus • Sampah-sampah seperti kaleng dan plastik dapat didaur ulang, sedangkan beberapa jenis sampah yang lain dapat dibakar



Kesehatan dan Lingkungan Hidup: Mengintegrasikan Masalah-Masalah Kesehatan dalam Pembangunan Berkelanjutan Nasional

Dr. Alex Andjaparidze

Wakil Kepala Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) di Timor Lorosa'e

"Manusia menempati posisi utama dalam masalah-masalah pembangunan berkelanjutan. Mereka berhak mempunyai kehidupan yang sehat dan produktif, selaras dengan alam. (Puncak Bumi, Pernyataan Rio 1992)

Harapan-harapan kesehatan di Timor Lorosa'e, seperti seluruh dunia, tergantung pada pengembangan lingkungan alam dan sosial kita secara berkelanjutan. Masalah-Masalah kesehatan tidak dapat dianggap terpisah dari berbagai unsur-unsur lingkungan seperti air dan air tawar, kemiskinan dan kondisi kehidupan, sanitasi, pembawa bahan-bahan kimia dan pembawa penyakit, kelebihan konsumsi dan kurangnya pembangunan, teknologi dan perdagangan.

Untuk menjamin kesehatan bagi semua orang di lingkungan yang sehat, perlu jauh lebih banyak daripada hanya penggunaan teknologi medis, atau usaha sendiri dalam semua sektor kesehatan.

Usaha-usaha secara terintegrasi dari semua sektor, termasuk organisasi-organisasi, individu-individu, dan masyarakat, diperlukan untuk pengembangan pembangunan sosio-ekonomi yang berkelanjutan dan manusiawi, menjamin dasar lingkungan hidup dalam menyelesaikan masalah-masalah kesehatan.

Seperti semua makhluk hidup, manusia juga tergantung pada lingkungannya untuk memenuhi keperluan-keperluan kesehatan dan kelangsungan hidup.

Kesehatanlah yang rugi apabila lingkungan tidak lagi memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia akan makanan, air, sanitasi, dan tempat perlindungan yang cukup dan aman- karena kurangnya sumber-sumber atau distribusi yang tidak merata.

Kesehatanlah yang rugi apabila orang-orang menghadapi unsur-unsur lingkungan yang tidak ramah-seperti binatang-binatang mikro, bahan-bahan beracun, musuh bersenjata atau supir-supir yang mabuk.

Kesehatan manusia adalah keperluan dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Tanpa kesehatan, manusia tidak dapat membangun apa pun, tidak dapat menentang kemiskinan, atau melestarikan lingkungan hidupnya. Sebaliknya, pelestarian lingkungan hidup merupakan hal pokok untuk kesejahteraan manusia dan proses pembangunan. Lingkungan yang sehat menghasilkan masyarakat yang sehat, sebaliknya lingkungan yang tidak sehat menyebabkan banyak penyakit dan masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan lingkungan.

Pada tahun 2000 di Timor Lorosa'e, lembaga-lembaga yang menyembuhkan (LSM-LSM dan tim kedokteran militer di INTERFET) memberi lebih dari 690 000 konsultasi dan pengobatan. Lingkungan yang tidak sehat bertanggung jawab langsung atas kurang-lebih

70% penyakit yang dapat dicegah di Timor Lorosa'e, sakit pernapasan, diare dan malaria adalah yang paling buruk. Sakit pernapasan keras di kalangan dewasa dan anak-anak termasuk kurang-lebih 35% dari semua konsultasi dan pengobatan. Penyakit diare termasuk 30%, dan malaria termasuk 18% dari semua konsultasi. Bahkan, penjangkitan demam berdarah disertai linu pada sendi-sendi dan otot-otot yang berdarahan terus, radang otak Jepang dan penyakit-penyakit lain yang dibawa oleh vector bukanlah hal yang luar biasa di Timor Lorosa'e. Dikira bahwa 80% dari anak-anak di Timor Lorosa'e membawa infeksi parasit dalam ususnya, penyakit yang berhubungan erat dengan lingkungan hidup, khususnya dengan sanitasi yang kurang sehat.

Tiga penyebab utama kematian dan ketidakmampuan di Timor Lorosa'e adalah

1) penyakit menceret yang biasanya disebabkan oleh makanan dan air yang dikontaminasi dan kurangnya sanitasi, 2) penyakit pernafasan, khususnya TBC dan radang paru-paru yang disebabkan oleh kondisi kehidupan yang padat dan kurang sehat dan 3) malaria yang membawa maut yang disebabkan oleh kurangnya saluran pembuangan air dan pencegahan nyamuk.

Kematian di Timor Lorosa'e disebabkan oleh penyakit yang dibawa oleh agen yang lain seperti demam berdarah, radang otak Jepang, penyakit tidak menular dan penyakit kronis, kecelakaan di jalan raya dan kondisi-kondisi lainnya.

Marilah kita melihat keadaan lingkungan hidup di Dili sekarang ini. Diperkirakan, jumlah penduduk Dili adalah sebesar 120 000 di Dili, yang berarti kira-kira 20% dari jumlah penduduk Timor Lorosa'e. Di Dili perhatian terhadap masalah-masalah kesehatan pada periode pasca-krisis ini sedikit saja karena perhatian biasanya terfokus pada keperluan gawat darurat dan rehabilitasi/pembangunan kembali. Dili tidak mempunyai sistem saluran air buangan untuk pembersihan limbah air. Praktek pengelolaan limbah air di Dili terdiri dari fasilitas pembuangan di tempat, dengan lubang WC atau tangki kotoran. Cair kotor dari lubang WC ini yang terkonsentrasi biasanya mengalir ke air tanah dangkal, dan cair kotor dari tangki kotoran yang tumpah mengkontaminasi got air muka. Tanpa sistem penyaluran air buangan, WC dan tangki kotoran yang ada mengotorkan air yang ditarik/dipompa dari tanah dan juga air di dalam got. Pemukaan air dalam tanah yang dangkal di bawah Dili menghambat infiltrasi limbah air di bawah permukaan, dan keadaan tersebut menjadi lebih buruk lagi apabila musim hujan. Saluran pipa untuk persediaan air (yang melayani kira-kira 50% dari penduduk kota) sering dipasang di dalam got jalan yang menunjukkan adanya kemungkinan air got masuk ke dalam pipa yang bocor.



Keadaan sanitasi dan air di Dili sekarang memungkinkan terkontaminasinya air minum dengan berbagai patogen yang menyebabkan penyakit menceret, radang hati, dan infeksi lain yang dibawa melalui air. Juga kekurangan sistem got/sistem saluran air yang cukup baik dan sistem penyimpanan air menambah ajang pemeliharaan agen-agen yang membawa malaria, infeksi demam berdarah, radang otak Jepang, filariases dan visceral leishmaniasis dalam kota dan di sekitar kota. Data pengamatan penyakit memberi indikasi bahwa selama tahun 2000, dalam kabupaten Dili ada kira-kira 30% menceret yang berdarah, 27% menceret yang berair, 40% infeksi demam berdarah dan 18% malaria dari semua kasus yang dilaporkan di Timor Lorosa'e.

Seperti yang sudah dilihat di banyak negara yang sudah berkembang, ada kemungkinan bahwa jumlah penduduk Dili akan bertambah, dan akan menarik lebih banyak orang pedalaman pindah ke kota untuk mendapat pekerjaan. Apabila rencana-rencana untuk persediaan air dan sistem pengaturan pembuangan tidak dikembangkan bersamaan bertambahnya jumlah penduduk dan dampak terhadap lingkungan hidup akan memperburuk lagi masalah-masalah lingkungan hidup dan kesehatan di Dili.

Sebuah sistem persediaan air merupakan proses yang lengkap, dan fungsinya dapat diklasifikasi sebagai:

- a) Pengambilan dari sumber, pembersihan dan penyimpanan;
- b) Distribusi secara individu atau borongan; dan
- c) Pembuangan limbah air yang dihasilkan dengan pembersihan yang cukup.

Baru-baru ini, Bagian Pelayanan Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia membuat komitmen bersama atas sebuah usulan proyek untuk persediaan, rehabilitasi dan perbaikan sistem persediaan air di Dili. Proposal ini hanya meliputi masalah pengambilan dari sumber dan tidak menangani pelaksanaan distribusi air atau pembuangan limbah air di masa yang akan datang.

Perbandingan pelayanan dalam sistem baru tersebut apabila dilaksanakan bertujuan mencapai 70%, berarti 30% penduduk tergantung pada sumber tradisional seperti air dalam tanah, sumur dangkal, sumur bor atau persediaan masyarakat umum yang berskala kecil yang tersebar di kota; sistem itu hampir tidak termasuk kontrol kuantitas dan kualitas air yang digunakan.

Persediaan air bersih yang direncanakan untuk setiap orang di perkotaan mencapai 248 liter sehari, lima kali lipat dari persediaan sekarang, yaitu kira-kira merupakan 50 liter. Jaringan distribusi yang ada sekarang tidak mampu menahan peningkatan mendadak dalam sistem persediaan air dan mungkin akan menyebabkan lebih banyak kebocoran, dan pecahnya pipa-pipa besar. Diakui dalam proposal itu bahwa apabila limbah air di kota tidak terkontrol dengan baik, penambahan dalam persediaan air mungkin akan menyebabkan bertambahnya limbah air sebanyak 2mm per hari dalam daerah distribusi dan mengalir sebagai air muka yang tersisa. Rawa-Rawa sementara yang diciptakan oleh kebanyakan limbah air yang dibuat di Dili mungkin akan mencemarkan tanah dan badan air muka, menyebabkan permukaan air bawah meningkat, dan menyebabkan lebih banyak dan menyulitkan

infiltrasi di tanah lapisan bawah dan dekomposisi air buangan di dalam lubang WC.

Keadaan saluran dan fasilitas tempat pembuangan air dan penyaluran di Dili menunjukkan keadaan yang gawat.

Maksudnya bukannya bahwa sistem persediaan air yang kualitasnya lebih baik tidak sangat diperlukan di kota Dili. Memang sangat diperlukan. Akan tetapi, keprihatinan utama kita adalah bahwa proposal proyek itu tidak lengkap karena tidak menangani perencanaan secara bersamaan atas pengelolaan air dan masalah limbah air yang kemudian terjadi. Dalam keadaan seperti itu, bertambahnya limbah air mungkin akan menyebabkan penurunan kualitas air, terlepas dari upaya untuk memperbaiki kualitas persediaan air borongan.

Bagian Pelayanan Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan kepada Bagian Persediaan Air dan Pelayanan Sanitasi di ETTA bahwa kerjanya yang dijalankan dalam rehabilitasi persediaan air termasuk sistem pembagian di Dili seharusnya mengusulkan pembangunan pada waktu bersama-sama sebuah sistem retikulasi air buangan dan perbaikan terhadap sistem saluran yang sudah ada. Saya harap bahwa rekomendasi kami akan dipertimbangkan dan dimasukkan dalam proyek tersebut bila sudah dilaksanakan.

Tolong ingat asumsi-asumsi salah dari pengalaman negara lain berikut ini:

- Perbaikan persediaan air saja menyebabkan kesehatan yang lebih baik. Tidak ada keperluan untuk sanitasi;
- Perbaikan sanitasi hanya sedikit keuntungan untuk kesehatan dan tidak ada keuntungan sosio-ekonomi;
- Semua pilihan sanitasi yang baik mahal dan sulit dipasang;
- Air, udara dan tanah merupakan bahan tanpa ongkos dan kita seharusnya tidak membayar untuk perbaikannya;
- Persediaan air yang cukup dan bersih saja sudah merupakan pra-kondisi untuk sanitasi yang baik;
- Pemberian pesan-pesan akan mengubah tingkah laku orang-orang;
- Sikap tradisional yang berdasarkan budaya merupakan halangan terhadap praktek-praktek sanitasi.

Memang mungkin bahwa anda sudah mendengar keterangan seperti ini dari organisasi-organisasi atau individu-individu tertentu. Walaupun begitu, sebaiknya anda mengingat bahwa yang disebutkan di atas merupakan asumsi-asumsi yang salah dan kita semua bertanggung jawab untuk mengoreksikannya dengan upaya untuk mendukung pentingnya pelaksanaan sanitasi yang berimbang dan keberlanjutan untuk semua orang Timor Lorosae. WHO memberi rekomendasi kuat bahwa proyek pembangunan apa saja di Timor Lorosa'e seharusnya mempertimbangkan pengaruh terhadap kesehatan penduduknya dan mendapatkan persetujuan dari lembaga-lembaga kesehatan. WHO bersedia memberi dukungan teknis yang diperlukan kepada Bagian Pelayanan Kesehatan dalam tugas yang penting ini.



Masalah Kesehatan di Timor Lorosa'e

Maria De Fatima Ximenes Dias
Direktor PAS Clinic

Introduksi

Dalam sejarah kita lima ratus tahun yang silam terutama 24 tahun dimana pendudukan Indonesia, orang-orang Timor Lorosa'e baik laki-laki maupun wanita dari yang kecil sampai yang tertua (90 %) berjuang untuk keluar dari tangan dan belenggu penjajahan. Karena para penjajah memakai banyak sistem diantaranya kekerasan yang menghancurkan anak-anak bangsa Timor Lorosa'e dalam segala segi serta lingkungannya.

Berbicara mengenai kesehatan dan lingkungan secara ideal, kita harus melihat bagaimana semua masyarakat dan termasuk kita sendiri "hidup sehat" baik fisik, psikis, mental dan jiwa. Dan lingkungan yang bersih, bermanfaat, aman, tenang dan damai. Berbicara tentang kesehatan tidak terlepas dari lingkungan hidup.

Kriteria-kriteria untuk masyarakat hidup dalam kesehatan yang baik:

1. Tanah adalah basis dari kesehatan kita. Dari tanah kita mengambil makanan dan obat-obatan;
2. Air merupakan salah satu unsur hidup bagi makhluk hidup di antara kita manusia. Siapapun tidak dapat hidup tanpa air;
3. Pekerjaan menguatkan kesehatan kita. Bila pekerjaan dibagi rata dan hak setiap orang dibagi dengan adil;
4. Makanan adalah kesehatan kita. Penyakit yang paling jelek di dunia adalah kelaparan;
5. Pelayanan medis untuk membantu kesehatan masyarakat. Setiap manusia mempunyai hak untuk dilayani secara medis.

Beberapa masalah yang sedang terjadi di Timor Lorosa'e adalah sebagai berikut. Setiap permasalahan ini membawa dampak negatif terhadap kesehatan, terutama bagi kesehatan manusia.

- Susah mendapat uang, orang keluar dari daerahnya;
- Banyak masalah terjadi di kota Dili;
- Sampah bertumpuk-tumpuk di pasar, jalan-jalan, selokan-selokan/got, semua itu adalah sumber dari penyakit;
- Kurangnya tempat tinggal, banyak orang tinggal/tidur di pasar;
- Banyak rumah-rumah yang terlalu berdempetan. Seperti di desa-desa;
- Perkelahian, pembunuhan, minum obat terlarang (Ganja, Morfin) di kalangan generasi muda;
- Hasil produksi pertanian yang kurang sementara harga bahan makanan di pasar sangat tinggi. Hal ini mengakibatkan banyak orang kelaparan karena tidak mampu membeli. Akibatnya Penyakit bertambah dan merajalela.

Realitas Masalah-masalah dalam masyarakat kita selama 1,4 tahun di masa Pemerintahan Transisi.

Saya kira kita semua selalu membersihkan mata

untuk melihat apa yang terjadi di dunia yang kita hidup ini.

1. Tanah

- Para petani di pedesaan bekerja dan hasilnya sampai rusak dan dibuang karena tidak ada transportasi untuk membawa ke kota dan juga tidak ada perusahaan untuk membelinya.
- Banyak orang dari pedesaan datang bertumpuk-tumpuk di kota Dili.
- Selama ini banyak masyarakat kekurangan makanan.
- Banyak pohon ditebang untuk dijadikan kayu bakar dan sebagian dijual untuk mencari nafkah.
- Hutan dan gunung dikikis serta dibakar terutama di bulan Juni-September.

2. Air

Air yang memberikan hidup kepada kita. Tanpa air semua makhluk hidup mati.

Timor Lorosa'e mempunyai banyak mata air dan saya kira cukup untuk seluruh umat manusia. Tetapi kenyataannya: Di kota Dili saja satu/dua minggu tidak ada air.

- Banyak daerah terpencil orang harus jalan 1-2 jam untuk mengambil air.
- Pada musim hujan mereka minum air hujan atau air yang keluar dari tanah dan banyak sekali para petugas Persediaan Air kurang/tidak memperhatikan pipa-pipa yang putus atau rusak di mana sambungan air tersebut keluar air yang terbuang-buang.
- Belum adanya hukum dan kepastian hukum secara sah dan tegas bagi peraturan pemasangan air. (semua orang memasangnya sendiri-sendiri).
- Dalam tangki-tangki penampungan air tidak dibersihkan, orang memakai pakaian kotor, kayu atau batu untuk menyumbat saluran pipa air.
- Akibatnya orang diserang berbagai macam penyakit seperti colera, malaria, penyakit kulit, scabies dan lain sebagainya.
- Pada musim kemarau masyarakat mau menanam sayur-sayuran dan lain-lain tetapi tanpa air tidak bisa apa-apa. Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat hidup tanpa air dan bijaksana pada waktu musim kemarau.

3. Pekerjaan

- Gaji
- Menguatkan kesehatan masyarakat, sekarang banyak orang tidak bekerja, contohnya jumlah perawat dan bidang 1000 lebih tidak bekerja karena UNTAET tidak ada uang untuk membayar.
- Banyak orang tidak bekerja karena tidak punya ketrampilan.
- Penerjemah, supir dan pelayan. Gaji pun tidak adil. Ada diskriminasi antara staf lokal dan staff pribumi.
- Semua rumah yang bagus punya AC, dll ditempati

oleh orang-orang Internasional, pejabat. Padahal banyak masyarakat yang sakit karena tidak punya tempat tinggal baik dan kami harus mengusahakan tempat untuk mereka istirahat.

- Banyak mini market dan restoran dibuka, yang pergi belanja dan makan hanya orang asing dan orang kaya. Orang kecil dan miskin hanya satu biji beras sulit didapat, dan sisa-sisa makanan dari restaurant dan orang kaya yang diangkut oleh truk sampah ke Tibar, diambil oleh masyarakat dan dibawa ke rumah untuk makan dan ada yang dijual kembali. Hal ini sangat buruk bagi kesehatan masyarakat.
- Masyarakat kecil dan miskin masak pakai kayu dan semua pohon digundulkan, orang asing dan kaya pakai kompor gas. Asap dari kayu bakar tidak baik untuk pernapasan dan kebiasaan di sini ibu dan anak yang selalu ada di dapur maka merekalah yang paling menderita. Kita tahu bahwa orang Timor Lorosa'e 75 % menderita penyakit Tuberculosis (TBC)
- Orang yang mempunyai pekerjaan banyak sekali tidak bertanggungjawab

4. Makanan

- Penyakit yang paling jelek adalah kelaparan, orang miskin banyak yang sakit karena kekurangan makanan.
- Banyak ibu hamil mengalami anemia.
- Banyak anak malnutrisi.
- Banyak suami-istri bertengkar karena tidak ada

makanan untuk anak-anak.

Kami mengurus makanan untuk orang-orang yang paling membutuhkan.

CARE

- 12 kg beras untuk 1 orang perbulan
- 6 kg kacang untuk 1 orang/ bulan

WFP

- Minyak Jagung 1 liter untuk 7-10 orang perbulan.
- Tepung jagung untuk anak 0-2 tahun, 5 orang/bulan
- Kedelai untuk anak 0-2 tahun, 2 orang/bulan
- Minyak, sabun, tepung jagung, juice buah-buahan dll.

5. Pelayan Medis

- Kekurangan Dokter baik dokter umum maupun spesialis.
- Masyarakat Timor Lorosa'e jumlahnya 600.000 jiwa.
- Dokter umum +/- 30 orang
- Dokter spesialis 1 orang.
- Perawat, diploma, akademi +/- 3000 orang
- Banyak tenaga belum direkrut/alasannya UNTAET tidak ada uang.
- Banyak puskesmas terutama di daerah ditutup.
- Masyarakat dari kampung-kampung mau ke puskesmas harus berjalan kaki 1-5 jam untuk berobat.
- Rumah sakit umum Dili maupun Baucau kekurangan obat-obatan maupun peralatan medis.
- Para dokter pribumi tidak ambil bagian dalam pekerjaan di rumah sakit.

Gender dan Pembangunan



Aurora Ximenes

Koordinator, Jaringan Kaum Perempuan Timor Lorosa'e (REDE)

Karakteristika gender Timor Lorosa'e hampir tidak berbeda dengan karakteristik gender lainnya di dunia.

Dimana-mana ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sejak turun temurun perempuan hanya diberikan prioritas untuk menjalankan pekerjaan rumah tangga saja. Sedangkan kaum laki dihargai sebagai orang yang produktif seperti bekerja di kebun, di sawah, juga pekerjaan publik lainnya. Pembagian ini kemudian disebarluaskan dimana-mana dalam masyarakat yang berlangsung sangat lama dan menjadi suatu kebiasaan dimana kaum perempuan kurang diberi prioritas, hanya diberikan prioritas pada kaum laki. Keadaan yang menjadi tradisi yang membagi peranan dan tanggung jawab sebagai kaum perempuan dan laki.

Terdapat suatu kebiasaan, kaum laki dibiasakan secara paternalistik yang seterusnya menjadi budaya paternalistik. Hal ini menyebabkan lingkungan sosial diskriminatif yang membuat perempuan kurang dihargai dan akibatnya mereka dimarginalisasi dan disubordinasi, dan tidak mendapat hak yang sama. Dengan demikian berarti di dalam lingkungan sosial muncul dengan otomatis membagi peranan dan tanggung jawab kepada laki dan perempuan yang kemudian perlahan-lahan muncul issue gender.

Gender dikenal pada tahun 1970 dari seorang yang bernama AAN OAKLY yang menggambarkan tentang

"karakteristik perempuan dan laki untuk ditetapkan dalam lingkungan sosial, tetapi dalam kenyataan perempuan dan laki secara biologis".

Berdasarkan dengan hal ini bahwa ukuran gender bisa berubah perlahan-lahan bersama dengan situasi seperti muncul krisis atau konflik, bisa mengubah situasi dengan cepat.

Seperti kita ketahui bahwa perempuan telah terbukti dengan adanya suatu situasi konflik di Timor Lorosa'e, perempuan melewati suatu perubahan yang membuat masyarakat mengetahui gender secara realitas. Situasi itu dengan sendirinya memperkenankan untuk mengikut serta dalam perkembangan situasi dalam segala bidang yaitu: ikut serta dalam Pergerakan Pembebasan Nasional disamping itu perempuan bergerak untuk membebaskan sesama perempuan khususnya di bidang politik, ekonomi dan pendidikan.

Situasi partisipasi ini tidak berlangsung lama, karena dikuasai oleh militer Indonesia maka menjadi diam dan berhenti. Keadaan perempuan ini ditambah dengan konsekuensi konflik dimana perempuan harus hidup dalam situasi kekerasan yang membuat perempuan mengalami kebodohan dan kemiskinan, dan harkat dan martabatnya menurun.

Dengan demikian kita melihat bahwa konsep Gender di Timor Lorosa'e walaupun sudah menetap menjadi



suatu tradisi yang paternalistik tetapi dengan konflik yang lama menunjukkan bahwa posisi perempuan yang subordinat itu bisa dikatakan telah mendapat perubahan gender sejak 1975.

Untuk mengangkat harkat dan martabatnya, berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi perempuan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta membebaskan kaum perempuan dari kegelapan. Upaya pembebasan yang dilakukan lewat Kongres Perempuan yang diadakan di Dili pada bulan Juni 2000 membahas banyak hal, antara lain:

Politik

- Kebijakan yang menghargai semua orang seperti; hukum, keadilan, sekolah, kesehatan, ekonomi, transportasi.
- Kebijakan yang mendukung perempuan.

Ekonomi

- Tidak adanya modal
- Tidak tersedianya bahan baku produksi
- Tidak adanya jalur transportasi perdagangan
- Pembagian usaha modal seperti pasar belum merata
- Kurangnya ketrampilan usaha
- Perempuan belum mendapat akses pada usaha kecil
- Kebijakan yang mendukung perempuan seperti mikro kredit.

Pendidikan

- Sebagian besar perempuan masih buta huruf.
- Kurang adanya fasilitas sekolah.
- Kurikulum yang belum jelas.
- Binbingan mendidik anak bagaimana cara menghargai dan menghormati orang lain.
- Kembangkan bahasa Tetun dan Portugis.

Kesehatan

- Terbatasnya persediaan obat di tingkat desa.
- Kurangnya tenaga kesehatan di tingkat desa.
- Kesehatan mental.
- Kekurangan gizi.
- Air minum bersih.

Media dan Komunikasi

- Fasilitas komunikasi.

Sehubungan dengan hal-hal yang diatas maka dapat disimpulkan bahwa perempuan harus dapat memberikan kontribusinya dan ambil bagian dalam pembangunan di segala bidang.

Biasanya perempuan tidak berkembang disebabkan banyak factor, seperti: pendidikan, ekonomi, komunikasi dan politik, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut sebagai factor yang mempengaruhi perkembangan gender karena didasarkan pertimbangan bahwa apabila perempuan tidak mengalami peningkatan, maka proses pembangunan akan berlangsung secara tidak merata dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diinginkan oleh masyarakat pada umumnya dan pada khususnya kaum perempuan.

Di bagian lain disebut dalam resolusi mengenai hak perempuan diantaranya mengetahui:

1. Diskriminasi yang terus-menerus dan ketidakadilan dalam kesempatan-kesempatan bagi perempuan di masyarakat Timor Lorosa'e;
2. Kekerasan terhadap perempuan baik di dalam maupun di luar rumah;
3. Poligami dan kekurangan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan;
4. Tidak adanya perundang-undangan yang melindungi perempuan Timor Lorosa'e.

Gender dan Politik Kasus Negara-Negara Pulau Kecil

Motarilavoa Hilda Lini

Direktor, Pusat Sumber-Sumber Masalah-Masalah Kawasan Pasifik, Fiji

Pada tanggal 30 Agustus 1999, masyarakat internasional menyaksikan penegasan secara demokratis keinginan rakyat Timor Lorosa'e untuk kemerdekaannya.

Kemenangan historis tersebut dicapai dengan keikutsertaan semua lapisan masyarakat, termasuk laki-laki, perempuan, tua, muda, dan anak-anak.

Hari ini, pada saat kita merencanakan langkah pertama pembangunan suatu negara, kita dapat menggunakan prinsip, lembaga, dan strategi yang sama, yang digunakan bagi gerakan kemerdekaan pada waktu itu.

Prinsip-prinsip yang biasa digunakan dalam suatu gerakan kemerdekaan adalah:

- Fokus yang jelas,
- Pemimpin yang siap melayani rakyatnya,
- Pengambilan keputusan dan pembuatan cita-cita secara bersama,

- Perencanaan secara strategis,
- Pengerahan rakyat,
- Komunikasi dan informasi,
- Ketrampilan,
- Tanggung jawab dan Pengorbanan.

Kita tinggal menentukan aspek-aspek yang perlu diperkuat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunan kembali Timor Lorosa'e pada saat ini.

Saya tahu bahwa Konferensi Tibar untuk Pembangunan Kembali Timor Lorosa'e, diadakan pada bulan Juni 2000, sudah menentukan arah kebijakan untuk setiap sektor pembangunan, termasuk perencanaan untuk keseimbangan gender.

Saya juga tahu bahwa strategi pelaksanaan dari Kongres Perempuan Timor Lorosa'e yang diadakan pada bulan Juni 2000, "Rencana Aksi untuk Kemajuan Kaum

Perempuan Timor Lorosa'e" sedang digabungkan dalam kebijakan yang termasuk masalah-masalah gender, kerangka hukum, dan perencanaan pembangunan, untuk pembagian dana.

Pekerjaan tersebut dikoordinasi oleh UNTAET Departemen Gender bersama dengan Jaringan Kaum Perempuan Timor Lorosa'e (REDE).

Bahkan, Bapak Xanana Gusmão, sudah menegaskan dalam Pidato Tahun Barunya hak rakyat untuk tinggal dalam perdamaian dan keharmonisan, dan tanggung jawabnya untuk melayani rakyatnya.

Dengan sudah berjalannya usaha-usaha tersebut, saya hanya dapat menceritakan pengalaman saya dari Vanuatu dan Kepulauan Pasifik, dan berharap ada beberapa hal yang dapat menjadi pelajaran bagi kita semua.

Pertama, Pengalaman Vanuatu

Vanuatu pernah mengalami situasi yang sama berhubungan dengan masalah-masalah pasca-penjajahan, termasuk masalah-masalah gender dilihat dari perspektif gerakan kemerdekaan. Program perempuan satu-satunya pada masa penjajahan ialah menjahit dan memasak.

Ketika gerakan kemerdekaan menang pemilu tahun 1979 secara menentukan, Bagian Perempuan dari gerakan tersebut mengadakan pertemuan untuk semua kelompok perempuan, dan semua fraksi politik. Konferensi Perempuan Nasional pertama tersebut mendirikan Dewan Perempuan Nasional Vanuatu, dan pada saat yang sama merancang Program Aksi sebelum Kemerdekaan.

Dewan Nasional terdiri dari 13 Dewan Pulau Perempuan. Perannya adalah untuk menasihati semua badan pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang bersangkutan dengan masalah-masalah perempuan.

Dewan Perempuan memilih perempuan-perempuan yang bertugas di badan pengambilan keputusan tersebut, dan mereka melapor kembali ke Dewan.

Dewan Perempuan juga berperan untuk memastikan bahwa perempuan terlibat dalam perancangan Konstitusi, Kode Kriminal, dan undang-undang utama seperti Undang-Undang Pekerjaan, Undang-Undang Desentralisasi, dan Undang-Undang Tanah.

Dewan Perempuan menentukan beberapa bidang yang perlu pelatihan utama perempuan, memberikan nasihat karir kepada mahasiswa, dan menuntun mereka dalam pelatihannya di luar negeri untuk menjamin hasil yang baik.

Pelatihan di tingkat lokal dikoordinasi oleh Dewan Perempuan melalui 13 propinsi di Vanuatu.

Kantor Masalah-Masalah Perempuan dibentuk di bawah tanggung jawab perdana menteri untuk diberikan prioritas utama. Peran Kantor Perempuan adalah untuk membuat kebijakan dan untuk melaksanakan kebijakan gender seperti ditentukan oleh Dewan Perempuan.

Perempuan dipilih untuk menjadi wakil dalam Pemerintahan Lokal, untuk mendapat ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dewan Perempuan memberikan mereka

pelatihan tentang perannya sebagai wakil perempuan di pemerintahan lokal.

Setiap lima tahun peninjauan kembali dibuat. Setelah 10 tahun kemerdekaan, suatu tinjauan mengusulkan bahwa Rencana Gender diangkat ke Kantor Perencanaan Nasional, untuk mengamati masuknya masalah-masalah gender dalam perencanaan nasional. Kantor Masalah-Masalah Perempuan sekarang bertanggung jawab hanya untuk koordinasi kebijakan.

Dewan Perempuan, yang membesar dari 13 Dewan Pulau, ke 77 Dewan Daerah, menjadi pelaksana kebijakan-kebijakan.

Dewan Perempuan terus sebagai badan pengambil keputusan, memberikan pembelaan, dan memastikan bahwa pemerintah mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang mengakui masalah-masalah perempuan.

Akan tetapi, selama 7 tahun setelah kemerdekaan, tidak ada perempuan yang terpilih untuk menjadi wakil dalam badan pengambilan keputusan yang tertinggi di Vanuatu, yaitu Parlemen Nasional.

Keadaan demikian mencerminkan kekurangan keterlibatan perempuan di bidang politik, tidak hanya di Kawasan Pasifik, tetapi di seluruh dunia.

Di Kawasan Pasifik, perempuan adalah pengelola keluarga, tulang punggung gereja dan masyarakat, perempuan sebagian besar dari guru dan perawat, dan 50% dari petani. Akan tetapi, proses-proses pengambilan keputusan di bidang politik dikuasai oleh laki-laki.

Jumlah perwakilan perempuan di parlemen-parlemen di Kawasan Pasifik sedikit sekali. Walaupun di Australia dan New Zealand ada lebih banyak perempuan yang memegang jabatan politik, perempuan mengeluh kurangnya dukungan, dan sikap dari banyak wakil parlemen dan juga di bidang media yang mengurangi pentingnya kegiatan-kegiatan politiknya.

Walaupun ada pertambahan dalam jumlah sistem politik demokratik di dunia kita ini, tetapi kesetaraan gender dalam sistem politik dan pengambilan keputusan dalam bidang politik belum tercapai.

Perempuan mempunyai cara pandang dan pengalaman yang berharga untuk proses pengambilan keputusan, baik sebagai pemegang jabatan politik, maupun sebagai pemimpin masyarakat.

Kekuatan politik perempuan terletak pada pengertiannya tentang keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan.

Dalam negara-negara kepulauan kecil, terdapat kesulitan dalam membuat kerangka kebijakan pengembangan gender di tingkat internasional dan tingkat daerah menjadi kenyataan.

Di sebagian besar negara, partai politik berpengaruh besar pada susunan parlemen dan pemerintah. Pada umumnya, partai politik tidak memberikan dukungan yang cukup kepada perwakilan perempuan dalam proses pemilihan nasional dan lokal. Budaya dan tradisi seringkali digunakan sebagai alasan mengapa perempuan tidak termasuk dalam pencalonan dan penjabatan posisi politik.

Lingkungan politik umum yang didominasi laki-laki dan bersifat kelaki-lakian, dengan sifat seperti konfrontasi, persaingan keras, jaringan laki-laki yang tertutup, dan jam-jam kerja yang panjang sekali, merupakan batasan-batasan tambahan terhadap



partisipasi perempuan dalam bidang politik.

Masalah kemiskinan perempuan, beban peran ganda, tingkat kebutuhurufan yang tinggi, dan kurangnya akses ke kesempatan pendidikan dan teknologi informasi, merupakan batasan-batasan tambahan terhadap partisipasi perempuan dalam bidang publik.

Saya berharap bahwa Timor Lorosa'e, setelah berjuang begitu keras, dan begitu lama, dengan banyaknya korban manusia, tidak akan membuat kesalahan-kesalahan yang sama seperti banyak negara-negara pulau kecil yang lain. Kesalahan tersebut adalah mengabaikan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Biarkanlah perempuan-perempuan Timor Lorosa'e

menjadi pasangan dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan pemantauan dan penengah dalam penyelesaian konflik. Berikanlah perempuan-perempuan Timor Lorosa'e kesempatan untuk menjadi pasangan aktif dalam pembangunan kembali Timor Lorosa'e.

Mereka sudah membuktikan bahwa mereka dapat berhasil, seperti mereka berhasil membantu menang perang yang berlangsung selama 24 tahun. Tantangannya adalah bagi kalian dalam menentukan strateginya.

Sebagai negara baru, pilihan adalah milik anda sendiri, untuk membuat perubahan.

Pembangunan Berkelanjutan dari Perspektif Generasi Muda Timor Lorosa'e

Ringkasan¹

Mariano Sabino

Koordinator Conselho Presidium Juventude Lorico Asswain/PPJLA

Fenotipe manusia terbentuk oleh interaksi antara genotipe dan lingkungan hidupnya, bahkan genotipe sendiri tidaklah konstan melainkan terus-menerus mengalami perubahan karena mutasi pada kromosomnya (baik mutasi spontanitas maupun pengaruh lingkungan). Tesis ini akan terus membangunkan manusia untuk selalu memperhatikan faktor lingkungan sebagai salah satu faktor determinan dari kehidupan manusia. Sebelum kita menelusuri lebih jauh prasyarat pembangunan berkelanjutan maupun potensi generasi muda didalamnya, penulis ingin mengawali tulisan ini dengan beberapa pertanyaan kritis untuk direfleksikan bersama yakni: tujuan dan falsafah pembangunan, siapa saja pelaku pembangunan, pembangunan untuk siapa, bagaimana proses dan tahapannya, apa saja potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki. Jawaban dari pertanyaan kritis diatas sangat penting dalam menuntun kita dalam melakukan analisis maupun studi komparatif dengan kasus-kasus negara-negara dunia ketiga atau dalam mengembangkan konsep perekonomian Timor Lorosa'e, sehingga konsep pembangunan kita tidak melayang-layang di awan melainkan realistis-pragmatis dan menyentuh persoalan rakyat. Berikut beberapa pemikiran dasar yang berkembang dikalangan generasi muda Timor Lorosa'e antara lain:

Pembangunan bertujuan untuk merubah kualitas kehidupan manusia yang rendah menuju kualitas kehidupan yang lebih baik dan falsafah pembangunan yakni membangun manusia menjadi manusia yang lebih berkualitas secara utuh mandiri dan merata. Bila kita refleksikan dengan kehidupan rakyat Timor lorosa'e maka pembangunan dalam transisi kedepan adalah untuk merubah rakyat Timor lorosa'e yang dulunya ada di bawah banyang-banyang penjajah akan (penindasan, ketakutan, ketidakadilan, direndahkan kemanusiannya, disingkirkan, dirampok hak miliknya, dinegasikan budayanya, yang ditindaklanjuti dengan dibakar

rumahnya) ke nuansa pembangunan yang lebih demokratis, membebaskan, menghargai martabat kemanusiannya, keadilan dan selanjutnya dijamin kesejahteraannya. Dengan demikian pembangunan tidak sekedar berorientasi mengejar pertumbuhan semata melainkan pembangunan partisipatif, merata dan utuh.

Sementara pembangunan berkelanjutan dalam perspektif generasi muda yakni pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa merugikan generasi yang akan datang.

Pemuda sebagai Potensi Pembangunan Berkelanjutan.

Sejarah telah menunjukkan kemampuan kekuatan muda dalam menyembuhkan berbagai penyakit pesimistis yang disebabkan oleh kelelahan dan kepasrahan menghadapi kekuatan kolonialis maupun neokolonialis. Dan pemuda bangkit sebagai pioner dan kompor revolusi yang menghanguskan pesimis dan kepasrahan dengan mentransformasikannya menjadi optimis dan semangat juang menuju kemenangan dan kejayaan. Dengan demikian pemuda sebagai tulang punggung bangsa adalah sebuah tesis yang terus relevan pada setiap zaman, walau secara dinamis akan menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan pada setiap ruang dan waktu.

Pemuda Timor Lorosa'e adalah: mereka yang turut memikul senjata dan gerliya sehingga sama sekali tidak menikmati dunia pendidikan formal, mereka yang lahir dari ibu-ibu yang waktu mengandung menahan rasa lapar apalagi soal pengaturan menu dan gizi, mereka yang semasa kanak-kanaknya menahan lapar dan haus apalagi soal gizi dan imunisasi balita, mereka yang tidak bisa sekolah atau putus sekolah karena orang tua mereka tidak mampu bayar SPP dan membeli peralatan sekolah, mereka yang sesudah selesai SLTA tidak berpeluang kuliah baik karena tidak lulus ujian masuk perguruan

¹Diringkaskan oleh komite pengorganisasian

tinggi atau karena system seleksi yang KKN, mereka yang meninggalkan bangku pendidikan karena menjadi buronan polisi dan militer Indonesia karena aktivitasnya dalam menentang invasi Indonesia, mereka yang kuliahnya tidak selesai karena aktivitas politiknya, sebagian sempat menyelesaikan kuliahnya dan sebagian ikut orangtuanya mengungsi keluar negeri (Portugal dan Australia) sehingga bisa sekolah sampai senjang yang lebih tinggi atau hanya sekedar bisa komunikasi bahasa Portugis/Inggris. Secara politik dan sosiologis pemuda Timor lorosa'e dibesarkan oleh perlawanan dan kekerasan yang sekaligus mempengaruhi perkembangan watak dan mental.

Pengembangan Potensi Pemuda Timor Lorosa'e

Secara Politik, pemuda tetap diberi tempat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan nasional baik bentuk maupun isi (dalam arti pertama, dalam pengambilan kebijakan nasional harus meminta masukan sebanyak mungkin pemuda dan rakyat secara keseluruhan dan kedua, isi dari kebijakan adalah menjawab persoalan-persoalan mayoritas rakyat dan pemuda).

Secara Hukum, ini merupakan pertamakalinya Timor Lorosa'e menikmati kemerdekaan sehingga membutuhkan perombakan total segenap aspek kehidupan manusia dari alam penindasan ke alam kemerdekaan (khususnya hukum yang selama masa penjajahan adalah salah satu instrumen penindasan. Sehingga diperlukan kesadaran hukum yang harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum (butuh kesungguhan perangkat-perangkat hukum)

Investasi Manusia, pendidikan formal maupun informal merupakan manifestasi dari investasi manusia yang bila dilakukan dalam skala besar akan menjanjikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan. Dan investasi manusia merupakan kata kunci dari seluruh rangkaian analisis kita tentang pembangunan berkelanjutan. Dari referensi siapa pemuda Timor Lorosa'e diatas maka untuk Investasi manusia harus diambil tindak sebagai berikut:

- Penyusunan kurikulum informal/dasar yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pembangunan tingkat sub-distrik dan pedesaan (jadi untuk memaksimalkan produktivitas SDM perlu kurikulum untuk pendidikan non formal bagi pemuda yang tidak melanjutkan pendidikan formal yang diorientasikan pada pekerjaan-pekerjaan khas misalnya: usaha pertanian (agrobisnis) dalam skala kecil, pertukangan, usaha-usaha wiraswasta maupun jasa-jasa komersil guna memenuhi kebutuhan daerah, (perlu dukungan finansial melalui kredit bank atau koperasi simpan-pinjam).
- Training/pelatihan yang lebih dititikberatkan pada spesifikasi pekerjaan tertentu (dalam skala beragam dan besar)
- Merancang visi dan misi pendidikan yang bernuansa Ukun Rasik'an.
- Pendidikan rakyat (pemberantasan buta huruf)
- Peningkatan jumlah siswa pendidikan keahlian (D3) dalam skala besar untuk mengisi guna memperkuat sektor swasta maupun negeri.

- Perlu dirancang diskusi/kuliah tamu bagi tingkat sarjana guna terus meningkatkan kapasitas mereka (setaraf S2 dan S3) dengan mendatangkan ahli-ahli luar negeri.
- Dirancang kursus komputer dan bahasa yang gratis (seperti yang dilakukan oleh Dewan Solidieritas Mahasiswa dan di KNUA IMPETTU) dalam skala yang bisa menjawab seluruh peminat.
- Demi melengkapi investasi manusia maka perlu pengaturan menu/makanan bagi ibu-ibu hamil dan balita yang di monitoring oleh pemerintah dan mereka tidak mampu di fasilitasi/ disediakan oleh pemerintah, guna lebih menjamin kesehatan dan pembentukan otak (peningkatan IQ) secara merata diseluruh wilayah.

Lapangan kerja, perlu membuka lapangan kerja bagi SDM produktif sesuai dengan SDA dan kebutuhan Negara Timor lorosae dan mengurangi/menghilangkan pola penajahan pekerjaan berdasarkan Ijasah dan penguasaan bahasa.

Lingkungan Hidup, perlu kampanye untuk kesadaran lingkungan hidup (untuk menghindari pembakaran dan penembangan liar) dan program reboisasi (disepakati dalam kalender nasional, sebulan sekali).

Air Bersih dan Sanitasi, penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi guna menjamin kebersihan dan kesehatan.

AMDAL, ADSB, ADK: Analisis dampak lingkungan, analisis dampak sosial budaya dan analisis dampak kesehatan bisa dijadikan alat untuk merencanakan tindakan preventif pada setiap program pembangunan, guna menjamin pembangunan berkelanjutan.

Catatan Lingkungan Timor Lorosa'e

Lingkungan Timor lorosa'e rusak akibat pertanian tradisional yang berpindah-pindah dan peperagan yang silih berganti di Timor lorosa'e, mulai dari penjajahan Portugis yang hobynya memburu, sehingga perlu membakar hutan (tempat berlindung rusa, babi hutan, kerbau liar dll). Kondisi ini diperparah oleh pendudukan Indonesia yang tidak hanya membakar hutan tetapi juga membakar rumah-rumah penduduk dan perburuannya pun meluas mulai dari binatang hutan (rusa, babi hutan, kerbau dan burung-burung untuk oleh-oleh kelurganya, ternak rakyat sampai pada berburu manusia). Singkatnya seluruh aspek kehidupan rakyat Timor lorosa'e dirusak.

Masa transisi: pembangunan mulai nol, banyak program yang telah di capai oleh UNTAET. Namun demikian beberapa point penting harus menjadi sorotan kita dalam konferensi ini antara lain:

1. Soal rekontruksi yang berjalan lambat (tanpa konsep, fase-fase pembangunan dan prioritas yang transparan dan partisipasi lokal dalam perumusannya), banyak rumah-rumah kecil yang nonpermanen seperti disebelah kantor UNTAET, daerah Pantai Kelapa, Komoro dll (yang mengindikasikan setelah UNTAET keluar rumah-rumah itu pasti turut lenyap).
2. Penanganan fasilitas sosial dan kesehatan seperti penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi, hal ini mungkin dipengaruhi oleh penyediaan Aqua dalam skala besar di kantor-kantor yang bisa diminum dan



sisanya bisa dipakai mandi.

3. Hanya memfungsikan satu Dermaga/Pelabuhan yaitu pelabuhan Dili, selain memperlambat bongkar muat barang juga membuat sesaknya kontener yang bersejejer hingga menutupi taman depan gereja Motael, sementara pelabuhan Com-Lauten, tidak terurus yang seharusnya untuk kapal skala Internasional.
4. Rusaknya taman-taman, karena digunakan untuk jualan sebagai akibat dangkalnya perencanaan tata kota oleh Untaet distrik Dili.
5. Pendidikan sebagai medium investasi manusia, seharusnya diprioritaskan baik dukungan finansial untuk infrastrukturnya maupun kerangka lunaknya, hal ini menambah pengangguran sebagai akibat tidak bisa melanjutkan kuliah atau sekolah bahkan beberapa SD di pedalaman terancam tutup.
6. Tidak deteksi barang dan makanan yang masuk sehingga terlihat banyak mobil bekas yang tidak layak dipakai berjamur dikota Dili dan makanan kadaluarsa tersedia di toko/super market.
7. Soal keamanan pribadi, penegakkan hukum (alat hukum Civpol) tidak maksimal telah menambah keresahan sosial, rusak jembatan dan jalan raya sebagai

sarana transportasi di beberapa daerah telah menimbulkan kesulitan besar daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dan lain-lain barangkali menjadi faktor penghambat dari pembangunan berkelanjutan. Catatan ini mengajak kita lebih proaktif dalam bekerja dengan UNTAET demi kelanjutan pembangunan TL.

Penutup

Lingkungan sosial-budaya merupakan komponen penting yang tidak boleh di lupakan dalam pembangunan berkelanjutan di Timor Lorosa'e dan pembangunan di Timor lorosa'e tidak hanya mengejar pertumbuhan melainkan hal penting adalah indikator sosial dan kesejahteraan dan partisipasi rakyat secara merata dan adil.

Selama ini kita telah melakukan banyak seminar dan konferensi yang hanya selesai dalam draf tanpa realisasi, semoga seminar kali ini kita tidak melakukan hal yang sama. Terima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah menyelenggarakan seminar ini, semoga Timor Lorosa'e kembali menjadi negeri yang hijau dan makmur seperti harapan setiap anak bangsa Timor lorosa'e.

Pressure Group: Sumbangan Kaum Muda dalam Membangun Kembali Timor Lorosa'e

Joao da Silva Sarmento
Koordinator Dewan Solidaritas

"A man travels the world over in search of what he needs and returns home to find it"

(Seorang melalang-buana untuk mencari sesuatu yang dibutuhkan dan kembali ke rumah untuk menemukan hal itu) *(George Moore, Filsuf)*

Hari Sabtu lalu di sebuah kota dingin Davos di Swiss (hari minggu pagi di Timor Lorosa'e), berlangsung pertemuan tahunan dari Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) yang dihadiri oleh kurang lebih 3000 tokoh bisnis papan atas dunia dan para pemimpin politik dunia. Akan tetapi pertemuan ini diwarnai dengan protes yang dilancarkan oleh massa demonstran anti-globalisasi.

Empat buah mobil dibakar, sejumlah massa demonstran ditangkap dan tentu disiksa dengan gas air mata, air, dan pentung karet, oleh polisi.

Massa demonstran itu meneriakkan yel-yel anti-globalisasi yang antara lain berbunyi, "Justice, Not Profits!" ("Keadilan, Bukan Keuntungan!"), "Wipe Out the WEF!" (Hapus Saja Forum Ekonomi Dunia!) dan lain-lainnya. Massa demonstran di daratan Eropa berusaha mengalir masuk ke dalam Swiss dan diperkirakan protes ini akan semakin seru dan menegangkan.

Protes serupa merupakan serangkaian protes anti-globalisasi yang telah terjadi di Seattle Amerika Serikat,

Prague, Finlandia, S11 di Melbourne, Australia, dan di beberapa kota lain tahun-tahun belakangan ini.

Saya mengetahui berita ini bukan karena saya berjalan mengelilingi dunia dalam mimpi semalam tetapi karena dunia telah menjadi suatu "global village" yang mengandung arti bahwa apa yang terjadi di belahan dunia dapat diketahui. Demam akan imbas globalisasi sedang terjadi di mana-mana.

Sebagai contoh yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin. Ketidakadilan global, suatu kebobrokan yang ditentang oleh massa demonstran dalam contoh di atas. Kita bisa melihat hal ini dengan jelas dengan sedikit melongok ke dalam perkembangan Timor Lorosa'e dewasa ini. Contoh-contoh kecil yang dapat ditunjukkan adalah petugas keamanan, interpreter, guru, dan lain-lainnya di bawah label lokal dan internasional.

Budaya MacDonald dan Kentucky Fried Chicken pun telah menjadi ejawantahan nyata. Kol dan pisang di Mercado lama membusuk. Kol, pisang, nanas, dan barang-barang lainnya dari negara lain membanjiri pasar Timor Lorosa'e.

Minggu lalu mata para penghuni planet ini dibuat terbelalak dengan drama penggulingan Presiden Joseph Estrada dari Filipina lewat suatu kekuatan rakyat. People Power di Filipina ini merupakan yang kedua kalinya dalam sejarah Filipina setelah drama yang serupa menimpa Presiden Ferdinand Marcos lima belas tahun

silam. Joseph Estrada digulingkan bukan karena masalah lain tetapi karena terlibat dalam penyakit kronis yang dinamakan korupsi.

Dan di sebuah negara tetangga Timor Lorosa'e pun, dua tahun silam mantan orang kuat Asia, Soeharto, terpaksa lengser prabon karena penyakit yang sama, korupsi. Jugoslavia pun para pemuda, mahasiswa dan pendamba demokrasi pun menjungkalkan tokoh otoriter, despotik Slobodan Milosevic. Pemerintahan Gus Dur pun belakangan ini sedang digoyang oleh massa demonstran yang terdiri dari para pemuda, mahasiswa, dan penggiat demokrasi.

Itulah sedikit gambaran tentang pressure group yang terjadi di belahan dunia. Pressure Group ini melawan badan-badan otoritas yang mengeksploitasi rakyat banyak, korup, dan memerintah rakyat negeri dengan tangan besi.

Timor Lorosa'e belakangan ini dalam diskursus dan media di Timor Lorosa'e tidak sepi dari isu-isu seputar korupsi, ancaman terhadap media dan terhadap kelompok politik tertentu, manifestasi tindakan yang despotik, unholy trinity, dll. Payahnya ialah segala keburukan itu telah terjadi di Timor Lorosa'e. Tampaknya kotak Pandora itu sedang dibuka di Timor Lorosa'e dan segala benih keburukan itu telah beterbangan dan menguasai berbagai sendi kehidupan masyarakat.

Timor Lorosa'e membutuhkan suatu kelompok penekan (Pressure Group) agar mampu menjalankan misi check and balance. Gambaran yang saya sebutkan di dalam beberapa contoh di atas selalu berisi protes dan bentrokan.

Benar bahwa Timor Lorosa'e dewasa ini agaknya memang sepi dengan protes massa demonstran setelah karyawan WFP dan para guru sekolah dasar dan menengah. Lantas, apakah saya mengajak para hadirin sekalian untuk melakukan protes? Tidak! Protes hanya merupakan salah satu cara menyampaikan pendapat. Masih ada banyak cara dalam menyampaikan pendapat. George Orwell alias Eric Blair pernah mengutip

Napoleon Bonaparte memerintahkan dalam sepekan diadakan suatu yang dinamakan demonstran spontan.

Dewasa ini terdapat banyak masalah sosial di negeri Timor Lorosa'e. Konferensi ini pun secara konseptual bukan tidak meninggalkan suatu masalah. Ada fenomena bahwa orang lahir diberi makan dengan kongres, orang sakit diberi obat dengan konferensi, orang menuntut sekolah dibius dengan pelatihan dan kursus.

Secara pribadi saya merasa sedih bahwa pada saat kita berkumpul untuk sebuah event yang bernama konferensi tentang pembangunan berkelanjutan kita sedang menjadi saksi bahwa serangkaian pembangunan yang tidak berkelanjutan sedang berlangsung bahkan di dalam ruangan ini sendiri dengan misalnya para penerjemah, institusi tertentu yang berupaya untuk membangun imperium kapitalisme berlabel badan-badan pemberi bantuan pembangunan, dan lain-lainnya.

Dalam konteks seperti ini konsep pembangunan berkelanjutan hanya menjadi suatu jargon yang disembah oleh negara-negara dunia tetapi paradigma ini tidak pernah berhasil dalam tingkat pelaksanaannya. Atau malah justru yang ada ialah Unsustainable Underdevelopment, mengutip Noam Chomsky.

Magna Carta CNRT di Peniche Portugal pada 25 April 1998 menandakan bahwa Timor Lorosa'e berkomitmen membangun suatu masyarakat sipil yang demokratis, multi-partai, dan menaruh respek mendalam terhadap hak-hak asasi manusia yang dibangun atas dasar identitas budaya Timor Lorosa'e.

Kaum muda di Timor Lorosa'e pun memberikan sumbangsih mereka dengan menjadi kelompok penekan yang tujuannya tentu memperjuangkan terbentuknya masyarakat sebagaimana disebutkan di atas. Kelompok penekan tidak boleh dipandang sebagai musuh atau tindakan anarkis sehingga perlu dibalas dengan sikap Kronos yang berusaha menelan anak-anaknya seperti dalam mitologi Yunani.

Sebagai penutup, izinkanlah saya mengutip motto para penggiat lingkungan, "Berpikir global, bertindak lokal" (Think globally, act locally).



Pendidikan dan Pembangunan Berkelanjutan

Armindo Maia

Rektor, Universitas Nasional Timor Lorosa'e (UNTL)

Presentasi ini mungkin lebih cocok bila berjudul "Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan", mengikuti model yang dikembangkan John Fien (2000). Akan tetapi lebih baik tetap terbuka, memberi kesempatan kepada ahli teori, akademis, dan pendidik yang bekerja di bidang pembangunan berkelanjutan, untuk mengembangkan suatu model pendidikan lingkungan hidup yang cocok untuk Timor Lorosa'e, baik untuk tujuan kurikuler, maupun untuk tujuan non-kurikuler.

Sebagai seorang akademis, saya tahu bahwa saya diharapkan memberi presentasi yang sangat bersifat akademis, dan berpengaruh besar dalam dunia pembangunan berkelanjutan. Saya harap saya tidak membuat peserta di sini kecewa bila mereka mengharapkan demikian. Sebetulnya, saya tidak mempunyai latar belakang di bidang pembangunan berkelanjutan, atau keahlian di bidang pembangunan berkelanjutan, bahkan saya tidak ikut serta dalam kegiatan apapun yang berhubungan dengan bidang pembangunan berkelanjutan. Pelajaran sedikit mengenai Sumber Daya Alam dan Ekonomi Lingkungan Hidup sekitar kira-kira sepuluh tahun yang lalu tidak berguna untuk konferensi ini. Maka di konferensi ini saya akan memantau saja, dan tentu saja saya akan mempelajari masalah pembangunan berkelanjutan secara lebih empiris dan bersifat teori.

Presentasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian

pertama akan membahas konsep-konsep utama seperti pembangunan berkelanjutan, pendidikan lingkungan hidup, dan tujuan-tujuan pendidikan lingkungan hidup. Bagian kedua adalah tentang masalah keperluan pendidikan lingkungan hidup di Timor Lorosa'e. Terakhir, saya akan memfokuskan pembicaraan pada masalah memasukkan pendidikan lingkungan hidup di dalam kurikulum sekolah, dari tingkat SD sampai tingkat universitas, maupun pendidikan lingkungan hidup di tingkat pendidikan informal.

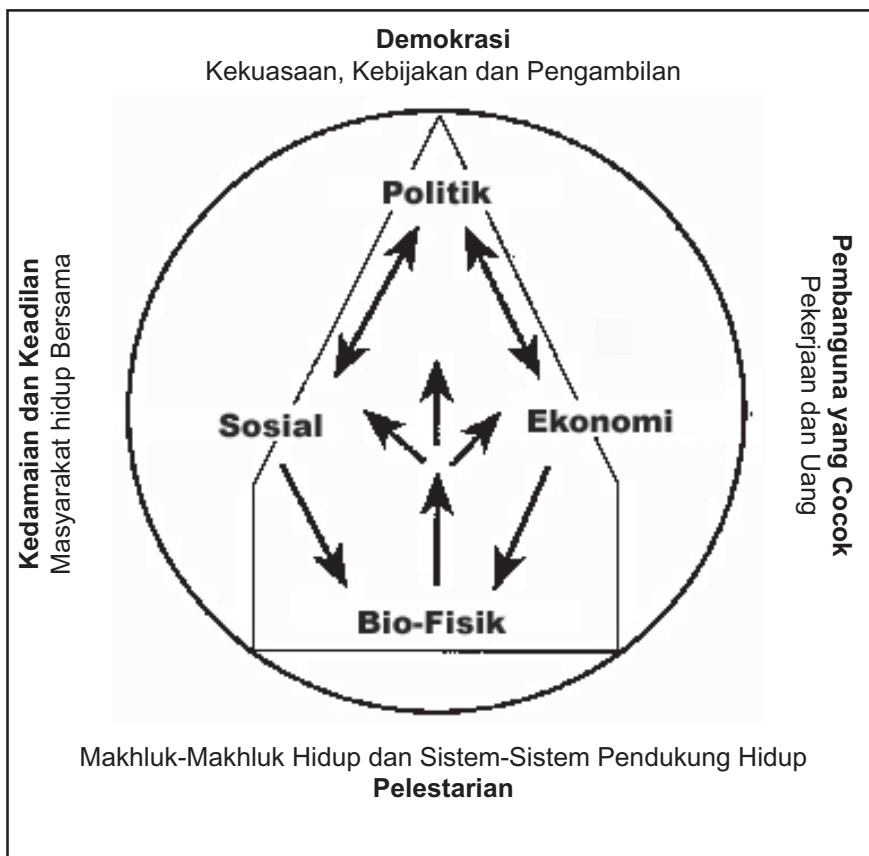
1. Pembangunan Berkelanjutan dan Pendidikan Lingkungan Hidup

Beberapa definisi Pembangunan Berkelanjutan sudah diusulkan dan dikembangkan ahli-ahli pembangunan berkelanjutan, sebagian dari definisi-definisi tersebut mengutamakan hal-hal tertentu, sedangkan definisi-definisi lain mengutamakan hal-hal yang lain. Untuk maksud presentasi ini, saya memilih definisi John Fien (2000) sebagai bahan pembahasan, yang memfokuskan pada lingkungan hidup: "Lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah lingkungan hidup di mana lingkungan alami, pembangunan ekonomi, dan kehidupan sosial, dianggap saling berkaitan, dan hubungan di antaranya menyebabkan peningkatan kualitas hidup dan sifat berkelanjutan masyarakat dan lingkungan hidup".

"Pendidikan Lingkungan Hidup" berarti "pendekatan proses pelajaran yang membantu individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk memahami konsep pembangunan berkelanjutan". Pendekatan tersebut harus meliputi semua aspek kurikulum pendidikan. Tujuan pengertian mengenai pembangunan berkelanjutan adalah supaya "kalangan muda mengembangkan sikap kepedulian dan berkomitmen, dan mempunyai keinginan untuk bertanggungjawab pada lingkungan hidup dan terhadap orang lain".

Kemudian, kita sampai di tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup yang artinya: "Penciptaan lingkungan yang berkelanjutan, di mana masyarakat dapat hidup dan bekerja" tidak hanya untuk generasi kini, tetapi juga untuk generasi di masa depan.

Konsep-konsep yang penting di bidang pendidikan lingkungan hidup termasuk: sumber-sumber alam yang tidak dapat diperbarui, sumber alam yang dapat diperbarui, dan sistem lingkungan hidup yang terdiri dari empat bagian: politik, sosial, ekonomi,



Bagan 1. Empat Sistem Lingkungan Hidup R. O'Donoghue, Sumber J. Fein 2000

dan biofisika. Sketsa R.O. Donoghue (Bagan 1, di atas) yang terkenal mengenai empat sistem lingkungan hidup menunjukkan keterkaitan antaranya, dan sistemnya sebetulnya adalah "tertutup", bergerak di satu lingkaran.

2. Mengapa perlu pendidikan lingkungan hidup di Timor Lorosa'e?

Banyak orang, termasuk peneliti, akedemikus, pemantau dan para politisi, sudah menyatakan keprihatinannya atas tingkat kerusakan lingkungan hidup yang mengerikan di Timor Lorosa'e pada tiga puluh tahun terakhir ini. Banyak dari ahli-ahli tersebut sudah menjelaskan penyebab-penyebab kerusakan demikian, termasuk faktor ekonomi, budaya dan pendidikan. Saya akan memfokuskan pada aspek budaya dan pendidikan sekarang, dan membiarkan orang lain membicarakan masalah ekonomi.

Terhadap masalah budaya, saya akan membaginya menjadi dua sikap utama- positif dan negatif- yang masih terlihat di mana-mana di negara ini, dengan perbedaan-perbedaan di daerah perkotaan. Sikap positif terhadap lingkungan hidup di masyarakat tradisional berakar pada kepercayaan pada "Lulik", serta terbentuk oleh interaksi sosial dan kebutuhan-kebutuhan ekonomi. "Lulik", seperti sudah dijelaskan dalam konferensi ini, menganggap unsur-unsur alami dan buatan manusia suci. "Lulik" menganggap pohon-pohon tua dan besar, batu, mata air, binatang, dan gunung, suci. Oleh karena itu, perusakan unsur-unsur tersebut oleh manusia dilarang. Maka pandangan demikian sangat menguntungkan pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Kebiasaan seperti menanam pohon di batas kepemilikan tanah (tanah masyarakat atau tanah individu) merupakan kebiasaan yang terjadi di mana-mana di Timor Loroasa'e. Kebiasaan yang sama juga dapat dilihat di setiap mata air, khususnya di daerah pedesaan, di mana pohon palma macam kelapa dan sirih merupakan jenis pohon utama, di samping pohon beringin yang sangat besar.

Sayangnya, kepercayaan dan kebiasaan tersebut secara pelan-pelan menghilang, dengan masuknya peradaban dan "pendidikan" ke daerah pedalaman.

Di sisi lain, beberapa kebiasaan sosial dan budaya

yang hanya bersifat negatif terhadap lingkungan hidup, harus ditangani secepat mungkin. Kebiasaan-Kebiasaan tersebut termasuk: kebiasaan pertanian "tambang/bakar", pertanian berpindah, pertambahan urbanisasi, penebangan pohon untuk kayu bakar, dan pembakaran hutan untuk mencari binatang. Faktor budaya lain yang perlu diubah termasuk kebiasaan membangun rumah di lereng gunung atau di atas bukit, diikuti oleh pembersihan tanah untuk ladang-ladang di lereng gunung, yang menyebabkan erosi dan degradasi tanah.

3. Pendidikan Lingkungan Hidup sebagai komponen kurikulum sekolah

Tidak dapat diabaikan bahwa setiap orang Timor Lorosa'e merasa ingin melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan lingkungan hidup. Tidak dapat diabaikan bahwa pendidikan, khususnya pendidikan resmi, dianggap salah satu cara yang paling berguna untuk mencapai tujuan tersebut. Orang muda belajar dengan cepat dan mudah dan dapat dengan mudah menanamkan sikap kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi bagian dari nilai-nilainya. Masalah-masalah lingkungan hidup tidak termasuk dalam kurikulum pendidikan pemerintahan Portugis dan Indonesia di Timor Lorosa'e pada masa lalu. Kurikulum SMP/SMA pada waktu pemerintahan Indonesia termasuk sedikit pelajaran yang disebut "muatan lokal". Akan tetapi, mengingat kekurangan pengetahuan dan ketrampilan guru-guru di bidang lingkungan hidup pada waktu itu, akhirnya pelajaran tersebut menjadi suatu kegiatan yang disebut "kegiatan reboisasi" dengan hasil-hasil yang meragukan.

Selama masa transisi ini, "kurikulum transisi" sudah diterapkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pendidikan, sementara usaha-usaha untuk mengembangkan kurikulum nasional sudah dimulai. Saya menyarankan dengan tegas bahwa pendidikan lingkungan hidup harusnya dimasukkan secara pelan-pelan ke dalam kurikulum sekolah, dari tingkat SD setidak-tidaknya sampai tingkat SMP/SMA. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada keperluan untuk kelompok guru yang berpengetahuan dan berketrampilan di bidang lingkungan hidup.

Referensi

- Fien J, (dilihat 10 Oktober 2000), Pendidikan yang Bersifat Berkelanjutan, UNEP, Pusat Pengembangan dan Pembaharuan Pendidikan Asia-Pasifik (UNESCO), Universitas Griffith, <http://www.ens.gu.edu.au/ciree/lse/mod1.htm>



Pendidikan Lingkungan

Sue Lennox
Oz Green

Pendidikan memiliki peran yang sangat utama dalam membangun kembali Timor Lorosa'e. Salah satu tantangan terbesar bagi Timor Lorosa'e adalah membangun masa depan yang berkelanjutan setelah bertahun-tahun diabaikan dan dieksploitasi – tanpa memperoleh perhatian dari dunia luar. Pendidikan memiliki potensi untuk bertindak sebagai kerangka yang mendukung semua inisiatif bagi pembangunan berkelanjutan yang lainnya. Dalam konteks ini Pendidikan Lingkungan lebih baik diganti sebagai "Pendidikan bagi Keberlangsungan".

Tantangan-tantangan bagi dunia secara umum dan Timor Lorosa'e secara khusus adalah suatu kebutuhan mendesak sekali untuk mengadakan perubahan pada skala global. Pada Hari Dunia Lingkungan Hidup tahun lalu, Klaus Toepfer, Direktur Eksekutif UNEP, berkata:

"Produksi yang tidak berkelanjutan dan pola konsumsi di negara-negara berkembang dan kemiskinan di negara yang sedang berkembang, merupakan dua ancaman utama bagi lingkungan hidup global yang sedang dihadapi dunia saat ini."

Saya pikir skala ini terlihat sangat kejam di Timor Lorosa'e – ketidaksetaraan di dunia kita terlihat sangat nyata di Dili di mana "para konsumen yang berlebihan" dan kemiskinan yang mencolok mata.

Kebanyakan masalah lingkungan hidup adalah hasil dari kelakuan manusia. Pendidikan adalah alat yang sangat penting untuk membuat perubahan yang dibutuhkan bagi pembangunan berkelanjutan di Timor Lorosa'e – Setiap orang perlu dilibatkan dalam pelatihan ketrampilan di program-program sekolah.

Anak-anak memiliki peran yang sangat penting untuk mengambil bagian tetapi kita tidak dapat mengandalkan pada program pendidikan yang hanya menargetkan anak-anak sekolah – masalah-masalah lingkungan perlu aksi sekarang juga – dan hal ini merupakan tugas orang-orang dewasa dalam masyarakat yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan dan menjadi panutan bagi anak-anak.

Di New South Wales, lingkungan merupakan salah satu keprihatinan teratas bagi masyarakat dan pendidikan lingkungan dapat dilihat oleh masyarakat sebagai satu-satunya hal yang sangat penting yang dapat pemerintah lakukan untuk melindungi lingkungan (NSW EPA Survey). Akan tetapi, fokus kuat pada pendidikan ini tidak didukung oleh perundang-undangan.

Program pendidikan lingkungan memiliki keefektifannya sebagai berikut:

1. Melibatkan semua orang;
2. Belajar seumur hidup;
3. Mempromosikan partisipasi yang aktif;
4. Menyeluruh – menyatukan pengetahuan lokal + pengetahuan para ahli + perencanaan;
5. Melibatkan proses belajar yang aktif (investigasi – tindakan – siklus evaluasi);
6. Mengarah pada perubahan;
7. Pendekatan visi yang tepat;

8. Ketekunan.

1. Melibatkan semua orang

Pendidikan lingkungan perlu melibatkan setiap orang – pemerintah, sekolah, universitas, bisnis, masyarakat, media dan orang-orang dari berbagai umur.

2. Belajar seumur hidup

Keadaan lingkungan berubah secara terus-menerus, sebagaimana pemahaman kita terhadap bagaimana cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan hidup dan membangun suatu cara hidup ekologis yang berkelanjutan. Karenanya, pendidikan mengenai lingkungan hidup secara terus-menerus penting sekali.

3. Partisipasi yang aktif

Masyarakat lokal membutuhkan bimbingan untuk membangun ketrampilan untuk menjadi aktif dan berpengetahuan dalam membangun kembali dan melindungi lingkungan. Hal demikian membutuhkan training dan pengembangan ketrampilan dalam penilaian lingkungan dan perencanaan, dengan demikian masyarakat setempat dapat memantau perubahan-perubahan yang ada di sekitar lingkungan mereka dan mengembangkan jawaban-jawaban yang tepat. Di Australia kami memiliki program-program masyarakat seperti pemantauan terhadap air sungai dan kepedulian terhadap tanah gundul yang melibatkan ratusan ribu para pelajar sekolah dan masyarakat setempat dalam menanam pohon-pohon dan melindungi sungai-sungai.

4. Menyeluruh – menyatukan pengetahuan lokal + pengetahuan para ahli + perencanaan

Solusi-solusi terhadap masalah lingkungan hidup terletak pada orang-orang yang mengalaminya. Pengetahuan setempat memainkan peran penting dalam pembangunan strategi-strategi yang cocok bagi Pembangunan Berkelanjutan Ekologis. Ketika masyarakat setempat mengetahui – bagaimana dipadukan dengan teknik apa – perencanaan yang cocok dapat dikembangkan bagi pembangunan yang berkelanjutan.

5. Melibatkan proses belajar yang aktif (investigasi – tindakan – siklus evaluasi)

Pendidikan lingkungan hidup yang efektif bukan saja menyangkut belajar – hal ini adalah proses yang aktif dalam mengembangkan ketrampilan-ketrampilan dan pemahaman-pemahaman baru; mengembangkan strategi-strategi bagi aksi; melaksanakan strategi-strategi, melihat kembali keefektifan dari aksi-aksi, dan belajar dari semua hal ini untuk membangun jalan yang lebih baik. Proses belajar yang terus menerus – bertindak – meninjau kembali – perubahan, merupakan suatu ciri pokok pendidikan lingkungan yang efektif.

6. Mengarah ke perubahan yang positif

Proses investigasi dan analisis membantu masyarakat lokal untuk menentukan perubahan-perubahan yang akan menyebabkan perubahan dalam keadaan hidup mereka. Masyarakat setempat bertanggung jawab atas dilaksanakannya perubahan-perubahan tersebut.

7. Pendekatan yang Bervisi

Pendidikan lingkungan yang efektif bukan hanya membantu orang untuk menghadapi tantangan-tantangan, tetapi mereka juga harus menjadi pemain-pemain yang aktif dalam membangun masa depan macam apa yang mereka inginkan.

"Masa depan bukan hanya suatu tempat kita tuju tetapi tempat kita menciptakan. Jalan menuju ke sana tidak ditemukan tetapi dibuat. Pembuatan jalan tersebut mengubah baik pembuat maupun tujuannya". (Motto Komisi Australia untuk Masa Depan).

8. Ketekunan

Perubahan makan waktu lama dan bertahap. Ketekunan sangat penting. Dengan peredaran ide-ide, suatu saat akan sampai di puncak, dan laju perubahan menjadi cepat sekali. Orang-Orang Timor Lorosae barangkali merupakan "ahli dunia" dalam hal ketekunan.

Saya adalah salah seorang pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat yang dikenal sebagai OZ GREEN- Global Rivers Environmental Education Network (Australia) Inc. Oz GREEN adalah sebuah organisasi "non profit" (tidak mencari untung) yang bertujuan memungkinkan

partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan sumber-sumber air dan pembangunan cara hidup ekologis yang berkelanjutan.

Pendidikan lingkungan dan program aksi yang sedang dilaksanakan Oz GREEN di Oecussi barangkali merupakan gambaran dari konsep-konsep ini.

- Bekerja dengan Administrasi Oecussi, EPU dan badan-badan kehutanan ETTA dan LSM Timor Lorosae FFSO dan Haburas;
- Pelatihan dan pemberdayaan kemampuan dalam pemantauan lingkungan hidup, pemantauan kualitas air, pendidikan masyarakat dan cara-cara partisipasi dan manajemen proyek;
- Melibatkan desa-desa setempat dalam penilaian lingkungan hidup mereka, mengembangkan rencana-rencana aksi lingkungan hidup pedesaan kemudian membantu mereka dalam pelaksanaan rencana-rencana tersebut.
- Bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan masyarakat setempat untuk melibatkan mereka secara aktif dalam berpartisipasi dalam pemulihan lingkungan hidup - mengembangkan kebun bibit pohon-pohon dan program-program reboisasi.
- Mengembangkan kebun-kebun masyarakat yang menunjukkan teknik-teknik yang praktis mengenai tanaman-tanaman yang berkelanjutan.
- Melibatkan seluruh masyarakat dalam mengembangkan Rencana Aksi bagi Distrik Oecussi.



Hak-Hak Atas Tanah Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa'e

Ringkasan

Pedro de Sousa Xavier

*Manajer Pendaftaran Hak Kepemilikan Tanah,
Bagian Tanah dan Harta Benda, ETTA*

Pengantar

Timor Lorosa'e mengalami sejarah yang panjang dan penuh dengan gejolak. Sebagai akibat dari peperangan yang berkepanjangan, hak atas tanah di Timor Lorosa'e jauh dari perhatian pemerintah (kedua regim). Sengketa tanah yang timbul saat ini adalah memperhatikan hal ini. Ketidakpastian pemilikan tanah menimbulkan persoalan tersendiri di Timor Lorosa'e saat ini dan di masa mendatang.

Masyarakat pedesaan masih hidup dengan tradisi leluhur mereka. Hukum adatpun beragam antara suku kemak (Patrilineal) dan Bunak (matrilineal). Demikian pula mengenai Hukum Pertanahan Adat. Secarik kertas yang membuktikan pemilikan tanah di Timor Lorosa'e tidak pernah diurus secara tuntas

Namun sedikit beruntung bagi masyarakat perkotaan terutama di Dili, selama kurang waktu 500 tahun. Sampai dengan tahun 1975 tanah yang telah terdaftar/mempunyai bukti pemilikan (Alvara) sekitar 2.709 bidang dan 24 tahun Pemerintah Indonesia 44.091 bidang tanah atau 46.800 (Nalle 1998:10) bidang tanah. Jumlah ini berarti 4.4% dari jumlah bidang tanah yang dimiliki tiap kepala keluarga di Timor Lorosa'e 186.743 (East Timor in Figure 1997:37) telah mendapatkan status yang jelas. Bukti pemilikan tanah (sertifikat/alvara) sebagian besar telah hancur (dimusnahkan), bersama pemiliknya dan harta benda tahun 1975 dan tahun 1999, yang tinggal saat ini adalah bukti penggarapan dan pengakuan dari masyarakat yang jadi rebutan.

Regulasi No. 1 tahun 1999 memberikan mandat kepada UNTAET untuk menanggapi administrasi semua asset bergerak dan tidak bergerak, milik pemerintah maupun umum yang ada di Timor Lorosa'e yang ditinggalkan sesudah tanggal 30 Agustus 1999. Bagian Tanah dan Benda Untaet mengalokasikan tanah/bangunan-bangunan tersebut kepada para investor/swasta yang melakukan kegiatan bisnis di Timor Lorosa'e. Sekitar 250 bidang tanah telah dialokasikan dengan Temporary Use Agreements (TUA).

Kabinet UNTAET tanggal 25 Oktober 2000 telah memutuskan Bagian Tanah dan Benda tidak mendaftarkan hak tetapi hanya menerima gugatan/claims atas tanah di Timor Lorosa'e dan pemberian hak secara final setelah merdeka. Keputusan ini memperjelas tugas Land and Property di masa Transisi.

Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Hak atas tanah timbul apabila seorang warga persekutuan (ema rai nain) dan non persekutuan (ema rai seluk/ema lao rai) dengan persetujuan memberi

tanda pada daerah tertentu (tara tara) selanjutnya tanah yang telah diberi tanda membuka tanah (lere rai atau fila rai). Hubungan selanjutnya tanah tadi diusahakan secara terus menerus akan lahir hak milik (rai ninian/aurea). Jika tanah yang telah diusahakan dan ditanami ini kemudian ditinggal, pemilik yang membuka tanah pertama mempunyai hak terdahulu (toos fatin atau natar fatin). Hak terdahulu bagi kaum pribumi (persekutuan) dapat diwariskan kepada ahli waris. Bagi warga non persekutuan hanya hak menikmati hasil dari tanah (halo deit han deit). Pola penguasaan tanah seperti ini yang mengakibatkan terjadi ladang berpindah-pindah, setelah tanami dan berkurang kesuburannya.

Tanah dan Pembangunan Berkelanjutan

Setiap kegiatan di muka bumi memerlukan tanah. Tanah sebagai sumber daya perlu dipelihara serta dijaga dari kerusakan sehingga ada keseimbangan.

Aspek fisik berupa luas, letak, ketinggian yang relatif tidak berubah dalam kurun waktu bertahun-tahun, yang berubah adalah cara penggunaan tanahnya, produksinya yang relatif sangat berubah-ubah adalah hak dan pemilikannya. Aspek fisik dan aspek hukum bagaikan dua sisi dari sebuah mata uang logam, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, harus ditangani secara bersama-sama. Banyak masalah tanah yang timbul disebabkan penanganan yang tidak bersama sebagai akibat ego sektoral dalam rencana pembangunan. Masalah tanah yang semakin dirasakan oleh instansi pemerintah, masyarakat bahkan untuk kepentingan pembangunan adalah bagaimana dan dimana memperoleh tanah sesuai untuk pembangunan.

Penutup

1. Masalah tanah saat ini, adalah ketidakjelasan status tanahnya sebagai akibat pergantian sistem hukum. Keterpaduan terus diupayakan untuk dapat mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan.
2. Jaminan akan tersedianya tanah yang sesuai bagi berbagai sektor pembangunan, sehingga dapat mendorong investasi dan sebesar-besarnya dalam rangka menunjang tercapainya pertumbuhan ekonomi
3. Masalah pembangunan berkelanjutan tidak hanya keterpaduan antar instansi terkait akan diperlukan persepsi yang sama antar semua pihak, baik bidang eksekutif maupun yudikatif, karena masalah lingkungan dan pertanahan terkait.
4. Pembangunan meningkat, meningkat pula permintaan akan tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan. Dilihat dari penguasaan dan pemilikan tanah dilekati hak, supaya

tidak menimbulkan masalah, dan menghambat jalannya pembangunan, tidak lain adalah mengadakan musyawarah dengan pemiliknya. Prinsip yang perlu diperhatikan: "Sejauh tidak mengurangi areal tanah pertanian yang subur dan memperhatikan kelestarian

sumber daya alam" dan "Keseimbangan kepentingan antara pemilik modal dan kepentingan mereka terkena proyek".

Referensi

1. Xavier, Pedro de Sousa, 1997. Study tentang Hukum Pertanahan Adat Timor Timur di Kecamatan Uato-Carbau Kabupaten Viqueque, Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Badan Pertanahan Nasional, Yogyakarta
2. Nalle, Jermias, 1998. Pengarahan Kakanwil pada Rapat Kerja di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Propinsi Timor Timur, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Timor Timur, Dili.
3. East Timor in Figures 1997, in Cooperation With Regional Development Planning Board of East Timor Propinse and Central Board of Statistics of East Timor Province, Dili.

Kepemilikan Tanah dan Laut Menurut Hukum Adat bagi Pembangunan Berkelanjutan

Dr. Graham Baines
Environment Pacific

Ide dari pengakuan dan dukungan untuk hak kepemilikan tanah dan laut menurut hukum adat sebagai dasar untuk pembangunan berkelanjutan yang masuk akal, apalagi karena kepemilikan merupakan lambang yang begitu penting dari hubungan sosial. Akan tetapi di negara-negara Kepulauan Pasifik telah menjadi sulit untuk menetapkan kembali suatu bentuk kepemilikan tanah tradisional yang serba memuaskan. Beberapa permasalahan yang dihadapi akan dijelaskan. Contoh-contoh dari pendekatan yang berbeda pada masalah dukungan legal untuk tanah adat akan tersedia. Bahkan dalam situasi mana hak-hak kepemilikan dan penggunaan tanah menurut hukum adat telah ditetapkan, terdapat kesulitan dalam menggunakan kepemilikan menurut hukum adat dengan dukungan legal sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi.

Sepanjang kedua jaman rezim kolonial, dan meskipun ditentang oleh pihak yang berkuasa, orang Timor Lorosa'e masih mempertahankan pengetahuan atas penetapan-penetapan tradisional untuk warisan dan alokasi tanah dan hak penggunaan sumber daya alam dari tanah itu. Penetapan-penetapan kepemilikan ini, bersama dengan pengetahuan lokal yang berhubungan atas sumber daya alam setempat dan keanekaragaman hayati, merupakan sistem-sistem lokal pengelolaan sumber daya alam. Hak laut berasal dari hak tanah di sekitar pesisir pantai. Jika masyarakat yang bersangkutan mengutamakan tanah, kepemilikan laut bisa tidak ditekankan sekuat kepemilikan tanah.

Pada saat kepergian para penguasa kolonial, semua negara Kepulauan Pasifik berusaha untuk memperoleh kembali dan mengembalikan sistem-sistem kepemilikan menurut hukum adat. Akan tetapi zaman dan keadaan telah berubah, dan tugas ini ternyata sulit.

• Penting untuk memelihara dasar hukum adat untuk daerah-daerah daratan dan lautan, apalagi karena kepemilikan merupakan lambang yang begitu penting dari hubungan sosial. Akan tetapi di negara-negara Kepulauan Pasifik telah menjadi sulit untuk menetapkan kembali suatu bentuk kepemilikan tanah tradisional yang cocok, karena:

• Alokasi tanah menurut hukum adat (ditentukan oleh warisan, tempat tinggal, pernikahan, dan asosiasi sosial yang lainnya) tidak pernah merupakan proses yang tepat. Keputusan-keputusan didasarkan atas prinsip-prinsip tertentu, tetapi ada suatu fleksibilitas

yang berarti bahwa keputusan dapat dibuat untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi.

- Jika hak tanah menurut hukum adat akan diberi kedudukan yang sah, bagaimana hak itu akan dijelaskan, dan pada titik apa dalam evolusi adat setempat prinsip-prinsipnya akan ditetapkan?
- Tradisi mewariskan silsilah secara lisan kepada generasi berikutnya mulai menghilang karena wewenang dari para leluhur yang berpengetahuan telah diperlemahkan. Akibatnya, orang-orang muda kurang informasi akan hak-hak dan kewajiban mereka. Hal ini meningkatkan tingkat persengketaan hak tanah.
- Tidak semua individu yang tinggal di bagian tanah tertentu menjadi bagian dari kelompok yang "memiliki" tanah itu secara kolektif. Akan tetapi, hak mereka atas pemakaian tanah itu dilindungi di bawah adat, dan hak adat mereka bisa terancam jika para "pemilik" diberi hak milik resmi yang sah.
- Pepatah "a little knowledge is a dangerous thing" atau "sedikit pengetahuan adalah suatu hal yang berbahaya" berlaku dalam masalah ini. Beberapa individu telah terampil dalam memanfaatkan pengadilan untuk mengajukan silsilah palsu yang lebih menakutkan dapat diterima daripada para pemilik yang sebenarnya. Dengan demikian mereka telah dapat mencabut hak milik dari pemilik sebenarnya.

- Pola distribusi tanah menurut hukum adat yang berlaku sekarang ini, pada beberapa hal mencerminkan hasil dari percekocokan yang terjadi di masa lampau. Dewasa ini, orang yang memiliki hak atas sedikit tanah atau tidak punya tanah sama sekali, mungkin merupakan keturunan dari pihak yang kalah pada masa lalu.

Negara-negara Kepulauan Pasifik telah menangani masalah dukungan hukum untuk tanah adat dengan cara-cara yang berbeda. Di kepulauan Solomon suatu pendekatan yang sederhana diangkat di bawah Customary Land Boundaries Act 1998 (Undang-undang Perbatasan Tanah menurut Hukum Adat, 1998). Undang-Undang ini memperbolehkan pendaftaran perbatasan tanah dan nama-nama dari suku bangsa atau marga yang secara bersama-sama "memiliki" tanah di dalam batas-batas yang terdaftar. Tugas sulit untuk menyetujui atas siapa yang menjadi anggota kelompok pemilik diserahkan kepada masyarakat yang bersangkutan. Perselisihan tentang siapa yang memenuhi syarat sering terjadi.

Di Papua New Guinea, Incorporated Land Groups Act, 1974 (Undang-Undang Kelompok Tanah 1974) memperbolehkan identifikasi "pemilik tanah". Hal ini dilakukan melalui suatu proses pemetaan sosial. Fiji mulai pendaftaran tanah adat kira-kira 90 tahun yang lalu. Perlu 50 tahun untuk menyelesaikan tugas ini. Tanah orang pribumi Fiji, diatur oleh Native Land Trust Board (Dewan Perwalian Tanah Leluhur), dan suatu daftar khusus disediakan untuk orang pribumi Fiji, dengan setiap orang terdaftar di bawah suku atau marga di dalam mana bapaknya dilahirkan.

Bahkan dalam situasi dimana hak-hak kepemilikan

dan pemanfaatan tanah menurut hukum adat telah ditetapkan, masih terdapat kesulitan-kesulitan dalam menggunakan kepemilikan harta kelompok yang didukung secara sah sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi. Nilai tanah boleh cukup besar, tetapi lembaga finansial tidak dapat menjamin tanah itu terhadap pinjaman untuk perkembangannya. Jalan yang lebih sederhana menuju keuntungan ekonomi dari tanah, melalui penyewaan dari sebagiannya, juga merupakan masalah. Walaupun persewaan mempunyai periode waktu yang tepat, keberadaan orang lain di tanah leluhur kadang-kadang dirasakan sebagai semacam bentuk "pendudukan" yang dapat menyebabkan hilangnya hak atas tanah. Satu lagi masalah pembangunan yang sulit adalah keuntungan ekonomi yang didapatkan dari pemotongan kayu dan dari sumber-sumber mineral di atas dan di bawah tanah adat. Siapa yang akan menerima apa? Distribusi keuntungan yang tidak adil dari tanah adat dapat menjadi ancaman yang serius terhadap stabilitas sosial dan juga terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

Pemikiran di belakang ide pengakuan dan dukungan hak kepemilikan tanah dan laut menurut hukum adat sebagai dasar untuk pembangunan yang berkelanjutan adalah logis. Terdapat pelajaran-pelajaran berguna yang bisa dipelajari dari usaha-usaha di tempat lain, tetapi pendekatannya harus bersifat Timor Lorosa'e dan harus menghadapi permasalahan seperti perbedaan status adat dan kelompok-kelompok masyarakat sehubungan dengan hak-hak adat, dan nasib orang-orang yang sudah lama menduduki tanah atas mana mereka tidak mempunyai hak keturunan.



Lokakarya-Lokakarya Masalah-Masalah Sosial

Lokakarya Pendidikan

Masalah-masalah: Tidak ada guru yang bisa mengajarkan masalah-masalah lingkungan hidup • Kurang kesadaran dan pengertian mengenai lingkungan hidup di masyarakat lokal • Hukum adat (bandu) telah dirusak oleh pendudukan Indonesia, sampai masyarakat sudah lupa akan hukum adatnya sendiri • Kurang adanya dukungan dari pemerintahan untuk mendukung hukum adat • Peraturan-peraturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh digunakan • Pendudukan Indonesia memasukkan hukum, sistem, dan kesadaran lain mengenai lingkungan hidup • Kesulitan untuk meyeragamkan hukum adat dalam kurikulum umum • Kurangnya pengertian mengenai hukum adat, yang berbeda-beda di seluruh Timor Lorosa'e • Tidak adanya keterlibatan keluarga dalam program-program lingkungan hidup • Kurangnya bantuan dana, seperti dianggap kurang penting • Kurangnya materi pengajaran dan kurikulum • Masyarakat kurang aktif, hanya menerima saja, kurang inisiatif • Hukum adat • Kurangnya guru ahli mengenai lingkungan hidup • Kurangnya dana untuk pendidikan lingkungan hidup • Kurangnya materi pengajaran/pendidikan lingkungan hidup • Sistem Indonesia: kurikulum khusus daerah-daerah- tidak ada lagi • Pelajaran sosial masuk ke pengajaran mengenai lingkungan hidup- sedikit saja, beberapa tidak ada • UNICEF berkata akan mendukung pelatihan guru pendidikan lingkungan hidup dan pengembangan kurikulum • Banyak guru di Timor Lorosa'e ingin lebih banyak berpartisipasi dan kurang monologi • Pendidikan lingkungan hidup perlu diluar ruangan dan aktif • Para guru ingin kurikulum menjadi lebih bersifat lokal dan berbudaya • Pendidikan lingkungan hidup perlu dimasukkan dalam kurikulum formal dengan peran khusus • Pendekatan aktif, belajar/mengajar; pendekatan penyelesaian masalah

ISU-ISU UTAMA	STRATEGI-STRATEGI
Kehancuran hukum adat selama pendudukan Indonesia – kekurangan informasi mengenai hukum adat & perbedaan di seluruh Timor Lorosa'e	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan alat-alat pendidikan lingkungan hidup yang didasarkan pada hukum adat ➡ dokumentasi hukum di seluruh Timor Lorosa'e • Pendidikan lingkungan hidup yang khusus untuk bekerja dengan guru lokal untuk mengembangkan sumber • Sekolah-sekolah bisa menyelidiki hukum adat di daerah lokal • Hukum pemerintah yang formal harus mendukung hukum adat
Kekurangan keahlian guru dalam pendidikan lingkungan hidup dan pelajaran secara 'aktif'	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok guru untuk kerjasama pendidikan lingkungan hidup agar mengembangkan kurikulum dan sumber pengajaran ➡ program "latih-pelatih" untuk semua guru Timor Lorosa'e • Program sekolah saudara 'sister' • Program pertukaran guru
Kekurangan dana untuk pendidikan lingkungan hidup.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan resolusi untuk konferensi yang merekomendasikan pendidikan lingkungan hidup sebagai prioritas. • Anggota pendidikan lingkungan di tim kerja – ketemu dengan UNTAET/CNRT untuk minta dukungan • Memperkuat hubungan dengan pendidik lingkungan hidup di Australia. • Memperkuat kemampuan LSM nasional dalam pendidikan lingkungan hidup.
Kekurangan sumber-sumber pengajaran dan pelajaran, Tidak ada kurikulum pendidikan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Pelajaran lingkungan hidup sebagai pelajaran terpisah • Peralatan pendidikan lingkungan hidup di seluruh pelajaran (matematika, ilmu, bahasa dll.) • Sumberdaya diperlukan untuk mempromosikan pelajaran secara aktif – kegiatan kurikulum yang meliputi keluarga dan masyarakat desa

Lokakarya Kesehatan

Masalah-masalah: Kurangnya sarana + prasarana: kesehatan, pencemaran, air • Kurangnya pendidikan, promosi, dan pelatihan (baik formal + informal): gizi, kesehatan umum dan sanitasi, sekolah-sekolah, media • Tidak ada pemerataan pelayanan kesehatan di desa, dan staf Timor • Lingkungan hidup: (air, udara, kondisi hidup, pencemaran) • Pengalihan ketrampilan + pengembangan kemampuan untuk orang-orang Timor • Dana • Kesehatan persalinan • HIV/AIDS • Faktor sosial dan ekonomi • Kurangnya kualitas pelayanan kesehatan • Urbanisasi – peningkatan stress • Kebijakan: kurangnya informasi dari pemerintah terhadap kebersihan lingkungan, penyuluhan, dan keamanan jalan umum • Kurangnya tenaga profesional.

ISU-ISU UTAMA	STRATEGI-STRATEGI
1. Perbaikan-perbaikan struktur kesehatan (organisasi/masyarakat) dan prasarana (jasmani)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah harus membangun kembali prasarana-prasarana kesehatan yang dihancurkan • Perlu dibuat rencana yang menyeluruh
2. Pendidikan dan mendorong pokok-pokok persoalan kesehatan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah harus menerapkan program-program kesehatan yang sederhana • Pemerintah harus menulis suatu panduan pendidikan kesehatan yang dapat digunakan oleh semua organisasi dan kelompok • Pendidikan kesehatan harus merupakan bagian dari kurikulum nasional • Pemerintah harus menerapkan kampanye pendidikan umum dengan memakai poster-poster, brosur-brosur dan kalender di semua desa
3. Tak ada keadilan dalam pelayanan kesehatan di daerah pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya lebih banyak obat-obatan disediakan bagi masyarakat umum
4a. Kebijakan kesehatan 4b. Peningkatan kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> • Semua program yang diterapkan oleh LSM, pemerintah dan kelompok masyarakat harus mempertimbangkan masalah kesehatan • Pengelolaan layanan kesehatan harus ditingkatkan • Staf medis harus direkrut

Lokakarya Gender

Masalah-masalah: Dampak negatif dari zaman Indonesia dan zaman transisi (misalnya pakaian, W.T.S.) pada perempuan Timor Lorosa'e • Pendidikan untuk pria dan wanita • Suami dan isteri • Keluarga berencana, kesehatan • Poligamia • Membangunkan/menaikkan kapasitas supaya dapat ikut dalam proses membuat keputusan • Menaikkan kekuatan perempuan pada tingkat desa • Peran kebudayaan, peran gereja, dan suara gereja terhadap perempuan di Timor Lorosa'e • Cara membuat supaya laki-laki dan perempuan bekerja sama untuk menaikkan kesadaran hal-hal gender • Akses ke sumber daya • Air bersih, sanitasi, dan kesehatan keluarga • Kebijakan pemerintah, undang-undang, dan program-program.

ISU-ISU UTAMA	STRATEGI-STRATEGI
Membangun / meningkatkan kapasitas/kemampuan supaya dapat ikut dalam proses pembuatan/pengambilan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan (pada sistem formal dan sistem informal) • Meningkatkan pengetahuan rakyat • Sebab-sebab informal pada UNTAET, LSM-LSM dan masyarakat
Pendidikan untuk perempuan dan laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> • Perpustakaan (sebagian sudah ada) • Kampanye informasi umum (poster-poster dengan gambar-gambar, radio, TV) • Pendidikan informal • Penguatan sistem pendidikan – tersedia lebih banyak sekolah-sekolah, guru-guru dan buku-buku dan lain lain
Akses ke sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan pemberian hak milik tanah pada perempuan • Pendidikan untuk perempuan untuk mendapatkan penghargaan. • Melobby bank-bank untuk kebijaksanaan peminjaman yang peka gender
Air bersih, sanitasi, kesehatan keluarga dan keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran air ke desa-desa contohnya pipa untuk mata air • Pendidikan untuk memasak air sebelum diminum • Pelaksanaan perundang-undangan mengenai perusakan hutan (no. 17) • Lebih banyak perawat-perawat / bidan-bidan di desa-desa • Memperbaiki kakus



Lokakarya Kepemilikan Tanah

Masalah-masalah: Siapakah yang memiliki tanah di Timor Lorosa'e? • Bagaimana mekanisme mengembangkan hak pemilikan tradisional? • Langit, tanah, air, dan semuanya termasuk dalam definisi hak pemilikan tanah • Siapa yang memiliki, yang mengontrol, yang mengatur, dan siapa yang menggunakannya? • Perlu didefinisikan beberapa macam dari hak pemilikan tanah • Kepemilikan tanah bukan dikuasai penuh oleh pemerintah, namun untuk kesejahteraan rakyatnya • Legalisasi dari kepemilikan tanah oleh orang asing • Bagaimana dengan investasi tanah yang sudah ada? • Regulasi apa saja yang harus diterapkan • Batas ukuran kepemilikan seseorang • Apakah UNTAET mempunyai kekuasaan terhadap tanah, atau pemerintahan baru? • Bagaimana penyelesaian terhadap aset pribadi dan pemilikan tanah oleh orang Indonesia yang kembali ke Timor Lorosa'e? • Bagaimana aturan yang diperlakukan kepada seseorang yang memiliki sumber daya alam pada tanahnya, atau pada tanah milik adat? • Tanah 'zoning' • Bagaimana kebijaksanaan terhadap kepemilikan adat yang akan diolah oleh pemerintah?

ISU-ISU UTAMA	STRATEGI-STRATEGI
Siapa yang memiliki tanah di Timor Lorosa'e?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya orang Timor Lorosa'e dapat memiliki tanah di Timor Lorosa'e. 2. Kepemilikan menurut mekanisme adat. 3. Perlu memastikan penduduk Timor Lorosa'e 4. Hak pegunaan tanah oleh investor asing. 5. Pemerintah harus menyelesaikan pertengkaran mengenai tanah diantara orang Timor Lorosa'e 6. Seharusnya ada regulasi untuk meliputi hal 1–5 7. Ini harus dimulai sekarang 8. Konsultasi dengan pemimpin adat dalam pengembangan regulasi
Regulasi kepemilikan asing	Tidak ada waktu untukdibahas
Pembatasan ukuran kepemilikan individu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus menetapkan kriteria untuk menanyakan apakah harus menerapkan pembatasan mengenai kepemilikan tanah 2. Menetapkan pembatasan mengenai kepemilikan tanah tidak realistis. 3. Apabila tidak ada batasnya orang miskin akan menderita karena tidak mempunyai akses tanah 4. Harus memastikan jumlah penduduk di setiap distrik 5. Perlu regulasi pemerintah untuk mengakui: <ul style="list-style-type: none"> - tanah individu - tanah perusahaan - tanah adat - tanah pertanian - industri - pariwisata 6. Perusahaan tidak boleh memiliki tanah, mereka dapat sewa dari pemerintah atau pemilik tanah swasta
Pertengkaran diantara hak adat dan tekanan lain mengenai sumberdaya tanah	Tidak ada waktu untukdibahas



Lokakarya Kaum Pemuda

Masalah-masalah: Keterlibatan angkatan pemuda • Aksesibilitas dan sistem tingkat-tingkat tertentu pada sistem pendidikan - harus memberikan kesempatan • Kurangnya percaya diri pada golongan anak muda • Pengangguran • Pendidikan • Kurangnya perasaan kesatuan dan persatuan • Kurangnya strategi • Mendidik generasi pasca-jaman Indonesia • Penyembuhan psikologis • Pengaruh baik dan buruk dari globalisasi • Perlunya pelatihan agar Timor Lorosa'e dapat menghadapi pengaruh ekonomi dari negara-negara lain • Ketidakpastian negara akan masa depannya, dan kurang percaya diri • Melibatkan kaum pemuda dalam pembuatan keputusan dan pengambilan keputusan.

ISU-ISU UTAMA	STRATEGI-STRATEGI
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan untuk guru-guru, sekolah-sekolah • Bekerjasama dengan LSM-LSM internasional • Memperbaiki fasilitas pendidikan di daerah-daerah • Menaikan gaji para guru/pengajar, untuk memberi semangat/mendorong para guru • Mempromosikan pekerjaan "mengajar" sebagai suatu karier • Pendidikan/pelatihan bahasa: Portugis (paling penting), dan Inggris
Globalisasi	<p>Mengembangkan nilai-nilai positif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki mutu produk-produk lokal (alam, manusia) • Pusat-pusat budaya untuk pendidikan mengenai kebiasaan-kebiasaan positif di budaya-budaya lain • Pers bebas (internasional) • Pendidikan Internet dan akses • Mengurangi nilai-nilai negatif • Membatasi jumlah impor dengan pajak • Mencabut duty-free (toko bagi orang asing tanpa dipungut pajak), dan perlindungan hukum untuk orang asing
Partisipasi dalam pengambilan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Memakai "kelompok-kelompok pemuda" untuk mendiskusikan dan lain-lain, dan juga digunakan sebagai masukan untuk parlemen / proses politik. • Pemerintahan yang terbuka bagi wakil - wakil kaum muda dalam sistem tradisional • Pemerintahan yang jelas/transparan dan rela berdialog • Latihan kepemimpinan





Keberlanjutan dan Pemerintah Demokratis di Timor Lorosa'e

Joao Cancio Freitas

Jakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional Timor Lorosa'e

Strategi pembangunan berkelanjutan diakui sebagai suatu rangkaian tindakan yang sangat cocok bagi berbagai negara. Berbagai konferensi PBB mutakhir dan pertemuan internasional besar selama dekade terakhir ini (seperti Peduli Dunia- *Caring for the Earth* dan *Agenda 21* dari Konperensi Puncak Rio, 1992) sudah menyoroti himbauan penting strategi-strategi tersebut, dan menganjurkan dilaksanakannya suatu strategi global untuk kehidupan dan pembangunan berkelanjutan pada semua lapisan masyarakat.

Terjadi peningkatan pengakuan hubungan antara investasi prasarana dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah tidak harus memilih antara lingkungan dan pembangunan. Bila lingkungan merupakan persediaan total dari sumber alam dan sosial yang ada untuk manusia dan spesies lain, pembangunan merupakan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk memajukan kesejahteraan manusia. Karenanya orang harus berencana sehubungan dengan yang lainnya.

Dalil dari pembangunan berkelanjutan bergerak jauh melebihi pelestarian lingkungan dalam menyertakan pemerintahan yang baik, kohesi sosial, dan bahkan kesamaan gender dalam suatu pendekatan holistik pada "sistem kehidupan" yang menekankan kaitan integral orang-orang tersebut dengan lingkungan total. Pemerintahan yang baik mengutamakan kesejahteraan bangsa dan rakyatnya. Hal itu terutama didasarkan pada suatu administrasi pemerintah yang mempunyai komitmen pada demokrasi, keadilan, kemerdekaan, persamaan status, dan efisiensi, sementara pada saat yang sama mendukung suatu lingkungan hidup yang berkelanjutan yang aman bagi semua. Karena keberlanjutan hanya dapat dikuatkan bila orang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah pusat tidak dapat lagi bertindak sendiri dan membutuhkan untuk mengembangkan kemitraan bagi semua tingkat pemerintah termasuk pemerintah daerah dan masyarakat hingga dapat mencapai tujuan bersama ini secara efektif. Hal ini membutuhkan suatu pergeseran besar dari berpikir ke desentralisasi pada tingkat bawah bila prinsip pembangunan berkelanjutan mengakar dan untuk mendatangkan hasil yang berarti.

Perencanaan Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan

Keputusan berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan di hampir seluruh penjuru dunia terdiri dari dua tingkat: tingkat kebijakan untuk memberi

petunjuk guna mencapai tujuan dari pembangunan berkelanjutan pada tingkat nasional, dan tingkat pelaksanaan yang dibiarkan pada instansi besar di bidang lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, pengendalian polusi, dan masalah lingkungan regional dan global termasuk komunitas dan masyarakat sipil secara luas.

Pada tingkat kebijakan untuk meningkatkan penggunaan daya berkelanjutan sumber daya alam Timor Lorosa'e, menurut pandangan saya, langkah pertama yang harus kita ambil mungkin adalah menciptakan suatu Perencanaan Nasional atas Pembangunan Berkelanjutan untuk membawa masalah integrasi lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan, keputusan ekonomi, dan perencanaan investasi. Dalam hal ini, negara-negara yang baru bangkit ini, dalam beberapa tahap, mempunyai pilihan terhadap pelibatan dirinya dengan konvensi dan kebijakan internasional menyangkut pembangunan berkelanjutan. Kita harus berkomitmen terhadap pelaksanaan Agenda 21 dan perjanjian internasional terkait yang disetujui di Pertemuan Puncak Dunia. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar perencanaan pembangunan nasional kita. Untuk menjalankan ini negara harus dapat mengadopsi strategi internasional dan memang terdapat berbagai organisasi internasional untuk melakukannya seperti Persatuan Internasional Konservasi dan Alam (International Union of Conservation and Nature - IUCN), Majelis Internasional untuk Inisiatif Lingkungan (International Council for Local Environmental Initiatives) dan Majelis Bumi (Earth Council).

Di tingkat pelaksanaan, ada sejumlah hal yang dapat dilakukan termasuk pembentukan berbagai lembaga dan mekanisme yang bertujuan untuk memperkenalkan pelaksanaan, rencana dan program daya berkelanjutan menjadi program-program pembangunan. Proses ini harus bersifat partisipatif, melibatkan para pelaku dari pemerintah dan dari luar pemerintah. Terdapat peran kuat bagi sektor swasta turut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Pada saat ini tanda kemajuan riil adalah kekuatan dan dinamisme LSM-LSM di negara ini (saat ini terdapat lebih dari 170 LSM lokal dan nasional di Timor Lorosa'e. Beberapa di antaranya, meski sebagiannya mungkin tidak berkelanjutan jangka panjang, mempunyai komitmen kuat dan berakar dalam masyarakat atau kelompok-kelompok kepentingan dan akan berkembang dan tumbuh). LSM-LSM ini, dengan komitmennya terhadap partisipasi dan pemberdayaan kemampuan, akan merupakan pembimbing untuk meningkatkan



kesadaran dan melakukan tindakan bagi lingkungan hidup di kemudian hari.

Sejalan dengan itu, lembaga-lembaga penelitian, universitas dan lembaga swasta dapat menjalankan fungsi pendidikan dan penelitian berkaitan dengan pelaksanaan strategi-strategi lingkungan hidup dan keberlanjutan yang kuat.

Pemerintahan demokratis

Selama dekade terakhir ini, terdapat ide-ide baru yang tumbuh yang menitikberatkan pada pentingnya masyarakat dan individu, dan yang menyoroti relevansi masyarakat sipil dan sumber daya manusia dalam proses pembangunan. Konsep pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan pada Pertemuan Puncak Dunia PBB, konsep UNDP terhadap pengembangan manusia dan pendekatan terhadap pengembangan perkotaan yang berdasarkan keterlibatan masyarakat, membantu menggeser tekanan ke arah metodologi partisipatif di bidang perencanaan pembangunan.

Pemerintahan dalam konteks Timor Lorosa'e termasuk pembangunan suatu bangsa baru, peran dan strukturnya termasuk konfigurasi tonggak pokok pemerintahan. Inisiatif yang berhasil untuk memajukan demokratisasi dan pembangunan bergantung pada kapasitas yang memadai dan sumber-sumber yang diperuntukkan bagi penguatan aparat pemerintah di tingkat rendah, terutama lembaga-lembaga pemerintahan dan juga tergantung pada komunikasi yang baik, termasuk pengakuan dan saling menghormati antar berbagai sudut pemerintahan.

Perlu untuk meningkatkan masukan dari masyarakat ke dalam proses berjalannya dan tujuan pemerintahan dan jasa umum. Namun, demokrasi menunjukkan suatu sistem politik di mana orang-orang yang berhak menentukan sebuah kebijakan berpartisipasi secara aktif tidak hanya dalam menentukan orang-orang yang akan berkuasa atas kebijakan tersebut, tetapi juga yang lebih penting lagi, membentuk kebijakan-kebijakan pemerintah. Desentralisasi merupakan mekanisme penting untuk menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Desentralisasi pemerintah dari tingkat pusat ke tingkat lain pemerintahan memungkinkan orang untuk berpartisipasi lebih langsung dalam proses pemerintahan. Hal ini butuh sebuah struktur lokal yang efektif yang dapat memperlancar partisipasi masyarakat dalam kehidupan masyarakat dan akhirnya dipertanggungjawabkan pada rakyat, tidak hanya pada pemerintah pusat atau tingkat tinggi pemerintahan.

Hanya dengan manajemen publik yang efektif dan kapasitas teknis pemerintah, Timor Lorosa'e akan mampu untuk mempertahankan pembangunan sosial dan ekonomis dalam jangka panjang. Kedua rezim sebelumnya di Timor Lorosa'e (terutama belakangan ini)

sangat tersentralisasi secara hirarkis yang, sebagai akibatnya, menjauhkan rakyat dari pengambilan keputusan dan pemerintahan tidak dipertanggungjawabkan pada rakyat. Sayangnya struktur pemerintah daerah di bawah UNTAET tetap diilhami oleh dan secara esensial mencerminkan sistem tersebut. Penting menyadari unsur-unsur yang tidak demokratis yang masih ada dari model lama sistem pemerintah ini, yang diciptakan terutama untuk menguasai rakyat dan untuk memenuhi kepentingan kekuatan asing. Bila struktur ini diteruskan di Timor Lorosa'e yang merdeka, daya berkelanjutan akan terancam dan rakyat akan dijauhkan dari proses pengambilan keputusan karena jarak antara warga dan proses-proses pengambilan keputusan yang tercermin dalam struktur ini dirasakan menjadi semakin besar.

Tantangan besar bagi kita sekarang adalah untuk mengambil tindakan yang tepat termasuk rancangan struktur demokrasi lokal dengan meniadakan struktur dan birokrasi yang tidak diperlukan untuk menjamin bahwa prinsip demokrasi dan partisipasi asli dipromosikan di semua pemerintahan lokal. Organisasi masyarakat sipil mewakili seluruh sektor masyarakat, yang tidak bergantung pada negara, dan sektor perseroan harus didorong untuk ikut berdebat dan menyarankan kebijakan, dan secara aktif melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah setempat harusnya dipertanggungjawabkan pada para warga negaranya terutama karena peranan politiknya dalam mencerminkan kepentingan kolektif masyarakat. Karenanya mekanisme konsultasi warga negara diutamakan, melalui organisasi masyarakat sipil yang mencakup pandangan 'pelaku' setempat (seperti sektor usaha, pemuda dan perempuan, dan forum tetangga) dalam proses pembuatan kebijakan. Pertanggungjawaban lokal dapat diperkuat dengan keterbukaan di proses administratif pemerintahan lokal (misalnya arsip pemerintahan lokal terbuka untuk masyarakat umum). Pemerintahan demokratis harus terbuka, memberi akses kepada warga negara terhadap informasi mengenai administrasi dan terutama mengenai penggunaan dan pembagian sumber-sumber milik masyarakat.

Pelaksanaan secara sukses kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek pembangunan berkelanjutan tergantung pada berbagai faktor termasuk rancangan dan struktur kelembagaan yang memungkinkan keterlibatan semua warga negara dalam proses pengambilan keputusan, dan suatu pemerintahan yang bersih, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan pada semua tingkat pemerintahan, bersama dengan masyarakat yang terbuka, demokratis dan partisipatif di Timor Lorosa'e.

Pemerintahan dan Pembangunan Berkelanjutan

Dr. Arthur J. Hanson

*Lembaga Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan
(International Institute for Sustainable Development (IISD))*

Seharusnya pembangunan berkelanjutan menjadi keprihatinan utama bagi pemerintahan. Pembangunan berkelanjutan adalah tema luas yang meliputi tidak hanya perencanaan dan anggaran belanja saja, tetapi juga keamanan nasional, keadilan sosial, serta kewajiban dan kesempatan internasional. Pemerintahan untuk pembangunan berkelanjutan tergantung pada hubungan baik antara pemerintah, para pengusaha dan masyarakat sipil. Pembangunan berkelanjutan akan bergantung pada komitmen dari tokoh-tokoh masyarakat dan dari semua bagian pemerintah. Pembangunan kapasitas yang diperlukan mungkin akan dibantu oleh berbagai kerjasama yang strategis di Timor Lorosa'e serta dengan negara lain juga. Pembangunan berkelanjutan akan dipelihara oleh pendekatan terhadap pemerintahan yang berdasarkan proses pembuatan keputusan yang transparan, bertanggung jawab dan praktek-praktek yang bebas korupsi; melalui kerjasama internasional, melalui upaya mengurangi kemiskinan dan pengelolaan sumber daya dengan cara yang berkelanjutan; dan dengan partisipasi dan pembangunan lembaga masyarakat sipil.

Pemerintahan adalah sebuah konsep luas yang meliputi mengapa dan bagaimana kekuasaan dilaksanakan. Pemerintahan harus menangani pembagian kuasa yang rumit dan tindakan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam memecahkan isu-isu kemasyarakatan. Sekarang kita mengerti tentang pemerintahan dengan lebih baik daripada zaman dulu, tidak hanya dalam konteks nasional dan lokal, tetapi berhubungan juga dengan kejadian lokal dan global. Seharusnya pembangunan berkelanjutan menjadi tujuan pusat untuk pemerintahan, tetapi seharusnya juga dipandang dalam konteks keamanan nasional, keadilan sosial serta kewajiban dan kesempatan internasional.

Bentuk kekuasaan politik memang akan mempengaruhi pendekatan pemerintahan yang dipergunakan. Sebuah aspek Timor Lorosa'e yang membesarkan hati sekarang adalah komitmennya terhadap keadilan sosial. Mudah-mudahan komitmen ini akan menjadi jalan menuju bentuk rezim yang bersifat partisipatif yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan. Seperti Bank Dunia dan lain-lain sudah sering menunjukkan, keprihatinan operasional di dalam pemerintahan adalah bagaimana "merancang, merumuskan dan melaksanakan kebijakan" dan melakukan fungsinya dengan cukup baik. Pada umumnya, kapasitas ini lebih sedikit daripada yang diharapkan, khususnya yang diharapkan oleh mereka yang di bawah pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional yang meminjamkan uang dan memberi dukungan lain. Dengan demikian, penting sekali untuk mengadakan harapan yang realistis mengenai tujuan dan waktunya, dan tidak menciptakan proses keputusan yang terlalu rumit. Pencapaian pembangunan

berkelanjutan melibatkan pendekatan yang berintegrasi, yang pada intinya sulit untuk dilaksanakan – sebuah alasan lagi untuk tidak melakukan terlalu banyak pada tahap awal.

Konsep "subsidiarity" bisa menolong kita. Konsep ini terkait dengan pengambilan keputusan dari atas – maksudnya, hanya memutuskan pada tingkat nasional bila tidak bisa ditangani di tingkat lokal. Berhubungan dengan pendekatan ini adalah nilai peran pemerintah dalam memperkenankan atau pemberian kemampuan yang membantu atau mendukung kapasitas lokal, daripada menjatuhkan wewenang pusat secara tidak sah. Penggunaan sarana ekonomi sebagai alternatif yang penting untuk mengomandani dan mengontrol regulasi lingkungan adalah sebuah contoh bagaimana hal itu bisa dilaksanakan. Sebuah contoh lain adalah pengakuan secara hukum dan operasional terhadap hukum adat istiadat dan pengetahuan dalam rangka pengelolaan kerjasama.

Memang, pada dasarnya pemerintahan adalah kerangka kerja undang-undang dan peraturan yang beroperasi di tingkat lokal, nasional dan internasional. Semakin banyak, ada keperluan untuk memastikan bahwa undang-undang nasional mencerminkan kondisi dan kewajiban yang termuat dalam persetujuan multilateral, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati atau Hukum Laut. Dari dasar itu mengalirlah struktur dan proses institusi untuk berwenang. Cara merancang lembaga untuk menghadapi isu seperti perlindungan lingkungan adalah sangat fleksibel.

Tetapi ada juga pertanyaan tertentu mengenai cara yang paling baik untuk merancang pemerintahan pembangunan berkelanjutan. Seharusnya ada instansi dan hukum pembangunan berkelanjutan yang khusus, atau sebaiknya keprihatinan atas keberlanjutan termasuk seluruh rangka legal dan di dalam semua kesatuan pemerintah? Pendekatan yang lebih awal tidak mampu berhasil sendiri, dan masih ada keperluan untuk koordinasi bila pendekatan kedua diikuti. Dengan kata lain, pertanyaannya adalah apakah hukum nasional untuk pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan, dan juga apakah sebuah kesatuan pembangunan berkelanjutan nasional diperlukan? Jawaban negara baru terhadap pertanyaan ini mungkin berbeda daripada negara-negara yang sudah maju. Timor Lorosa'e baru mulai dengan halaman bersih tanpa kepentingan dalam birokrasi sendiri.

Kebanyakan negara sudah memilih untuk meninjau kembali undang-undang yang ada, menambah pasal khusus untuk pembangunan berkelanjutan dengan undang-undang lingkungan dan sektoral yang sudah ada. Hanya beberapa yang sudah punya Undang-Undang pembangunan berkelanjutan yang komprehensif. Pada tingkat propinsi atau wilayah keadaannya lebih sering berubah. Propinsi Manitoba di

Kanada mempunyai Undang-Undang Pembangunan Berkelanjutan. Propinsi terbaru di Kanada, Nunavut, mempunyai Department Pembangunan Berkelanjutan.

Yang paling penting untuk memasukkan pembangunan berkelanjutan ke dalam pemerintahan adalah: komitmen secara keseluruhan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan oleh para pemimpin nasional dan semua pegawai negeri senior; kapasitas dalam departemen perencanaan dan keuangan untuk mengadakan tujuan dan anggaran belanja berdasarkan prinsip dan keperluan pembangunan berkelanjutan; komitmen sektor-sektor terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan; undang-undang dan regulasi yang mengakui peran individu, masyarakat dan para pengusaha dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan; mekanisme untuk mengecek bahwa orang-orang mengikuti hukum itu; pelayanan luar negeri yang mampu berpartisipasi secara efektif dalam negosiasi internasional atas kepentingan lingkungan, keberlanjutan dan ekonomis; kapasitas masyarakat untuk mendapatkan dan menyebarkan pengetahuan pengelolaan dan teknis untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Daftar ini adalah harapan yang agak tinggi untuk sebuah negara kecil. Gabungan strategis dengan negara-negara lain yang berpikiran sama serta berbagai sumber keahlian diperlukan. Di Timor Lorosa'e sangat mungkin pertentangan yang utama adalah untuk membentuk hubungan yang bermanfaat antara pemerintah, para pengusaha dan masyarakat, supaya mampu melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang efektif dengan ongkos yang kurang.

Beberapa titik mula yang berguna mungkin termasuk pengelolaan sumber daya alam yang mengandalkan kerjasama masyarakat (umpamanya perikanan, perhutanan); upaya sukarelawan yang efektif untuk mengontrol pengotoran industri; serta prosedur penilaian lingkungan yang sederhana.

Pemerintahan untuk pembangunan berkelanjutan menuntut proses keputusan yang transparan, dan praktek kerja yang bebas korupsi. Bisa dipelihara oleh kerjasama internasional, sebuah strategi kekurangan kemiskinan yang canggih, serta dengan partisipasi penuh dari sektor keuangan. Lembaga masyarakat sipil bisa dan seharusnya diperbaiki oleh proses itu.

Peranan Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan di Timor Lorosa'e

Arsenio Bano

Direktor Eksekutif, Nasional NGO Forum

Organisasi Masyarakat Sipil Timor Lorosa'e

Kita bisa mendefinisikan masyarakat sipil sebagai organisasi-organisasi yang dibentuk masyarakat di luar dari pemerintah dan market bisnis (untuk mencari keuntungan) untuk mendukung aspek kehidupan sosial yang menjadi kepentingan bersama. Dengan kata lain masyarakat sipil adalah organisasi masyarakat yang didirikan secara sukarela berbeda dengan aparat-aparat pemerintah.

Dan sifat dari masyarakat sipil bisa kita sebut sebagai organisasi masyarakat sipil dimana organisasi non-pemerintah, LSM, mempunyai peranan besar sebagai organisasi masyarakat sipil. Kalau begitu peranan utama CSO-CSO (Civil Society Organisation/Organisasi Masyarakat Sipil) dalam isu pembangunan berkelanjutan adalah termasuk untuk membatasi kekuasaan dan melakukan kontrol demokratik terhadap pemerintah. Biasanya yang menjadi isu dalam melakukan kontrol demokratik adalah mengenai pemerintahan yang baik, dengan fokus pada demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Berikut dari demokrasi dan HAM adalah 'rule of law' yang direfleksikan oleh institusi pengadilan karena disini prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dipraktekkan.

Kadang kalangan kelompok lingkungan hidup mengatakan pembangunan berkelanjutan memberikan keseimbangan antara generasi yang sekarang dengan generasi yang akan datang. Dalam hal ini pesan yang mau disampaikan adalah generasi sekarang seharusnya mengkonsumsi sumber daya alam yang mencukupi kondisi kehidupan mereka tanpa mengakibatkan bahaya

untuk kondisi kehidupan di masa yang akan datang.

Masyarakat sipil Timor Lorosa'e sedang mengalami perkembangan pesat dalam masa transisi ini dengan transformasi dari situasi dimana masyarakat yang mulanya hidup dalam represi dan ketakutan, menjadi masyarakat yang muncul kembali mengidentifikasi hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga sipil.

Transformasi ini sama halnya berubah dari organisasi perlawanan pembebasan bangsa menjadi organisasi yang harus bekerja keras dalam mempersiapkan kemerdekaan untuk negara baru.

Organisasi masyarakat sipil disini bisa dengan sederhana digambarkan dengan munculnya organisasi-organisasi yang dulu bergerak sebagai organisasi bawah tanah sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil. Asosiasi-asosiasi, kelompok mahasiswa/ pelajar, majalah/buletin yang didirikan termasuk di beberapa distrik dan lebih dari 130 LSM Nasional dan 73 LSM Internasional terdaftar di NGO Forum bermunculan juga dalam satu setengah tahun terakhir. Dalam beberapa minggu terakhir beberapa radio komunitas akan/telah bermunculan. Radio komunitas yang dikelola oleh Dewan Mahasiswa, UNTIL adalah salah satu contoh refleksi dari usaha meningkat peranan organisasi masyarakat sipil di Timor Lorosa'e. Dalam satu tahun terakhir salah satu wadah organisasi masyarakat sipil yang berkembang dengan pesat adalah Forum LSM yang pada saat ini mempunyai 60 LSM menurut hasil rapat umum tahunan 12-13 Desember 2000. Dalam beberapa bulan terakhir CSO-CSO yang tergabung dalam Forum banyak mendiskusikan dan memberikan pendapat mengenai berbagai usulan peraturan yang dikeluarkan

oleh Pemerintahan Transisi UNTAET/ETTA, dalam usaha mempengaruhi kebijakan-kebijakan Pemerintahan Transisi. Ini menunjukkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat sipil.

Peranan Organisasi Masyarakat Sipil di Masa Transisi

Untuk mengukur sampai peranan (CSO-CSO) dalam mencapai tujuan mereka dalam membangun dan mempersiapkan masyarakat sipil yang kuat di Timor Lorosa'e, jawabannya masih jauh kedepan. Namun kesempatan masih terbuka, CSO-CSO tersebut masih mempunyai waktu untuk memikirkan, rencana-rencana strategis, jangka pendek dan jangka panjang. Dengan segala macam keterbatasan itu penting untuk kembali mengingatkan disini bahwa peranan CSO-CSO dalam pembangunan yang berkelanjutan, salah satunya termasuk mendorong partisipasi dan mobilisasi individu dan kelompok-kelompok untuk terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Ini diharapkan juga meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam membangun Timor Lorosa'e.

Dalam diskusi untuk merampung rencana strategi untuk Forum LSM Nasional Timor Lorosa'e Agustus 2000, salah satu kelemahan yang masih banyak ditemukan sementara ini adalah minimnya tingkat partisipasi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan Pemerintahan Transisi UNTAET. Dalam hal ini artinya banyak hal yang telah diputuskan terutama beberapa peraturan yang berdampak untuk banyak orang telah disetujui tanpa konsultasi yang sistematis.

Setelah Rapat Umum Tahunan Forum LSM pada 12-13 Desember 2000 yang diikuti lebih dari 140 LSM Nasional dan Internasional, Sekretariat Forum LSM berusaha mengkaji beberapa contoh skenario yang ditulis situasi dimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil bisa dibangun. Skenario yang kami sedang bicarakan adalah tulisan Alison Van Roy (1998) mengenai perkembangan masyarakat sipil di Hungaria. Menurutny, skenario yang terburuk terjadi dimana tidak ada hubungan yang baik antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organisation, CSOs), yang mungkin menjadi hubungan yang konfrontasional dimana pemerintah akan berusaha menghambat meningkatkan peranan CSO-CSO.

Skenario kedua digambarkan dengan situasi dimana pemerintah menggunakan CSO-CSO hanya sebagai kontraktor untuk menyampaikan jasa-jasa. Dalam situasi ini pemerintah hanya memberikan bantuan kepada CSO-CSO yang mendapatkan akreditasi pemerintah sebagai perpanjangan tangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan mengabaikan mereka yang bertujuan mempengaruhi kebijakan dan isu-isu dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Skenario ideal yang ketiga terjadi dimana pemerintah menganggap CSO-CSO sebagai pasangan dalam menentukan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai tujuan pemerintah dan LSM. Ini juga termasuk dengan soal mempersiapkan, mengformulasi dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat pada umumnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya situasi seperti yang digambarkan dalam tiga skenario tersebut, Forum LSM dengan LSM Nasional lainnya pada tahun ini

memfokuskan kerjanya untuk meningkatkan kemampuan kapasitas Forum dan LSM-LSM khusus dalam informasi penyuluhan, advokasi dan penelitian, pelatihan dan koordinasi. Dalam advokasi Forum berpikir bahwa meningkatkan keterlibatan masyarakat pedalaman dalam proses pembuatan dan menganalisa program-program yang sedang dipersiapkan oleh ETTA dan aktor lainnya. Untuk itu CSO-CSO yang ada di Timor Lorosa'e perlu membangun kondisi dimana hubungan antara ketiga sektor, Organisasi Masyarakat Sipil, Pemerintah dan Sektor Swasta untuk mengantisipasi bahwa situasi tidak akan terjadi seperti skenario pertama. Antara CSO-CSO sendiri terutama LSM-LSM Utara dan LSM-LSM Selatan perlu meningkatkan kemitraan kerja sama mereka dalam membangun masyarakat sipil Timor Lorosa'e. Pasangan antara LSM perlu didorong terus-menerus sehingga harapan untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat sipil berkembang kuat dan dapat menjadi pasangan dari pemerintah. Di negara baru seperti Timor Lorosa'e, membangun peranan organisasi masyarakat sipil Timor Lorosa'e sedikit kompleks tidak hanya terpaku pada program-program kemasyarakatannya saja. Namun LSM Nasional Timor Lorosa'e ikut berpartisipasi membangun pasangan dengan LSM Internasional, para pemberi donor dan pemerintah. Usaha membangun hubungan dengan pemerintah, donor dan LSM Internasional adalah sangat penting karena CSO-CSO Timor Lorosa'e sangat tergantung dengan para pemberi donor dan LSM-LSM Internasional yang sementara ini berada di Timor Lorosa'e.

Peranan Pemerintahan Transisi, UNTAET/ETTA dalam membangun masyarakat sipil

Salah satu keuntungan dengan berada dalam periode transisi di Timor Lorosa'e adanya kesempatan untuk mempersiapkan diri. Bagian yang penting seharusnya ditingkatkan oleh UNTAET/ETTA adalah merancang rencana-rencana sekarang berdampak untuk jangka waktu yang panjang. Ini dengan menekankan keterlibatan masyarakat sipil seluas mungkin. Dan memastikan organisasi masyarakat sipil mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam membuat kebijakan-kebijakan pemerintah.

Praktek pengambilan keputusan oleh pemerintahan transisi sekarang ini kebanyakan kurang melibatkan masyarakat Timor Lorosa'e secara luas, dan cenderung terpusat. Kita pasti sangat setuju dengan Emilia Pires, kepala NPDA bahwa apabila aktivitas tersebut harus merefleksi ide dan pendapat, dan kemauan masyarakat Timor Lorosa'e mengenai apa yang mereka mau dengan masa depan mereka untuk masyarakat dan negara mereka.

Kesimpulan

Aktifitas pembangunan berkelanjutan akan berhasil apabila program-program dari pembangunan itu merefleksi kemauan dari rakyat Timor Lorosa'e. Ini jelas bahwa perlu partisipasi dari CSO-CSO dalam merancang program-program pembangunan dan pelaksanaannya. Ini dapat terjadi dengan meningkatkan kerja sama, koordinasi antara ETTA/CSO-CSO dan para pemberi donor, termasuk dengan organisasi-organisasi tingkat bawah (grassroots) terutama di Distrik-Distrik. Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan bisa disimpulkan sebagai pemerataan dalam pembangunan yang aktivitasnya berkelanjutan dan berdampak jangka panjang. Aktifitas-Aktivitas tersebut dirancang dan dilaksanakan dengan partisipasi penuh dari CSO-CSO, pemerintah dan para pemberi donor.



Lingkungan Hidup dan Masyarakat Sipil

Emmy Hafild
WALHI / JOE Indonesia



Masyarakat madani berperan penting dalam melindungi lingkungan hidup. Ada beberapa cara bagaimana masyarakat madani mengadvokasi pelestarian lingkungan hidup.

I. Kelompok-Kelompok Advokasi Pelestarian Lingkungan Hidup

Advokasi pelestarian lingkungan hidup selalu dibutuhkan. Prinsip dasarnya adalah: jangan biarkan pemerintah dan perusahaan bekerja sendiri, tanpa keterlibatan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan advokasi untuk pelestarian lingkungan hidup termasuk advokasi kebijakan dan penegakan hukum, pendidikan umum dan pembelaan masyarakat.

Advokasi Masyarakat

Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan advokasi tersebut termasuk

- a) Merubah kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan hidup;
- b) Advokasi kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan baru yang menganjurkan pelestarian lingkungan;
- c) Penegakan undang-undang lingkungan hidup dengan proses pengadilan;

UU No 23-1997 untuk sementara digunakan di Timor Lorosa'e. Proses pengadilan untuk menganjurkan hukum lingkungan hidup dapat dilakukan dengan memakai "legal standing" atau memakai "class action". Saudari Weiweik Awiati akan membahas masalah tersebut secara lebih terinci dalam lokakarya mengenai hukum lingkungan hidup.

- d) Pengawasan korupsi;
- e) Pengawasan perusahaan.

Kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat sangat penting untuk pelestarian lingkungan hidup. Peningkatan kesadaran masyarakat termasuk pendidikan umum mengenai lingkungan dan kampanye. Isu-isu yang penting termasuk pembuangan sampah dan pentingnya serta caranya untuk menyelamatkan binatang dan tumbuhan yang terancam punah.

Kelompok-kelompok advokasi lingkungan hidup berperan penting dalam gerakan-gerakan perlawanan. Ini termasuk bekerja dengan masyarakat lokal untuk melawan kerusakan lingkungan hidup. Kampanye yang mementingkan suatu isu di tingkat lokal sangat efektif. Pengelolaan lingkungan hidup yang ditingkatkan di tingkat dasar masyarakat dapat juga dilaksanakan oleh kelompok-kelompok lingkungan hidup.

2. Pendekatan terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup

Organisasi biasanya mengambil pendekatan berdasarkan pelestarian/konservasi lingkungan hidup, atau pendekatan berdasarkan hak-hak.

Berdasarkan Pelestarian

Pendekatan berdasarkan pada konservasi mementingkan melindungi ekosistem, dan jenis-jenis binatang dan tumbuhan-tumbuhan yang terancam punah. Masalah-masalah tersebut dianggap lebih penting daripada manusia. Pendekatan lainnya ialah berdasarkan pada Keadilan Lingkungan Hidup menyangkut pelestarian lingkungan sambil memperjuangkan keadilan sosial, demokrasi dan hak asasi manusia. Biasanya kelompok lingkungan hidup di negara sedang berkembang seperti Indonesia dan Timor Lorosa'e memakai pendekatan kedua. Kelompok lingkungan hidup Indonesia, tempat kerja saya- WALHI- mengambil pendekatan kedua.

Berdasarkan Hak-Hak Masyarakat Asli

Pelestarian lingkungan hidup dapat juga diadvokasi dengan pendekatan berdasarkan hak masyarakat asli; dan seperti sudah dibicarakan, pendekatan Pengelolaan Lingkungan Hidup/Sumber Daya Alam oleh masyarakat setempat juga merupakan pendekatan yang sangat efektif.

3. Usulan saya untuk agenda di sini:

- Mengawasi pemerintah dalam kebijakan dan pembuatan undang-undang, baik yang dibuat UNTAET maupun pemerintahan baru hasil pemilu.
- Pengawasan Donor, seperti USAID, UNDP, ADB, WB, karena kelakuan mereka yang dapat menghancurkan lingkungan hidup kita.
- Membuat Undang-Undang Lingkungan Hidup yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di Timor Lorosa'e- yang mengakui hak-hak masyarakat asli.
- Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh masyarakat – jangan biarkan hutan-hutan dikuasai oleh pengusaha. Masyarakat harus tetap memegang haknya untuk mengelola dan memiliki hutannya sendiri.
- Mengawasi investasi yang masuk. Jangan ulangi kesalahan Indonesia.
- Mengawasi korupsi, pemerintahan pasti korupsi.
- Memperjuangkan transparansi, tanggung gugat, dan partisipasi dalam proses demokrasi.
- Mendasarkan kebijakan-kebijakan baru pada adat dan kebiasaan lokal, jangan membuangnya, tetapi menggabungkannya dengan sistem demokratik yang baik.

Lakukan sekarang juga, selagi pemerintah masih dekat dengan masyarakat- makin lama pemerintahan berkuasa, mereka makin jauh dari kita.



Budaya dan Tradisi

M. Olandina J.C. Alves

East Timorese Women Against Violence (ET-WAVE)

(Kaum Perempuan Timor Loro Sae Menentang Kekerasan)

Kita sering dengar kata-kata BUDAYA dan TRADISI diucapkan dimana saja dan oleh siapa saja bahkan dalam melakukan kekerasan terhadap orang lain pun kata-kata tersebut sering digunakan sebagai alasan, padahal banyak dari kita sendiri tidak tahu bahkan tidak mengerti tentang BUDAYA dan TRADISI.

Terima kasih saya sampaikan kepada Panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan terima kasih kepada peserta yang datang dari Distrik untuk mengikuti Konferensi ini.

Hari ini saya diundang Panitia untuk menyampaikan makalah tentang BUDAYA dan TRADISI tentu saja dalam konteks yang berkaitan dengan tema dari pada Konferensi sendiri yaitu Konferensi Pembangunan Berkelanjutan.

Waktu yang tersedia adalah sangat terbatas sehingga sudah barang tentu kita tidak dapat mengulas secara panjang lebar tentang arti dari pada BUDAYA dan TRADISI pada saat ini dan karena itulah saya tidak ingin membawa ke sini suatu makalah karena tidak akan berguna namun saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua yang berada di dalam ruangan ini, baik Panitia Penyelenggara, Peserta dan Pembicara bahwa ketika kita berbicara tentang Pembangunan di Bumi Loro Sae maka jangan kita lupa bahwa pembangunan itu sendiri mempunyai hubungan yang sangat erat dengan orang Timor Loro Sae karena dilakukannya di buminya, untuknya dan lebih penting lagi karenanyalah kita semua berada di sini. Jangan orang Timor Loro Sae sekali lagi jadi penonton di negerinya sendiri dan jangan lagi kita berpikir bahwa yang kita lakukan adalah yang paling baik dan benar untuk orang Timor Loro Sae

karena kita tetap berasumsi bahwa orang Timor tidak bisa apa apa. Kita harus hentikan dulu semua asumsi-asumsi demikian baru selanjutnya kita bicara berapi-api tentang pembangunan dan itu belum cukup kalau kita tidak melibatkan orang Timor Loro Sae sendiri dalam pembangunan yang memang adalah untuknya.

Satu hal yang penting yang harus kita ingat adalah bahwa orang Timor Loro Sae memiliki Budaya dan Tradisi sendiri yang tidak bisa kita samakan dengan Budaya dan Tradisi orang lain.

Selama 450 tahun orang Portugis menjajah Bumi Loro Sae membawa juga kebiasaannya dan selama itu pula orang Timor Loro Sae menjalaninya seolah-olah itu memang miliknya, kemudian datang orang Indonesia juga dengan kebiasaannya dan orang Timor kali ini bukan saja harus mengikutinya tetapi dipaksakan untuk mengakuinya sebagai miliknya pula dan yang lebih sadis lagi ada sebagian orang Timor yang setuju dengan mereka bahwa kita ini adalah satu, kita telah kembali ke pangkuan ibu pertiwi setelah sekian lama berpisah karena ulah penjajah. Mereka lupa kalau mereka juga adalah penjajah baru dan yang membedakan hanya warna kulit saja dan yang lebih menyedihkan lagi tentu saja bahwa pembangunan itu adalah untuk kepentingan mereka karena memang mereka tidak pernah berkonsultasi dengan orang Timor sendiri, atau mengajak kerja sama.

Kini semua telah berubah dan sudah tiba saatnya orang Timor sendiri dilibatkan dalam perencanaan sampai pada pembangunan Timor Loro Sae tercinta dengan tidak mengabaikan BUDAYA dan TRADISI

Bagaimana hukum lingkungan hidup internasional dapat membantu Timor Lorosa'e

Lisa A. Ogle

Direktor, Kantor Pembela Lingkungan Hidup, Sydney, Australia

Bagaimana kerangka hukum lingkungan hidup relevan untuk Negara Timor Lorosae? Bagaimana kerangka tersebut dapat dipergunakan? Pencapaian pembangunan yang berkelanjutan adalah masalah global, dan oleh karena itu prinsip-prinsip berkelanjutan dicerminkan dalam banyak persetujuan internasional. Timor Lorosa'e dapat menggunakan prinsip yang bersifat berkelanjutan yang sudah dibuat di tingkat internasional. Seharusnya Timor Lorosae mempertimbangkan apakah ingin mengangkat prinsip-prinsip yang berkelanjutan dan hak-hak lingkungan hidup dalam Undang-Undang hak-hak asasi. Sebaiknya dipertimbangkan juga bagaimana dapat melaksanakan prinsip-prinsip tersebut dalam undang-undang lingkungan hidup yang baru. Timor Lorosa'e mungkin juga dapat memperoleh bantuan hukum, teknis dan finansial sesuai dengan aturan di dalam beberapa persetujuan, dan melalui penggabungan dengan beberapa jaringan lingkungan hidup di kawasan Asia untuk membantu dalam penciptaan dan pelaksanaan kerangka hukum yang baru terhadap lingkungan hidup.

Pendahuluan

Mengapa kita mempunyai hukum lingkungan hidup internasional?

Selama 20 tahun terakhir, masyarakat internasional mengakui bahwa pembangunan di seluruh dunia terjadi dengan cara tidak berkelanjutan. Secara global, kita sedang menghabiskan sumber daya alam seperti ikan, hutan, lapisan tanah dan air minum yang bersih dengan cepat. Keanekaragaman hayati terancam. Polusi dari suatu negara menyeberangi batas negara lain dan masuk ke dalam wilayah negara itu. Contohnya, polusi dioksida karbon yang dihasilkan di suatu negara akan memberikan sumbangan terhadap pemanasan seluruh dunia ini.

Penyebab perusakan lingkungan hidup juga agak sama di seluruh dunia: konsumsi dan pembangunan yang berlebihan, tekanan padatnya jumlah penduduk, kemiskinan, kelaparan, dan pertempuran bersenjata yang terus meningkat. Ada perlu agar masyarakat internasional menghadapi penyebab kemiskinan dan memastikan bahwa teknologi dan kekayaan dibagikan secara adil di antara negara-negara.

Tanggapan dari masyarakat internasional merupakan upaya menciptakan undang-undang internasional yang menyediakan kerangka untuk pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan hukum lingkungan hidup internasional adalah untuk menghabiskan kemiskinan dan memperbaiki keadaan kebudayaan, sosial dan ekonomi sambil melestarikan keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup. Tujuan ini dicapai dengan memastikan bahwa lingkungan hidup dipertimbangkan dalam semua keputusan mengenai pembangunan (Perjanjian Internasional mengenai Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Pasal 13).

Apakah hukum internasional itu?

Undang-Undang internasional mengenai lingkungan hidup terdapat dalam berbagai dokumen termasuk persetujuan, konvensi, perjanjian dan deklarasi prinsip-prinsip.

Seperti halnya hukum hak asasi manusia, salah satu kelemahan hukum lingkungan hidup internasional adalah bahwa hukum itu tidak dapat diterapkan apabila tidak disahkan oleh negara sendiri dalam undang-undang negara tersebut.

Mengapa hukum lingkungan hidup internasional menarik perhatian Timor Lorosa'e?

1. Beberapa pakta internasional mengidentifikasi prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Sebaiknya Timor Lorosa'e mempertimbangkan:

- a) Apakah ingin mengangkat hak-hak lingkungan hidup dan prinsip-prinsip berkelanjutan di dalam Undang-Undang Dasar (contohnya, "Berhak hidup dalam lingkungan hidup yang sehat dan bersih"); dan
- b) Bagaimana prinsip-prinsip yang berkelanjutan itu dapat dimasukkan ke dalam undang-undang lingkungan hidup (contohnya, mengikuti prinsip berhati-hati dalam membuat keputusan mengenai pembangunan).

2. Keikutsertaan dalam kesepakatan internasional juga mungkin dapat menarik bantuan dari masyarakat internasional dalam bidang-bidang yang berikut:

- a) Penilaian isu-isu lingkungan hidup, contohnya dengan penelitian keanekaragaman hayati;
- b) Bantuan finansial atau bantuan serupa;
- c) Bantuan pengelolaan lingkungan hidup, contohnya dalam pengelolaan daerah khusus, seperti rawa-rawa atau cagar alam;
- d) Bantuan dalam penyusunan undang-undang;
- e) Transfer teknologi.

Hukum internasional dan pembangunan yang berkelanjutan secara ekologi

Dokumen utama

Dokumen-dokumen utama yang menguraikan prinsip-prinsip umum untuk pembangunan yang

berkelanjutan adalah:

- Deklarasi Rio (1992).

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh masyarakat internasional mengenai prinsip-prinsip umum untuk pembangunan yang berkelanjutan.

- Agenda 21 (1992).

Sebuah Rencana Aksi untuk pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan atas dasar Pernyataan Rio.

- Perjanjian Internasional mengenai Lingkungan Hidup dan Pembangunan.

Maksud dokumen ini adalah untuk maju satu langkah lagi dengan memberi pengesahan terhadap ketentuan-ketentuan Deklarasi Rio dan Agenda 21 di dalam bentuk kesepakatan yang mengikat. Kesepakatan itu akan merupakan suatu "Deklarasi Hak Asasi Manusia" untuk lingkungan hidup. Pada saat ini belum mempunyai status resmi.

Apakah prinsip-prinsip utama untuk pembangunan berkelanjutan yang bersifat ekologis?

Prinsip-prinsip yang dibahas dalam makalah ini disertai contoh bagaimana setiap prinsip diterapkan terhadap pembangunan sumber daya pertambangan, seperti di Celah Timor, supaya berkelanjutan.

- Kesetaraan antar generasi

Harus ada keadilan di antara generasi. Generasi sekarang berkewajiban untuk mewariskan sumber daya alam kepada generasi berikut, agar mereka mempunyai kesempatan-kesempatan yang sama secara fisik dan ekologis, serta untuk pembangunan ekonomi.

Contoh: Apakah sumber mineral yang akan ditambang, misalnya emas, tembaga atau minyak, masih tersedia untuk generasi berikut? Apabila tidak, bagaimana hasil-hasil pertambangan dapat disimpan supaya masih tersedia untuk generasi berikut?

- Kesetaraan dalam generasi

Keadilan di dalam setiap generasi. Pembangunan seharusnya tidak berdampak secara tidak adil pada mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi. Semua anggota masyarakat harusnya mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi keputusan mengenai pembangunan dan lingkungan hidup.

Contoh: Apakah pertambangan akan secara tidak adil mempengaruhi sebagian masyarakat lebih dari sebagian lainnya? Pertambangan seringkali membuang limbah yang sudah tercemar ke sungai. Kelakuan tersebut dapat merusak sungai dan berpengaruh buruk untuk masyarakat yang tinggal di daerah sungai, dan menggunakan sungai untuk memancing atau sebagai sumber air tawar. Seperti halnya, pembuangan limbah ke laut dapat merusak terumbu karang, dan mempengaruhi masyarakat yang mengandalkan terumbu karang untuk menangkap ikan.

- Prinsip Pencegahan

Walaupun belum tentu kerusakan lingkungan hidup

akan terjadi, tetapi tindakan-tindakan yang memastikan supaya kerusakan tidak terjadi atau supaya kerusakan terbatas, seharusnya diambil.

Contoh: Bahan kimia sianida sering digunakan di tambang emas. Perusahaan pertambangan mungkin mengatakan bahwa aman untuk memakai sianida karena pembuangan sianida akan tertampung di bendungan. Tetapi bagaimana bila bendungannya bocor? Apabila bocor, efek terhadap sungai sangat gawat. Pelaksanaan prinsip pencegahan berarti perusahaan pertambangan tidak boleh memakai sianida.

- Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Kita harus menyelamatkan jenis-jenis binatang dan tumbuhan langka atau yang terancam punah, karena binatang dan tumbuh-tumbuhan tersebut merupakan sumber makanan, obat-obatan dan produk industri untuk generasi masa depan, dan merupakan bagian dari lingkungan hidup yang lebih sehat.

Contoh: Sudahkah penilaian terhadap dampak pertambangan terhadap tumbuhan-tumbuhan dan binatang-binatang dilakukan? Apakah undang-undang di Timor Lorosa'e melarang pembangunan yang menyebabkan suatu jenis binatang dan tumbuhan menjadi punah?

- Pemakai harus membayar penuh biaya lingkungan hidup

Para pembangun harus tidak hanya membayar biaya penuh dari pemerasan sumber daya alam, seperti kayu, minyak atau mineral. Para pembangun seharusnya juga membayar penuh untuk kerusakan apapun yang terjadi terhadap lingkungan setempat, seperti pencemaran, serta untuk tindakan pemulihan kembali lingkungan setempat.

Prinsip-prinsip lingkungan hidup lain yang termasuk dalam undang-undang internasional

Selain dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ekologis yang diuraikan di atas, prinsip-prinsip umum pembangunan berkelanjutan lain yang termasuk dalam hukum internasional termasuk:

- Hak terhadap kehidupan dan lingkungan yang sehat dan produktif;
- Hak masyarakat untuk ikut terlibat dalam keputusan mengenai lingkungan hidup;
- Hak masyarakat untuk mencari solusi untuk masalah lingkungan hidup lewat proses pengadilan;
- Hak atas informasi mengenai pembangunan;
- Perlunya Analisa Dampak Lingkungan untuk dilaksanakan untuk semua proyek pembangunan yang baru;
- Perlunya keterlibatan penuh dari kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan mengenai lingkungan hidup.

Pertanyaan: Timor Lorosa'e harus mempertimbangkan apakah ingin mengangkat hak-hak terhadap lingkungan hidup, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang ekologis, dan prinsip-prinsip umum lain yang tercatat di hukum internasional



di dalam:

- Konstitusi; dan
 - Setiap undang-undang terhadap lingkungan hidup?
- Contoh: Konstitusi Timor Lorosa'e dapat menjamin: "Semua orang mempunyai hak terhadap lingkungan yang bersih dan sehat".

Undang-undang internasional yang seharusnya dipertimbangkan oleh pemerintahan Timor Lorosa'e

Kebanyakan undang-undang dilengkapi dengan Sekretariat yang membantu memberikan nasihat, dukungan finansial dan dukungan keahlian lingkungan hidup untuk melaksanakan syarat-syarat undang-undang (mis. Komite Dunia Daerah-Daerah Terlindung, dan Badan Ramsar yang membantu melestarikan daerah rawa-rawa).

- Perubahan iklim. Konvensi Kerangka untuk Perubahan Iklim (1992)
- Jenis-jenis binatang dan tumbuhan yang terancam punah. Konvensi Keanekaragaman Hayati (1992) Menuntut agar setiap negara melindungi segala jenis binatang dan tumbuhan dengan cara legal dan institusional. Badan Global untuk Lingkungan Hidup memberikan bantuan finansial kepada negara-negara yang sedang berkembang di bawah naungan konvensi ini, dengan memberikan dana untuk pelaksanaan penilaian keanekaragaman hayati.
- Konvensi mengenai Perdagangan Internasional terhadap jenis-jenis yang terancam punah 1973 (CITES) Mengelola perdagangan jenis-jenis yang terancam punah dengan menuntut ijin untuk mengekspor dan mengimpor jenis-jenis tersebut.
- Pencemaran. Konvensi "Basel" mengenai pengiriman limbah berbahaya melewati batas kenegaraan, dan pembuangannya (1989). Mengelola pengiriman limbah berbahaya antar negara.
- Undang-Undang internasional yang dapat digunakan untuk melindungi daerah-daerah khusus di Timor Lorosa'e. Konvensi Daerah-Daerah Terlindung di Dunia (1972). Tempat-tempat yang dianggap khusus sebagai contoh budaya atau alam dapat terdaftar sebagai tempat terlindung di bawah naungan undang-undang ini. Contoh: Terumbu Karang Besar terdaftar di Australia. Dana untuk perlindungan tempat-tempat tersebut didapat di bawah naungan konvensi ini untuk mendukung konservasi tempat-tempat tersebut, dan tempat-tempat yang terancam oleh pembangunan.
- Konvensi mengenai Daerah Rawa yang Penting di Skala Internasional 1971 (Konvensi Ramsar. Daerah Rawa yang penting di skala internasional dapat terdaftar sebagai tempat terlindung di bawah konvensi ini, khususnya tempat di mana burung berkembang biak. Bantuan ahli untuk mengelola daerah rawa dapat diambil dari Badan Ramsar, dan terdapat juga sejumlah dana untuk membantu negara-negara yang masih berkembang.

Bantuan dari asosiasi internasional dan regional

Timor Lorosa'e seharusnya mempertimbangkan apakah ingin terlibat dalam asosiasi lingkungan hidup

global dan regional yang mana. Bantuan finansial, pelatihan dan pembangunan dan keahlian lingkungan hidup dapat tersedia melalui jaringan-jaringan tersebut.

Badan-badan PBB

- Program Lingkungan Hidup PBB. Divisi Pengembangan Kebijakan dan Hukum Lingkungan Hidup dapat memberikan bantuan dengan membuat kebijakan dan undang-undang untuk membantu dengan pengangkatan undang-undang internasional.
- Program Pembangunan PBB
- Bank Dunia. Divisi Hukum Lingkungan Hidup Internasional dapat membantu dengan memberikan bantuan dengan membuat undang-undang untuk pelaksanaan undang-undang internasional.
- Fasilitas Global Lingkungan Hidup. Memberikan dana untuk proyek, bantuan teknis dan penelitian untuk membantu negara-negara yang sedang berkembang untuk melaksanakan Agenda 21, Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Konvensi Perubahan Iklim.

Organisasi regional yang seharusnya dipertimbangkan oleh pemerintahan Timor Lorosa'e

- ASEAN. Organisasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) mempunyai program lingkungan hidup untuk membantu negara-negara anggota ASEAN. ASEAN juga mempunyai persetujuan yang penting mengenai konservasi alam dan sumber daya alam (1985), akan tetapi belum mendapat status resmi.
- Program Lingkungan Hidup Kawasan Pasifik Selatan (SPREP). Program ini berpusat di Samoa Barat. Organisasi ini berdiri pada tahun 1993, dan terdiri dari 27 anggota, termasuk semua negara di Kepulauan Pasifik. Tujuan-tujuan SPREP adalah untuk:
 - Menjalin iklim kooperasi di antara semua negara anggota di kawasan Pasifik Selatan
 - Memberi bantuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan
 - Memastikan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan generasi di masa yang akan datang.

Ada kemungkinan Timor Lorosa'e dapat menjadi anggota SPREP, akan tetapi keanggotaan Timor Lorosa'e memerlukan perluasan dari pengertian kawasan SPREP sekarang.

Organisasi non-Pemerintah Internasional

- IUCN (Uni Konservasi Dunia. IUCN mempunyai Program Hukum Lingkungan Hidup yang memberikan bantuan dan nasihat dalam pembuatan dan pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup internasional.

Kesimpulan

Kerangka hukum internasional telah mengembangkan prinsip-prinsip untuk pembangunan berkelanjutan secara ekologis untuk menjawab keprihatinan masyarakat dunia terhadap masalah tersebut. Prinsip-prinsip tersebut mudah-mudahan dapat membantu Timor Lorosa'e dalam pertimbangannya mengenai pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup dan hukum lingkungan hidup supaya mencapai pembangunan berkelanjutan.



Hukum Lingkungan Nasional di Indonesia

Weiweik Awiati

Pusat Hukum Lingkungan Hidup Indonesia

Pembicaraan ini akan memfokuskan pada pengalaman Indonesia di bidang hukum lingkungan hidup. Pembicaraan ini adalah sebagai acuan untuk negara-negara lain seperti Timor Lorosa'e dalam bidang hukum lingkungan hidup dan lingkungan hidup pada umumnya, supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan Indonesia dalam bidang tersebut. Saya juga akan mengajukan beberapa syarat yang menurut saya dapat digunakan untuk mencegah masalah-masalah yang pernah terjadi di Indonesia.

Sekarang ini undang-undang dan peraturan-peraturan Indonesia berlaku di Timor Lorosa'e.

Hukum Lingkungan Nasional di Indonesia termasuk:

- Peraturan Perundang-undangan Umum Lingkungan Hidup (GEL)
- Peraturan Perundang-undangan Sektorial yang Mengatur Pengendalian Dampak Lingkungan (SEL)
- Konvensi Lingkungan Hidup yang telah Diratifikasi

Undang-Undang Umum untuk Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia adalah:

- UU No. 23/1997 UUPH (EMA)
- PP No. 27/1999 AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)
- PP No. 18/1999 > PP 85/1999 B3 (Pengelolaan sampah yang berbahaya)
- PP No. 20/1990 (Pengelolaan pencemaran air)
- PP No. 41/1999 (Pengelolaan pencemaran udara)

Undang-Undang Sektorial yang Mengatur Pengendalian Dampak Lingkungan termasuk

- UU No. 11/1967 (yang mengatur pertambangan)
- UU No. 5/1984 (perindustrian)
- UU No. 41/1999 (kehutanan)
- UU No. 8/1971 (minyak dan gas bumi)

Masalah-Masalah dengan Hukum Lingkungan Hidup Indonesia

Ada beberapa masalah yang bersangkutan. Masalah-Masalah tersebut termasuk masalah dengan undang-undang itu sendiri, serta pelaksanaan dan penegakan yang tidak memadai.

Dalam hal perundang-undangan, terdapat ketidakseimbangan antara GEL dan SEL. Masalah lain lagi adalah bahwa GEL dan SEL bersifat sangat sentralistik, dan mandat hukum GEL dan SEL belum dilimpahkan ke daerah.

Pelaksanaan dan Penegakan hukum di Indonesia tidak cukup karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia pengawas dan penyidik lingkungan, dan terbatasnya anggaran dalam melaksanakan program-program.

Hal-hal yang lain yang menyebabkan kurang baiknya pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup termasuk:

• Lemahnya kemampuan dan efektivitas masyarakat madani untuk melakukan fungsi kontrol publik, ini termasuk LSM-LSM; perguruan tinggi; media masa; dan masyarakat;

- Aparatur birokrasi yang belum memiliki integritas, ketanggapan, dan profesional;
- Kemampuan pemerintah (pusat dan daerah) untuk melaksanakan transparansi, partisipasi publik dan kehandalan dalam pengelolaan sumber daya umum perlu dipertanyakan;
- Kemandirian peradilan yang harus diperjuangkan;
- Daerah belum memiliki strategi penegakan dan penataan yang komprehensif.

Masalah-masalah lain yang menyangkut perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia:

- Kehendak politik yang terwujud dalam paradigma pembangunan tidak mendukung upaya perlindungan daya dukung ekosistem;
- Belum terdapat kerangka hukum yang kuat untuk mendukung konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;
- Belum mempunyai mekanisme penyelesaian konflik.

Delapan Kriteria Perundang-undangan

Hal-hal berikut ini membahas kriteria perundang-undangan untuk pemerintahan demokratik yang baik:

1. Pemberdayaan, keikutsertaan masyarakat dan akses publik terhadap informasi
2. Transparansi
3. Desentralisasi yang bersifat demokratis
4. Pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan pentingnya keberlanjutannya
5. Pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat
6. Konsistensi dan keseimbangan
7. Kejelasan
8. Daya Penegakan

Prasyarat Pemerintahan yang Baik

1. Lembaga Perwakilan yang mampu menjalankan fungsi kontrol yang efektif;
2. Badan Peradilan yang profesional dan bebas dari campur tangan eksekutif/tidak korup;
3. Aparatur pemerintah (birokrasi) yang profesional dan memiliki integritas yang kokoh;
4. Masyarakat sipil yang kuat sehingga mampu melaksanakan fungsi kontrol publik dan menerapkan tekanan;
5. Desentralisasi dan Lembaga Perwakilan di daerah yang kuat serta didukung oleh masyarakat sipil lokal yang juga kuat;

6. Mekanisme-Mekanisme resolusi konflik.

Perwujudan Pemerintahan Lingkungan dapat diukur dengan beberapa upaya/tindakan:

1. Se jauh mana konstitusi memuat hak-hak yang terkait dengan aspek keberlanjutan ekologis dan lingkungan hidup;
2. Se jauh mana kita mau dan mampu menerjemahkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang tersebar dalam berbagai deklarasi, piagam dan konvensi internasional dalam kebijakan nasional;

3. Se jauh mana penataan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan agar dapat berfungsi lebih efektif dan tepat guna;
4. Se jauh mana masyarakat dilibatkan dalam berbagai keputusan penting dan strategis yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
5. Se jauh mana kita mampu menindaklanjuti kasus-kasus lingkungan yang terbengkalai;
6. Se jauh mana anggaran lingkungan dibagikan secara merata;

Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Professor Henry Nix

CRES, Australian National University, Canberra, ACT Australia

Perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi aneka ragam bidang dan keahlian, tetapi harus menjadi bagian penting dari perencanaan dan pengelolaan nasional apabila berhasil. Lingkungan hidup dan masalah-masalah lingkungan hidup seharusnya tidak dianggap terpisah dari fungsi-fungsi pemerintahan, tetapi seharusnya dianggap sebagai masalah pokok. Ada lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu inventarisasi; evaluasi; perencanaan, pengelolaan dan pemantauan. Lima komponen tersebut akan dibahas dalam suatu kerangka prinsip-prinsip pokok dan pelaksanaan secara praktis.

Membangun masyarakat yang berkelanjutan memerlukan perhatian pada tiga masalah pokok:

- Kelangsungan ekonomi
- Keadilan sosial
- Lingkungan hidup yang berkelanjutan

Setiap hal memang diperlukan, tetapi tidak bisa berlangsung sendiri. Dua hal yang pertama adalah yang paling penting untuk Timor Lorosa'e sekarang, tetapi tidak bisa berlangsung apabila hal terakhir tidak juga diperhatikan. Banyak sekali sudah terjadi degradasi tanah, air, dan margasatwa di Timor Lorosa'e, yang berakibat pada terjadi tanah longsor, banjir, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hasil-hasil tersebut tidak direncanakan, tetapi merupakan akibat dari usaha masyarakat lokal untuk hidup dengan menggunakan sumber-sumber hidup yang ada di sekitarnya, termasuk tanah, tenaga kerja, modal (uang), dan teknologi. Akan tetapi, sumber tanah ada batasnya, tenaga kerja bisa hilang semangatnya, modal sudah sangat terbatas, dan teknologi yang ada masih sangat terbatas.

Maka tantangan untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan mungkin dianggap sesuatu yang tidak bisa dicapai. Akan tetapi, manusialah yang menyebabkan masalah-masalah tersebut, jadi manusialah yang harus memecahkan masalah-masalah itu. Masyarakat madani, di mana masyarakat dididik

untuk memahami hubungan penting antara tanah, air, dan kehidupan, dan yang menggunakan pengertian ini untuk mengelola pemakaian sumber dan untuk melindungi lingkungan hidup, harus menjadi cita-cita utama. Hanya dengan pemahaman demikian teknologi yang cocok mulai dapat ditentukan dan dilaksanakan. Walaupun tanggung jawab untuk perencanaan dan pengelolaan harus dibagi di antara sektor nasional, daerah, dan lokal, peran individu, keluarga, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup supaya keberlanjutan, juga dipentingkan.

Pada tingkat nasional dan daerah kita dapat menentukan lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup: inventarisasi; evaluasi; perencanaan; pengelolaan; pemantauan. Secara tradisional, dan secara mendunia, fungsi-fungsi pokok tersebut dibagi di antara bidang-bidang yang terpisah fungsinya. Maka muncullah beberapa masalah perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup selalu dianggap sebagai masalah yang berdiri sendiri, yang tidak ada kaitannya dengan perencanaan ekonomi, infrastruktur, pertanian, kehutanan, pemancingan, pendidikan, kesehatan umum, hukum, dan sebagainya. Sebenarnya, lingkungan hidup merupakan bagian pokok dari semua bidang di atas. Apabila begitu, bagaimana caranya supaya pertimbangan lingkungan hidup/ekologis tercantum dalam setiap fungsi pemerintah?

Pertama, kita harus membuat agar semua orang, khususnya para pembuat kebijakan, para pendidik, para pengacara, dan para perencana dan pengelola, memahami akan prinsip-prinsip ekologi dan proses-proses lingkungan hidup. Untuk jangka pendek, yang diperlukan adalah diadakan beberapa lokakarya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup (lokakarya tersebut bersifat sangat fokus dan relevan, dan berlangsung selama setengah hari, sehari, atau dua hari). Dalam jangka panjang, pengetahuan tersebut dapat dikembangkan untuk digunakan di sekolah, perguruan tinggi, dan di

universitas. Sebagai tambahan yang sangat penting dan sangat diperlukan sebagai penambahan pengetahuan sumber daya manusia tersebut, struktur dan komposisi pemerintah dan badan-badan yang bersangkutan juga harus ditimbang.

Mari kita mempertimbangkan jawaban terhadap masalah perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam di Timor Lorosa'e, yang menimbulkan masalah yang rumit, berlipat ganda, dan kelihatan tidak bisa diselesaikan. Masalah tersebut akan kita bahas dalam rangka hubungannya dengan lima fungsi pokok yang sudah dibicarakan tadi.

1. Inventorisasi

Secara tradisional, peta dan laporan mendokumentasikan basis sumber daya alam, dan penggunaannya. Sekarang ada beberapa teknologi baru (Sistem Informasi Geografi, "Remote Sensing", "Spatial Interpolation Techniques", Gambaran Tiruan, dan "Modelling"), yang memungkinkan pegeseran dari pola bentang darat yang statis ke pendekatan yang "parametris", yang memfokuskan pada hal-hal lingkungan dan diperlukan untuk membentuk proses-proses bentang darat dan jawaban-jawaban biologis. Data minim yang sudah ada memberikan masukan yang sangat diperlukan untuk model teknis, hidrologi, agronomi, silvikulturis, dan ekologi. Hasilnya adalah bahwa banyak macam produksi dan pelestarian lingkungan hidup dapat dinilai dalam suatu sistem "Spatial Referencing". Contoh pengembangan database untuk negara yang sudah dan sedang berkembang akan tersedia.

2. Evaluasi

Pemakaian data "abiotic" (cuaca, lapangan tanah, dan "substrate") sebagai basis untuk mengevaluasi tanah dan gunanya untuk pertanian, penggembalaan dan penebangan hutan sudah lama berjalan. Belakangan ini, pemakaian data "abiotic" untuk perencanaan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup makin populer. Jenis-jenis produksi dan pelestarian lingkungan hidup memakai proses fisik dan jawaban biologis yang sama. Model proses sederhana seperti keseimbangan air dan pertumbuhan tanaman dapat menghasilkan informasi yang sangat diperlukan untuk pengembangan industri pertanian, dan dapat dilihat di kalkulator biasa bila diperlukan. Model tanaman yang paling rumit pun dapat dilihat di komputer yang sangat sederhana sekalipun. Model komputer yang serupa juga digunakan oleh para insinyur supaya tahu dimana letak infrastruktur tertentu seperti jalan, gedung, susunan saluran jalan air, dll. Akan tetapi, masalahnya adalah ketersediaan data yang diperlukan untuk memakai model-model tersebut. Pengalaman lokal harusnya tidak pernah diabaikan, dan banyak proses evaluasi tanah mempunyai aturan-aturan sederhana yang berdasarkan pemahaman lokal (mis. Di Distrik-Distrik tertentu, batu-batu metamorfosa yang bisa merubah bentuknya menjadi sangat mudah longsor bila dibersihkan tanahnya).

3. Perencanaan

Definisi-Definisi resmi tentang perencanaan menunjukkan bahwa ada aneka ragam pendekatan untuk proses yang sangat penting ini. Apabila berhasil, perencanaan harus memperhitungkan faktor-faktor tertentu seperti faktor fisik, biologis, ekonomis, sosial, budaya, hukum, dan administratif. Di banyak negara, termasuk di negara saya sendiri, perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati dianggap sebagai suatu proses pembagian tanah. Tidak dapat dielakkan bahwa pembagian tanah untuk alasan pelestarian lingkungan hidup memerlukan proses tukar-menukar di antara beberapa macam pemakaian yang bersaing. Ada beberapa metode yang membantu proses tersebut, dan yang memberikan partisipasi untuk yang berminat. Taman-Taman dan tanaman-tanaman yang terlindung memang diperlukan, tetapi tidak cukup. Harus diakui, pengelolaan berbagai macam pemakaian tanah di setiap tanaman yang dilindungi harus dipertimbangkan.

4. Pengelolaan

Belum ada yang namanya bidang pengelolaan lingkungan hidup atau ahli pengelolaan lingkungan hidup, tetapi ahli pengelolaan dari bidang lain dapat dicari untuk mengelola lingkungan hidup, misalnya dari bidang pembangunan perkotaan dan industri; pertambangan; kehutanan; pariwisata ekologis, serta pengelolaan tanaman-tanaman yang dilindungi. Sebagian besar bidang tersebut memakai teknologi. Pengelolaan lingkungan hidup biasanya berlangsung dengan cara tidak langsung, karena pengelolaan tersebut bersifat berusaha untuk mengendalikan dan mengatur tingkah laku para pembuat dan pembeli, masyarakat, dan lembaga-lembaga. Akan tetapi, pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan pembangunan berkelanjutan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip ekologis yang kuat. Sayangnya, walaupun ekologi memang dapat memberikan pengertian dan pemahaman yang sangat diperlukan, ekologi jarang dapat memberikan tingkat keterincian dan pengaturan yang diinginkan pengelola sumber daya tanah, para insinyur, dan para teknisi.

Pengelola lingkungan hidup di masa depan akan ikut pelatihan keras, dan harus mempunyai pengetahuan luas, termasuk pengetahuan tentang politik, administratif, hukum, ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan umum. Yang paling penting adalah perlunya memahami terjalannya sistem-sistem tersebut, perlunya menimbang keinginan beberapa peminat, dan perlunya berkomunikasi secara efektif.

5. Pemantauan

Masalah yang terakhir, tetapi tidak kurang pentingnya, pengelolaan lingkungan hidup tidak akan berhasil tanpa adanya pemantauan berjalannya sistem tersebut, apakah di tingkat nasional, propinsi, lokal, atau suatu sistem produksi tertentu. Walaupun lembaga keuangan besar dan perusahaan industrial mengakui situasi demikian, tidak semua pemerintahan dan badan-



badannya memahami akan pentingnya pemantauan. Statistik-statistik seringkali dianggap kurang penting bila keadaan fiskal sedang mengalami kesulitan. Akan tetapi, bagaimana keberhasilan atau kegagalan program pemerintah dan pengeluaran fiskal dinilai?

Tidak bisa dielakkan, teknologi baru seperti "remote sensing" dengan sistem informasi geografi, dan "strategic ground-based sampling" dapat menyebabkan pemantauan lebih murah. Apalagi, sistem-sistem

tersebut dapat mempermudah partisipasi masyarakat dalam pemantauan. Australia dapat memberikan beberapa contoh pemantauan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang di tingkat masyarakat lokal. Sistem pemantauan yang di tingkat nasional dan yang sukarela untuk pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati adalah kemungkinan besar di suatu masyarakat madani, tetapi tetap merupakan tantangan untuk masa depan.

Urusan Pengelolaan Lingkungan Untuk Negara-Negara Kepulauan Kecil

*Dr. Graham Baines
Environment Pacific*

Suatu administrasi pengelolaan lingkungan kemungkinan besar akan menjadi bagian penting dari pemerintahan di Timor Lorosa'e. Jangkauan dan besar tugas – tugas yang dihadapi luas sekali dan meliputi baik tanggungjawab nasional maupun internasional. Negara Kepulauan Pasifik telah menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang serupa pada saat mereka memperoleh kemerdekaan. Usaha-usaha individu mereka bersama dengan dukungan dari program lingkungan wilayah Pasifik Selatan merupakan contoh-contoh yang berguna meskipun kesuksesan mereka terbatas. Beberapa faktor dan masalah yang menghambat kesuksesan itu diketahui. Disarankan bahwa Timor Lorosa'e mulai dengan suatu program yang sederhana dan terfokus sebagai tahap pertama dari administrasi pengelolaan lingkungan, dengan maksud untuk perluasan lebih lanjut di kemudian hari.

Orang Timor Lorosa'e menghadapi banyak masalah lingkungan yang timbul dari bertahun-tahun kelalaian dan salah urus. Oleh karena itu diperlukan berbagai macam kebijakan, undang-undang dan tindakan-tindakan yang baru. Suatu lembaga pengelolaan lingkungan akan perlu mencakup bermacam-macam fungsi dan keahlian teknis.

Beberapa masalah yang akan dihadapi mempunyai dimensi internasional, khususnya yang berhubungan dengan sumber daya lingkungan dan alam yang dipakai bersama antara Australia dan Indonesia, dan hal ini menambah beban kerja kita. Pada saat Timor Lorosa'e memasuki masyarakat global, dalam hal lingkungan dia akan diharapkan untuk "berpikir secara global dan lokal." Ini menindaki masalah-masalah lokal dan lingkungan, tetapi dalam kaitannya dengan konteks global di mana masalah-masalah lokal itu merupakan bagian saja. Negara-negara anggota PBB telah memikul sejumlah kewajiban lingkungan internasional melalui konvensi-konvensi. Dengan menerima konvensi-konvensi ini, Timor Lorosa'e akan bisa menarik dukungan keuangan dan teknis untuk pengelolaan keanekaragaman hayati dan lingkungan. Akan tetapi tanggung jawab dari keanggotaan konvensi-konvensi ini sangat berat bagi negara-negara kepulauan kecil. Dengan sedikit staf yang terlatih, bahkan untuk masalah-

masalah lokal yang menjadi prioritas, sejumlah besar waktu staf yang penting akan diancam akan dialihkan untuk memenuhi syarat pelaporan dari Sekretariat konvensi di luar negeri. Oleh karena itu, dianjurkan untuk diadakan sebuah analisa yang teliti mengenai kerugian dan keuntungan relatif yang akan timbul apabila Timor Lorosa'e mengambil bagian dalam konvensi-konvensi ini.

Negara-negara Kepulauan Pasifik telah menghadapi pilihan-pilihan, kontradiksi dan persoalan-persoalan yang sama dengan saat mereka memperoleh kemerdekaan. Kesamaan-kesamaan keadaan dan kebutuhan mereka dalam pengelolaan lingkungan dan pelestarian biodiversitas mengarah pada pendirian Program Lingkungan Wilayah Pasifik Selatan (SPREP). Program ini telah memberikan beberapa bentuk bantuan kepada pemerintah-pemerintah Kepulauan Pasifik. Akan tetapi keefektifan dari SPREP dihalangi oleh transformasinya dari satuan dukungan "low key" (sederhana) ke dalam organisasi daerah secara geografi yang "big and glossy" (besar dan mewah) dan, pada beberapa hal, jauh secara konsepsional dari para kliennya. Tidak pernah dipikirkan sebelumnya bahwa SPREP harus memikul seluruh peran pengelolaan lingkungan dari negara-negara anggotanya. Setiap negara kepulauan masih perlu mendirikan semacam satuan pengelolaan lingkungan. Bentuk-Bentuk satuan ini dan tingkat kesuksesannya yang berbeda, dan tak satupun yang telah mampu memenuhi idaman masa depan kemerdekaan.

Faktor-faktor dan masalah yang telah mengurangi keefektifan instansi-instansi dan staf pengelolaan lingkungan di negara Kepulauan Pasifik termasuk :

- Aneka ragam masalah-masalah yang dihadapi mengharuskan petugas-petugas menjadi "multi-tasked"(beragam tugas). Hal ini menurun keefektifan mereka, dan mengurangi kesempatan untuk kerja lapangan. Pemerintah-pemerintah tidak mampu menggaji staf untuk kerja lapangan lingkungan, tetapi belum ada upaya untuk menghadapi kekurangan ini melalui kerjasama dengan instansi pertanian, perikanan dan kehutanan.

- Jumlah staf yang sangat kecil berarti bahwa kemangkiran pada waktu mengikuti latihan dan konferensi, menyebabkan kekurangan besar pada usaha konservasi dalam negeri.
- Lembaga-Lembaga bantuan pembangunan sepatutnya memerlukan rekan lokal untuk proyek-proyek. Di negara-negara kepulauan kecil, hal ini lebih menuntut lebih banyak waktu lagi dari staf lokal yang multi-tugas, mendapat bantuan sedikit saja, dan sering mangkir karena pelatihan atau konferensi.
- Walaupun adanya kebijakan konservasi diuraikan dalam rencana pembangunan ekonomi lima tahun dari beberapa negara kepulauan cukup menggembirakan, tetapi hal ini belum dicerminkan dalam cara pemerintah-pemerintah menjalankan kegiatan pembangunan.
- Beberapa perundang-undangan lingkungan yang unggul telah diperkenalkan, tetapi sering dibuat tidak efektif karena kekurangan sokongan bagi pelaksana atau pembuatan perundang-undangan belakangan yang mengesampingkan peraturan lingkungan.
- Fungsi-Fungsi pengelolaan lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati merupakan hal-hal yang pertama-tama dikurangi ketika pemerintah menghadapi kesulitan keuangan. Situasi ini tak serupa dengan "demokrasi maju", dukungan masyarakat (yang dapat diterjemahkan sebagai tekanan pemilih pada pemerintah) masih lemah.
- Oleh karena kerja lingkungan dan konservasi dianggap tidak sepenting pembangunan, pekerjaan di bidang konservasi memberi kesempatan terbatas untuk perkembangan karir, dalam komposisi pelayanan umum yang kaku. Hal ini telah membuat sebagian dari petugas yang berkualitas lebih tinggi menjadi enggan menjabat di bidang ini.
- Sumbangan besar dari para donor dana untuk membantu peserta kepulauan ikut serta dalam konferensi luar negeri telah menyebabkan kecenderungan pada pihak penerima untuk menerima semua tawaran tanpa mengetahui lebih dulu konferensi mana yang betul-betul relevan dengan kebutuhan mereka. Setiap konferensi yang diikuti membawa kerugian dari segi usaha konservasi di dalam negeri.
- Persaingan dan pertandingan antara instansi pemerintah melemahkan administrasi pengelolaan lingkungan. Usaha khusus diperlukan untuk menghasilkan hubungan kooperatif.
- Instansi lingkungan hidup nasional telah menjadi sangat "territorial" (nasionalis). Dengan demikian inisiatif konservasi dari pihak lain cenderung dianggap sebagai saingan daripada bantuan. Tidak ada banyak upaya untuk mendorong pengelolaan lingkungan ditingkat pemerintahan yang lebih rendah, tetapi ada beberapa usaha untuk menyokong masyarakat desa dalam hal ini.
- Telah memerlukan waktu yang lama sebelum pemerintahan setuju untuk berkerjasama dengan LSM-LSM, dan hal ini telah menghambat sumbangan LSM-LSM pada usaha konservasi nasional. Masalah ini telah timbul akibat salah pengertian antara kedua pihak
- Tidak ada inisiatif konservasi atau pengelolaan lingkungan di daerah-daerah pedesaan di negara Kepulauan Pasifik yang telah berhasil kecuali inisiatif di mana masyarakat lokal diajak ikut dan dilibatkan secara dekat.
- Semua instansi konservasi Kepulauan Pasifik menghadapi suatu masalah yang payah dengan kekurangan informasi untuk tindakan konservasi dan pengelolaan hutan. Sebagian dari masalah itu disebabkan oleh tidak adanya suatu kerangka kerja untuk mendapatkan kembali data penting dari penelitian yang dilakukan oleh orang-orang luar.

Timor Lorosa'e dapat bertindak untuk mencegah atau mengurangi masalah-masalah ini, dan mungkin bisa mempertimbangkan pendekatan bertahap untuk pendirian dan pengembangan suatu administrasi pengelolaan lingkungan. Tahap jangka pendek yang pertama dapat: memfokuskan pada bermacam tugas terpilih dari yang dibutuhkan; memperkenalkan bentuk-bentuk perundang-undangan "minimalis" (paling rendah/sederhana) yang menjadi prioritas (dipergunakan sebagai dasar untuk perundang-undangan yang lebih terinci di kemudian hari); mengontrakkan (dengan dukungan dana donor) banyak dari kerja lapangan (penelitian dan laporan sangat diperlukan); sambil menjamin bahwa kontrak-kontrak ini menyediakan pelatihan "in-service" (dalam pekerjaan) yang berguna bagi orang Timor Lorosa'e (pemerintah, LSM-LSM, dan masyarakat).



Lokakarya-Lokakarya Lembaga-Lembaga

Lokakarya Masyarakat Sipil (Civil Society)

Masalah-masalah: Kekurangan sumber daya manusia • Bagaimana memperkuat masyarakat sipil? • Kesadaran masyarakat tentang persoalan-persoalan politik, sosial dan lingkungan hidup sangat rendah • Belum nampak konsep pembangunan kerakyatan • Pemerintah jalan sendiri, bisnis jalan sendiri, pemerintah seolah-olah selalu benar • Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan karena seolah-olah pembangunan harus dilakukan oleh pemerintah saja • Anggota-anggota masyarakat sipil tidak sadar akan kekuatannya untuk mempengaruhi pemerintah, dan tidak mengetahui perannya dalam mempengaruhi perusahaan • Di beberapa daerah partai politik sudah terbentuk, bahkan berkelahi satu sama lain, sedangkan masyarakat sipil belum terbentuk- masyarakat terorganisasi menurut partai politik, tetapi tidak menurut masyarakat sipil • Kurangnya pendidikan politik dan pemimpin politik di masyarakat.

ISU-ISU UTAMA	STRATEGI-STRATEGI
Kekurangan sumber daya manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pelatihan untuk pelatih baik oleh NGO secara independen maupun pemerintah. Pemerintah diminta untuk mendukung program ini. • Pertukaran kelompok masyarakat dengan negara lain • Perlu ada pendidikan formal untuk pendidikan sipil • NGO membuat kurikulum mengenai materi training untuk masyarakat sipil
Masyarakat sipil yang masih lemah	<ul style="list-style-type: none"> • Desentralisasi NGO dan Donor ke setiap distrik • Membangun sistem komunikasi antara pusat dan setiap distrik • Identifikasi aktor-aktor baru untuk mengarahkan nasionalisme dan perlawanan untuk menghadapi berbagai kendala yang akan datang
Kurangnya pendidikan politik dalam masyarakat sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan radio untuk komunikasi dengan masyarakat kalangan bawah • Mengadakan pertemuan di kota maupun di desa (Sorumutu) • Teater rakyat • Lokakarya mengenai sejarah dari masing-masing orang
Kurangnya partisipasi masyarakat sipil dalam proses pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Melobi dewan nasional, UNTAET dan Kabinet supaya mengupayakan pendekatan partisipasi • Menciptakan mekanisme konsultative di luar Dewan Nasional (NC), antara eksekutif dan legislatif. • Mengadvokasi Bank Dunia agar mengubah pendekatan "memberi alat pancing bukan ikan". • Mengkomunikasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya "budaya Gotong Royong" dan mendapatkan pancing bukan ikan. • Multinasional agar tidak terjadi monopoli ekonomi

Lokakarya Hukum Lingkungan

Masalah-masalah: Sosialisasi dan informasi lingkungan • Kurang kuatnya sumber daya manusia (lemah) • Belum terangkatnya hukum adat, terutama yang berkaitan dengan lingkungan • Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan • Undang-undang harus mencerminkan kebutuhan masyarakat, tidak bersifat 'top-down' (keputusan dari atas), yang akhirnya tidak efektif • Lemahnya kepemimpinan • Pendidikan lingkungan dan kebijakan 'regenerasi' • Belum ada lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan lingkungan hidup • Ketidakjelasan kepemilikan sumber daya alam • Partisipasi dan konsultasi masyarakat harus ada • Skala prioritas dalam memanfaatkan sumber daya alam- "lingkungan hidup vs pembangunan" • Kurangnya kerja sama antara lembaga-lembaga pemerintah.

ISU-ISU UTAMA	STRATEGI-STRATEGI
Informasi dan kesadaran untuk semua pihak yang mempunyai kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya dan seminar di pedusunan • Seminar Industri • Sebuah penjaga independen untuk pemerintah/industri, termasuk regulasi
Apa yang memastikan hukum berlaku? Pengakuan adat dan keikutsertaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelidiki hal-hal adat dan memakainya dalam hukum nasional (termasuk sebuah daftar pertanyaan) • Konsultasi untuk konstitusi dan usulan regulasi lingkungan hidup
Sumber daya manusia dan kepemimpinan yang tidak baik	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan isu-isu lingkungan di kurikulum di sekolah • Mempromosikan kooperasi diantara UNTAET dan CNRT di masa transisi

Lokakarya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Masalah-masalah: Polusi • Pembakaran hutan • Polusi udara • Penebangan hutan • Pendidikan masyarakat yang rendah • Erosi dan banjir • Kehilangan marga satwa • Pengembalaan liar • Perladangan yang berpindah • Perlu adanya peraturan • Tenaga ahli dari luar • Pedagang kaki lima dan sampah • Administrasi tentang lingkungan hidup • Energi alternatif • Kurangnya kontrol pemerintah • Konvensi internasional • Kurangnya kebijaksanaan mengenai pembangunan • Kurangnya tenaga ahli • Perlu pelatihan dalam pertanian, ekonomi, administrasi lingkungan ahli pertambangan, ahli keuangan.

ISU-ISU UTAMA	STRATEGI-STRATEGI
Pendidikan rendah dan pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pendidikan yang kuat diperlukan (dengan fokus pada sekolah-sekolah dan kurikulum) • Ada keperluan untuk fasilitas pendidikan (perlengkapan, alat-alat, prasarana) • Program kesadaran umum diperlukan • Pemerintah harus menyokong dan mendukung keperluan ini untuk pendidikan dan kesadaran • Masyarakat harus mendukung proses ini secara kuat
Kekurangan pelatihan teknik	<ul style="list-style-type: none"> • Ada keperluan untuk program pelatihan teknik dalam manajemen lingkungan untuk karyawan ahli yang kerja di administrasi • Ada keperluan untuk fasilitas pelatihan (perlengkapan, alat-alat, prasarana) • Ada keperluan untuk sumber-sumber penghasilan yang lain (pembiayaan dan keahlian)
Kekurangan pemerintah kekuasaan	<ul style="list-style-type: none"> • Ada keperluan untuk struktur pemerintah yang jelas untuk manajemen lingkungan dari atas ke dasar • Isu-isu lingkungan harus diintegrasikan dalam pembangunan kebijaksanaan dalam beberapa bidang yang penting termasuk pertanian, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan • Pemerintah harus bekerja dekat dengan masyarakat dengan manajemen lingkungan • Pembangunan kerangka hukum yang pantas untuk pengelolaan lingkungan hidup
Kekurangan peraturan	<ul style="list-style-type: none"> • Ada keperluan untuk pelatihan intensip di dalam administrasi dan masyarakat umum mengenai isi dan cara mempergunakan peraturan lingkungan • Harus ada proses yang jelas untuk melibatkan masyarakat sipil di dalam pembangunan kebijaksanaan lingkungan dan peraturan lingkungan • Peraturan-peraturan lingkungan harus relevan dan berhubungan dengan konteks Timor Lorosa'e dan harus dicapai melalui keikutsertaan masyarakat dan konsultasi • Pemerintah harus berniat baik dalam implementasi kebijaksanaan dan peraturan-peraturannya

Laporan Lokakarya Budaya

Masalah-masalah: Menetapkan undang-undang pemerintah tentang lingkungan (bagaimana hubungan hukum adat dengan perlindungan alam) • Kebiasaan-kebiasaan tradisional-modern • Budaya Timor terancam oleh budaya luar; harus ada perencanaan pengembangan budaya dan kebiasaan yang baik • Anak-anak tidak tahu budaya Timor, dan malu mengikuti budaya Timor, misalnya bila harus memakai pakaian adat pada hari raya • Susah untuk membuat rumah orang Timor, tidak ada yang trampil • Hukum adat terancam oleh ritus agama • Tara-bandu-hukum adat • Hilangnya bahasa dan kebudayaan daerah • Perbedaan dalam pengambilan keputusan (perempuan dan laki-laki, dan perbedaan dengan tingkat masyarakat) • Proteksi terhadap budaya dan hukum adat dalam konstitusi • Hal-hal budaya lokal yang tidak baik perlu dikurangi, seperti 'harga penganten', yang memalukan kamu wanita.

ISU-ISU UTAMA	STRATEGI-STRATEGI
Budaya Timor terancam oleh budaya luar	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui pendidikan formal maupun informal • Menetapkan undang-undang • Budaya merupakan identitas diri • Perlu adanya lembaga-lembaga • Penelitian mengenai budaya dan bahasa • Perlu adanya media-elektronik dan cetak yang mendukung budaya yang ada • Perlu dana penelitian
Anak-anak tidak tahu mengenai budaya dan malu menghayati budaya Timor Lorosa'e	
Proteksi terhadap budaya dalam konstitusi	
Budaya lokal "barlake/Belis" perlu dikurangi	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya penelitian • Organisasi perempuan • Advokasi • Kesepakatan dari dua belah pihak • Disesuaikan dengan kemampuan



Lokakarya Pemerintahan

Masalah-masalah: Pembagian sumber daya tidak merata, dan kekuasaan untuk tawar-menawar yang tidak dibagi secara merata • Pengakuan hubungan CNRT di tingkat desa oleh UNTAET • Kurang pengertian dari masyarakat mengenai struktur dan fungsi UNTAET/CNRT • Prioritas UNTAET tidak sesuai dengan prioritas masyarakat, sehingga berakibat pada tidak terselesaikannya program-program • Terlalu banyak harapan dari masyarakat terhadap UNTAET • Nepotisme • Kurangnya keterbukaan dari UNTAET tentang pajak • Hubungan di antara CNRT/UNTAET • Bagaimana untuk memastikan keikutsertaan yang murni • pemusatan administrasi UNTAET/CNRT • Masyarakat tidak paham undang-undang dan munculnya partai-partai politik di Timor Lorosa'e • Warisan struktur birokrasi • Korupsi • Konferensi ini sebagai contoh sentralisasi- distrik-distrik tidak berpartisipasi • UNTAET/CNRT tidak memperhatikan isu-isu sosial • UNTAET memilih bupati tidak secara demokratis • Sistem perwakilan masyarakat asli vs bentuk perwakilan barat.

ISU-ISU UTAMA	STRATEGI-STRATEGI
Pemusatan yang berlebihan di UNTAET/CNRT	(Tidak ada waktu untuk dibahas)
Bagaimana bisa memastikan partisipasi/ keikutsertaan yang murni.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat melalui musyawarah, pelatihan untuk pegawai negeri dan masyarakat umum • Keikutsertaan yang lebih langsung terhadap perencanaan, kebijaksanaan dan pengambilan keputusan • Masyarakat seharusnya memutuskan hal-hal apa saja yang boleh diputuskan oleh tingkat atas
UNTAET/CNRT tidak memperhatikan isu-isu lokal.	<ul style="list-style-type: none"> • Perumahan: memperbaiki kerjasama di antara LSM mancanegara dan lokal, dan juga pemakaian bahan-bahan lokal • Pendidikan: menyediakan pendidikan gratis dan memberikan prioritas kepada anak-anak yang mengalami keadaan yang merugikan • Kesehatan: Memperkuat sistem masyarakat seperti klinika, pelatihan dll.
Bupati distrik tidak dipilih dengan cara demokratis.	<ul style="list-style-type: none"> • Memberitau masyarakat mengenai pengadaan pemilihan umum • Membuat peraturan untuk pemilu secara demokratis • Mengadakan diskusi supaya dapat bermusyawarah terhadap proses pemilu



Program untuk Distrik-Distrik

*Manatuto, Baucau, Viqueque, Lospalos, Aileu, Maubisse,
Ainaro, Same dan Maliana*

Keterlibatan distrik-distrik dalam konferensi dianggap penting sekali. Program untuk distrik-distrik dilaksanakan untuk mempermudah pembahasan di distrik-distrik mengenai pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, dan untuk mengajak wakil-wakil dari distrik-distrik untuk menghadiri konferensi di Dili. Tujuannya adalah untuk menjalin jaringan yang kuat antara Dili dan distrik-distrik dan untuk memastikan partisipasi distrik-distrik dalam konferensi supaya hasil-hasil konferensi mencerminkan kebutuhan-kebutuhan dan isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan di Timor Lorosa'e. Hubungan yang terjalin melalui program ini akan memberikan hubungan yang penting antara Satuan Tugas untuk Pembangunan Berkelanjutan dengan distrik-distrik.

Program untuk Distrik-distrik termasuk:

- Lokakarya yang dilaksanakan di lima distrik-distrik sebelum konferensi;
- Hadirnya lebih dari 25 wakil Distrik dari delapan distrik-distrik di konferensi;
- Lokakarya-lokakarya pasca konferensi.

Lokakarya yang berlangsung satu hari dilaksanakan di lima distrik-distrik satu minggu sebelum konferensi. di Manatuto, Baucau (termasuk wakil-wakil dari Lospalos dan Viqueque), Aileu, Maubisse (termasuk wakil-wakil dari Same dan Ainaro), dan Maliana. Kira-kira 100 peserta mengikuti lima lokakarya tersebut, dan wakil-wakil tersebut berasal dari berbagai organisasi distrik dan masyarakat. Lokakarya-lokakarya diadakan oleh wakil-wakil dari kelompok-kelompok lokal. Kelompok tersebut termasuk. Yayasan Hak di Baucau, OMT di Maliana, OMT di Aileu, Yayasan Hak di Maubisse (termasuk Same dan Ainaro), dan Renetil di Maliana. Lokakarya-lokakarya memperkenalkan dan membahas kondep-konsep pembangunan berkelanjutan.

Setiap lokakarya dimulai dengan pengenalan konferensi, dan sejarah dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Peserta-peserta dapat membahas dan membagi pendapat mengenai lingkungan hidup dan pentingnya pembangunan berkelanjutan bagi Timor Lorosa'e. Lokakarya-lokakarya menitikberatkan perlunya memahami kondisi lingkungan hidup sekarang dan perlunya melestarikan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Ini termasuk pembahasan mengenai penyebab kerusakan lingkungan hidup dan bagaimana dapat memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Sebagian dari pembahasan tersebut termasuk bagaimana masyarakat dapat melestarikan lingkungan hidup dengan memakai hukum adat yang ada sekarang, dan bagaimana dapat menegakkan hukum tersebut sendiri.

Lokakarya-lokakarya menitikberatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelaksanaan program-program dan kebijakan-kebijakan, dan perlunya tindakan supaya dapat meningkatkan kondisi lingkungan hidup.

Lokakarya-lokakarya sebelum konferensi ditanggapi dengan baik oleh peserta-peserta karena lokakarya-lokakarya tersebut merupakan pertama kali lokakarya lingkungan hidup dan pembangunan dilaksanakan di distrik-distrik.

Isu-isu prioritas ditentukan oleh setiap lokakarya. Isu-isu yang ditentukan oleh setiap distrik ditulis di bawah. Supaya memastikan bahwa isu-isu tersebut dibahas di konferensi, dan hasil-hasil koferensi dibawa kembali ke masyarakat, setiap lokakarya memilih satu wakil untuk menghadiri konferensi. Wakil yang dipilih itu mengikuti perjalanan ke Dili dan mengikut serta dalam konferensi selama satu minggu berjalannya konferensi. Mereka disediakan uang untuk ongkos perjalanan, makanan, dan penginapan.

Lebih dari 25 wakil distrik hadir di konferensi. Sedangkan lokakarya-lokakarya sebelum konferensi menjamin partisipasi distrik-distrik tersebut, peserta-peserta juga diajak dari Distrik-distrik lain. Hampir semua distrik terwakil di konferensi.

Selama konferensi, wakil-wakil distrik mengadakan pertemuan untuk membahas pengalaman, ide-ide, dan isu-isu spesifik mereka. Pada hari terakhir konferensi, wakil distrik Francisco dos Santos dari Radio Communicade dari Lospalos, membuat presentasi mengenai isu-isu yang merupakan masalah bagi distrik-distrik.

Masalah-masalah yang ditentukan oleh wakil-wakil distrik berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan merupakan prioritas bagi distrik-distrik, dimana sekolah-sekolah tidak mempunyai fasilitas-fasilitas pokok, jangankan fasilitas-fasilitas lain. Sebagai contoh, sebagian besar pelajar masih terpaksa duduk di lantai dalam ruang kelasnya. Hanya ada satu universitas di Timor Lorosa'e, maka akses ke pendidikan bagi pemuda-pemudi pedesaan sangat terbatas. Diharapkan bahwa universitas-universitas dapat didirikan di distrik-distrik.

Selain pendidikan, keseshatan dianggap sebagai masalah utama bagi distrik-distrik. Semua orang di distrik-distrik (khususnya di pedesaan) tidak mempunyai fasilitas kesehatan yang memadai. Beberapa desa sangat terpelosok, tanpa akses untuk kendaraan, maka pelayanan kedokteran tidak dapat sampai pada mereka. Pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit tidak memadai, dan di beberapa distrik, misalnya Viqueque, tidak ada rumah sakit. Ada kekurangan staf kesehatan, dan jumlah staf yang ada sangat tergantung pada para sukarelawan. Walaupun ada masalah-masalah

lain di distrik-distrik yang dianggap penting, seperti penggundulan hutan, pendidikan dan kesehatan dianggap dua isu yang paling penting.

Setelah presentasi wakil distrik pada hari terakhir konferensi, kesimpulan hasil-hasil lokakarya, rekomendasi-rekomendasi dan usulan untuk Satuan Tugas untuk Pembangunan Berkelanjutan disampaikan dan dibahas. Semua dokumen tersebut didukung oleh peserta-peserta konferensi. Peserta-peserta menerima informasi konsep hasil-hasil konferensi dan hasil-hasil lokakarya. Mereka dapat membawa hasil-hasil konferensi ke masyarakat mereka sendiri.

Lokakarya-lokakarya pasca konferensi

Lokakarya-lokakarya pasca konferensi dilaksanakan di Distrik-distrik untuk membahas hasil-hasil konferensi dan untuk menjamin bahwa Satuan Tugas untuk Pembangunan Berkelanjutan mempunyai hubungan dengan distrik-distrik dari awal. Lokakarya-Lokakarya membahas bagaimana hubungan dapat dipelihara. Disetujui oleh peserta-peserta lokakarya bahwa seharusnya ada perwakilan dari setiap distrik di Satuan Tugas. Akan tetapi, perwakilan tersebut seharusnya netral. Anggota-anggota Satuan Tugas dari distrik-distrik seharusnya tidak mewakili partai politik, bisnis, atau kepentingan-kepentingan lain. Lokakarya-lokakarya menentukan satu orang yang dapat dihubungi dari setiap distrik sementara Satuan Tugas masih didirikan.

Lokakarya-lokakarya juga membahas terbentuknya kelompok-kelompok lingkungan hidup untuk bekerja menyelesaikan masalah-masalah lingkungan hidup di tingkat lokal dan nasional. Dengan waktu, kelompok-kelompok tersebut mungkin dapat mendirikan pusat-pusat lingkungan hidup. Direncanakan bahwa persekutuan peminat-peminat lingkungan hidup akan dibentuk antara kelompok-kelompok bagian Timor di Baucau, Lospalos dan Viqueque. Peserta-peserta lokakarya di Maliana merekomendasikan terbentuknya gabungan lingkungan hidup dan kelompok-kelompok di Maliana sudah mengucapkan tanggung jawabnya atas terbentuknya gabungan tersebut.

Suatu hasil konferensi yang sangat menyenangkan adalah cerita yang diceritakan oleh salah satu peserta konferensi di lokakarya pasca konferensi di Maliana. Setelah kembali ke Maliana setelah konferensi, dia menceritakan hasil-hasil konferensi kepada murid-muridnya di sekolah, sampai murid-muridnya itu memutuskan untuk bertindak. Semangat murid-murid itu dibangkitkan sampai mereka menanam pohon. mereka menanam dua hektar pohon jati di pinggiran Maliana.

Sedangkan inisiatif-inisiatif tersebut memang dapat mencapai banyak, tidak mengherankan bahwa program untuk distrik-distrik menentukan keperluan atas sumber daya dan pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup di distrik-distrik.

Isu-isu yang diprioritaskan oleh peserta-peserta lokakarya-lokakarya di distrik-distrik adalah sebagai berikut.

Isu-isu prioritas lingkungan hidup di Distrik-Distrik

Distrik Maubisse:

- Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup yang menyusul (disebabkan oleh penggundulan hutan dan pemakaian bahan kimia untuk pertanian);
- Perlindungan hutan-hutan asli yang masih ada di bagian pantai selatan;
- Sistem-sistem pengelolaan limbah.

Distrik Baucau:

- Perubahan iklim;
- Hak penebangan hutan. Kebijakan pemerintah yang memperbolehkan penebangan hutan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup secara luas yang paling besar;
- Sistem pembuatan kebijakan yang bersifat dari atas ke bawah tanpa keterlibatan masyarakat;
- Pendidikan

Distrik Maliana:

- Membatasi pemakaian bahan kimia untuk pertanian dengan mencari cara\bahan lain yang melindungi lingkungan alam;
- Perlindungan sumber daya alam;
- Penghutan kembali (reboisasi) sangat penting karena efek pertanian berpindah dan penggembalaan yang tidak sah;
- Deboisasi dan pembersihan tanah yang dikarenakan oleh sistem hukum yang lemah, dan tidak adanya pengetahuan mengenai hukum adat.

Distrik Aileu:

- Kebijakan-kebijakan pemerintah merupakan kesempatan paling besar untuk kerusakan lingkungan hidup;
- Perlunya pendidikan mengenai lingkungan hidup dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah (baik SD maupun SMP\SMA);
- Perencanaan perkotaan diperlukan dan keputusan-keputusan perlu diambil terhadap letaknya industri. Sistem pengelolaan limbah harus mencerminkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan pemakaian sumber daya alam harus sesuai dengan kapasitas sistem-sistem alam;
- Perlindungan dan pelestarian sumber daya alam;
- Terlarangnya impor limbah;
- Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan hidup karena sistem alam tidak dapat mendukung eksploitasi jangka panjang;
- Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.



Distrik Manatuto:

- Penggundulan hutan merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup;
- Pemerintah tidak menanggapi hukum adat yang sudah ada dalam masyarakat dan yang secara tidak langsung dapat melindungi lingkungan hidup;
- Sistem-sistem pengelolaan limbah;
- Penggembalaan secara tidak sah;
- Pemakaian bahan-bahan kimia untuk menangkap ikan;
- Perubahan iklim \ pemanasan bumi.

Keberlanjutan jangka panjang

Hasil-hasil konferensi menunjukkan keinginan kuat dan kebutuhan atas partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Masyarakat-masyarakat yang terlibat

dalam lokakarya-lokakarya pembangunan berkelanjutan mengutamakan isu-isu penting kerusakan lingkungan hidup, perlunya kebijakan-kebijakan yang transparan, dan perlunya pendidikan mengenai lingkungan hidup. Ada keperluan untuk pertanggung jawaban terhadap pendidikan, sebagai bagian dari proses pengembangan kesadaran dan penguatan masyarakat. Pendidikan masyarakat sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Pendidikan tersebut tergantung pada penyebaran informasi secara setara antara masyarakat distrik dan Pusat, dan juga tergantung pada pengembangan fasilitas untuk pendidikan dan pelatihan secara luas.

Buku laporan konferensi ini akan disebarakan ke semua distrik-distrik. Semoga buku ini berguna untuk pendidikan dan perencanaan pembangunan di daerah pedesaan Timor Lorosa'e.



Strategi-Strategi Pembangunan Berkelanjutan Nasional dalam konteks Strategi-Strategi Global dan Organisasi-Organisasi Internasional

Strategi-Strategi dan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Sedunia

World Conservation Strategy
Strategi Pelestarian Dunia
(IUCN/UNEP/WWF) 1980

Our Common Future
Masa Depan Bersama Kami (WCED) 1987

Caring for the Earth
Peduli Dunia
(IUCN/UNEP/WWF) 1991

Agenda 21
Rio Earth Summit
(Petemuan Puncak Bumi Rio) 1992

Earth Charter
Earth Council
Piagam Bumi
(Dewan Bumi) 2000

Menyarankan...

National Sustainable Development Strategies (NSDSs)
Strategi-Strategi Pembangunan Berkelanjutan Nasional

Diajukan, didukung dan ditinjau kembali oleh;

Organisasi-Organisasi Internasional

Commission for Sustainable Development (UNCSD) Komite Pembangunan Berkelanjutan

Capacity 21 Program (UNDP) Program Kapasitas 21

Earth Council
Dewan Bumi

Mendirikan Dewan-Dewan Pembangunan Berkelanjutan Nasional

Memuat, misalnya;

Strategi-Strategi di tingkat Nasional, Daerah, dan Lokal

National Conservation Strategies (NCSs)
Strategi-Strategi Pelestarian Nasional

National Environmental Action Plans (NEAPs)
(World Bank) Rencana Aksi Lingkungan Hidup Nasional (Bank Dunia)

National Environmental Management Plans
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional

Sectoral Strategies
eg Tropical Forestry Action Plans
Strategi-Strategi Bidang Tertentu
Mis. Rencana Aksi Hutan-Hutan Tropis

Local and regional strategies
Strategi-Strategi Lokal dan Daerah

Organisasi-organisasi, Strategi-strategi dan Petunjuk-petunjuk Pembangunan Berkelanjutan

Banyak organisasi di dunia ini bekerja untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Daftar ini, walaupun tidak komprehensif, memberikan data hubungan-hubungan dan titik-titik awal yang berguna apabila mencari informasi, pembiayaan, dukungan proyek dan kesempatan untuk menjalin hubungan untuk pekerjaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Sebagian besar daftar ini mencerminkan berbagai organisasi yang mendukung dan ikut serta dalam Konferensi Pembangunan Berkelanjutan di Timor Lorosa'e.

Situs web dan alamat Email diberikan untuk sebagian besar organisasi yang ada dalam daftar ini.

Organisasi-Organisasi

LSM-LSM Timor Lorosa'e

East Timor NGO Forum (FONGTIL) adalah organisasi payung untuk banyaknya LSM nasional di Timor Lorosa'e. Daftar LSM-LSM Timor Lorosa'e dan informasi penghubung, termasuk yang bekerja dalam bidang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat di:

<http://www.geocities.com/etngoforum/nngo.html>
dan

<http://www.pcug.org.au/~wildwood/linksindig.htm>
Email FONGTIL: etngocentre@hotmail.com

Amnesty International

<http://www.amnesty.org/>

Email: amnestyis@amnesty.org

Amnesty International adalah gerakan kampanye seluruh dunia yang bekerja untuk mempromosikan semua hak asasi manusia yang dinyatakan dalam Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia dan standar-standar internasional lainnya.

Australian Centre for Renewable Energy (ACRE) (Kantor Tenaga yang dapat Diperbarui Australia)

<http://acre.murdoch.edu.au/>

Email: acre@acre.murdoch.edu.au Kantor Penelitian Koperatif untuk Tenaga yang Dapat Diperbarui (ACRE) bertujuan membina industri tenaga yang dapat diperbarui yang dapat bersaing di tingkat internasional.

Australian Conservation Foundation (ACF) (Yayasan Pelestarian Lingkungan Hidup Australia)

<http://www.acfonline.org.au/>

E-mail: acf@acfonline.org.au

ACF adalah organisasi lingkungan hidup yang bersifat swadaya masyarakat dan tidak mencari keuntungan. ACF berkampanye untuk hal-hal yang memerlukan tindakan segera, dan mempunyai wawasan perubahan jangka panjang, pengelolaan daerah perkotaan, industri-industri dan warisan alami, yang bersifat bertanggung jawab dan ekologis.

Both Ends (Belanda)

<http://www.bothends.org>

Email: info@bothends.org

Both Ends mendukung inisiatif-inisiatif inspiratif di

seluruh dunia, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, dan negara-negara bagian Tengah dan Timor Eropa.

BP Solar

<http://www.bpsolar.com>

Email: info@bpsolar.com

BP Solar dan jaringan luasnya para distributor dan pedagang, memberikan solusi tenaga listrik solar untuk pembeli industrial, komersial dan swasta di seluruh dunia.

Ecological Architects Association (EAA) (Persatuan Para Arsitek Ekologis)

Email: [<tonyedye@magna.com.au>](mailto:tonyedye@magna.com.au)

[<gareth@archinet.com.au>](mailto:gareth@archinet.com.au) [<dbaggs@netspace.net.au>](mailto:dbaggs@netspace.net.au)

Persatuan Para Arsitek Ekologis (EAA) adalah organisasi para arsitek yang tertarik dengan desain yang bersifat berkelanjutan dan ekologis, yang berpusat di Sydney.

Earth Council (Dewan Bumi)

<http://www.ecouncil.ac.cr/>

Email: eci@ecouncil.ac.cr

Dewan Bumi adalah LSM internasional yang membantu negara-negara melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Dewan Bumi bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah atau organisasi-organisasi untuk membantu negara-negara mendirikan Dewan-dewan Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan (NCSDs).

Environmental Defenders Office (EDO) (Kantor Pembelaan Lingkungan Hidup, Australia)

<http://www.edo.org.au/>

Email: edonsw@edo.org.au

Jaringan Nasional EDO terdiri dari sembilan kantor hukum lingkungan hidup masyarakat yang dikelola secara independen, tersebar di Australia. Setiap kantor EDO bertujuan melindungi lingkungan hidup untuk kepentingan umum.

Pusat Teknologi Lingkungan Hidup, Univeristas Murdoch (Australia Barat) (ETC)

<http://www.wies.murdoch.edu.au/etc/>

Email: anda@essun1.murdoch.edu.au

Tujuan daripada ETC adalah untuk meneliti, membangun dan menunjukkan teknologi-teknologi lingkungan hidup, melakukan pendidikan dan pelatihan, memberikan pelayanan nasihat pada industri, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai teknologi-teknologi lingkungan hidup. Di kantor ini juga ada pameran teknologi pembangunan berkelanjutan yang terpadu dan dapat dioperasikan.

Friends of the Earth International (FoEI)

<http://www.foei.org/> (FoE Australia: <http://www.foe.org.au/>)

Email: foei@foei.org (FoE Australia email: foe@foe.org.au)

Friends of the Earth adalah federasi kelompok-kelompok lingkungan hidup yang terbesar di dunia, menggabungkan hampir satu juta para aktivis di seluruh dunia. Organisasi-organisasi anggota FoEI di 68 negara dan 13 kelompok pembantu berkampanye mengenai isu-isu lingkungan hidup dan sosial yang paling penting saat ini.

Greenpeace International

<http://www.greenpeace.org/>

Email: supporter.services@ams.greenpeace.org

Human Rights Watch

<http://www.hrw.org/>

Email: hrwnyc@hrw.org

Human Rights Watch bertujuan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia.

Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL)

Email: icel@indosat.net.id

ICEL menganjurkan dan mengembangkan kebijakan dan perundang-undangan dalam bidang lingkungan hidup. ICEL bekerja sama dengan LSM-LSM lingkungan hidup lainnya dan mendukung kelompok-kelompok masyarakat dengan tujuan memastikan bahwa pembangunan adalah berkelanjutan secara ekologis dan berdasarkan demokrasi, pembelaan hak asasi manusia, dan peraturan hukum.

Institute for Sustainable Futures (ISF) (Institut untuk Masa Depan yang Berkelanjutan, Australia)

<http://www.isf.uts.edu.au/>

Email: isf@uts.edu.au

ISF bekerja sama dengan industri, pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan program-program yang memberikan tanggapan aktif dan praktis terhadap isu-isu ekonomi, sosial dan pembangunan ekologis yang relevan saat ini.

Federasi Internasional Gerakan Pertanian Organik

<http://www.ifoam.org/>

Email: HeadOffice@ifoam.org

Federasi Internasional Gerakan Pertanian Organik adalah organisasi payung untuk gerakan pertanian organik internasional, dengan kurang-lebih 740

organisasi dan lembaga anggota di kurang-lebih 103 negara di seluruh dunia.

International Institute for Environment and Development (IIED) (Institut Internasional untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan)

<http://www.iied.org/>

Email: mailbox@iied.org.

IIED bertujuan memberikan keahlian dan kepemimpinan dalam meneliti dan mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional, daerah dan global.

International Institute for Sustainable Development (IISD) (Institut Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan)

<http://iisd.ca/>

Email: info@iisd.ca

IISD yang berpusat di Kanada bekerja untuk membuat pembangunan berkelanjutan dengan mengajukan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang berdasarkan analisis mengenai perdagangan internasional, instrumen-instrumen ekonomi, perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya alami.

International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)

<http://www.iclei.org> (Australia and New Zealand

<http://www.iclei.org/anz>)

Email: iclei@iclei.org (Australia and New Zealand

Email: anz@iclei.org)

ICLEI adalah organisasi pemerintahan local yang bertujuan mencegah dan menyelesaikan masalah-masalah lingkungan hidup di tingkat lokal, daerah, dan global, melalui tindakan di tingkat lokal. Lebih dari 300 kota, kabupaten, kecamatan dan organisasi-organisasi yang berkaitan adalah anggota ICLEI.

La'o Hamutuk

<http://http://www.etan.org/lh/default.htm>

Email: laohamutuk@easttimor.minihub.org

La'o Hamutuk adalah organisasi Timor Lorosa'e-internasional bersama yang bertujuan memantau dan melapor mengenai kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga internasional utama yang ada di Timor Lorosa'e.

Mineral Policy Institute (MPI) (Institut Kebijakan Mineral, Australia)

<http://www.mpi.org.au/>

Email: mpi@mpi.org.au

MPI memantau dan berkampanye mengenai dampak luas lingkungan hidup dan sosial dari industri mineral di kawasan Asia Pasifik.

Organic Federation of Australia (OFA) (Federasi Organik Australia)

<http://www.ofa.org.au/>

Email: info@ofa.org.au

OFA adalah organisasi utama untuk industri organik dan biodinamik di Australia. Organisasi ini secara aktif melobi untuk lebih banyak sumber daya untuk pertanian berkelanjutan dan memberikan informasi dan pelayanan



berupa nasihat dan sumber daya kepada anggota-anggotanya, masyarakat umum, dan pemerintah.

Oz GREEN

<http://www.ozgreen.org.au/>

Email: ozgreen@ozgreen.org.au

Oz GREEN adalah LSM yang mempunyai program-program pendidikan lingkungan hidup. Organisasi ini adalah bagian dari Jaringan Pendidikan Lingkungan Hidup Sungai Dunia, suatu jaringan internasional yang bertujuan secara aktif meningkatkan dan memelihara air bumi ini.

Pacific Concerns Resource Centre (PCRC)

<http://www.pcrc.org.fj>

Email: pcrc@is.com.fj

PCRC adalah Sekretariat untuk gerakan Kawasan Pasifik yang independen dan bebas nuklir. Tujuan PCRC adalah untuk mendidik masyarakat Pasifik mengenai lingkungan hidupnya, keadilan politik dan ekonomi, dan keadilan dan perdamaian di wilayahnya.

Protimos Foundation (Yayasan Protimos)

<http://www.protimos.org/>

Email: protimos@aol.com

Yayasan Protimos adalah organisasi pengacara praktek dan akademis dan ahli lingkungan hidup yang bertujuan memberikan bantuan untuk membina dan meningkatkan metode-metode legal dan bersifat kelembagaan untuk pemakaian sumber daya-sumber daya keanekaragaman hayati secara setara.

Regional Community Forestry Training Centre (RECOFTC) (Pusat Pelatihan Kehutanan Masyarakat Daerah)

<http://www.recoftc.org/>

Email: ftcsss@ku.ac.th

Pusat Pelatihan Kehutanan Masyarakat Daerah untuk Asia dan Kawasan Pasifik adalah organisasi internasional yang bekerja secara aktif untuk mendukung pengembangan hutan-hutan masyarakat di wilayah Asia ini.

South Pacific Regional Environmental Program (SPREP) (Program Lingkungan Hidup Kawasan Pasifik Selatan)

<http://www.sidsnet.org/pacific/sprep/>

Email: sprep@sprep.org.ws

SPREP adalah organisasi wilayah dan didirikan oleh pemerintah-pemerintah dan administrasi-administrasi Kawasan Pasifik guna melindungi lingkungan hidup di wilayahnya. Keanggotaan SPREP adalah 22 negara Kepulauan Pasifik dan Australia, Perancis, Zelandia baru, dan Amerika Serikat.

United Nations Commission on Sustainable Development (CSD) [Komisi Pembangunan Berkelanjutan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB)]

<http://www.un.org/esa/sustdev/>

Email: dsd@un.org

Komisi Pembangunan Berkelanjutan didirikan pada

bulan Desember 1992 untuk menjamin penyusunan yang efektif daripada Puncak Bumi Rio, dan untuk memantau dan melapor mengenai pelaksanaan persetujuan-persetujuan Puncak Bumi di tingkat lokal, nasional, wilayah, dan internasional.

United Nations Development Program (UNDP) (Program Pembangunan PBB)

<http://www.undp.org/>

<http://www.undp.east-timor.org/>

Email: <registry.tp@undp.org>,<asia-pacific@undp.org>

UNDP adalah pemberi nasihat pembangunan, advokasi dan dukungan bantuan dana utama di PBB. Situs web Timor Lorosa'e termasuk terbitan-terbitan dan informasi mengenai Timor Lorosa'e.

United Nations Environment Program (UNEP) (Program Lingkungan Hidup PBB)

<http://www.unep.org/>

Email: ipainfo@unep.org

UNEP bekerja sama dengan pemerentah-pemerintah untuk mempromosikan bentuk-bentuk pembangunan yang baik secara lingkungan hidup, dan mengkoordinasikan tindakan di tingkat global untuk pembangunan tanpa kerusakan lingkungan hidup.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

<http://www.walhi.or.id/>

Email: WALHI@walhi.or.id

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah forum yang didirikan oleh kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi non-pemerintah (Ornop), Kelompok Pecinta Alam (KPA) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Tujuan WALHI adalah untuk mewujudkan tercapainya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, partisipasi rakyat dan demokrasi.

World Conservation Union (IUCN) (Uni Perlindungan Lingkungan Hidup Sedunia)

<http://www.iucn.org/>

IUCN bekerja sama dengan persekutuan negara-negara, badan-badan pemerintahan, LSM-LSM, pembantu-pembantunya, ahli ilmu pengetahuan dan ahli-ahli lainnya untuk mempengaruhi, mendorong, dan membantu masyarakat di seluruh dunia untuk melestarikan integritas dan keanekaragaman alam, dan untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya alami adalah setara dan berkelanjutan secara ekologis.

Worldwatch Institute

<http://www.worldwatch.org/>

Email: worldwatch@worldwatch.org

Worldwatch adalah organisasi penelitian kebijakan umum yang tidak mencari keuntungan, dan bertujuan memberitahu pembuat kebijakan dan masyarakat umum mengenai masalah-masalah dan kecenderungan-kecenderungan global yang sedang muncul, dan jaringan kompleks antara ekonomi dunia dan sistem-sistem dukungan lingkungan hidupnya.



World Wide Fund For Nature (WWF)

<http://www.panda.org/>

Email: w-panda@client-mail.com

WWF adalah organisasi perlindungan lingkungan hidup pribadi yang terbesar di dunia. Organisasi ini mendorong kesadaran umum mengenai masalah-masalah perlindungan lingkungan hidup, dan bekerja untuk melindungi jenis-jenis margasatwa dan tempat-tempat alami yang terancam.

Women's Environment and Development Organisation (WEDO) (Organisasi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Perempuan)

<http://www.wedo.org/>

Email: wedo@wedo.org

WEDO adalah organisasi advokasi internasional yang bertujuan meningkatkan kekuasaan perempuan di seluruh dunia sebagai pembuat kebijakan di semua tingkat pemerintahan, lembaga-lembaga, dan forum-forum, untuk mencapai keadilan ekonomi dan sosial, bumi yang sehat dan damai, dan hak asasi manusia untuk semua orang.

World Resources Institute (WRI) (Institut Sumber Daya Alami Sedunia)

<http://www.wri.org/wri/>

Email: front@wri.org

Institut Sumber Daya Alami Sedunia memberikan informasi, ide-ide, dan solusi-solusi untuk pemecahan masalah-masalah lingkungan hidup.

Publikasi-Publikasi dan Strategi-strategi

Beberapa dokumen yang berpengaruh telah dipublikasikan untuk membantu menjamin pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Pada tahun 1980, IUCN, UNEP, dan WWF mempublikasikan *World Conservation Strategy* (Strategi Perlindungan Lingkungan Hidup Sedunia). Sepuluh tahun kemudian, tiga organisasi yang sama mempublikasikan *Caring for the Earth* (Mempedulikan Dunia), yang membangun pada semua yang telah dipelajari dalam dekade terakhir mengenai kerumitan masalah-masalah dan menunjukkan bagaimana radikal dan luasnya tindakan-tindakan dan obyektif-obyektif yang diperlukan untuk mencapainya. *Caring for the Earth* (Mempedulikan Dunia) dapat dilihat di:

<http://coombs.anu.edu.au/~vern/caring/caring.html>

Laporan Komisi Dunia Lingkungan Hidup dan Pembangunan *Our Common Future* (Masa Depan Bersama) dicetak pada tahun 1987. *Our Common Future* (Masa Depan Bersama) Kita membahas masalah-masalah lingkungan hidup dan pembangunan kritis di bumi kita dan mengajukan usulan-usulan realistis untuk menyelesaikannya.

Agenda 21

<http://www.igc.org/habitat/agenda21/>

<http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21.htm>

Puncak Bumi Rio pada tahun 1992 menghasilkan strategi pembangunan berkelanjutan yang sangat penting-Agenda 21. Agenda 21 bertujuan menentukan isu-isu dan topik-topik yang perlu ditangani untuk mencapai keberlanjutan. Agenda tersebut membahas kemiskinan, kelaparan, penyakit, kebutuhurufan, dan kerusakan lingkungan hidup sebagai isu-isu yang saling terkait. Agenda 21 memerlukan setiap negara membuat strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan.

National Councils on Sustainable Development (Earth Council) [Dewan-dewan Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan (Dewan Bumi)]

<http://www.ncsdnetwork.org/>

Email: info@ncsdnetwork.org

Dewan Bumi bekerja sama dengan pemerintahan-pemerintahan atau organisasi-organsiasi untuk membantu negara-negara untuk mendirikan Dewan-dewan Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan (NCSDs) untuk mempromosikan dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.

Strategi-strategi untuk Pembangunan Berkelanjutan Nasional

Buku Pedoman untuk Perencanaan dan Pelaksanaan oleh Jeremy Carew-Reid, Robert Prescott-Allen, Stephen Bass and Barry Dalal-Clayton

<http://www.iucn.org/themes/ssp/natmain.html>

Buku Pedoman untuk orang-orang yang terlibat atau akan terlibat dalam mengembangkan dan melaksanakan Strategi-strategi Pembangunan Berkelanjutan Nasional (NSDSs) atau strategi-strategi multi-sektor nasional lainnya.

Social and Economic Conditions in East Timor (Keadaan Sosial dan Ekonomi di Timor Lorosa'e)

Redaktor: Jon Pedersen dan Marie Arneberg, Direktor Proyek David L. Phillips

<http://sipa.columbia.edu/ICRP/easttimor.html>

Laporan ini diterbitkan pada bulan November 1999. Laporan ini memberikan data dasar mengenai keadaan sosio-ekonomi di Timor Lorosa'e pada waktu pemungutan suara yang disponsor oleh PBB (Agustus 1999).

UN Common Country Assessment (East Timor) (PBB Penilaian Negara Umum (Timor Lorosa'e)

<<http://www.undp.east-timor.org/CCA.PDF>>

Laporan ini diterbitkan pada bulan November 2000 oleh semua badan PBB di Timor Lorosa'e, untuk memberikan analisis mengenai kebutuhan-kebutuhan pembangunan. Laporan ini memberikan data dasar dan menitikberatkan beberapa isu pembangunan utama yang perlu ditangani untuk mencapai pembangunan sosio-ekonomi yang berdekatan manusia, adil dan keberlanjutan.

Assessing Environmental Needs and Priorities in East Timor: Issues and Priorities (Menilai Kebutuhan-kebutuhan dan Prioritas-prioritas Lingkungan Hidup di Timor Lorosa'e: Isu-isu dan Prioritas-prioritas)

oleh Odd Terje Sandlund, Ian Bryceson, Demetrio de Carvahlo, Narve Rio, Joana da Silva, Maria Isabel Silva
<http://www.undp.east-timor.org/Factsheets/I&P-report.pdf>

Laporan ini diterbitkan pada tahun 2001 dan menggarisbawahi isu-isu lingkungan hidup utama yang dihadapi Timor Lorosa'e saat ini, dan membicarakan prioritas-prioritas lingkungan hidup utama.

Petunjuk-Petunjuk

Environmental Defenders Office (EDO) (Kantor Pembelaan Lingkungan Hidup, Australia)

<http://www.edo.org.au/>

Email: edonsw@edo.org.au

Situs Web ini termasuk jaringan ke: Informasi dari Pemerintah Australia di tingkat nasional, tingkat negara bagian, dan tingkat lokal; sumber daya-sumber daya hukum Australia; informasi untuk pengacara lingkungan hidup; LSM-LSM dan kelompok-kelompok lingkungan hidup di Australia; halaman sumber daya hukum untuk aktivis lingkungan hidup di Australia; dan jaringan-jaringan hukum lingkungan hidup internasional lainnya.

Green pages (Halaman-halaman Hijau)

<http://www.eco-web.com>

Petunjuk global untuk teknologi lingkungan hidup-suatu pedoman untuk melihat luasnya pelayanan-pelayanan dan produk-produk lingkungan hidup, 6633 pedagang dari 129 negara.

IISD Linkages (Jaringan IISD)

<http://www.iisd.ca/linkages/>

Sumber multi-media untuk pembuat kebijakan dalam bidang lingkungan hidup dan pembangunan

Sustainability Web Ring (Jaringan Web untuk Keberlanjutan)

<http://sdgateway.net/webring/default.htm>

Email: webring@iisd.ca

Alat internet ini membuat supaya pemakai situs web dapat melihat dengan mudah situs-situs dimana termuat prinsip-prinsip, kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek paling baik untuk pembangunan berkelanjutan.

World Wide Web Virtual Library on Sustainable Development (World Wide Web Perpustakaan Pembangunan Berkelanjutan Virtual)

<http://www.ulb.ac.be/ceese/meta/ORGANISATIONS>

Email: bkest@ulb.ac.be

Daftar komprehensif situs-situs internet yang membicarakan pembangunan berkelanjutan, termasuk organisasi-organisasi, proyek-proyek, dan kegiatan-kegiatan, jurnal elektronik, perpustakaan-perpustakaan, referensi-referensi, dokumen-dokumen, database-database, dan petunjuk-petunjuk.

Singkatan-Singkatan

ADB	<i>Asian Development Bank</i> (Bank Pembangunan Asia)
ANU	<i>Australian National University</i> (Universitas Nasional Australia)
APACE	<i>Appropriate Technology for Community and Environment</i> (Teknologi yang Masyarakat dan Lingkungan Hidup)
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i> (Persatuan Negara-negara Asia Tenggara)
AusAID	<i>Australian Agency for International Development</i> (Lembaga Pembangunan Internasional Australia)
CAFOD	<i>Catholic Fund for Overseas Development</i> (UK) (Dana Katolik untuk Pembangunan di Luar Negeri (UK))
CDM	<i>Clean Development Mechanism</i> (Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB))
CEO	<i>Chief Executive Officer</i> (Petugas Ketua Eksekutif)
CNRT	<i>Concelho Nacional da Resistancia Timorese</i> (Dewan Nasional Gerakan Perlawanan Timor Lorosa'e)
CNRT/CN	<i>CNRT/Congresso Nacional</i> (CNRT/Kongres Nasional)
CRES	<i>Centre for Resource and Environment Studies</i> (Pusat Pelajaran Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (ANU))
EFZ	<i>Exclusive Fishing Zone</i> (Daerah Pemancingan Eksklusif)
EPA	<i>Environment Protection Agency</i> (Badan Perlindungan Lingkungan Hidup)
EPU	<i>Environment Protection Unit</i> (Badan Perlindungan Lingkungan Hidup)
ESD	<i>Ecologically Sustainable Development</i> (Pembangunan Berkelanjutan Ekologis)
ETFOG	<i>East Timor Forestry Group</i> (Kelompok Kehutanan Timor Lorosa'e)
ETTA	<i>East Timor Transitional Administration</i> (Administrasi Transisi Timor Lorosa'e)
ET-WAVE	<i>East Timorese Women Against Violence</i> (Perempuan Timor Lorosa'e Melawan Kekerasan)
FONGTIL	<i>NGO Forum Nasional Timor Lorosa'e</i> (Forum LSM Timor Lorosa'e)
GHG	<i>Greenhouse gas</i> (Gas rumah kaca)
HIVOS	<i>Humanistic Institute for Cooperation with Developing Countries</i> (Institut Manusiawi untuk Koperasi dengan Negara-negara Sedang Berkembang (Belanda))
ICEL	<i>Indonesian Centre for Environmental Law</i> (Pusat Indonesia untuk Hukum Lingkungan Hidup)
IISD	<i>International Institute for Sustainable Development</i> (Institut Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan)
INGO	<i>International Non-Government Organisation</i> (Organisasi non-Pemerintah Internasional)
INTERFET	<i>International Forces in East Timor</i> (Pasukan Internasional di Timor Lorosa'e)
IUCN	<i>International Union for Conservation of Nature</i> (Uni Pelestarian Lingkungan Hidup Internasional)
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
NSW	<i>New South Wales</i>
NZODA	<i>New Zealand Official Development Assistance</i> (Bantuan Resmi untuk Pembangunan, Zelandia Baru)
OMT	<i>Organizacao Mulher Timor</i> (Organisasi Perempuan Timor Lorosa'e)
PAS	<i>Prontu atu Serbi</i> (siap melayani)
PBB	Persatuan Bangsa-bangsa
RECOFTC	<i>Regional Community Forestry Training Centre</i> (Pusat Pelatihan Kehutanan Masyarakat Daerah (Thailand))
REDE	<i>Feto Timor Lorosa'e</i> (Jaringan Perempuan Timor Lorosa'e)
RMIT	<i>Royal Melbourne Institute of Technology</i> (Institut Teknologi Royal Melbourne)
TROCAIRE	Badan Katolik Irlandia untuk Pembangunan Dunia
UN	<i>United Nations</i> (Persatuan Bangsa-bangsa (PBB))
UNCSD	<i>United Nations Commission for Sustainable Development</i> (Komisi Pembangunan Berkelanjutan PBB)
UNDP	<i>United Nations Development Program</i> (Program Pembangunan PBB)
UNEP	<i>United Nations Environment Program</i> (Program Lingkungan Hidup PBB)
UNFCCC	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (Konvensi Kerangka Perubahan Iklim PBB)
UNICEF	<i>United Nations Children's Fund</i> (Dana Anak-anak PBB)
UNTAET	<i>United Nations Transitional Administration in East Timor</i> (Administrasi Transisi PBB di Timor Lorosa'e)
UNTIL	<i>Universitas Nasional Timor Lorosa'e</i>
USAID	<i>United States Agency for International Development</i> (Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat)
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WCED	<i>United Nations Children's Fund</i> (Komisi Dunia Lingkungan Hidup dan Pembangunan)
WFP	<i>World Food Program</i> (Program Makanan Dunia)
WHO	<i>World Health Organisation</i> (Organisasi Kesehatan Sedunia)
WWF	<i>World Wildlife Fund</i> (Dana Margasatwa Sedunia)
WTO	<i>World Trade Organisation</i> (Organisasi perdagangan dunia)

